

# **KUMPULAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS  
PANCASAKTI TEGAL  
2021**

# **DOKUMEN**

## **Rencana Pembelajaran Semester Program Studi Sarjana S1 Ilmu Hukum Tim Penghimpun :**

1. Dr. Moh Taufik, MH.,MM
2. Fajar Dian Aryani, SH.,MH.
3. Ganang Tarno, MH
4. Selviany, MH
5. Dinar Mahardika, MH
6. Intan Fajriyanti M.Kn

# Daftar Isi

1.	Filsafat Hukum .....
2.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi .....
3.	Hukum Acara Perdata .....
4.	Hukum Acara Tata Usaha Negara .....
5.	Hukum Administrasi Negara .....
6.	Hukum dan HAM .....
7.	Hukum dan Kebijakan Publik .....
8.	Hukum dan Pancasila .....
9.	Hukum dan Perubahan Sosial .....
10.	Hukum Ekonomi Syariah .....
11.	Hukum Pajak .....
12.	Hukum Tata Negara .....
13.	Hukum Wakaf .....
14.	Kapita Selekta HTN .....
15.	Penyelesaian Sengketa .....
16.	Penyelesaian Kontrak .....
17.	Perancangan Undang-Undang .....
18.	Perbandingan Hukum Perdata .....
19.	Perbandingan Konstitusi .....
20.	Perlindungan Konsumen .....
21.	Praktek Peradilan Tata Usaha .....
22.	Sosiologi Hukum .....
23.	Hukum Pidana Khusus .....
24.	Hukum Acara Pidana .....
25.	Pengantar Ilmu Hukum .....
26.	Pendidikan Pancasila .....
27.	Pengantar Hukum Indonesia .....
28.	Pendidikan Agama Islam .....
29.	Hukum Dagang .....
30.	Hukum Perdata .....
31.	Hukum Surat Berharga .....
32.	Perancangan Peraturan Perundang-Undang .....
33.	Hukum Kepemiluan .....
34.	Pendidikan Kewarganegaraan .....
35.	Kewirausahaan .....
36.	Hukum Islam .....
37.	Hukum Waris .....
38.	Hukum Perkawinan dan Waris Islam .....
39.	Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian .....
40.	Hukum Agraria .....
41.	Hukum Adat .....
42.	Bahasa Inggris .....
43.	Bahasa Indonesia .....
44.	Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum .....

45. Hukum Kekayaan Intelektual .....
46. Hukum Asuransi .....
47. Kapita Selekta Hukum Pidana .....
48. Politik Hukum Pidana .....
49. Hukum Cyber .....
50. Perbandingan Hukum Pidana .....
51. Hukum dan Politik .....
52. Kapita Selekta Hukum Bisnis .....
53. Hukum Penanaman Modal Asing .....
54. Ilmu Negara .....
55. Ilmu Ahli Teknologi .....
56. Hukum Perlindungan Korban .....
57. Kriminologi .....
58. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum .....
59. Politik Hukum Pidana .....
60. Hukum Wakaf .....
61. Perbandingan HTN-HAN .....
62. Hukum Eksekusi Keperdataan .....
63. Hukum Eksekusi Kepidanaan .....
64. Hukum Eksekusi Ketatanegaraan .....
65. Hukum Acara PTUN.....
66. Hukum Perdata Lanjutan .....
67. Hukum Pembuktian Acara Perdata .....
68. Praktek Peradilan MK.....
69. Hukum Perjanjian Internasional.....
70. Hukum Properti.....
71. Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial .....
72. Perbuatan Melawan Hukum Perdata.....
73. Reforma Agraria .....
74. Praktek Peradilan Perdata .....
75. Hukum Perusahaan dan Transportasi.....
76. Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dan Hak Guna Tanah .....
77. Hukum Kepailitan dan Jaminan .....
78. Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan .....
79. Perancangan Kontrak .....
80. Perbankan.....
81. Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha .....
82. Judicial review .....
83. Hukum Keuangan Negara.....
84. Sistem Peradilan Pidana.....
85. Hukum Acara Pidana Lanjut.....
86. Pendidikan Anti Korupsi.....
87. Kejaharan Korporasi .....
88. Hukum Pidana Islam.....
89. Hukum Penologi .....
90. Hukum Kelautan .....
91. Hukum Lingkungan .....

92.	Hukum Kewarganegaraan.....
93.	Hukum Pidana.....
94.	Hukum Internasional.....
95.	Hukum Otonomi Daerah.....
96.	Hukum Acara Tata Usaha Negara Lanjut.....
97.	Praktik Peradilan Pidana.....
98.	Pendidikan Pelatihan Kemahiran Hukum.....
99.	Kapita Seleкта Hukum Perdata.....
100.	Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional.....
101.	Hukum Pidana Anak.....
102.	Perbuatan Melawan Hukum Pidana.....
103.	Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian.....
104.	Hukum Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.....
105.	Lembaga-lembaga Internasional.....
106.	Hukum Pembuktian Acara Pidana.....
107.	Hukum Pembuktian Acara TUN.....
108.	Klinis Hukum.....

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas bimbingan taufik dan hidayah-Nya, Tim Penyusun Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi Fakultas Hukum dapat menyelesaikan penyusunan dan pengembangan kurikulum ini untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan menentukan berbagai kebijakan proses kegiatan belajar mengajar, agar terencana, terarah, terprogram dan tepat tujuan yang akan dicapai khususnya dalam mengantarkan mahasiswa menjadi insan kamil sebagai bekal hidup dan bekal membangun negeri tercinta Indonesia.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani kemudian kepada Wakil Dekan 1 Ibu Kanti Rahayu, SH., MH. Wakil Dekan II Bapak Toni Haryadi, SH., MH, dan Wakil Dekan III Bapak Imam Asmarudin, SH., MH. telah membimbing kami dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Fakultas Hukum

Dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Fakultas Hukum ini, kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan konsep, perangkat, serta strategi yang ideal, namun kami pun menyadari sepenuhnya karena berbagai keterbatasan yang ada pada kami dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan yang ada, sehingga kurikulum yang kami susun ini masih perlu penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan peraturan yang berlaku.

Semoga Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah kami susun ini dapat dijadikan landasan dan pedoman bagi peningkatan mutu lembaga, mutu mahasiswa dan mutu para dosen, sehingga harapan yang ingin dicapai menuju Universitas Pancasakti yang unggul, berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi dan standar proses pendidikan yang dilaksanakan di Program Studi Fakultas Hukum.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta bimbingan demi terselesainya Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi Fakultas Hukum ini, kami ucapkan terima kasih.

Tegal, Oktober 2021

Tim ISK FH UPS



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Filsafat Hukum	FA176245	HTN	T=2 P= 1	V	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>				
<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>				
<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
<b>CPMK</b>	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, khususnya hukum sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tatacara, dan etika ilmiah dalam bentuk skripsi.				
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengetahui dan memahami pentingnya mata kuliah yang akan diajarkan.</li> <li>Mampu menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat hukum, dan definisi filsafat hukum.</li> <li>Mampu tentang perkembangan filsafat hukum dalam pembuatan hukum, dan mampu membedakan hukum alam dan hukum positif.</li> <li>Mampu mengidentifikasi jenis aliran hukum, sosiologi hukum, dan jurisprudensi dalam hukum.</li> <li>Mampu memahami dan menjelaskan hukum dalam kehidupan dan memahami hukum sebagai alat pengaturan dalam kekuasaan.</li> <li>Mampu mendefinisikan aspek hubungan hukum dengan perubahan sosial, dan fungsi hukum sebagai alat pembaharu.</li> <li>Mampu menggambarkan urgensi dan makna mengikatnya hukum, hakekat, tujuan, dan makna filsafat hukum.</li> <li>Mampu secara teori mengaplikasikan hasil pembelajaran mata kuliah dalam bentuk penulisan jurnal dan tulisan lainnya.</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Pengantar Filsafat Hukum merupakan mata kuliah wajib nasional yang mengantarkan mahasiswa untuk memahami dasar-dasar pengertian sejarah dan aliran-aliran dalam filsafat hukum. Inti dari pembelajaran mata kuliah ini adalah penguasaan pada pokok bahasan mengenai aliran-aliran filsafat hukum karena dengan bekal inilah semua permasalahan filsafat hukum mampu dianalisis dengan baik melalui pendekatan integral-holistik.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak Belajar</li> <li>Pengertian dan Definisi Filsafat Hukum.</li> <li>Posisi dan Letak Filsafat Hukum dalam Ranah Ilmu Hukum.</li> <li>Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum,</li> <li>Sejarah Perkembangan Hukum Alam</li> <li>Sejarah Perkembangan Hukum Positif</li> <li>Aliran Unitarian</li> <li><b>Ujian Tengah Semester</b></li> <li>Mazhab Sejarah</li> <li>Aliran Sociological Jurisprudence.</li> <li>Menguraikan beberapa aliran hukum, diantaranya aliran hukum realisme.</li> <li>Hukum dan Keadilan dalam Kekuasaan.</li> <li>Hukum dan nilai sosial budaya</li> <li>Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.</li> <li>Mengikatnya hukum, Memahami Hakekat dan Tujuan Hukum, dan Diskusi mengenai Materi Kuliah yang telah diberikan.</li> <li><b>Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>				
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Abdul Ghofur Anshari, 2006, Filsafat Hukum Sejarah Aliran dan Pemaknaan, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.</li> <li>Arief Sidarta, 2007, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum-Ilmu Hukum-Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung.</li> <li>Francisco Budi Hardiman, 2007, <i>Filsafat Pragmatis: Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi</i>. Kanisius, Yogyakarta.</li> </ol>				
	<b>Pendukung :</b>				

Dosen Pengampu							
Matakuliah syarat		Filsafat Hukum.					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami dan mengetahui tahapan materi yang akan diajarkan	Ketepatan mengetahui dan memahami pentingnya mata kuliah yang akan diajarkan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar mata kuliah, dan kontrak belajar	20 %
2	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan dan memahami istilah serta pengertian Filsafat Hukum	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian dan Definisi Filsafat Hukum.	15 %
3	Sub-CPMK-2: Mampu melihat Filsafat Hukum dalam ranah hukum.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Letak Filsafat Hukum dalam Ranah Ilmu Hukum	15 %
4	Sub-CPMK-3: Mampu menjelaskan kekhususan perkembangan filsafat hukum	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang perkembangan filsafat hukum dalam pembuatan hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum.	15 %
5	Sub-CPMK-3: Mampu membedakan hukum alam dan hukum positif dalam kehidupan hukum.	Ketepatan dalam membedakan hukum alam dan hukum positif.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Hukum Alam dan Hukum Positif	15 %
6	Sub-CPMK-4 Mampu menjelaskan Kekhususan jenis aliran hukum. sosiologi	Ketepatan menjelaskan Jenis aliran hukum, sosiologi hukum,	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Aliran Unitarian dan Mazhab Sejarah.	10 %
7	Sub-CPMK-4 Mampu menjelaskan Kekhususan jenis aliran jurisprudensi hukum.	Ketepatan menjelaskan Jenis aliran hukum, jurisprudensi dalam hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Aliran Sociological Jurisprudence	10 %
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
9	Sub-CPMK-	Ketepatan	A = 86-100	a. Kuliah;	e-Learning	Aliran hukum realisme.	10 %



	5: Mampu menjelaskan Kekhususan hukum dalam realita kehidupan sekitarnya,	menjelaskan kekhususan tentang hukum dalam kehidupan	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b. Diskusi[TM: 1x(2x50''); c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	dan platform media lainnya.		
<b>10</b>	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan hukum sebagai alat pengaturan dalam kekuasaan.	Ketepatan dalam memahami hukum sebagai alat pengaturan dalam kekuasaan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50''); f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Hukum dan Keadilan dalam Kekuasaan	10 %
<b>11</b>	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan Kekhususan tentang aspek kerja hukum dalam hubungan dengan perubahan sosial	Ketepatan menjelaskan kekhususan pada aspek hubungan hukum dengan perubahan sosial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50''); c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Hukum dan nilai sosial budaya.	<b>10 %</b>
<b>12</b>	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan Kekhususan tentang fungsi hukum sebagai alat pembaharu.	Ketepatan menjelaskan kekhususan pada fungsi hukum sebagai alat pembaharu.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50''); f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.	<b>10 %</b>
<b>13</b>	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan urgensi dan makna mengikatnya hukum	Ketepatan menjelaskan Urgensi dan makna mengikatnya hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50''); c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Mengikatnya hukum.	<b>20 %</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan hakekat, tujuan hukum	Ketepatan menjelaskan hakekat, tujuan, dan makna filsafat hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50''); f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Memahami Hakekat dan Tujuan Hukum. b. Diskusi mengenai Materi Kuliah yang telah diberikan	<b>20 %</b>
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpn MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</b>	FA176242	Hukum Acara MK	<b>2</b>	IV	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami dan menjelaskan dan menerapkan Hukum acara Mahkamah Konstitusi republik Indonesia.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
	<b>Sub-CPMK</b>	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum acara MK. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP. 3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum acara MK.			

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Menjelaskan tentang Bagaimanakah Prosedur dalam beracara di Mahkamah konsitusi republik indonesia	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah.</li> <li>2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Asas asas Hukum Acara Mahkamah konsitusi</li> <li>4. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li> <li>5. Aspek aspek umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li> <li>6. Beban pembuktian dan alat bukti</li> <li>7. Jenis dan sifat persidangan</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Hukum Acara pengujian Undang Undang</li> <li>10. Ruang Lingkup Pengertian Undang Undang</li> <li>11. Pengujian Formil dan material</li> <li>12. Kedudukan Hukum pemohon ( legal standing )</li> <li>13. Proses persidangan dan pembuktian</li> <li>14. Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>15. Review dan Diskusi Kelas</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Acara Mahkmah Konstitusi</li> <li>2. Mahkamah Konsitusi dan negatif legislature ke Positif legislature oleh Dr.martitah, M.Hum</li> <li>3. UU no 24 tahun 2003 tentang MK.</li> <li>4. UU no 8 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.24 tahun 2003 tentang MK</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Hukum Acara Mahkmah Konstitusi  Mahkamah Konsitusi dan negatif legislature ke Positif legislature oleh Dr.martitah, M.Hum  UU no 24 tahun 2003 tentang MK.  UU no 8 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.24 tahun 2003 tentang MK</p>	
<b>Dosen Pengampu</b>		

Matakuliah syarat		Hukum Acara Mahkamah Konstitusi					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami Pengertian kedudukan, fungsi dan wewenang Mk	Ketepatan memahami Pengertian kedudukan, fungsi dan wewenang Mk	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa di harap dapat mengetahui dan memahami asas Hukum Acara MK	Ketepatan menjelaskan dan memahami asas Hukum Acara MK	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Asas asas Hukum Acara mahkamah konstitusi	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui sumber hukum acara Mk	Ketepatan mengetahui sumber hukum acara Mk	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sumber hukum acara MK	2%


<b>7-8</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa bisa mengetahui aspekk aspek umum hukum acara Mk	Ketepatan menjelaskan aspek-aspek umum hukum acara Mk	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Aspek aspek umum Hukum acara MK	2%
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat memahami beban pembuktian dan alat Bukti	Ketepatan dalam memahami beban pembuktian dan alat Bukti	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Beban Pembuktian dan Alat Bukti	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat memahami jenis dan sifat persidangan	Ketepatan dalam memahami jenis dan sifat persidangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Jenis dan sifat Persidangan	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						30%
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hukum acara pengujian UU	Ketepatan dalam memahami hukum acara pengujian UU	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum Acara pengujian Undang Undang	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami ruang lingkup UU	Ketepatan mengetahui dan memahami ruang lingkup UU	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Ruang Lingkup pengertian Undang Undang	2 %

			E = 0 – 40				
<b>13 – 15</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa di harapkan mengetahui dan memahami pengujian formal dan material	Ketepatan mengetahui Dan memahami pengujian formal dan Material	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning Dan platform media lainnya.</b>  -	Pengujian formal dan Material	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa bisa mengetahui kedudukan hukum pemohon (legal standing)	Ketepatan Dalam mengetahui kedudukan Hukum Pemohon (legal standing)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning Dan platform media lainnya</b>	Kedudukan Hukum Pemohon (legal standing)	2%
<b>18-19</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat mengenal proses persidangan dan pembuktian	Ketepatan Dalam mengetahui Bentuk rancangan Peraturan perundang undangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning Dan platform media lainnya</b>	Proses persidangan Dan pembuktian	2%
<b>20-21</b>	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat mengerti dan putusan MK	Ketepatan Dalam memahami dan mengerti dan putusan MK	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning Dan platform media lainnya</b>	Putusan mahkamah konstitusi	2%
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-15: Mahasiswa dapat memahami dan menguasai	Ketepatan Dalam memahami Dan menguasai Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning Dan platform media lainnya</b>	Review dan diskusi kelas	2%

	materi Hukum acara MK	Hukum acara MK	D = 41- 55 E = 0 – 40				
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Acara Perdata</b>	FA176239	Perdata	<b>T= 2 P= 1</b>	IV	Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthy Rahayu, SH., MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>3. Mampu menunjukan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan Hukum Acara Perdata, mampu membuat gugatan dan putusan.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menganalisis berbagai dasar hukum, teori dan asas-asas hukum acara perdata;</li> <li>b. Mampu menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan hukum acara perdata;</li> <li>c. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai macam langkah hukum acara perdata.</li> <li>d. Mampu menguasai teknik Beracara di pengadilan dalam lapangan hukum perdata;</li> <li>e. Mampu membuat surat gugatan yang baik dengan memperhatikan identitas dan kompetensi pengadilan, posita dan petitum;</li> <li>f. Mampu membuat putusan dengan memperhatikan hal-hal yang harus ada dalam putusan;</li> <li>g. Mampu Memiliki Kejujuran Akademik dalam menyajikan karya tulis yang berkaitan dengan hukum acara perdata</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah Hukum Acara Perdata adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa tentang bagaimana pelaksanaan hukum perdata sebagai hukum materiil dan hukum acara perdata sebagai hukum formil yang menunjukkan alur pelaksanaan hukum perdata.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Pengertian Hukum Perdata, Keanekaragaman Hukum Perdata</li> <li>3. Sejarah KUH Perdata di Indonesia, Berlakunya KUH Perdata di Indonesia</li> <li>4. Kekuasaan kehakiman, asas asas kekuasaan kehakiman, lingkup peradilan</li> <li>5. Tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan.</li> <li>6. Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan absolut dan relatif</li> <li>7. Gugatan lisan dan tertulis, pihak yang berperkara, perwakilan, surat kuasa</li> </ol>				



	<p><b>8. Ujian Tengah Semester</b></p> <p><b>9.</b> Substansi surat gugatan, bentuk dan format, syarat formil surat gugatan</p> <p><b>10.</b> Penjelasan tentang pemeriksaan dalam persidangan, cara pemanggilan para pihak, tahap perdamaian (mediasi),</p> <p><b>11.</b> Tahap persidangan, penambahan dan perubahan gugatan, jalannya persidangan</p> <p><b>12.</b> Penjelasan tentang substansi jawaban, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan.</p> <p><b>13.</b> Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek</p> <p><b>14.</b> Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan</p> <p><b>15.</b> Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti.</p> <p><b>16. Ujian Akhir Semester</b></p>						
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia ( Yogyakarta: Liberty, 1998)</li> <li>- Sophar Moru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdatadan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)</li> <li>- Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdatadan Contoh Dokumen Litigasi, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012)</li> <li>- Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010)</li> <li>- M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: SinarGrafika, 2011)</li> </ul> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPER)</li> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> <li>- UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung</li> <li>- UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman</li> </ul>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Perdata						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami gambaran dan pemahaman awal materi hukum acara perdata materiil dan formil. [S9, KU1, KU2]	Kejelasan dan pemahaman Hukum Acara Perdata materiil Dan formil	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengantar Hukum Perdata: a. Penyampaian peraturan perundang undangan; HIR, KUHPdt b. Pengertian dan asas hukum acara perdata	10 %
2-3	Sub-CPMK-2: Memahami mengenai kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan-badan peradilan dan	Kejelasan dan pemahaman tentang kekuasaan kehakiman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Perkembangan Kekuasaan kehakiman, asas-asas kekuasaan kehakiman, lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan.	15 %

	untuk acara perdata pada badan peradilan umum [S9, KU1, KU2, PP4]						
4 - 5	b-CPMK-3: Mampu memahami mengenai pengajuan gugatan, permohonan, kewenangan absolut dan relatif, pihak yang berperkara, konsep perwakilan dan kuasa, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang pengajuan gugatan dan pengadilan yang berwenang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearnin g dan platform media lainnya.</b>	Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan Absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak Yang berperkara, perwakilan, surat kuasa	15 %
6 - 7	Sub-CPMK-4 Mampu memahami tentang surat gugatan yang menjadi dasar pengajuan gugatan. [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang surat gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearnin g dan platform media lainnya.</b>	Substansi surat gugatan, Bentuk dan format, syarat formil surat gugatan	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9 - 10	Sub-CPMK-5: mampu memahami; jawaban tergugat, pengajuan jawaban, jawaban dalam pemeriksaan perkara, bentuk dan penyusunan surat jawaban memahami pemeriksaan gugatan dan persyaratan	Kejelasan dan pemahaman mengenai jawaban menjawab dalam persidangan Kejelasan dan pemahaman mengenai pemeriksaan gugatan dan persyaratan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearnin g dan platform media lainnya.</b>	Penjelasan tentang substansi jawaban, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-6: Memahami tentang sita jaminan sebagai lembaga yang	Kejelasan dan pemahaman tentang sita jaminan dan kemampuan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 –	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x	<b>eLearnin g dan platform media lainnya.</b>	Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan, Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti,	10 %

	memberikan jaminan jika penggugat menang. mampu menjelaskan skandal bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti [S9, KU1, PP4]	menyusun permohonan sita jaminan Kejelasan dan pemahaman tentang pembuktian.	40	60”]		penyusunan alat bukti	
13	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan putusan pengadilan. [S9, KU9, KK1]	Kejelasan dan pemahaman tentang putusan pengadilan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisiputusan, macam macam putusan hakim, kekuatan putusan, susunan dan isiputusan	10 %
14	Sub-CPMK-7 Mampu mengetahui dan memahami prosedur pengajuan banding, kasasi, peninjauan kembali	Kejelasan dan pemahaman pengajuan upaya hukum, dan kemampuan membuat memori	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	eLearning dan platform media lainnya.	Upaya hukum; banding, kasasi, peninjauan kembali, membuat memori banding dan kasasi	10%
15	Sub-CPMK-7 memahami tentan eksekusi memahami tentan upaya hukum terhadap sita jaminan dan eksekusi Kajian terhadap kasus hukum acara perdata	Kejelasan dan pemahaman tentang eksekusi Kejelasan dan pemahaman tentang permohonan perlawanan Mengkaji sebuah kasus	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	eLearning dan platform media lainnya.	Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) - Pengertian dan asas eksekusi - Tata cara eksekusi - Penyusunan permohonan eksekusi - Eksekusi pembayaran sejumlah uang Perlawanan terhadap sita jaminan dan eksekusi - Perlawanan tidak menunda eksekusi - Tata cara pengajuan perlawanan - Perlawanan oleh pihak ketiga Menganalisis putusan	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, 26 Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpn MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Acara Tata Usaha Negara</b>	FA176241	Hukum Acara Tata Usaha Negara	<b>2</b>	IV	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari Hukum Acara Tata Usaha Negara diharapkan memiliki Kemampuan untuk memahami, menjelaskan dan Menerapkan Hukum Acara Tata Usaha Negara.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum acara tata usaha negara. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum acara tata usaha negara.</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Menjelaskan tentang Bagaimanakah Prosedur dan tata Cara pelaksanaan Hukum Acara pengadilan Tata Usaha Negara
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah.</li> <li>2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Tata Usaha Negara</li> <li>3. Lanjutan Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Tata Usaha Negara</li> <li>4. Tidak termasuk Dalam Keputusan Tata Usaha Negara</li> <li>5. Karakteristik dan Prinsip Huku Acara PTUN</li> <li>6. Proses Gugatan</li> <li>7. Lanjutan Proses gugatan</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Pemeriksaan Tingkat Pertama: acara Biasa</li> <li>10.Lanjutan Pemeriksaan Pertama acara Biasa</li> <li>11.Pembuktian</li> <li>12.Putusan Pengadilan</li> <li>13.Upaya Hukum</li> <li>14.Pelaksanaan Putusan Pengadilan</li> <li>15.Review dan Diskusi Kelas</li> <li><b>16.Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1 oleh Indrohartono, SH.</li> <li>2. Usaha memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 2 oleh Indrohartono, SH.</li> <li>3. UU no 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.</li> <li>4. UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.5 tahun 2009 tentang UU no 5 tahun 1986 tentang Peradiln tata usaha negara</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Usaha memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1 oleh Indrohartono, SH.  Usaha memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 2 oleh Indrohartono, SH.  UU no 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.  UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.5 tahun 2009 tentang UU no 5 tahun 1986 tentang Peradiln tata usaha negara</p>
<b>Dosen Pengampu</b>	

Matakuliah syarat		Hukum Acara Tata Usaha Negara					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami Pengertian dan dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara.	Ketepatan memahami Pengertian dan dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Tata Usaha Negara	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa di harap dapat mengetahui dan memahami ruang lingkup hukum acara tata usaha Negara	Ketepatan menjelaskan dan memahami ruang lingkup hukum acara tata usaha negara	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Lanjutan Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Acara tata Usaha Negara.	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui yang tidak termasuk dalam keputusan	Ketepatan mengetahui tidak termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Tidak Termasuk Dalam Keputusan tata usaha Negara	2%

	Tata Usaha Negara						
<b>7-8</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa bisa mengetahui karakteristik dan prinsip Hukum acara PTUN	Ketepatan menjelaskan karakteristik dan prinsip Hukum acara PTUN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Karakteristik dan prinsip Hukum Acara PTUN	2%
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat memahami tahapan Proses gugatan	Ketepatan dalam memahami tahapan Proses gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Proses gugatan	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat memahami dan mempraktekan tahapan proses gugatan	Ketepatan dalam memahami dan mempraktekan tahapan proses gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Lanjutan Proses gugatan	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						<b>30%</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pemeriksaan tingkat pertama	Ketepatan dalam memahami pemeriksaan tingkat pertama	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pemeriksaan Tingkat pertama : acara biasa	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami	Ketepatan mengetahui dan memahami lanjutan pertama	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Lanjutan pemeriksaan pertama Acara Biasa dan Acara Cepat	2 %

	pemeriksaan lanjutan pertama dalam acara biasa dan acara cepat	dalam acara biasa dan acara cepat	D = 41-55 E = 0 – 40				
<b>13 – 15</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa di Harapkan Mengetahui Dan Memahami Tahapan Pembuktian	Ketepatan mengetahui dan memahami tahapan pembuktian	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning Dan Platform Media lainnya.</b> -	Pembuktian	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa Bisa Mengetahui Putusan Pengadilan	Ketepatan dalam mengetahui putusan pengadilan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning Dan Platform Media Lainnya</b>	Putusan Pengadilan	2%
<b>18-19</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa Dapat Mengenal upaya upaya Hukum	Ketepatan dalam mengetahui upaya upaya hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning Dan Platform Media Lainnya</b>	Upaya Hukum	2%
<b>20-21</b>	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pelaksanaan putusan pengadilan	Ketepatan dalam memahami pelaksanaan putusan pengadilan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning Dan Platform Media Lainnya</b>	Pelaksanaan Putusan Pengadilan	2%
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-15:	Ketepatan dalam memahami	A = 86-100	a. Kuliah;	<b>eLearning dan platform</b>	Review dan diskusi kelas	2%



	Mahasiswa dapat memahami dan menguasai materi Hukum acara tata usaha negara	dan menguasai materi Hukum acara tata usaha negara	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>Media Lainnya</b>		
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>

Tegal, 26 Juli 2021

Dosen Pengampu EBT



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Administrasi Negara</b>	FA176259	Adm Negara	<b>3</b>	III	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>		

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>	
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>		
<b>CPMK</b>	Memiliki sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus tentang ruang lingkup dan instrumen Hukum administrasi negara serta pengelolaan aparatur negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di Indonesia.	
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>		
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum administrasi negara.</li> <li>Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.</li> </ol>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum administrasi negara</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari suatu hukum dibidang Administrasi Negara diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus tentang ruang lingkup dan instrumen Hukum administrasi negara serta pengelolaan aparatur negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di Indonesia.
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah.</li> <li>2. Pengertian Hukum Administrasi Negara.</li> <li>3. Sumber Hukum Administrasi Negara</li> <li>4. Instrumen Hukum Administrasi Negara.</li> <li>5. Instrumen Instrumen pemerintah</li> <li>6. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tentang Aparatur Negara.</li> <li>7. Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</li> <li><b>8. Ujian tengah Semester</b></li> <li>9. Pengelolaan Barang Milik Negara.</li> <li>10. Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara</li> <li>11. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat.</li> <li>12. Hukum Pengelolaan Keuangan Negara.</li> <li>13. Hukum Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>14. Pengertian Hukum Pelayanan Publik</li> <li>15. Hukum Kesejahteraan Sosial</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Administrasi Negara, Prof. Yos Yohan Utama, Penerbit UNDIP Press, 2016..</li> <li>2. Modul Hukum Administrasi Negara, Prof.Drs. CST Kansil ,SH,dkk, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 2015.</li> <li>3. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Dr. Ir.H. Juniarso Ridwan,dkk,Nuansa Cendekia,Bandung,2019.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Prof. Yos Yohan Utama, 2016. Hukum Administrasi Negara, Semarang: UNDIP Press.  Prof.Drs. CST Kansil ,SH,dkk, 2015. Modul Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT.Pradya Paramita.  Dr. Ir.H. Juniarso Ridwan,dkk, 2019. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Bandung: Nuansa Cendekia.</p>

<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Hukum Administrasi Negara					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami Pengertian Hukum Administrasi Negara.	Ketepatan menjelaskan Pengertian hukum administrasi negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian Hukum Administrasi Negara	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui Sumber sumber Hukum Administrasi Negara	Ketepatan menjelaskan Sumber-sumber hukum administrasi negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sumber Hukum Administrasi Negara	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengenal tentang Instrumen Hukum	Ketepatan mengetahui tentang instrument hukum administrasi negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Instrumen hukum Administrasi Negara.	2%

	Administrasi Negara		E = 0 – 40				
<b>7-8</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa bisa mengetahui Instrumen-Instrumen pemerintah dalam kebijakan Publik	Ketepatan menjelaskan instrument pemerintah dalam kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Instrumen pemerintah	2%
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum ttg Aparatur Negara	Ketepatan dalam menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum tentang aparatur negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum tentang Aparatur Negara	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat mengetahui apa saja dalam Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Ketepatan dalam mengenal apa saja dalam Disiplin Pegawai Negeri Sipil	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Disiplin Pegawai Negeri Sipil	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						<b>30%</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-8: Mahasiswa dapat memahami tata cara kelola barang Milik Negara	Ketepatan dalam memahami tata cara kelola barang Milik Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengelolaan Barang Milik Negara	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat mengetahui cara Penggunaan dan pemanfaatan	a.Ketepatan menjelaskan cara Penggunaan dan pemanfaatan Barang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Penggunaan dan pemanfaatan barang Milik Negara.	2 %

	Barang Milik Negara	Milik Negara					
<b>13 – 15</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa di harapkan mengetahui bentuk bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat	Ketepatan menjelaskan bentuk bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b> -	<b>Perlindungan Hukum</b> bagi Masyarakat	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa bisa mengetahui tentang Hukum Pengelolaan Keuangan Negara	Ketepatan mengenal tentang Hukum Pengelolaan Keuangan Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Hukum Pengelolaan keuangan Negara	2%
<b>18-19</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa dapat mengenal lebih jauh tentang Hukum Keterbukaan Informasi Publik	Ketepatan mengenal lebih jauh tentang Hukum Keterbukaan Informasi Publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning Dan Platform Media Lainnya</b>	Hukum Keterbukaan Informasi Publik	2%
<b>20-21</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Pengertian Hukum Pelayanan Publik	Ketepatan memahami Pengertian Hukum Pelayanan Publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning Dan Platform Media Lainnya</b>	Pengertian Hukum pelayanan Publik	2%
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat memahami dan mengenal tentang Hukum Kesejahteraan Sosial	Ketepatan memahami dan mengenal tentang Hukum Kesejahteraan Sosial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning Dan Platform Media Lainnya</b>	Hukum Kesejahteraan Sosial	2%


	Kesejahteraan Sosial						
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT





	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>	
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Hukum dan HAM	FA176233	HTN	T=2 P= 1	III	Juli 2021	
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
					Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;				
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;				
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari dan lulus mata kuliah ini mahasiswa mahasiswa mampu memahami menyadari, mengerti dan menganalisisnya dengan baik HAM. Dengan pemahaman akan HAM itu, mahasiswa diajak untuk membangun masyarakat yang berwawasan HAM.				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>						
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu memahami tentang mata kuliah yang akan diajarkan. b. Mampu menjelaskan pengertian, definisi, dan kedudukan HAM, serta peristiwa- peristiwa sejarah HAM. c. Mampu memahami tentang hak-hak sipil, politik, dan peradilan HAM. d. Mampu mengidentifikasi kasus HAM, dan peradilan HAM. e. Mampu menjelaskan kedudukan HAM dalam konstitusi, serta hubungan HAM dengan deklarasi Durban f. Mampu merumuskan hubungan HAM dengan islam, dan HAM dalam perbedaan gender. g. Mampu menganalisa Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, h. Mampu merumuskan hak-hak minoritas, dan HAM dalam struktur hukum nasional.					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari HAM berdasarkan hukum internasional/nasional dan sekaligus mengkonfrontasikan dengan realitas hukum. Ciri khas HAM, macam-macam HAM beserta pelanggarannya; dan bagaimanakah promosi dan proteksi HAM itu dijalankan					
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Belajar 2. Pengertian Hukum dan HAM serta Dasar Filsafat 3. Teologi dan Politik HAM 4. HAM dalam Kitab Suci, Patristik dan, Magna Charta, Deklarasi Universal HAM. 5. Memahami Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil 6. Politik dua opsional 7. Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM di Indonesia. <b>8. Ujian Tengah Semester</b> 9. Mahkamah Pidana Internasional Permanen (Satuta Roma) 10. Pengadilan HAM: Level Nasional dan Internasional 11. HAM dalam Konstitusi di Indonesia, Deklarasi Vienna 1993, Deklarasi Durban (2002) dan Program aksinya. 12. HAM dalam Islam: Piagam Medinah, Deklarasi HAM Menurut Islam (198 13. Masalah Gender, Perlindungan HAM Anak dan Perempuan. 14. Hak-hak Minoritas: ras, agama, bahasa dan suku bangsa 15. Mengenal Komnas HAM di Indonesia. <b>16. Ujian Akhir Semester</b>					
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: 1. Setya Arinanto, <i>Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia</i> , FH UI, Jakarta, 2003. 2. Shobirin Nadj dan Naning Mardiyinah (ed), <i>Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi</i> , Cesda – LP3ES, Jakarta, 2000. 3. Majda El-Muhataj, <i>Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia</i> , Kencana Media-Group, Jakarta, 2005. 4. Todung Mulya Lubis, <i>Jalan Panjang HakAsasi Manusia</i> , Gramedia, Jakarta, 2005.  Pendukung : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)					
<b>Dosen Pengampu</b>						
<b>Matakuliah</b>	Hukum dan Ham.					

syarat							
Ming gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	BobotP enilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami dan mengetahui posisi Hukum dan HAM dalam kurikulum dan pendidikan Hukum	Ketepatan memahami tentang mata kuliah yang akan diajarkan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar Mata Kuliah dan Kontrak Belajar Definisi dan ruang	20 %
2	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan kekhususan pengertian Hukum HAM dan kedudukannya. menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah	Ketepatan menjelaskan kekhususan pengertian, definisi, dan kedudukan HAM, serta peristiwa-peristiwa sejarah HAM	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian Hukum dan HAM serta Dasar Filsafat, Teologi dan Politik HAM. HAM dalam Kitab Suci, Patristik dan, Magna Charta, Deklarasi Universal HAM.	15 %
3	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan kekhususan pengertian Hukum HAM dan kedudukannya. menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah	Ketepatan menjelaskan kekhususan pengertian, definisi, dan kedudukan HAM, serta peristiwa-peristiwa sejarah HAM	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; f. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian Hukum dan HAM serta Dasar Filsafat, Teologi dan Politik HAM. HAM dalam Kitab Suci, Patristik dan, Magna Charta, Deklarasi Universal HAM.	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelaskan kekhususan tentang hak sipil dan politik UU dan peradilan HAM di Indonesi.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang hak-hak sipil, politik, dan peradilan HAM.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik dua opsional UU HAM dan Pengadilan HAM di Indonesia.	15 %
6 - 7	Sub-CPMK-4 Mampu menjelaskan kekhususan tentang fenomena/kasus yang ada terkait dengan sub kompetensi HAM keberadaan Pengadilan HAM	Ketepatan menjelaskan kekhususan kasus HAM, dan peradilan HAM.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Mengenal Mahkamah Pidana Internasional Permanen (Satuta Roma). Pengadilan HAM di Level Nasional dan Internasional.	10 %
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan kekhususan kedudukan HAM dalam Konstitusi negara, relevansi antara HAM dan aksi Deklarasi Durban.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang kedudukan HAM dalam konstitusi, serta hubungan HAM dengan deklarasi Durban	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Mengenal HAM Dalam Konstitusi Indonesia. Deklarasi Vienna 1993, Deklarasi Durban (2002) dan Program aksinya	10 %

11 - 12	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan Kekhususan mengenai HAM dan peristilahannya dalam Islam, hak dalam perbedaan gender.	Ketepatan menjelaskan kekhususan hubungan HAM dengan islam, dan HAM dalam perbedaan gender	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	HAM dalam Islam: Piagam Medinah, Deklarasi HAM Menurut Islam (1981). Memahami masalah gender.	10 %
13 - 15	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan Kekhususan Hukum perlindungan bagi Anak dan Perempuan, hak-hak kaum minoritas di Indonesia. HAM dalam struktur Hukum di Indonesia.	Ketepatan menjelaskan kekhususan Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, hak-hak minoritas, dan HAM dalam struktur hukum nasional.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.  -	Memahami Perlindungan HAM Anak dan Perempuan. Hak-hak Minoritas: Ras, Agama, Bahasa dan Suku Bangsa. Mengenal Komnas HAM di Indonesia.	20 %
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpn MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum dan Kebijakan Publik</b>	FA176229	Hukum dan Kebijakan Publik	<b>2</b>	III	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
					<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Target yang diharapkan adalah sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> <li>Setelah mempelajari dan lulus mata kuliah ini mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah- masalah sosial , menganalisis, mendiskripsikan dan memberikan penjelasan.</li> <li>Mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui dan memahami perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan di masyarakat terhadap hukum</li> </ol>			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup Hukum dan Kebijakan Publik</li> </ol>				

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.</li> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam Hukum dan Kebijakan Publik</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik adalah perspektif kebijakan publik tentang hukum dan perspektif hukum tentang Kebijakan Publik. Secara garis besar materi-materi yang dibahas mengenai, pemahaman dasar HKP, kerangka hukum kebijakan publik, hukum sebagai instrumen Kebijakan Publik, proses hukum berpendekatan Kebijakan Publik, peristiwa publik dalam proses kebijakan publik.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Mata Kuliah.</li> <li>2. Pengertian dan Istilah Hukum Kebijakan Publik.</li> <li>3. Pengertian Dasar tentang Kebijakan Publik.</li> <li>4. Pemahaman Dasar tentang Hukum dan Kebijakan Publik.</li> <li>5. Menterjemahkan Kebijakan Publik ke Dalam Hukum.</li> <li>6. Domain Studi Hukum dan Kebijakan Publik.</li> <li>7. Kerangka Hukum Kebijakan Publik.</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik.</li> <li>10. Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Strata Kebijakan Publik.</li> <li>11. Hukum Berorientasi Kebijakan Publik.</li> <li>12. Memahami Aktor dan Proses Kebijakan Publik (Peranan Resi dan Peran Serta).</li> <li>13. Sistem Hukum dan Sistem Kebijakan Publik.</li> <li>14. Formulasi Kebijakan Publik dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>15. Memahami Metode Pembuatan Hukum</li> <li><b>16. Ujian Ahir Semester</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005.</li> <li>2. Budi Hardiman F., Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, Kanisius, Yogyakarta, 2009.</li> <li>3. Irfan Islami M., Materi Pokok Kebijakan Publik, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1988</li> </ol> <b>Pendukung :</b> Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005.	

	Budi Hardiman F., Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, Kanisius, Yogyakarta, 2009. Irfan Islami M., Materi Pokok Kebijakan Publik, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1988						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum dan Kebijakan Publik						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap Tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat Kesepakatan dosen dengan Mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Setelah Mengikuti kuliah ini Mahasiswa Dapat mengerti dan Memahami makna dan Peristilahan hukum dan Kebijakan publik.	Ketepatan memahami makna dan peristilahan hukum dan kebijakan publik.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian dan Istilah Hukum Kebijakan Publik.	5%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Setelah Mengikuti kuliah ini Mahasiswa Dapat Mengetahui Dan Memahami dasar-dasar	Ketepatan menjelaskan dan memahami dasar-dasar kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pemahaman Dasar tentang Kebijakan Publik.	2%

	kebijakan publik.						
<b>6 - 7</b>	Sub-CPMK-4: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memahami dasar-dasar hukum dan kebijakan publik	Ketepatan mengetahui dan memahami dasar-dasar hukum dan kebijakan publik sebagian perkara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pemahaman Dasar tentang Hukum.dan Kebijakan Publik.	2 %
<b>7-8</b>	Sub-CPMK-5: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat mengerti pola pemahaman kebijakan publik dalam hukum.	Ketepatan memahami pola pemahaman kebijakan publik dalam hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menerjemahkan Kebijakan Publik ke Dalam Hukum.	2%
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat Memahami wilayah dan domain studi hukum dan kebijakan publik.	Ketepatan dalam Memahami wilayah dan domain studi hukum dan kebijakan publik.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Domain Studi Hukum dan Kebijakan Publik	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan menggambar kerangka hukum dan menggambar kerangka hukum	Ketepatan dalam memahami dan menggambar kerangka hukum dan kebijakan publik.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Kerangka Hukum Kebijakan Publik.	2%

	kebijakan publik.						
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						<b>30%</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-9: Setelah Mengikuti kuliah ini Mahasiswa Dapat Mengenali porsi hukum Sebagai Instrumen Kebijakan publik.	Ketepatan dalam memahami mengenali porsi hukum sebagai instrumen kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-10: Setelah Mengikuti kuliah ini Mahasiswa Dapat Memahami Serta Menggambarkan hierarki Peraturan perundang-Undangan dalam strata Kebijakan Publik	Ketepatan mengetahui dan memahami serta menggambarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam strata Kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Strata Kebijakan Publik.	2%
<b>13 – 15</b>	Sub-CPMK-11: Setelah Mengikuti kuliah ini Mahasiswa Dapat Memahami Serta Menggambarkan aspek hukum yang Berorientasi Kebijakan Publik	Ketepatan memahami serta menggambarkan aspek hukum yang berorientasi kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b> -	Hukum Berorientasi Kebijakan Publik.	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-12:	Ketepatan dalam mengetahui	A = 86-100	a. Kuliah;	<b>eLearning dan platform</b>	Memahami Aktor dan Proses	2%




	Setelah Mengikuti kuliah ini Mahasiswa Dapat Memahami proses dan Pelaku Kebijakan publik.	proses dan pelaku kebijakan publik	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>media lainnya</b>	Kebijakan Publik (Peran Resmi dan Peran Serta)	
<b>18-19</b>	Sub-CPMK-13: Setelah Mengikuti kuliah ini Mahasiswa Dapat Memahami Dan Menggambarkan sistem hukum dan Sistem Kebijakan publik.	Ketepatan dalam memahami dan menggambarkan sistem hukum dan sistem kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Sistem Hukum dan Sistem Kebijakan Publik.	2%
<b>20-21</b>	Setelah Mengikuti kuliah ini Mahasiswa Dapat Memahami dan mengenali Formulasi antara kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.	Ketepatan dalam memahami dan mengenali formulasi antara kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Formulasi Kebijakan Publik Dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	2%
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-15: Mahasiswa mampu dan memahami metode dan tahapan proses pembuatan hukum.	Ketepatan dalam memahami metode dan tahapan Proses pembuatan hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Memahami Metode Pembuatan Hukum	2%
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Hukum dan Pancasila	FA176265	HTN	T=2 P= 1	VII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			Kanthi Rahayu,SH.,MH		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;				
<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;				
<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari dan lulus mata kuliah ini mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami, serta mampu menguraikan dan menjelaskan hubungan Hukum dan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara.				
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu memahami konsep dan urgensi, landasan dan tujuan pembelajaran Hukum dan Pancasila. b. Mampu memahami dan menguasai pemikiran mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia c. Mampu memahami dan menggambarkan pemikiran dalam teori asal mula tentang Pancasila. d. Mampu memahami dan menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat e. Mampu memahami dan menganalisis hubungan Pancasila dan UUD 1945 f. Mampu menganalisis pancasila sebagai sistem Ideologi Negara, serta mahasiswa mampu membandingkan pancasila dengan ideologi-ideologi besar dunia g. Mampu menganalisis dan menggambarkan pancasila sebagai sumber hukum h. Mampu menterjemahkan dan menggambarkan nilai luhur pancasila				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah <i>Hukum dan Pancasila</i> diharapkan mahasiswa menjadi ilmuwan yang berjiwa Pancasila dan bersikap serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, memahami dan menghayati sistem kenegaraan berdasarkan UUD 1945, Memiliki keterampilan dan sikap kritis dan komunikatif dengan profesi guru, teknis, analis dan administrator.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Belajar 2. Pengantar Mata Kuliah. 3. Pengertian dan istilah Pancasila 4. Sejarah Pancasila. 5. Pancasila dan Pengetahuan Ilmiah, 6. Fungsi dan kedudukan Pancasila 7. Pengertian teori asal mula Pancasila, <b>8. Ujian Tengah Semester</b> 9. Penjelasan Pancasila sebagai Filosofi Bangsa 10. Pancasila dan UUD 1945 11. Pancasila sebagai konsep berbangsa dan ideologi. 12. Pelaksanaan Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. 13. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 14. Pancasila dan permasalahan aktual. 15. Pancasila sebagai dasar pemikiran dan moral bangsa, dan Nilai-nilai luhur Pancasila. <b>16. Ujian Akhir Semester</b>				
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: a. Jakob, Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Prientasi Pengembangan IPTEK, Interskip Dosen-Dosen Pancasila se Indonesia, Yogyakarta, 1999. b. Notonegoro, Pancasila Secara Utuh Populair, Pancoran Tujuh, Jakarta, 1976. c. Bakry Noor, Pancasila Yuridis Kebegaraan, Liberty, Yogyakarta, 1998.				
	Pendukung : Dardji Darmodihardjo, Santiaji Pancasila, Lepasila, Malang, 1975.				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum dan Pancasila				

Ming gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	BobotPen ilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring ( <i>offline</i> )	Daring ( <i>online</i> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami kontrak perkuliahan, RPS dan Sistem Penilaian dalam mata kuliah Hukum dan Pancasila	Membuat kesepakatan dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu memahami konsep dan urgensi, landasan dan tujuan pendidikan pancasila	Ketepatan memahami makna dan istilah-istilah khusus dalam materi kuliah Hukum Pancasila	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Menguraikan konsep hukum yang berjiwa Pancasila, serta urgensinya dalam penyusunan hukum.	15 %
4 - 5	CPMK-3: asiswa mampu memahami kedudukan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa.	Ketepatan memahami kedudukan Pancasila dalam Hukum Nasional	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian Pancasila dan sejarah Pancasila dalam kedudukan Hukum Nasional	15 %
6 - 7	Sub. CPMK-4: Mahasiswa mampu memahami dan menguasai Pancasila dalam konteks hubungan dengan pengetahuan ilmiah lainnya.	Ketepatan menjelaskan Pemahaman hubungan Pancasila dengan pengetahuan ilmiah lainnya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pancasila dan Pengetahuan Ilmiah. Pengertian teori asal mula Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila	10 %
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hubungan Pancasila dan UUD 1945	Ketepatan menjelaskan Hubungan Pancasila dan UUD 1945 dalam landasan hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pancasila dan UUD 1945 dan konsep Pancasila sebagai konsep berbangsa dan ideologi	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu menganalisis pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila sebagai sumber hukum.	Ketepatan menjelaskan hasil analisa terhadap pancasila dalam hubungan bernegara dan sebagai sumber hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x (2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pelaksanaan dan realitanya.	10 %
13 - 15	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mampu menguraikan pemahaman pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu dalam bidang ilmu masing-masing	Ketepatan menjelaskan Dan menguraikan perihal pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x( 2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x( 2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pancasila sebagai dasar pemikiran dan moral bangsa Pancasila dan Permasalahan aktual	20 %
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum dan Perubahan Sosial	FA1763107	HTN	T=2 P= 1	VIII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
					Kanthi Rahayu,SH.,MH
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang eksistensi hukum dalam perubahan sosial dalam konstelasi ketatanegaraan modern dengan baik, menganalisis implementasi hukum dalam praktek perubahan sosial.			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Hukum dan Perubahan Sosial merupakan materi dasar mengenai perihal konstelasi konstitusi sebagai “rule of game” , dasar pedoman berjalannya sebuah negara dan pemerintahan. Konstitusi sebagai kristalisasi nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum sebuah bangsa menjadi sebuah keniscayaan dalam mendalami kajian kenegaraan. Bahasan Materi meliputi, pengertian dasar, faham, dan doktrin konstitusi, cita hukum, teori, klasifikasi, materi muatan, serta eksistensi konstitusi dalam sebuah negara.</p>				
	<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah, dan program pembelajaran semester.</li> <li>2. Dasar-dasar pemikiran tentang hubungan antara Hukum dan Perubahan Sosial Aspek-aspek Perubahan Sosial yang berhubungan dengan Perubahan Hukum.</li> <li>3. Teori-teori tentang perkembangan masyarakat dan keadaan hukumnya</li> <li>4. Perkembangan masyarakat dan hukum di negara berkembang</li> <li>5. Kondisi hukum dan penetrasi barat</li> <li>6. Hubungan Barat dengan perkembangan hukum di Indonesia.</li> <li>7. Hukum sebagai sarana sosial kontrol, dan sosial engineering,</li> <li>8. <b>Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.</li> <li>10. Pengalaman perubahan hukum dan perubahan sosial di Indonesia</li> <li>11. Sumber-sumber Hukum yang mempengaruhinya</li> <li>12. Modernisasi hukum di Indonesia dan Aspek hukum modernisasi dan pembangunan</li> <li>13. Beberapa masalah dasar dalam pembangunan hukum.</li> <li>14. Peranan Pendidikan dan peranan sarjana hukum dalam perubahan sosial</li> <li>15. Aspek ketimpangan hukum dalam pembangunan hukum.</li> <li>16. <b>Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>			
<b>Pustaka</b>		<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat</li> <li>b. Astrid S.Soesanto, <i>Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial</i>, Bina Cipta Bandung, 1977.</li> <li>c. Soetandyo Wignyoebroto, Hukum dalam Masyarakat.</li> <li>d. Ronny Hanitoyo Soemitro, <i>Studi Hukum dan Masyarakat</i>, Alumni Bandung, 1982.</li> </ol>			
	<b>Pendukung :</b>				
<b>Dosen Pengampu Matakuliah</b>	Hukum dan Perubahan Sosial.				

syarat							
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan perlunya mempelajari hukum perubahan sosial.	Ketepatan menjelaskan tentang pengaruh hukum dalam perubahan sosial.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Kontrak kuliah dan pengarah program belajar semester.	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan kekhususan definisi perubahan sosial dan perubahan hukum,	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang pengertian dan definisi perubahan hukum dan perubahan sosial.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Dasar-dasar pemikiran tentang hubungan antara perubahan sosial dan perubahan Hukum; Aspek-aspek perubahan sosial yang berhubungan dengan perubahan hukum;	15 %
4 – 5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelaskan Kekhususan hukum sebagai alat perubahan Sosial, dan perkembangannya di Indonesia.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang hukum sebagai alat perubahan sosial dan perkembangan hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Teori-teori tentang pertumbuhan masyarakat dan keadaan hukumnya; Perkembangan masyarakat dan hukum di negara berkembang.	15 %
6 – 7	Sub. CPMK-4 Mampu menjelaskan kekhususan kondisi hukum dan peranan Barat dalam perkembangan hukum di Indonesia	Ketepatan menjelaskan Kekhususan tentang kondisi dan perkembangan hukum serta pengaruh barat di Indonesia.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Kondisi hukum dan penetrasi Barat Hubungan Barat dengan perkembangan hukum di Indonesia.	10 %
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
9 – 10	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan kekhususan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, dan keberlakuan hukum.	Ketepatan menjelaskan Kekhususan tentang hukum sebagai sarana kontrol sosial dan keberlakuan hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Hukum sebagai sarana sosial kontrol, dam sosial engineering Hukum represif,hukum otonom, dan hukum responsif;	10 %
11 – 12	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan kekhususan aspek kerja hukum dalam hubungan dengan perubahan sosial, dan dampak modernisasi hukum,	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang aspek hukum dalam hubungan perubahan sosial dan dampak modernisasi hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengalaman perubahan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Aspek hukum modernisasi dan pembangunan	10 %
13 – 15	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan kekhususan pengembangan hukum, dan permasalahan-permasalahan dalam proses perubahannya.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang pengembangan hukum dan masalah-masalah yang muncul dalam proses perubahannya.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Beberapa masalah dasar dalam pembangunan hukum Pendidikan dan peranan sarjana hukum dalam pembangunan Aspek ketimpangan hukum dalam pembangunan hukum.	20 %
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM

Kode Dokumen  
FA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Ekonomi Syariah	FA176398	Perdata	T=2 P= 1		Juli 2021
	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua PRODI		
			Kanthi Rahayu,SH.,MH		
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan hukum ekonomi syariah			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	a. Mahasiswa mampu mengerti hukum Islam dan hukum ekonomi syariah; b. Mampu membuat dan menganalisa akad-akad di lembaga Keuangan syariah; c. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara integral; d. Mampu mengkomunikasikan keputusan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah secara khusus kepada masyarakat; e. Mampu menyusun Legal Drafting dalam hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syaria'ah seperti akad, perundang-undangan dan sebagainya; f. Mampu menyusun langkah-langkah Problem Solving (sengketa ekonomi syariah); g. Mampu menyusun instrument dan melaksanakan Legal Auditing (berkas hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus); h. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum ekonomi syariah.				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah Hukum Ekonomi Islam membahas hal-hal yang berkaitan dengan konsep ekonomi syariah dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, surat surat berharga syariah (saham, obligasi dan reksa dana syariah), penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan lain-lain sebagaimana tersebut dalam UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2010				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Belajar 2. Sejarah ekonomi syariah 3. Sejarah ekonomi syariah (lanjutan) 4. System ekonomi syariah				



	5. Hukum kontak syariah 6. Hukum kontak syariah (lanjutan) 7. Hukum perseroan syariah <b>8. Ujian Tengah Semester</b> 9. Hukum investasi syariah 10. Hukum investasi syariah (lanjutan) 11. Investasi bank syariah 12. Asuransi reasuransi syariah 13. Saham dan surat-surat berharga syariah 14. Peranan hokum dalam pembangunan ekonomi 15. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah <b>16. Ujian Akhir Semester</b>						
<b>Pustaka</b>	DaftarReferensi:						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abdul Manan, HukumEkonomiSyariah, (Jakarta: Kencana), 2016.</li> <li>- Adiwarmam A. Karim, FikihEkonomiKeuangan Islam, (Jakarta: DarulHaq), 2004.</li> <li>- Ahmad AzharBasyir, Prinsip-prinsipEkonomi Islam dalamAspekEkonomi Islam, (Yogyakarta: FE UII), 1992.</li> <li>- Akram Khan, Economic Message of The Quran, (Kuwait: Islamic Book Publisher), 1996.</li> <li>- RahmatRosyadi, ArbitrasedalamPerspektif Islam danHukumPositif, (Bandung: Citra Adity), 2002.</li> <li>- UmerChappra., The Future Of Economics An Islamic Perspektive, (Jakarta: SEBI), 2001.</li> </ul>						
	<b>Pendukung :</b>						
	UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2010 Kompilasi Hukum Islam						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>							
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]</b>		<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>BobotPenilaian (%)</b>
		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp;Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>		
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
<b>1</b>	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan secara teoretis Sejarah Ekonomi Islam Indonesia. [S9, KU1, KU2]	Kejelasan, pemahaman dan penghayatan menjelaskan Sejarah Ekonomi Islam meliputi: Pengertian Ekonomi Syariah, Rancang Bangun Ekonomi Islam dan Pendapat Para Ahli Ekonomi Islam tentang Ekonomi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [ TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sejarah Ekonomi Islam meliputi: (Pengertian Ekonomi Syariah, Rancang Bangun Ekonomi Islam dan Pendapat Para Ahli Ekonomi Islam tentang Ekonomi)	20 %

2-3	Sub-CPMK-2: Memahami secara teoretis Sistem Ekonomi Syariah[S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang Prinsip-Prinsip ekonomi Islam, Sumber-Sumber ekonomi Syariah, Ekonomi Islam Sebagai alternative	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Prinsip-Prinsip ekonomi Islam, Sumber-Sumber ekonomi Syariah, Ekonomi Islam Sebagai alternative	15 %
4-5	b-CPMK-3: Mampu memahami mengenai Hukum Kontrak Syariah [S9, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang Hukum Kontrak Syariah meliputi: Asas-asas Kontrak, Rukun dan Syarat Kontrak, Hal-hal yang dapat merusak Kontrak, Khiyar, Berakhirnya suatu Kontrak (Intiha' al-'aqad)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum Kontrak Syariah meliputi: Asas-asas Kontrak, Rukun dan Syarat Kontrak, Hal-hal yang dapat merusak Kontrak, Khiyar, Berakhirnya suatu Kontrak (Intiha' al-'aqad)	15 %
6-7	b-CPMK-4 Mampu memahami tentang Hukum Perseroan Syariah[S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang Hukum Perseroan Syariah meliputi: Konsep Perseroan dalam Hukum Islam, Bentuk-Bentuk Perseroan, Berakhirnya Perseroan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum Perseroan Syariah meliputi: Konsep Perseroan dalam Hukum Islam, Bentuk-Bentuk Perseroan, Berakhirnya Perseroan.	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9-10	Sub-CPMK-5: Mampu memahami tentang Hukum Investasi Syariah[S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman mengenai Hukum Investasi Syariah meliputi: Tujuan dan Jenis Investasi, Asas-	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum Investasi Syariah	10 %

		<p>asas Hukum Investasi, Pasar Uang dan Pasar Modal, risiko dalam Investasi, Prinsip-prinsip Investasi Berdasarkan Syariah.</p>					
11 - 12	<p>Sub-CPMK-6: Memahami tentang Investasi Bank Syariah meliputi : Sejarah lahirnya Bank Syariah, Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Ciri-ciri Bank Syariah dan Perbedaan dengan Bank Konvensional. [S9, KU1, PP4]</p>	<p>Kejelasan dan pemahaman tentang menjelaskan Investasi Bank Syariah</p>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]</p>	<p><b>eLearn</b> <b>ng dan</b> <b>platfor</b> <b>m</b> <b>media</b> <b>lainnya.</b></p>	<p>Investasi Bank Syariah</p>	<p>10 %</p>
13-14	<p>Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan Syariah. Saham dan Surat - Surat Berharga Syariah [S9, KU9, KK1]</p>	<p>Ketepatan menjelaskan Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan Syariah meliputi: Pengertian, Perkembangan Asuransi Syariah, dasar Hukum Asuransi Syariah, Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional, Strategi Pengembangan Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah. Dapat mengajukan terka</p>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]</p>	<p><b>eLearn</b> <b>ng dan</b> <b>platfor</b> <b>m</b> <b>media</b> <b>lainnya.</b></p> <p>-</p>	<p>Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan Syariah Saham dan Surat-Surat Berharga Syariah</p>	<p>10 %</p>

		tbentukSah amdanSurat - SuratBerhar gaSyariah					
<b>15</b>	Sub-CPMK-7 Mampu memahami menjelaskan tentang PerananHukum dalam Pembangunan EkonomisertaP enyelesaianSen gketaEkonomiS yaria	Kejelasanda npemahama ntentangme nuliskandan menyajikan PerananHu kumdalam Pembangun an Ekonomi	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokume  
n  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Pajak</b>	FA176230	HTN	T=2 P= 1	III	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa selaku peserta didik mampu mengetahui dan memahami berbagai persoalan mendasar dalam perpajakan, baik menyangkut asas, pengertian, sistem, stelsel dan berbagai persoalan yang dapat terjadi dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pajak oleh rakyat.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu memahami Perlunya mempelajari hukum pajak, dalam pembelajaran semester</li> <li>Mampu menjelaskan Pengertian dan Definisi Pajak. Pendekatan dan Faksafah Pajak.</li> </ol>				

	<p>c.Mampu mengidentifikasi Subyek Pajak, dan Dasar Hukum Pajak.</p> <p>d.Mampu menjelaskan Pembagian Hukum Pajak, perkembangan Pembaharuan Hukum Pajak.</p> <p>e.Mampu menjelaskan Dasar-Dasar Pemungutan Pajak, berakhirnya Utang Pajak.</p> <p>f. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip Stelsel Pajak dan Pemungutannya, serta hapusnya utang pajak.</p> <p>g.Mampu menjabarkan karakteristik Penghindaran Pajak, dan cara penyelesaiannya.</p> <p>h.Mampu memahami Penyelesaian Sengketa Pajak, dan penegakkan hukum pajak.</p>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Substansi mata kuliah hukum pajak mencakup aspek-aspek hukum dari pajak yang mencakup mengenai teori, konsep, maupun asas mengenai pajak, hak, dan kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak, ketentuan-ketentuan hukum pajak materil, maupun hukum pajak formil dalam rangka menegakkan hukum pajak materiil. Muatan dari mata kuliah ini meliputi pengertian dasar, teori perpajakan, asas di bidang perpajakan, pembaharuan perpajakan lahir dan hapusnya utang pajak dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan aspek yuridis dalam pajak.</p>
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Mata Kuliah, dan pemaparan kontrak belajar.</li> <li>2. Menguraikan Pengertian dan Definisi Hukum Pajak</li> <li>3. Pendekatan Terhadap Pajak dan Falsafah Pajak.</li> <li>4. Menjelaskan Subtek Pajak dan Wajib Pajak.</li> <li>5. Dasar Hukum Pajak</li> <li>6. Pembagian Hukum Pajak.</li> <li>7. Pembaharuan Perpajakan di Indonesia</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Asas Pemungutan Pajak.</li> <li>10. Lahirnya Utang Pajak, dan Stelsel Pajak, dan Cara Pemungutannya.</li> <li>11. Lahirnya Utang Pajak, dan Stelsel Pajak, dan Cara Pemungutannya (Lanjutan)</li> <li>12. Hapusnya Utang Pajak, Perlawanan, Penghindaran, dan Penyelundupan Pajak.</li> <li>13. Hapusnya Utang Pajak, Perlawanan, Penghindaran, dan Penyelundupan Pajak.(Lanjutan)</li> <li>14. Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Pajak</li> <li>15. Penegakkan HUKUM Pajak.</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sri Pudyatmoko, Y, <i>Pengantar Hukum Pajak,(edisi revisi)</i> , Andi Offset, Yogyakarta,2009.</li> <li>2. Anastasia Diana, &amp; Lilis Setiawati, <i>Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis</i>, Penerbit Andi Yogyakarta, 2004</li> <li>3. Rochmat Soemitro, <i>Asas dan Dasar Perpajakan I, II, dan III.</i> ,Eresco Bandung, 1991.</li> <li>4. Pengantar Hukum Pajak, , PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2002.</li> </ol>
	<b>Pendukung :</b>

Min ngu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bob otPe nilai an (%)
		Indikator	Kriteri a & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mampu memahami Perlunya mempelajari hukum pajak, dalam pembelajaran semester	Ketepatan menjelaskan tentang definisi hukum pajak dalam pembelajaran semester.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 )]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Pengantar Mata Kuliah, dan Kontrak Belajar	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan kekhususan tentang Pengertian dan Definisi Pajak. Pendekatan dan Faksafah Pajak.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang pengertian, definisi, dan pendekatan falsafah pajak	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 )]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Pengertian dan Definisi Pajak Pendekatan Pajak dan Falsafah Pajak	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelasakn Kekhususan Subyek Pajak, dan Dasar Hukum Pajak.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang subyek dan dasar hukum pajak.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 )]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Menjelaskan Subtek Pajak dan Wajib Pajak.	15 %
6 - 7	Sub. CPMK-4 Mampu menjelaskan kekhususan Pembagian Hukum Pajak, perkembangan	Ketepatan menjelaskan kekhususan mengenai dasar pembagian hukum pajak,	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 )]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Pembagian Hukum Pajak. Pembaharuan Perpajakan Indonesia di	10 %

	Pembaharuan Hukum Pajak.	perkembangan, dan pembaharuan pajak.	E = 0 – 40				
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9 -10</b>	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan kekhususan Dasar-Dasar Pemungutan Pajak, berakhirnya Utang Pajak.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tatacara pemungutan pajak, dan hapusnya utang pajak	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Asas Pemungutan Pajak. Lahir dan berakhirnya Utang Pajak	10 %
<b>11 -12</b>	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan kekhususan Stelsel Pajak dan Pemungutannya. Hapusnya Utang Pajak	a.Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang stelsel dan pemungutan pajak, serta hapusnya utang pajak.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Stelsel Pajak dan Cara Pemungutannya. Hapusnya Utang Pajak	10 %
<b>13-15</b>	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan kekhususan karakteristik Penghindaran Pajak. Penyelesaian Sengketa Pajak, dan penegakkan hukum pajak	Ketepatan menjelaskan kekhususan karakteristik penghindaran pajak, penyelesaian dan penegakkan hukum pajak	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Pajak. Penegakkan Hukum Pajak.	20 %
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						







**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Hukum Tata Negara	FA176222	Tata Negara	4	II	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari Hukum Tata Negara diharapkan mampu menjelaskan tentang ruang lingkup, Sumber Hukum Tata negara dan sejarah Sistem ketatanegaraan Indonesia serta Pembagian Tugas dan Wewenang Lembaga Tinggi negara di Indonesia.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum tata negara.</li> <li>Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.</li> </ol>				

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum tata negara.</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Ruang lingkup mata kuliah Hukum Tata Negara membahas tentang ruang lingkup Hukum Tata negara dan Sejarah Sistem ketatanegaraan Indonesia serta tata kelola Lembaga Tinggi negara di Indonesia.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah.</li> <li>2. Pengertian Hukum Tata Negara</li> <li>3. Sumber Hukum Tata Negara</li> <li>4. Sejarah Ketatanegaraan RI</li> <li>5. Lanjutan Sejarah Ketatanegaraan RI</li> <li>6. Kekuasaan Pemerintahan Negara : Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>7. Lanjutan Presiden dan wakil Presiden</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Kekuasaan Legislatif Negara: Majelis Permusyawaratan Rakyat</li> <li>10. Kekuasaan Legislatif Negara : dewan permusyawaratan Rakyat</li> <li>11. Kekuasaan Yudikatif Negara : Mahkamah Agung dan Mahkamah konsitusi</li> <li>12. Kementrian Negara</li> <li>13. Hak Asasi Manusia</li> <li>14. Warga Negara RI</li> <li>15. Review dan Diskusi Kelas</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Tata Negara Indonesia, Prof. Dr. HRT Sri Sumantri M, SH</li> <li>2. Impeachment Presiden oleh Hamdan Zoelva.</li> <li>3. Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi oleh Prof. Dr. Jimly Assidique</li> <li>4. Format kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945 oleh Prof. Dr. Jimly Asshdiqie. SH</li> <li>5. UUD RI 1945</li> <li>6. Undang Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</li> <li>7. Undang Undang tentang Mahkamah Agung RI.</li> <li>8. Undang Undang tentang Kementrian RI.</li> <li>9. Undang Undang tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>10. Undang Undang tentang kewarganegaraan.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b>  Prof. Dr. HRT Sri Sumantri M, SH. Hukum Tata Negara Indonesia.  Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden.</p>	

		Prof.Dr.Jimly Assidiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi Prof.Dr.Jimly Asshdiqie.SH. Format kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945.					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Hukum Tata Negara					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami Pengertian dan dasar Hukum Tata Negara.	Ketepatan menjelaskan Pengertian dan dasar Hukum Tata Negara.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian Hukum Tata Negara.	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa di harap dapat mengetahui Sumber-sumber hukum Tata negara	Ketepatan menjelaskan Sumber-sumber hukum Tata Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sumber Hukum Tata negara	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengenal dan	Ketepatan mengetahui sejarah ketatanegara an RI	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'');	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sejarah Ketatanegaraa n RI	2%

	mengetahui sejarah ketatanegaraan RI		C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM : (1+1)x(2x60'')]			
<b>7-8</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa bisa mengetahui dan mengetahui sejarah ketatanegaraan Pasca Reformasi.	Ketepatan menjelaskan dan mengetahui sejarah ketatanegaraan pasca reformasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x50'')]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Lanjutan Sejarah Ketatanegaraan RI	2%
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat menjelaskan tugas-tugas kenegaraan dan Pemerintahan Presiden dan wakil Presiden	Ketepatan dalam menjelaskan tugas-tugas kenegaraan dan Pemerintahan Presiden dan wakil Presiden	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x50'')]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Kekuasaan pemerintahan Negara : presiden dan wakil Presiden	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat mengetahui tugas kenegaraan dan Pemerintahan Presiden dan wakil Presiden setelah orde reformasi	Ketepatan dalam mengenal tugas kenegaraan dan Pemerintahan Presiden dan wakil Presiden setelah orde reformasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x50'')]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Lanjutan Presiden dan wakil Presiden	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						<b>30%</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kekuasaan MPR dalam sistem	Ketepatan dalam mengetahui dan memahami kekuasaan MPR dalam sistem ketatanegaraan RI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x50'')]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kekuasaan Legislatif negara : MPR	2 %

	ketatanegaraan RI						
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kekuasaan DPR dalam sistem ketatanegaraan RI	Ketepatan Mengetahui Dan Memahami Kekuasaan DPR dalam System Ketatanegaraan RI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning Dan platform Media lainnya.</b>	Kekuasaan Legislatif Negara : DPR	2 %
<b>13 – 15</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami kekuasaan dan peran Lembaga MA dan MK dalam sistem ketatanegaraan RI	Ketepatan Mengetahui Dan Memahami Kekuasaan dan peran Lembaga MA dan MK dalam system Ketatanegaraan RI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning Dan platform Media lainnya.</b>  -	Kekuasaan Yudikatif Negara : Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa bisa mengetahui peran dan tugas kementerian sebagai pembantu Presiden dalam tata Pemerintahan RI	Ketepatan Dalam Mengetahui peran dan Tugas Kementerian Sebagai Pembantu Presiden dalam tata Pemerintahan RI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning Dan platform Media lainnya</b>	Kementerian Negara	2%
<b>18-19</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat mengenal lebih jauh perkembangan dan	Ketepatan dalam mengenal lebih jauh perkembangan dan pelaksanaan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning Dan platform Media lainnya</b>	Hak Asasi Manusia	2%

	pelaksanaan HAM di Indonesia	HAM di Indonesia	E = 0 – 40				
<b>20-21</b>	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami definisi, peran hak dan kewajiban warga negara RI	Ketepatan dalam memahami definisi, peran hak dan kewajiban warga negara RI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning Dan platform Media lainnya</b>	Warga Negara Republik Indonesia	2%
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-15: Mahasiswa dapat memahami dan menguasai materi Hukum Tata negara secara Konseptual dan praktis.	Ketepatan dalam memahami dan menguasai materi Hukum Tata negara secara Konseptual dan praktis.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning Dan platform Media lainnya</b>	Review dan diskusi kelas	2%
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen**  
FA

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Wakaf	FA176374	Perdata	T=2 P= 1		Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan perwakafan				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
Sub-CPMK	a. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis wakaf b. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis syarat wakaf c. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis proses perwakafan d. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis penukaran harta wakaf e. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis Persamaan dan perbedaan konsep wakaf f. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis factor penyebab timbul konsep perwakafan g. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis Badan Wakaf di Indonesia h. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis tentang wakaf tunai i. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis pengelolaan wakaf, jenis-jenis wakaf j. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis potensi dan pengembangan wakaf produktif				
<b>Deskripsi</b>	Mata kuliah ini membahas tentang penyelesaian sengketa membahas beberapa alternative				



<b>Singkat MK</b>		penyelesaiannya					
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, Syarat Dan Rukun Wakaf</li> <li>3. Proses Perwakafan</li> <li>4. Penukaran Harta Wakaf</li> <li>5. Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif</li> <li>6. Faktor Penyebab Timbulnya Persamaan Dan Perbedaan Perwakafan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif</li> <li>7. <b>Ujian Tengah Semeseter</b></li> <li>8. Badan Wakaf Indonesia</li> <li>9. Wakaf Tunai</li> <li>10. Konsep Dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai</li> <li>11. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai</li> <li>12. Tunai Dan Pembangunan Ekonomi</li> <li>13. Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik</li> <li>14. Wakaf Produktif</li> <li>15. Potensi Dan Pengembangan Wakaf Produktif</li> <li>16. <b>Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>					
<b>Pustaka</b>		Daftar Referensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khallaf, Abdul Wahhab Ahkam al-Waqf, Mesir: al- Nasr, 1946.</li> <li>- Muslim, Sahih Muslim, Juz I . Bandung: Dahlan, tt.</li> <li>- Syairazi, (Al-), al-Muhaddab, Juz I, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.</li> <li>- Salam Madkur, Muhammad. al-Waqf. Beirut: Dar al-Nahdah al- ‘Arabiyah, 1961.</li> <li>- Zahra, Muhammad Abu. Muhadlarat fi al-Waqf, Bairut: Dar al-Fikral Arabi, 1971.</li> </ul>					
		<b>Pendukung :</b>					
		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>							
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan pengertian wakaf dalam pandangan para ulama dan menurut hukum positif [S9, KU1, KU2]	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan pengertian wakaf menurut para ulama dan hukum positif</li> <li>b. Menjelaskan dasar hukum wakaf menurut al-Qur’an, Hadis dan hukum positif</li> <li>c. Mengkomparasikan</li> </ol>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50’)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60’)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif	20 %

		mengkritisipengertian wakaf yang diformulasikanoleh para ulamadandung-undang wakaf					
2-3	Sub-CPMK-2: Memahamisecara teoretis syarat dan rukun wakaf, sertamemahami proses perwakafan[S9, KU1, KU2, PP4]	Menjelaskan syarat dan rukun wakaf menurut hukum Islam b. Menjelaskan syarat dan rukum wakaf menurut hukum positif Menjelaskan proses perwakafanmenurut para ulamamadzhab b. Menjelaskan proses perwakafanmenuruthukum positif c. Mengkritisi proses perwakafanmenuruthukum Islam danhukumpositi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya.</b>	Syaratdan rukunwakaf Proses perwakafan	15 %
4- 5	b-CPMK-3: Mampumemahamimengenaipenukaranhartakafdanmemahamipersamaanperbedaankonsep perwakafandalamperspektiffiqhdanhukumpositif[S9, PP4]	Menjelaskan penukaran harta wakaf menurut para ulama madzhab b. Menjelaskan penukaran harta wakaf menurut hukum positif c. Mengkritisi penukaran harta wakaf menurut hukum Islam Menjelaskan persamaanda	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya.</b>	- Penukaranhartawakaf - perwakafandalamperspektiffiqhdanhukumpositif	15 %

		<p>perbedaan konsep perwakafan dalam perspektif fiqh dan hukum positif b.</p> <p>Mengkritisipersamaan perbedaan konsep perwakafan dalam perspektif fiqh dan hukum positif</p>					
6 - 7	<p>b-CPMK-4</p> <p>Mampu memahami tentang faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan. Mampu memahami BWI[S9, KU1, PP4]</p>	<p>Menjelaskan faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan konsep perwakafan dalam perspektif fiqh dan hukum positif b.</p> <p>Mengkritisip faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan konsep perwakafan dalam perspektif fiqh dan hukum positif menjelaskan BWI</p>	<p>A = 86-100</p> <p>B = 71-85</p> <p>C = 56-70</p> <p>D = 41-55</p> <p>E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah;</p> <p>b. Diskusi[ TM: 1x(2x50”)];</p> <p>c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]</p>	<p><b>eLearn</b></p> <p><b>ngdan</b></p> <p><b>platfor</b></p> <p><b>m</b></p> <p><b>media</b></p> <p><b>lainnya.</b></p>	<p>- Faktor penyebab timbulnya persamaan perbedaan</p> <p>- BWI</p>	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9 - 10	<p>Sub-CPMK-5:</p> <p>Mampu memahami pengertian, hukum dan sejarah wakaf tunai memahami konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai[S9, KU1, PP4]</p>	<p>a. Menjelaskan pengertian wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif</p> <p>b. Menjelaskan hukum dan sejarah wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif</p>	<p>A = 86-100</p> <p>B = 71-85</p> <p>C = 56-70</p> <p>D = 41-55</p> <p>E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah;</p> <p>b. Diskusi[ TM: 1x(2x50”)];</p> <p>c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]</p>	<p><b>eLearn</b></p> <p><b>ngdan</b></p> <p><b>platfor</b></p> <p><b>m</b></p> <p><b>media</b></p> <p><b>lainnya.</b></p>	<p>- Pengertian, hukum dan sejarah wakaf tunai</p> <p>- Pengertian Konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai</p>	10 %

		menjelaskan konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif					
11 - 12	Sub-CPMK-6: memahami tentang wakaf tunai dan pembangunan ekonomi dan wakaf tunai sebagai publik [S9, KU1, PP4]	Menjelaskan wakaf tunai dan pembangunan ekonomi dengan membuka kebuntuan wakaf, pemberdayaan ekonomi, baik secara tradisional maupun institusional dan wakaf tunai sebagai publik menurut hukum Islam dan hukum positif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	- Wakaf tunai dan pembangunan ekonomi - Wakaf tunai sebagai publik	10 %
13-14	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan dasar filosofis wakaf produktif [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum positif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	Pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif	10 %
15	Sub-CPMK-7 Mampu menjelaskan potensi dan pengembangan wakaf produktif	Kejelasan dan pemahaman tentang potensi dan pengembangan wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum positif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Potensi dan pengembangan wakaf produktif	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN  
SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Kapita Selekt HTN- HAN	FA176377	HTN	T=2 P= 1	VII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu, SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari mata kuliah Kapita Selekt HTN-HAN Mahasiswa mampu mendeskripsikan secara spesifik hal-hal yang termasuk dalam kajian ketatanegaraan, dan mampu menganalisis hal-hal aktual berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum tata negara			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
	<b>Sub-CPMK</b>	a.Mampu dan memahami kapita selekt hukum tata negara dalam kurikulum dan pendidikan Hukum b.Mampu menjelaskan tentang pengertian dan definisi Kapita Selekt hukum, serta peristiwa-peristiwa sejarah. c.Mampu menjelaskan tentang demokrasi, pemilihan umum, dan sistem kepartaian di Indonesia.			

		<p>d. Mampu menjelaskan tentang sistem perwakilan unicameral, bicameral, sentralistik, dan otonomi.</p> <p>e. Mampu menjelaskan praktik sistem demokrasi, kepartaian, dan amandemen/perubahan suatu undang-undang.</p> <p>f. Mampu menjelaskan, menganalisis, dan menyimpulkan kekurangan dan kelebihan amandemen,</p> <p>g. Mampu menganalisis tentang keseimbangan (check and ballances), dan apa yang dimaksud dengan sengketa negara</p>					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Kapita Selektta Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah konsentrasi yang spesifik membahas hukum tata negara dan hal-hal aktual kenegaraan						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Pengantar Mata Kuliah,</li> <li>3. Review Pokok Bahasan Hukum Tata Negara</li> <li>4. Mereview tentang Supra dan Inpra Struktur Politik Hukum Tata Negara.</li> <li>5. Sejarah ketatanegaraan Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi</li> <li>6. Sistem Pemerintahan (Parlemerter, Presidential, Quasi).</li> <li>7. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Sistem Keptartaian.</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Sistem Badan Perwakilan (Unicameral dan Bicameral).</li> <li>10. Pemencaran Kekuasaan Negara.</li> <li>11. Praktek pelaksanaan prinsip demokrasi.</li> <li>12. Konstitusi dan Amandemen.</li> <li>13. Kesepakatan mendasar amandemen.</li> <li>14. Perkembangan Sistem Cheks and Balances.</li> <li>15. Hubungan antara lembaga primer dan lembaga independen.</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syahran Basah, <i>Ilmu Negara: Pengantar, Metode Dan Sejarah Perkembangan</i>. Jakarta: Alumni. 1987.</li> <li>- Mukhtie Fajar, <i>Tipe Negara Hukum</i>. Malang: Bayumedia, 2005.</li> <li>- Lili Rasjidi, <i>Hukum Sebagai Suatu Sistem</i>. Bandung: Mandar Maju, 2003.</li> <li>- Dadang Juliantara, <i>Negara Demokrasi Untuk Indonesia</i>. Solo: Pondok Edukasi, 2001.</li> </ul> <p><b>Pendukung :</b></p>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Mata Kuliah syarat</b>	Kapita Selektta HTN – HAN.						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Sub-CPMK-1: Mampu memahami kapita selekta hukum tata negara dalam kurikulum dan pendidikan Hukum	a.Ketepatan menjelaskan tentang sifat dan maksud mata kuliah yang akan diajarkan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ")]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60")]	e-Learnin g dan platfor m media lainnya.	Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan kekhususan tentang pengertian dan definisi mata kuliah, serta peristiwa-peristiwa sejarah	Ketepatan menjelaskan kekhususan kapita selekta dalam peristiwa-peristiwa hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ")]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60")]	e-Learnin g dan platfor m media lainnya.	Review Materi Pokok Bahasan Hukum Tata Negara. Review tentang Supra dan Inpra Struktur Politik Hukum Tata Negara	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelasakn Kekhususan latar belakang munculnya suatu peristiwa dan peraturan, dan konfigurasi politik Indonesia	Ketepatan menjelaskan Latar belakang terjadinya peristiwa dan peraturan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ")]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60")]	e-Learnin g dan platfor m media lainnya.	Sejarah ketatanegaraan setelah kemerdekaan Sistem Pemerintahan (Parlementer, Presidential, Quasi)	15 %
6 - 7	Sub-CPMK-4 Mampu menjelaskan Kekhususan tentang demokrasi, pemilihan umum, dan sistem kepartaian.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang makna demokrasi, partai politik, dan paket pemilihan umum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ")]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60")]	e-Learnin g dan platfor m media lainnya.	Konfigurasi politik Indonesia Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Sistem Kepartaian (Partai Politik)	10 %
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						

9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan kekhususan tentang sistem perwakilan unicameral, bicameral, dan sentralistik	Ketepatan menjelaskan kekhususan mengenai sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Sistem Perwakilan (Unicameral dan Bicameral) Pemencaran Kekuasaan di Indonesia (sentralistik, Otonomi)	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan sistem demokrasi, kepartaian, dan amandemen konstitusi.	Ketepatan menjelaskan kekhususan mengenai sistem demokrasi, dan mengenali amandemen konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Praktek pelaksanaan prinsip demokrasi. Konstitusi dan Amandemen.	10 %
13 - 15	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan menganalisis kekurangan dan kelebihan amandemen, keseimbangan (check and ballances), dan sengketa negara.	Ketepatan menjelaskan Kekhususan amandemen, check and ballances, dan sengketa negara.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Kesepakatan mendasar amandemen Perkembangan Sistem Cheks and Balances. Hubungan antara lembaga primer dan lembaga independen	20 %
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN  
SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Penyelesaian Sengketa</b>	FA176261	Perdata	T=2 P= 1		Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan penyelesaian sengketa			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Hakekat penyelesaian sengketa</li> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Dasar hukum penyelesaian sengketa</li> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Strategi Penyelesaian sengketa.</li> </ol>				

		<p>d. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan</p> <p>e. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Pelaksanaan putusan Arbitrase</p> <p>f. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis pembatalan putusan Arbitrase</p> <p>g. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Badan Arbitrase Nasional di Indonesia Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase institusional di Indonesia</p> <p>h. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase Modern</p> <p>i. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis keuntungan &amp; kelemahan penyelesaian sengketa modern (Online Discussion)</p> <p>j. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis hukum acara arbitrase modern (Online)</p> <p>k. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia</p> <p>l. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis putusan arbitrase modern (Online)</p> <p>m. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase Internasional.</p>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang penyelesaian sengketa membahas beberapa alternative penyelesaiannya	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Hakikat penyelesaian sengketa dan Dasar hukum penyelesaian sengketa</li> <li>3. Strategi Penyelesaian sengketa</li> <li>4. Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan</li> <li>5. Pelaksanaan putusan Arbitrase</li> <li>6. Pembatalan putusan Arbitrase</li> <li><b>7. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>8. Badan Arbitrase Nasional di Indonesia</li> <li>9. jenis-jenis Arbitrase institusional di Indonesia</li> <li>10. Jenis-jenis arbitrase modern</li> <li>11. Keuntungan &amp; kelemahan penyelesaian sengketa modern (Online Dispute Resolution ODR)</li> <li>12. Hukum acara arbitrase modern (Online)</li> <li>13. Putusan arbitrase modern (Online)</li> <li>14. Jenis-jenis Arbitrase Internasional</li> <li>15. Pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian sengketa, Arbitrase Nasional &amp; Internasional. Jakarta : Sinar Grafika, 2012</li> <li>- Gary Goodpaster diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak. Panduan Negosiasi dan Mediasi.</li> <li>- Gunawan Widjaja. penyelesaian sengketa. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gunawan Widjaja &amp; Ahmad Yani. Hukum Arbitrase. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003</li> <li>- Huala Adolf, SH., LL.M. PH.D., Hukum Penyelesaian sengketa Internasional. Jakarta : Sinar grafika, 2004</li> <li>- Moch. Basarah., Prosedur penyelesaian sengketa Arbitrase Traditional dan Modern (online). Bandung: Genta Publishing, 2011</li> </ul>						
	<b>Pendukung :</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> <li>- UU No 30 Tahun 1999</li> </ul>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>							
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan secara teoretis Hakikat penyelesaian sengketa di Indonesia. [S9, KU1, KU2]	Kejelasan, pemahaman dan penghayatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	• Latar belakang penyelesaian sengketa, • Pengertian penyelesaian sengketa, • Jenis jenis penyelesaian sengketa • Karakteristik dan pelaksanaan penyelesaian sengketa	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Memahami secara teoretis Dasar hukum penyelesaian sengketa di Indonesia mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Strategi	Kejelasan dan pemahaman tentang strategi penyelesaian	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Penyelesaian sengketa menurut UU No. 30 Tahun 1999 Konsultasi,, Negosiasi & Perdamaian, Mediasi Konsiliasi Arbitrase	15 %


	Penyelesaian sengketa. [S9, KU1, KU2, PP4]						
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan Pelaksanaan putusan Arbitrase [S9, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang arbitrase	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang &amp; pengertian Arbitrase,</li> <li>- Perjanjian Arbitrase,</li> <li>- Klausula Arbitrase</li> <li>- Kelebihan &amp; Kelemahan Arbitrase</li> <li>- Asas personalitas,</li> <li>- Keterkaitan antara Arbitrase &amp; pengadilan,</li> <li>- Perbedaan antara putusan arbitrase nasional &amp; Putusan Arbitrase Internasional</li> <li>- Pelaksanaan putusan arbitrase nasional &amp; Alasan pembatalan putusan Arbitrase,</li> <li>- Mekanisme pembatalan putusan arbitrase</li> <li>- Penolakan eksekusi putusan Arbitrase</li> </ul>	15 %
6 - 7	Mampu memahami tentang pembatalan putusan Arbitrase dan Badan Arbitrase Nasional di Indonesia [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang badan arbitrase dan pembatalannya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM :(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan pembatalan putusan Arbitrase,</li> <li>- Mekanisme pembatalan putusan arbitrase</li> <li>- Penolakan eksekusi putusan Arbitrase Tujuan &amp; lingkup kegiatan BANI</li> <li>- Pengajuan permohonan Arbitrase</li> <li>- Putusan Arbitrase</li> <li>- Biaya Arbitrase BANI</li> </ul>	10 %

8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu memahami tentang jenis-jenis Arbitrase institusional di Indonesia dan jenis-jenis Arbitrase Modern [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman mengenai jenis-jenis arbitrase modern di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia</li> <li>- Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia</li> <li>- Badan Arbitrase syariah Nasional (BASYARNAS)</li> <li>- Badan Arbitrase &amp; mediasi Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>- Bentuk transaksi Ecommerce</li> <li>- Dasar hukum Klausula Arbitrase Online</li> <li>- Ruang lingkup Online dispute resolution (ODR)</li> <li>- Pengertian Online Dispute Resolution I</li> </ul>	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-6: memahami tentang keuntungan & kelemahan penyelesaian sengketa modern (Online Dispute Resolution - ODR) dan hukum acara arbitrase modern (Online) [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang keuntungan dan kelemahan penyelesaian sengketa modern dan online.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode online dispute resolution : Negosiasi, mediasi &amp; Arbitrase)</li> <li>- Arbitrase Online</li> <li>- Penetapan klausula arbitrase online menurut UU No. 30/1999 &amp; Konvensi New York thn 1958</li> <li>- Hukum acara arbitrase online di Indonesia</li> <li>- Keuntungan Online dispute resolution (ODR)</li> <li>- kelemahan Online</li> </ul>	10 %
13-14	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan putusan arbitrase modern	Ketepatan menjelaskan Putusan modern	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')];	<b>eLearning dan platform media</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk putusan arbitrase online</li> <li>- Penegakan &amp; pelaksanaan arbitrase online</li> </ul>	10 %

	(Online) dan jenis-jenis Arbitrase Internasional [S9, KU9, KK1]	dan arbitrase online	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>lainnya</b> . -	- Putusan arbitrase Online - Contoh penyelesaian sengketa secara Online - Penetapan klausula arbitrase online menurut UU No. 30/1999 & Konvensi New York thn 1958 - Hukum acara arbitrase online di Indonesia - Keuntungan Online dispute resolution (ODR) - kelemahan Online - Singapore International Arbitration Centre - United Nations commission on International Trade law - Perbandingan Arbitrase Nasional dengan Arbitrase	
<b>15</b>	Sub-CPMK-7 mampu memahami menjelaskan tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia	Kejelasan dan pemahaman tentang putusan arbitrase asing di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Pelaksanaan putusan arbitrase Internasional menurut UU no. 30 Tahun 1999	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>	
	<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>	
<b>Perancangan Kontrak</b>	FA176260	Perdata	<b>T=2 P= 1</b>		Juli 2021	
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>			
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>				
	<b>CPL2 KETRAMPI LAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>				
	<b>CPL3 KETRAMPI LAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>3. Mampu menunjukan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
	<b>CPMK</b>	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan perancangan kontrak				
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu membandingkan pengertian kontrak dengan pengertian konsep hukum terkait, yaitu persetujuan, perjanjian, perikatan, kontrak bernama dan kontrak tidak bernama.</li> <li>b. Mampu menganalisis asas-asas hukum kontrak, terutama asas kebebasan berkontrak/asas otonomi pihak-pihak, asas perikatan kontrak/asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, asas konsensualisme dan asas personalitas.</li> </ol>					

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mampu menganalisis klausula eksonerasi/klausula eksemisi dan klausula memberatkan dalam kontrak konsumen (consumerscontracts) dan kontrak baku serta kaitannya dengan penagaturan terkait dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).</li> <li>d. Mampu membandingkan klausula operatif dalam isi kontrak nasional/kontrak domestik yang sederhana, seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, sewa guna usaha (leasing), dan jasa.</li> <li>e. Mampu menganalisis standar/tolok ukur dalam pembatalan kontrak, yang meliputi tidak terpenuhinya persyaratan subyektif atau obyektif, tidak beritikad baik, adanya penyalahgunaan keadaan (undue influence).</li> <li>f. Mampu membandingkan pengertian dan karakteristik antara kontrak internasional (international contracts) dan traktat/perjanjian internasional publik (treaties).</li> <li>g. Mampu menganalisis para pihak dalam suatu kontrak internasional.</li> <li>h. Mampu menganalisis hukum yang berlaku dalam kontrak internasional. uu. Mampu menjelaskan asas hukum kontrak internasional yang umum.</li> <li>i. Mampu menganalisis asas hukum kontrak internasional berdasarkan hukum transnasional (new lex mercatoria), terutama yang diatur Unidroit PICC dan mampu membandingkan pokok pengaturan kontrak dalam PICC dan hukum kontrak nasional Indonesia.</li> <li>j. Terampil dalam merancang kontrak internasional, dengan penekanan pada klausula operatif tertentu dalam kontrak patungan internasional (international joint venture contracts)</li> </ul>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini membahas tentang pengertian, sumber hukum kontrak, asas-asas hukum kontrak, jenis-jenis, prinsip-prinsip, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merancang kontrak, struktur dan anatomi kontrak, serta berakhirnya kontrak dan berakhirnya perikatan	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Hakikat perancangan kontrak</li> <li>3. Asas-asas hukum kontrak</li> <li>4. Asas kebebasan berkontrak para pihak dalam teori maupun praktek</li> <li>5. Kontrak konsumen dan kontrak baku</li> <li>6. Klausula-klausula kontrak dan Klausula opertaif</li> <li>7. Pembatalan kontrak</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Kontrak internasional dan traktak</li> <li>10. Para pihak kontrak internasional</li> <li>11. Hukum kontrak internasional</li> <li>12. Asas hukum kontrak internasional umum</li> <li>13. Asas hukum kontrak internasional berdasarkan hukum transnasional</li> <li>14. Langkah dan struktur kontrak internasional</li> <li>15. Perumusan klausula</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dahlan dan Sanusi Bintang. 2000. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Cet Ke-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.</li> <li>- Mariam Darus Badruzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis, Cet Ke-1, Bandung: Alumni.</li> <li>- _____, 2015, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhamammad Syarifuddin. 2012. Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung: Mandar Maju.</li> <li>- Sanusi Bintang. 2017. Perancangan Kontrak Internasional, Cet Ke-1, Banda Aceh: Gamna Publishing.</li> <li>- Satrio J., 1992. Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Cet. Ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.</li> <li>- Subekti, R. 1995. Aneka Perjanjian.Cet. Ke-10. Bandung: Citra Aditya Bakti.</li> <li>- _____.2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Penerbit PT Intermasa.</li> <li>- Yohannes Sogar Simamora, 2009, Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Laksbang Pressindo</li> </ul>						
	<b>Pendukung :</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> </ul>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>							
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan membandingkan antara pengertian kontrak dan pengertian persetujuan, perjanjian, perikatan, kontrak bernama dan kontrak tidak bernama. [S1, KU1]	Kejelasan, pemahaman dan penghayatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Pengertian Perikatan, Persetujuan, Perjanjian, dan Kontrak Klasifikasi Kontrake dalam Kontrak Bernama dan Kontrak Tidak Bernama	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Memahami secara teoretis	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100	a. Kuliah;	<b>eLearning dan</b>	ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK	15 %

	<p>asas-asas hukum kontraksaiian sengketa. asas kebebasan berkontrak/asas otonomi para pihak baik dalam teori maupun dalam praktik [S9, KU1, KU2, PP4]</p>	<p>tentang strategi penyelesaian</p>	<p>B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>b.Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60”)]</p>	<p><b>platform media lainnya</b> .</p>	<p>1. Asas Kebebasan Berkontrak/Asas Otonomi Para Pihak 2. Asas Perikatan Kontrak/Asas Pacta Sunt Servanda 3. Asas Itikad Baik 4. Asas Konsensualisme 5. Asas Personalitas ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 1. Teori 2. Praktik 3. Asas Kebebasan Berkontrak yang Bertanggung Jawab</p>	
4 - 5	<p>Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai pengaturan kontrak konsumen dan kontrak baku serta realitasnya dalam praktik. menganalisis klausula eksonerasi/klausula eksemisi dan klausula memberatkan dalam kontrak konsumen dan kontrak baku [S9, PP4]</p>	<p>Kejelasan dan pemahaman tentang arbitrase</p>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60”)]</p>	<p><b>eLearning dan platform media lainnya</b> .</p>	<p>KONTRAK KONSUMEN DAN KONTRAK BAKU 1. Kontrak Konsumen 2. Kontrak Bakuse KLAUSULA EKSONERASI/KLAUSULA EKSEMSI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM KONTRAK KONSUMEN DAN KONTRAK BAKU 1. Pengertian dan Pengaturan Klausula Eksonerasi/Klausula Eksemisi 2. Pengertian dan Pengaturan Klausula</p>	15 %

						Memberatkan	
<b>6 - 7</b>	Mampu memahami membandingkan klausula operatif dalam beberapa kontrak nasional/kontrak domestic yang sederhana. menganalisis standar/tolok ukur pembatalan kontrak [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang badan arbitrase dan pembatalannya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	PERBANDINGAN KLAUSULA OPERATIF KONTRAK 1. Jual Beli 2. Sewa Menyewa 3. Sewa Guna Usaha (Leasing) 4. Jasa PEMBATALAN KONTRAK 1. Tidak Terpenuhi Persyaratan Subyektif dan Obyektif 2. Tidak Beritikad Baik 3. Ada Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence)	10 %
<b>8</b>	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-5: Mampu memahami tentang karakteristik antara kontrak internasional dan Traktat. para pihak dalam kontrak internasional [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman mengenai jenis-jenis arbitrase modern di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK KONTRAK INTERNASIONAL 1. Pengertian a. Berdasarkan Unsur Asing (Nasionalitas dan teritorialitas) b. Berdasarkan Subyek/Para Pihak dalam Kontrak c. Berdasarkan Risiko 2. Perbedaan dengan Traktat 3. Karakteristik PARA PIHAK DALAM KONTRAK INTERNASIONAL	10 %

						<p>1. Swasta dan Swasta</p> <p>2. Swasta dan Negara/Daerah</p> <p>3. Negara/Daerah dan Negara/Daerah secara Terbatas</p>	
11 - 12	<p>Sub-CPMK-6: Memahami tentang hukum yang berlaku dalam kontrak internasional. menganalisis asas hukum kontrak internasional yang umum [S9, KU1, PP4]</p>	<p>Kejelasan dan pemahaman tentang keuntungan dan kelemahan penyelesaian sengketa modern dan online.</p>	<p>A = 86-100</p> <p>B = 71-85</p> <p>C = 56-70</p> <p>D = 41-55</p> <p>E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah;</p> <p>b. Diskusi [TM:1x(2x50'')];</p> <p>c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]</p>	<p><b>eLearning dan platform media lainnya</b></p>	<p>HUKUM YANG BERLAKU DALAM KONTRAK INTERNASIONAL</p> <p>1. Ketika Ada Pilihan Hukum (Choice of Law, Governing Law)</p> <p>2. Ketika Tidak Ada Pilihan Hukum</p> <p>ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL (UMUM)</p> <p>1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Ciontracts/Party Autonomy) dan Asas Turunannya</p> <p>a. Asas Pilihan Hukum</p> <p>b. Asas Pilihan Forum (Choice of Forum)</p> <p>c. Asas Pilihan Pengadilan (Choice of Court)</p> <p>d. Asas Pilihan Arbitrase (Choice of Arbitration)</p> <p>2. Asas Perikatan</p>	10 %

						<p>Kontrak (The Principle of Pacta Sunt Servanda)</p> <p>3. Asas yang Merangah pada Keseimbangan</p> <p>a. Asas Itikad Baik (The Principle of Good Faith and Fair Dealing)</p> <p>b. Asas Kewajaran dan Kepatutan (The Principle of Reasonableness and Fairness)</p> <p>c. Asas Sesuai Hati Nurani (The Principle of Unconsienability)</p> <p>d. Asas Proportionalitas (The Principle of Proportinality) .</p> <p>e.Asas Keseimbangan (The Principle of Equilibrium)</p>	
13-14	<p>Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan asas hukum kontrak internasional berdasarkan hukum transnasional (new lex mercatoria), terutama Unidroit PICC. menganalisis langkah dalam perancangan kontrak internasional dan struktur kontrak</p>	<p>Ketepatan menjelaskan Putusan modern dan arbitrase online</p>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60'')]</p>	<p><b>eLearning dan platform media lainnya</b></p> <p>.</p> <p>-</p>	<p>SAS HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL ( UNIDROIT PICC)</p> <p>1. Pengertian Hukum Transnasional (New Lex Mercatoria)</p> <p>2. Sejarah Hukum Transnasional</p> <p>3. Hukum Transnasional Unidroit PICC</p> <p>4. Asas Hukum Kontrak Internasional Unidroit PICC</p> <p>5. Perbandingan Asas Hukum Internasional</p>	10 %

	internasional [S9, KU9, KK1]					Unidroit PICC dan Hukum Kontrak Nasional Indonesia PENGENALAN PERANCANGAN KONTRAK INTERNASIONAL 1. Langkah dalam Perancangan Kontrak Internasional secara Umum 2. Struktur Kontrak Internasional Secara Umum	
15	Sub-CPMK-7 Mampu terampil dalam merumuskan klausula pada bagian operatif Kontrak internasional tertentu, terutama kontrak patungan internasional (international joint venture contracts)	Kejelasan dan pemahaman tentang putusan arbitrase asing di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	KLAUSULA OPERATIF KONTRAK INTERNASIONAL TERTENTU: KONTRAK USAHA PATUNGAN INTERNASIONAL 1. Contoh Klausula Baku Tertentu 2. Latihan Perancangan Klausula Kontrak Internasional Tertentu	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpn MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Perancangan Peraturan Perundang- Undangan</b>	FA176259	Peraturan Perundang- Undangan	<b>4</b>	II	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
					<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari mata kuliah perancangan peraturan perundang Undangan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui definisi ilmu pengetahuan perundang undangan serta dapat membuat naskah rancangan Undang undang atau peraturan daerah.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup perancangan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.</li> </ol>				



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam perancangan peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Ruang lingkup mata kuliah Perancangan Peraturan perundang Undangan membahas tentang ruang lingkup dan definisi Pengetahuan perundang dan penyusunan naskah Rancangan Undang Undang serta memahami penyusunan perautran daerah.
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah.</li> <li>2. Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan</li> <li>3. Norma Dalam Masyarakat</li> <li>4. Norma Hukum dalam Negara</li> <li>5. Sistem Norma Hukum Menurut UUD NRI 1945</li> <li>6. Hirarki Peraturan Perundang Undangan di negara Republik Indonesia</li> <li>7. Asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan</li> <li><b>8. Ujian tengah Semester</b></li> <li>9. Jenis, fungsi dan materi Muatan perundangan</li> <li>10. Materi Muatan Undang Undang dan Peraturan perundang undangan lainnya</li> <li>11. Teknik Penyusunan dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan</li> <li>12. Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Undang Undang</li> <li>13. Bentuk Rancangan Peraturan Perundang Undangan</li> <li>14. Lanjutan Bentuk Rancangan Peraturan perundang Undangan</li> <li><b>15. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perihal Undang Undang oleh Prof.DR Jimly Asshidiqie, SH</li> <li>2. Prinsip legal drafting dan desai naskah Akademik oleh Hestu Cipyo Handoyo</li> <li>3. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan oleh Dr. Ahmad Redi, SH,MH</li> <li>4. Ilmu perundang undangaan 1 oleh Maria Farida Indrati</li> <li>5. Ilmu Perundang Undangan 2 oleh Maria Farida Indrati</li> <li>6. Ilmu perundang Undangan oleh Dr. Putera Astono, SH,MH.</li> <li>7. Undang Undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan undang undang</li> <li>8. Undang Undng No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU no. 12/2011 tentang Peraturan perundang undangan.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Prof.Dr.Jimly Asshdiqie.SH. Perihal Undang Undang  Hestu Cipyo Handoyo. Prinsip legal drafting dan desai naskah Akademik  Dr. Ahmad Redi, SH,M. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan  Maria Farida Indrati. Ilmu perundang undangaan 1</p>

		Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang Undangan 2 Dr. Putera Astono, SH,MH. Ilmu perundang Undangan					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Perancangan Peraturan Perundang-Undangan					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami Pengertian dan definisi ilmu pengetahuan perundang undangan.	Ketepatan memahami Pengertian dan definisi ilmu pengetahuan perundang undangan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa di harap dapat mengetahui norma dan asas asas hukum	Ketepatan menjelaskan norma dan asas hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Norma dan Masyarakat	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan	Ketepatan mengetahui perbedaan norma hukum dan	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')];	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Norma Hukum dalam negara	2%

	norma hukum dan norma lainnya	norma lainnya	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM : (1+1)x(2x60'')]			
<b>7-8</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa bisa mengetahui sistem norma hukum RI menurut UUD RI 1945	Ketepatan menjelaskan dan mengetahui sistem norma hukum RI menurut UUD RI 1945	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Sistem Norma hukum menurut UUD RI 1945	2%
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan perundang undangan sebagai produk Hukum	Ketepatan dalam menjelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan perundang undangan sebagai produk Hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	hirarki Peraturan Perundang Undangan di negara Republik Indonesia	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat mengetahui asas asas pembentukan peraturan perundang undangan.	Ketepatan dalam mengenal asas asas pembentukan peraturan perundang undangan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Asas pembentukan peraturan perundang undangan	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						<b>30%</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat memahami jenis, fungsi dan materi peraturan perundang undangan	Ketepatan dalam memahami jenis, fungsi dan materi peraturan perundang undangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Jenis , fungsi dan materi peraturan Perundang undangan	2 %

16-17	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat mengetahui materi muatan undang undangan dan peraturan perundang undangan lain	Ketepatan mengetahui dan memahami materi muatan undang undangan dan peraturan perundang undangan lain	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Materi Muatan Undang Undang dan peraturan perundang undangan lain	2 %
13 – 15	Sub-CPMK-11: Mahasiswa di harapkan mengetahui dan memahami teknik penyusunan dan kerangka peraturan perundang undangan	Ketepatan mengetahui dan memahami teknik penyusunan dan kerangka peraturan perundang undangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b> -	Teknik Penyusunan dan kerangka peraturan perundang Undangan	2%
16-17	Sub-CPMK-12: Mahasiswa bisa mengetahui naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Undang undang	Ketepatan dalam mengetahui naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Undang undang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Undang undang	2%
18-19	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat mengetahui bentuk rancangan Peraturan perundang undangan	Ketepatan dalam mengetahui bentuk rancangan Peraturan perundang undangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Bentuk Rancangan Peraturan Perundang Undangan	2%
20-21	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat	Ketepatan dalam memahami bentuk	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'');	<b>eLearning dan platform</b>	Lanjutan Bentuk Rancangan Peraturan	2%

	mengetahui bentuk rancangan peraturan perundang undangan	rancangan peraturan perundang undangan	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>media lainnya</b>	perundang-Undangan	
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-15: Mahasiswa dapat mengerti dan mempraktekan pembuatan rancangan peraturan daerah ( 2 )	Ketepatan dalam mengerti dan mempraktekan pembuatan rancangan peraturan daerah ( 2 )	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Diskusi kelas / seminar	2%
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Perbandingan Hukum Perdata</b>	FA176370	Perdata	<b>T=2 P= 1</b>		Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>	

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>	
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>
	<b>CPL2 KETRAMPI LAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>
	<b>CPL3 KETRAMPI LAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>		
<b>CPMK</b>	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan keperdataan	
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>		
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Hakekat penyelesaian sengketa.</li> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Dasar hukum penyelesaian sengketa</li> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Strategi Penyelesaian sengketa.</li> </ol>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan</li> <li>e. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Pelaksanaan putusan Arbitrase</li> <li>f. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis pembatalan putusan Arbitrase</li> <li>g. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Badan Arbitrase Nasional di Indonesia Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase institusional di Indonesia</li> <li>h. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase Modern</li> <li>i. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis keuntungan &amp; kelemahan penyelesaian sengketa modern (Online Discussion)</li> <li>j. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis hukum acara arbitrase modern (Online)</li> <li>k. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia</li> <li>l. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis putusan arbitrase modern (Online)</li> <li>m. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase Internasional</li> </ul>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang membandingkan hukum perdata antara negara satu dengan negara lainnya.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Pengertian, objek kajian perbandingan hokum</li> <li>3. Fungsi,Tujuan dan manfaat perbandingan hukum</li> <li>4. Sumber-sumber dan sistematika perbandingan hukum perdata</li> <li>5. Pengertian, klasifikasi sistem hukum</li> <li>6. Proses, objek perbandingan hukum</li> <li>7. Pedoman, macam-macam metode perbandingan hukum</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. pengertian, macam-macam lembaga hukum perdata</li> <li>10. Adopsi</li> <li>11. Subjek hokum</li> <li>12. Badan hukum</li> <li>13. Catatan sipil</li> <li>14. Hukum Kontrak</li> <li>15. Hukum Kontrak (Lanjutan)</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ul>	
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014,Perbandingan Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo, Jakarta.</li> <li>- R. Soeroso, 2010, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>- Muderis, 1992, Adopsi (Suatu Tinjauan ari Tiga Sistem Hukum),Sinar Grafika, Jakarta.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soerjono Soekanto, 1979, Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung.</li> <li>- R. Subekti, 1988, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.</li> <li>- Michael Bogdan, 2010, Pengantar Perbandingan Hukum, diterjemahkan oleh Dirda Sri Widowatie, Media Nusa, Bandung.</li> <li>- Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.</li> <li>- Djaja S. Meliala. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Nuansa Aulia. Bandung. 2012.</li> <li>- Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktek Hukum Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Mandar Maju. Bandung. 2012.</li> <li>- Salim H.S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika. 2014.</li> <li>- Salim H.S. Hukum Kontrak (Teori &amp; Teknik Penyusunan Kontrak) Sinar Grafika. Jakarta. 2006..</li> <li>- Salim H.S &amp; Erlis Septina Nurbani. Perbandingan Hukum Perdata. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.</li> <li>- Titik Triwulan Tutik. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Kencana. Jakarta. 201</li> </ul>							
<b>Pendukung :</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> <li>- UU No 30 Tahun 1999</li> </ul>							
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>							
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan secara teoretis	Kejelasan, pemahaman perbandingan hukum	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")];	<b>eLearning dan platform media</b>	Pengertian Perbandingan Hukum	20 %



	pengertian, objek kajian, fungsi, tujuan, manfaat perbandingan hukum. [S9, KU1, KU2]		C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>lainnya</b> .	Objek Kajian Perbandingan Hukum Perdata 3. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Mempelajari Perbandingan Hukum Perdata	
<b>2-3</b>	Sub-CPMK-2: Memahami secara teoretis sumber-sumber dan sistematika perbandingan hukum perdata.  mampu menjelaskan pengertian, klasifikasi sistem hukum [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang sistematika perbandingan hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Sumber-sumber Hukum Perbandingan Hukum Perdata 2. Sistematika perbandingan Hukum Perdata  Pengertian Sistem Hukum 2. Kriteria dan Pengklasifikasian Sistem Hukum 3. Klasifikasi Sistem Hukum Di Dunia Sistem Hukum <i>Civil Law</i> Sistem Hukum <i>Common Law</i> Sistem Hukum Sosial	15 %
<b>4 - 5</b>	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai proses, objek, pedoman, macam-macam metode perbandingan hukum dan pengertian, macam-macam lembaga	Kejelasan dan pemahaman objek dan lembaga hukum perdata	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	- 1. - Proses Perbandingan Hukum Perdata - 2. - Objek Perbandingan Hukum Perdata - 3. - Dasar dan Pedoman Pokok Proses Perbandingan	15 %

	<p>hukumperdata [S9, PP4]</p>					<p>anHukum Perdata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4. Macam-macam metode Perbandingan Hukum</li> <li>- 1. Pengertian Lembaga Hukum Perdata</li> <li>- 2. Macam-macam Lembaga hukum Perdata</li> <li>- 3. Membandingkan lembaga hukum perdata</li> </ul>	
6 - 7	<p>Mampu memahami tentang adopsi dan subjek hukum [S9, KU1, PP4]</p>	<p>Kejelasan dan pemahaman tentang adopsi</p>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]</p>	<p><b>eLearning dan platform media lainnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Pengertian Adopsi</li> <li>- 2. Ruang lingkup Adopsi</li> <li>- 3. Adopsi dalam hukum barat</li> <li>- 4. Adopsi dalam hukum Adat</li> <li>- 5. Adopsi dalam hukum Islam</li> <li>- 6. Adopsi dalam hukum positif di Indonesia</li> </ul>	10 %	


						<p>Manusia SebagaiSubjek Hukum</p> <p>2. PengecualianS ebagai SubjekHukum</p> <p>3. Ketidakwenan ganSubjek Hukum</p> <p>4. Ketidakcakapa nSubjek Hukum</p>	
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
<b>9 - 10</b>	<p>Sub-CPMK-5: Mampu memahami tentang badan hokum dan catatan sipil [S9, KU1, PP4]</p>	<p>Kejelasan dan pemahama n mengenai badan hokum dan catatan sipil</p>	<p>A = 86-100</p> <p>B = 71-85</p> <p>C = 56-70</p> <p>D = 41-55</p> <p>E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah;</p> <p>b.Diskusi [TM:1x(2x50”)];</p> <p>c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]</p>	<p><b>eLearn ing dan platfor m media lainnya</b></p>	<p>Syarat-syaratBadan Hukum</p> <p>2. Dasar-dasarHukum SebagaiBada n Hukum</p> <p>3. Macam-macamBadan Hukum</p> <p>4. Teori BadanHuku m</p> <p>PengertianCatatan Sipil</p> <p>Tujuan lembagaCatatan Sipil</p> <p>Fungsi lembagaCatatan Sipil</p> <p>Macam CatatanSipil</p> <p>Sejarah danperkembangannya</p>	10 %

						Catatan Sipildalam berbagaisistem hukum	
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6: memahami tentang domisili [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang domisili.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Istilah dan Pengertian domisili Sejarah domisili Domisiliberda sarkanhukum diberbagai Negara Domisiliberda sarkansistem hukum diIndonesia	10 %
<b>13-14</b>	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan perkawinan [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan Perkawinan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .  -	Perkawinanme nurut hukumIslam 2. Perkawinanme nurut BW 3. Perkawinanme nurut HukumAdat 4. Perkawinanme nurut UU No.1Tahun 1971	10 %
<b>15</b>	Sub-CPMK-7 mampu memahami menjelaskan tentang hukumkon trak dansyarat sah danberakh	Kejelasan dan pemahaman tentang hukum kontrak	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pengertian danKlasifikasi KontrakMenurut Hukum: Hukum KontrakAmerika Hukum KontrakInggris Hukum KontrakRusia	10%

	irnyakontr ak.					Hukum KontrakIndonesia 2. Perbedaaan danPersamaan tentangsyarat – syarat sahkontrak 3. Perbedaan danPersamaan tentangberakhirnya kontrak	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Perbandingan Konstitusi</b>	<b>FA1763105</b>	<b>HTN</b>	<b>T=2 P= 1</b>	<b>VIII</b>	<b>Juli 2021</b>
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
					<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban.			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar konstitusi dan hukum konstitusi dengan benar. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang eksistensi konstitusi dan hukum konstitusi dalam konstelasi ketatanegaraan modern dengan baik.			
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu menjelaskan pengertian dan istilah konstitusi. b. Mampu menjelaskan sejarah dan perjalanan, serta kedudukan dan tujuan konstitusi. c. Mampu menjelaskan jenis dan bentuk konstitusi. d. Mampu menjelaskan macam ragam dan bentuk Konstitusi yang terdapat di negara-negara lain. e. Mampu mengenali dan menjelaskan gambaran dan fungsi konstitusi, serta identifikasi konsep konstitusi. f. Mampu melihat dan menginterpretasikan hukum dan konstitusi dan mengenal permasalahan konstitusi. g. Mampu memahami peranan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan modern. h. Mampu mengidentifikasi konsep perbandingan konstitusi, dan mampu membedakan sifat konstitusi.				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Perbandingan Konstitusi merupakan materi dasar mengenai perihal konstelasi konstitusi sebagai " <i>rule of game</i> " dasar pedoman berjalannya sebuah negara dan pemerintahan. Konstitusi sebagai kristalisasi nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum sebuah bangsa menjadi sebuah keniscayaan dalam mendalami kajian kenegaraan. Bahasan Materi meliputi, pengertian dasar, faham, dan doktrin konstitusi, cita hukum, teori, klasifikasi, materi muatan, serta eksistensi konstitusi dalam sebuah negara.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Belajar 2. Pengertian dan definisi Konstitusi 3. Sifat Norma Konstitusi. 4. Sejarah Konstitusi Indonesia dan supremasi konstitusi 5. Kedudukan dan Tujuan Konstitusi. 6. Klasifikasi, bentuk Konstitusi 7. Urgensi Konstitusi dalam negara. <b>8. Ujian Tengah Semester</b> 9. Perbandingan Konstitusi. 10. Konsep identitas konstitusi, Interpretasi 11. Metode penemuan hukum Konstitusi. 12. Problematika Hukum Konstitusi dalam praktek ketatanegaraan modern. 13. Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan modern. 14. Konsep perbandingan Konstitusi, dan Konstitusi di negara-negara lain. 15. Konsep perbandingan Konstitusi, dan Konstitusi di negara-negara lain (Lanjutan) <b>16. Ujian Akhir Semester</b>				
<b>Pustaka</b>	<b>Daftar Referensi:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi RI 2006, Jakarta.</li> <li>- Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.</li> <li>- Firman Freddy Busroh dan Fitriah Khairo, Memahami ukum Konstitusi Indonesia, Raja Grafindo Persada, 2018, Jakarta.</li> </ul>				
	<b>Pendukung :</b>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Mata kuliah syarat</b>	Perbandingan Konstitusi				

Min gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami arah dan tujuan pembelajaran mata kuliah serta memahami istilah dan pengertian Konstitusi	a. Ketepatan memahami program pembelajaran mata kuliah; b. Ketepatan menjelaskan pengertian dan istilah konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: dapat mengetahui dan memahami sejarah dan perkembangan konstitusi Indonesia, memahami dan menggambarkan kedudukan dan tujuan konstitusi dalam perjalanan negara.	Ketepatan menjelaskan sejarah dan perjalanan, serta kedudukan dan tujuan konstitusi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Sejarah Konstitusi Indonesia dan supremasi Konstitusi Kedudukan dan Tujuan Konstitusi	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu memahami dan Menggambarkan bentuk dan klasifikasi konstitusi, dan mengenali pentingnya konstitusi bagi negara.	Ketepatan menjelaskan kekhususan bentuk dan klasifikasi, dan pentingnya konstitusi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Klasifikasi dan Bentuk konstitusi. b. Urgensi Konstitusi dalam bernegara	15 %
6 - 7	Mampu menjelaskan kekhususan perbandingan dan jenis-jenis konstitusi, membedakan dan mengenali ragam konstitusi	Ketepatan menjelaskan kekhususan jenis dan bentuk konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Perbandingan Konstitusi dari jenis dan sifatnya. b. Macam ragam dan bentuk Konstitusi yang terdapat di negara-negara lain	10 %
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan kekhususan gambaran fungsi konstitusi bagi sebuah negara. mengidentifikasi dan memahami konsep konstitusi.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang gambaran dan fungsi konstitusi, serta identifikasi konsep konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Konstitusi sebagai dasar dan rel berjalannya Negara b. Konsep identitas konstitusi.	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan kekhususan pola menginterpretasi kan hukum dan konstitusi dan mengenal permasalahan konstitusi dalam praktek kenegaraan.	Ketepatan menjelaskan kekhususan interpretasi hukum dan konstitusi dan mengenal permasalahan konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Interpretasi dan metode penemuan Hukum Konstitusi b. Problematika Hukum Konstitusi dalam praktek ketatanegaraan modern	10 %
	Sub-CPMK-7: Mampu	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:	e-Learning dan	a. Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan	20 %

13 - 15	menjelaskan kekhususan lembaga Mahkamah Konstitusi. konsep konstitusi dan perbandingannya, dan perbedaan sifat konstitusi.	kekhususan lembaga, konsep, dan perbandingan, serta perbedaan sifat konstitusi.	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	1x(2x50"); c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	platform media lainnya. -	modern. b. Konsep perbandingan konstitusi c. Konstitusi dinegara lain.	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Perlindungan Konsumen</b>	FA176395	Perdata	<b>T=2 P= 1</b>		Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMPI LAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMPI LAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan hukum perlindungan konsumen			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
	<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa memahami tentang pengertian tentang konsep istilah- istilah hukum dalam hukum perlindungan konsumen.</li> <li>Mahasiswa memahami tentang sejarah munculnya hukum perlindungan konsumen.</li> <li>Mahasiswa memahami tentang prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen.</li> <li>Mahasiswa memahami tentang hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha.</li> </ol>			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mahasiswa memahami tentang isu-isu yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen.</li> <li>f. Mahasiswa memahami tentang perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia.</li> <li>g. Mahasiswa memahami tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam hukum perlindungan konsumen.</li> <li>h. Mahasiswa memahami tentang upaya penyelesaian sengketa konsumen.</li> <li>i. Mahasiswa memahami ketentuan tentang sanksi dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</li> <li>j. Mahasiswa memahami tentang perlindungan konsumen dalam e-commerce</li> </ul>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah munculnya hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip pertanggungjawaban, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen, ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum perlindungan konsumen, dan kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan konsumen.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Pengertian tentang konsep istilah-istilah hukum dalam hukum perlindungan konsumen</li> <li>3. Sejarah munculnya hukum perlindungan konsumen</li> <li>4. Sejarah munculnya hukum perlindungan konsumen (Lanjutan)</li> <li>5. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen</li> <li>6. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha</li> <li>7. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha (Lanjutan)</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Isu-isu yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen</li> <li>10. Isu-isu yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen (Lanjutan)</li> <li>11. Perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia</li> <li>12. Lembaga-lembaga yang berperan dalam hukum perlindungan konsumen</li> <li>13. Upaya penyelesaian sengketa konsumen</li> <li>14. Ketentuan tentang sanksi dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</li> <li>15. Perlindungan konsumen dalam e-commerce</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.</li> <li>- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.</li> <li>- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.</li> <li>- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendekia, Jakarta.</li> <li>- Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.</li> <li>- Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Grasindo, Jakarta.</li> <li>- Yusuf Shofie, 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK : Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.</li> <li>- Yusuf Shofie, 2008, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung</li> <li>- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.</li> </ul>	

		- CST. Kansil, 1999, Pengantar Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Bandung.					
		<b>Pendukung :</b>					
		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Mata kuliah syarat</b>		Hukum Perdata					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan secara teoretis tentang pengertian konsep istilah-istilah hukum dalam hukum perlindungan konsumen [S9, KU1, KU2]	Kejelasan, pemahaman dan penghayatan pengertian dan istilah dalam perlindungan konsumen	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Pengertian tentang konsep istilah-istilah hukum dalam hukum perlindungan konsumen - Pengertian Konsumen - Pengertian Pelaku Usaha - Pengertian Perlindungan Hukum - Pengertian Perlindungan Konsumen - Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Memahami secara teoretis sejarah munculnya hukum perlindungan konsumen [S9,	Kejelasan dan pemahaman tentang sejarah perlindungan konsumen	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	- Sejarah gerakan perlindungan konsumen di AS - Sejarah gerakan konsumen di Indonesia	15 %

	KU1, KU2, PP4]		E = 0 – 40				
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai tentang prinsip-prinsip pertanggungjawaan dalam hukum perlindungan konsumen [S9, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang prinsip dan pertanggung jawaban perlindungan konsumen	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	-Prinsip-prinsip yang terkait dengan kedudukan konsumen -Prinsip-prinsip pertanggungjawa bandalam Hukum perlindungan Konsumen -Prinsip Tanggung Jawab produk dan Tanggung Jawab Profesional	15 %
6 - 7	Mampu memahami Tentang issu-issu yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen dan Tentang perlindungan konsumen dalam hukum positif diIndonesia [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang isu-isu perlindungan konsumen	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	- Periklanan - Keamanan Pangan - Perjanjian Standar - Layanan Purna Jual - Pelanggaran Hakatas Kekayaan Intelektual (HKI) - Pelayanan Kesehatan  Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Administrasi Ne	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / UjianTengah Semester						
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu memahami	Kejelasan dan	A = 86-100	a. Kuliah;	<b>eLearning dan platform</b>		10 %

	<p>tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam hukum perlindungan konsumen</p> <p>[S9, KU1, PP4]</p>	<p>pemahaman mengenai lembaga yang berperan</p>	<p>B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60'')]</p>	<p>m media lainnya .</p>	<p>Pemerintah 2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 5. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 6. Perguruan Tinggi (PT)</p>	
11 - 12	<p>Sub-CPMK-6: memahami tentang upaya penyelesaian sengketa konsumen [S9, KU1, PP4]</p>	<p>Kejelasan dan pemahaman tentang penyelesaian sengketa</p>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60'')]</p>	<p>eLearning dan platform media lainnya .</p>	<p>- Penyelesaian sengketa Konsumen Non Litigasi - 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui jalur Litigasi</p>	10 %
13-14	<p>Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan tentang sanksi dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [S9, KU9, KK1]</p>	<p>Ketepatan menjelaskan Sanksi sesuai undang-undang</p>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60'')]</p>	<p>eLearning dan platform media lainnya .</p>	<p>- - Sanksi Perdata - Sanksi Administratif - Sanksi Pidana - Hukum Tambahan</p>	10 %

15	Sub-CPMK-7 mampu memahami menjelaskan tentang perlindungan konsumen dalam E-Commerce	Kejelasan dan pemahaman tentang perlindungan konsumen dalam E-Commerce	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Pengertian E-Commerce 2. Ruang Lingkup dan Pengaturan E-Commerce 3. Mekanisme Transaksi melalui E-Commerce 4. Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi E-Commerce.	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpn MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Praktek Peradilan Tata Usaha Negara</b>	FA176257	Praktek Peradilan Tata Usaha Negara	<b>2</b>	VI	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mahasiswa memiliki Kemampuan dan Keunggulan dalam praktek di Pengadilan tata Usaha Negara			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup Praktek Peradilan Tata Usaha Negara 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.				



		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam Praktek Peradilan Tata Usaha Negara.</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Menyusun Bagaimanakah Proses Gugatan di Lakukan di pengadilan tata Usaha Negara				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah.</li> <li>2. Menyusun Surat Kuasa Khusus Penggugat.</li> <li>3. Menyusun Surat Kuasa khusus tergugat</li> <li>4. Menyusun surat Kuasa Limpahan Sebagian perkara</li> <li>5. Menyusun Surat Kuasa Limpahan seluruhnya</li> <li>6. Menyusun gugatan</li> <li>7. Mencabut surat Gugatan</li> <li><b>8. Ujian tengah semester</b></li> <li>9. Menyusun Jawaban</li> <li>10. Menyusun replik</li> <li>11. Menyusun Duplik</li> <li>12. Menyusun bukti bukti</li> <li>13. Menyusun kesimpulan terakhir</li> <li>14. Menyusun Surat Kuasa banding</li> <li>15. Menyusun surat kuasa Kasasi</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>				
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. Undang Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara</li> <li>2. UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.5 tahun 2009 tentang UU no 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara</li> </ol>				
	<b>Pendukung :</b> Undang Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.5 tahun 2009 tentang UU no 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Praktek Peradilan Tata Usaha Negara				
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>

	tahap belajar)			[ Estimasi Waktu]			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami cara menyusun surat kuasa khusus penggugat .	Ketepatan memahami cara menyusun surat kuasa khusus penggugat	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menyusun Surat Kuasa Khusus Penggugat.	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa di harap dapat mengetahui dan memahami cara menyusun surat kuasa tergugat	Ketepatan menjelaskan dan memahami ruang lingkup hukum acara tata usaha negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menyusun surat kuasa Tergugat	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui cara menyusun surat kuasa limpahan sebagian perkara	Ketepatan mengetahui cara menyusun surat kuasa limpahan sebagian perkara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menyusun Surat Kuasa Limpahan Sebagian Perkara	2%
7-8	Sub-CPMK-5:	Ketepatan memahami	A = 86-100	a. Kuliah;	<b>eLearning dan</b>	Menyusun surat kuasa	2%

	Mahasiswa bisa mengetahui cara menyusun surat kuasa limpahan seluruhnya	cara menyusun surat kuasa limpahan seluruhnya	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>platform media lainnya</b>	limpahan seluruhnya	
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat menyusun gugatan	Ketepatan dalam menyusun gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menyusun gugatan	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat memahami dan mempraktekan cara mencabut surat gugatan	Ketepatan dalam memahami dan mempraktekan cara mencabut surat gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Mencabut surat gugatan	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						<b>30%</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara menyusun jawaban	Ketepatan dalam memahami cara menyusun jawaban	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menyusun jawaban	2%
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara menyusun replik	Ketepatan mengetahui dan memahami cara menyusun replik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menyusun replik	2 %

<b>13 – 15</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa di harapkan mengetahui dan memahami tahapan menyusun duplik	Ketepatan mengetahui dan memahami tahapan menyusun duplik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	Menyusun duplik	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa bisa mengetahui cara menyusun bukti	Ketepatan dalam mengetahui cara menyusun bukti	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menyusun bukti bukti	2%
<b>18-19</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat menyusun kesimpulan akhir	Ketepatan dalam menyusun kesimpulan akhir	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menyusun kesimpulan akhir	2%
<b>20-21</b>	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami cara menyusun surat kuasa banding	Ketepatan dalam memahami cara menyusun surat kuasa banding	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menyusun surat kuasa Banding	2%
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-15: Mahasiswa dapat memahami dan menguasai cara menyusun surat kuasa kasasi	Ketepatan dalam memahami dan menguasai cara menyusun surat kuasa kasasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menyusun surat kuasa kasasi	2%

	surat kuasa kasasi		E = 0 – 40				
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN  
PANCASAKTI UNIVERSITAS  
PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS  
HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Sosiologi Hukum	FA176264	HTN	T=2 P= 1	VI	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari dan lulus mata kuliah ini mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah sosial, menganalisis, mendeskripsikan dan memberikan penjelasan, dan mampu mengetahui dan memahami perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan di masyarakat terhadap hukum			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu memahami, dan perlunya mempelajari Sosiologi Hukum.</li> <li>Mampu memahami makna dan definisi Sosiologi Hukum dalam kehidupan menggambarkan hubungan antar Individu di Masyarakat.</li> </ol>				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mampu menganalisa Norma Sosial dalam Pengertian Interaksi Sosial, Proses dan Kegiatan Sosial.</li> <li>d. Mampu menggambarkan kedudukan, posisi, dan fungsi Sosiologi Hukum dalam Tata Hukum.</li> <li>e. Mampu mengidentifikasi aspek Stratifikasi Sosial, dan Pengaruh Stratifikasi Sosial.</li> <li>f. Mampu menguraikan dan menterjemahkan tanda-tanda dan terjadinya perubahan sosial.</li> <li>g. Mampu mengkaji kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai kebudayaan hukum, dan perkembangan hukum, dan perubahan sosial.</li> <li>h. Mampu mengelola, menerapkan pengaruh sosial terhadap hukum, hidup dan berkembangnya budaya hukum,</li> </ul>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib institusional dalam rangka memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai ilmu hukum yang bersifat empiri, disamping ilmu hukum yang normatif. Materi ini mempelajari istilah dan pengertian sosiologi hukum, arti pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat, hubungan masyarakat dengan hukum, konsep sosiologis dari sosiologi, konsep yuridis dari ilmu hukum, beberapa pemikiran filsafat yang relevan dengan sosiologi hukum, penerapan dan penegakan hukum, perubahan hukum, dan permasalahan hukum dalam masyarakat.</p>	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Pengantar Mata Kuliah, memahami isi materi mata kuliah dan penjabaran mata kuliah.</li> <li>3. Pengertian dan Definisi Sosiologi Hukum</li> <li>4. Hubungan Individu dan Masyarakat.</li> <li>5. Norma Sosial dan Pengertian Interaksi Sosial</li> <li>6. Macam-macam Proses Sosial.</li> <li>7. Pengertian Sosiologi Hukum secara umum,</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Fungsi Sosiologi Hukum</li> <li>10. Stratifikasi Sosial dan Kontrol Sosial</li> <li>11. Pengaruh Stratifikasi Sosial dalam bidang Hukum.</li> <li>12. Perubahan Sosial, dan Faktor-faktor terjadinya Perubahan Sosial.</li> <li>13. Kebudayaan Hukum</li> <li>14. Pandangan Sosiologi Hukum terhadap masalah Sosial</li> <li>15. Pengaruh Masalah Sosial terhadap Hukum</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stephen K. Sanderson, <i>Makro Sosiologi sebuah pendekatan terhadap realitas sosial</i>, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.</li> <li>- Soeryono Soekanto, <i>Sosiologi Suatu Pengantar</i>, Edisi Keempat, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1990.</li> </ul> <p><b>Pendukung :</b></p>	
<b>Dosen Pengampu</b>		


Mata kuliah syarat		Sosiologi Hukum.					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mampu memahami perlunya mempelajari Sosiologi Hukum	Ketepatan dalam menjelaskan tentang perlunya Sosiologi hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Kontrak Kuliah dan pengantar belajar semester.	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan kekhususan Sosiologi Hukum dalam kehidupan menggambarkan hubungan antar Individu di Masyarakat.	Ketepatan menjelaskan Kekhususan definisi Sosiologi Hukum dalam kehidupan hukum, dan memahami hubungan antar individu pada masyarakat.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian dan Definisi Sosiologi Hukum Hubungan Individu dan Masyarakat.	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelaskan Kekhususan Norma Sosial dalam Pengertian Interaksi Sosial, Proses dan Kegiatan Sosial.	Ketepatan menjelaskan kekhususan Norma sosial dalam interaksi sosial, proses, dan kegiatan sosial.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Norma Sosial dan Pengertian Interaksi Sosial. Macam dan ragam Proses Sosial.	15 %



6 - 7	Sub-CPMK-4 Mampu menjelaskan  Kekhususan Posisi, dan fungsi  Sosiologi Hukum dalam Tata Hukum	Ketepatan menjelaskan kekhususan  posisi dan fungsi sosiologi  hukum dalam tata hukum nasional.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian Sosiologi Hukum dalam Tata Hukum Fungsi Sosiologi Hukum dalam Tata Hukum.	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan Kekhususan aspek Stratifikasi Sosial. Pengaruh Stratifikasi Sosial.	Ketepatan menjelaskan kekhususan aspek dan pengaruh stratifikasi sosial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Stratifikasi Sosial dan Kontrol Sosial Pengaruh Stratifikasi Sosial dalam bidang hukum.	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan Kekhususan tanda-tanda Perubahan Sosial dan faktor terjadinya perubahan sosial.	Ketepatan menjelaskan kekhususan mengenai tanda-tanda dan terjadinya perubahan sosial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Gejala perubahan sosial Faktor-faktor terjadinya Perubahan Sosial.	10 %
13 - 15	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan Kekhususan kebudayaan hukum, dan perkembangan hukum, dan perubahan sosial, serta pengaruh sosial terhadap hukum, hidup dan berkembangnya budaya hukum,	Ketepatan menjelaskan kekhususan hidup dan berkembangnya budaya hukum,	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Budaya hukum Pandangan Sosiologi Hukum terhadap Masalah Sosial, Pengaruh Masalah Sosial terhadap Hukum.	20 %

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KOD E</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMEST ER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Hukum Pidana Khusus	FA176243	Pidana	T=2 P=1	IV	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mampu membedakan nilai-nilai yang melandasi pada setiap model sistem peradilan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan tujuan dan manfaat sistem peradilan pidana, substansi hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana, mahasiswa pidana, Mahasiswa mampu berargumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.			
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					


	Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus.</li> <li>2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.</li> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum pidana khusus.</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang ketentuannya diatur diluar KUHP, yakni diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri. Pidana-pidana khusus tersebut memiliki beberapa kaidah hukum formil yang berbeda dari tindak pidana umum.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Dasar-dasar hukum pidana khusus: definisi dan ruang lingkup.</li> <li>3. Alat bukti yang khas digunakan dalam hukum pidana khusus.</li> <li>4. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: perkembangan peraturan di Indonesia.</li> <li>5. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi : pembuktian terbalik yang terbatas.</li> <li>6. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi : posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus-kasus korupsi.</li> <li>7. Pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang: sistem pembuktian menurut UU 8/2010.</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup.</li> <li>10. Pembahasan mengenai tindak pidana ITE: alat bukti khas yang hanya diatur dalam UU 11/2008.</li> <li>11. Pembahasan mengenai tindak pidana narkoba dan psikotropika: definisi dan ketentuan khusus.</li> <li>12. Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus.</li> <li><b>13. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, <i>Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen &amp; Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)</i>, Bandung, Widya Padjadjaran.</li> <li>- H. Edi Setiadi, 2017, <i>Sistem Peadilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</i>,</li> <li>- Prenadamedia Grup, Jakarta</li> <li>- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, 2016 <i>Sistem Peradilan Pidana di Indonesia</i>, Sinar Grafika, Jakarta Marlina, 2009, <i>Peradilan Pidana Anak di Indonesia</i>, Refika Aditama, Bandung.</li> <li>- Romli Atmasasmita, 2010, <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer</i>, Kencana Prenadamedia, Jakarta R. Wiyono, 2016, <i>Sistem Peradilan Piddana Anak</i>, Sinar Grafika, Jakarta</li> <li>- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kejaksanaan Undang-Undang</li> </ul>	

		<p>Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan</p> <p>- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</p>					
		<p><b>Pendukung :</b></p> <p>Abdul Hakim. 1986. KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan. Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung.</p>					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Hukum Pidana, Hukum Pidana Lanjut					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus dan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. [S9, KU1, KU2]	a. Ketepatan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus; b. Ketepatan menjelaskan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Pengertian, tempat, sifat dan pembagian hkm pidana 2. Fungsi, tujuan dan sumber hkm pidana	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. [S9, KU1, KU2, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	Perkembangan peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia; tindak pidana korupsi; pembuktian terbalik yang terbatas.	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang. [S9, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	a. Sistem pembuktian menurut UU No.8 Tahun 2010 b. Alat bukti menurut UU No. 8 Tahun 2010	15 %
6 - 7	mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisi tindak pidana ekonomi; ruang lingkup tindak pidana ekonomi; badan hukum sebagai pelaku tindak pidana ekonomi; serta pidana yang dapat dikenakan.	10 %
<b>8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>							
9 - 10	Sub-CPMK-5:	Ketepatan	A = 86-100	a. Kuliah;	eLearnin	Konsep dasar informasi	10 %

	mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik [S9, KU1, PP4]	menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[T M:1x(2x50” )]; c.[PT+BM:( 1 +1)x(2x60” )]	g dan platform media lainnya.	dan transaksi elektronik, dan kekhususan tindak pidananya.	
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6:  mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika dan psikotropika. [S9, KU1, PP4]	a.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika;  b.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana psikotropika.	A = 86-100  B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah;  b.Diskusi[T M:1x(2x50” )]; c.[PT+BM:( 1 +1)x(2x60” )]	eLearnin  g dan platform media lainnya.	Definisi narkotika; kekhususan tindak pidana psikotropika.narkotika; definisi psikotropika; kekhususan	<b>10 %</b>
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>	
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Hukum Acara Pidana		Pidana	T=2 P=1	IV	Juli 2021	
OTORISASI	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>		
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>				
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>				
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
	CPMK	Mampu membedakan nilai-nilai yang melandasi pada setiap model sistem peradilan Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan tujuan dan manfaat sistem peradilan pidana, substansi hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana, mahasiswa pidana, Mahasiswa mampu berargumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.				
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus.</li> <li>Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.</li> <li>Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum pidana khusus.</li> <li>Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>					

<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini pada dasarnya merupakan mata kuliah Wajib Program Studi Ilmu Hukum, mahasiswa diperkenalkan mengenai pengetahuan teoritis dan praktis yang berhubungan dengan masalah penerapan dan perkembangan di Indonesia masa yang akan datang. hukum pidana formil (hukum acara pidana) . Materi perkuliahan terdiri dari 6 ( enam) pokok bahasan meliputi: pengantar, tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap pra penuntutan dan penuntutan, tahap pra peradilan, tahap persidangan dan upaya hukum. Pada setiap pertemuan/presentasi, didahului dengan kuliah pendek dosen sebagai pengantar serta memberikan contoh-contoh yang up to date, presentasi mahasiswa, dan diakhiri dengan penyampaian ikhtisar oleh dosen, sehingga mahasiswa mendapatkan benang merah dari materi yang disampaikan. Dalam mata kuliah ini penyampaian materi perkuliahan dilakukan dalam minggu ( 1-7) dan sesudah Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan presentasi bahan kuliah ( 9-14) masing-masing mahasiswa wajib memuat bahan presentasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang sudah diberikan.
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana</li> <li>3. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana (Lanjutan)</li> <li>4. Subjek dan Objek Hukum Acara Pidana</li> <li>5. Subjek dan Objek Hukum Acara Pidana (Lanjutan)</li> <li>6. Sumber Hukum Acara Pidana</li> <li>7. Sumber Hukum Acara Pidana (Lanjutan)</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Asas-Asas hukum Acara Pidana</li> <li>10. Asas-Asas hukum Acara Pidana (Lanjutan)</li> <li>11. Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana</li> <li>12. Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana (Lanjutan)</li> <li><b>13. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>
<b>Daftar Riferensi :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta</li> <li>- Andi Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta</li> <li>- Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta</li> <li>- Barda Nawawi Arief, 1982, Masalah Pidana dan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan</li> <li>- Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern, Bina Cipta, Bandung</li> <li>- Chidir Ali, 1987, Badan Hukum, Alumni, Bandung</li> <li>- E. Utrecht, 1960, Hukum Pidana I, Universitas Pajajaran, Bandung</li> <li>- EY, Kanter, SR. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Sinar Grafika, Jakarta</li> <li>- Mardjono Reksodiputro, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.</li> <li>- -----, 1989, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang</li> <li>- 10- &amp; Andi Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta</li> <li>- Moelyatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta</li> <li>- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Pidana dan Pemidanaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.</li> <li>- PAF Lamintang, 1984, Hukum Penitensir Indonesia, Armico, Bandung</li> <li>- R. Soesilo, 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor</li> <li>- Rancangan KUHP Direktorat Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI</li> <li>- Roeslan Saleh, 1984, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, BPHN, Jakarta</li> <li>- Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Terkemuka, Bagian I dan II, Balai Lektor Mahasiswa</li> <li>- Sudarto, 1976, Suatu Dilema dalam Perubahan Sistem Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</li> <li>- -, 1987, Hukum Pidana, Alumni, Bandung.</li> <li>- Suharto RM, 1987, Hukum Pidana I, Semarang</li> </ul> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Abdul Hakim. 1986. KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan. Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung.</p>
<b>Dosen</b>	



Pengampu							
Matakuliah syarat		Hukum Pidana					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-2	Sub-CPMK-1:  Memahami definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus dan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. [S9, KU1, KU2]	Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, pengertian, jenis delik serta cara / tehnik merumuskan norma dalam KUHP	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Pengertian, tempat, sifat dan pembagian hkm pidana 2. Fungsi, tujuan dan sumber hkm pidana  Referensi: 1,2,3,6,7	20 %
3,4,5	Sub-CPMK-2:  Mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. [S9, KU1, KU2, PP4]	Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan delik-delik yang ditunjukkan kepada orang. Mampu menganalisa unsur-unsur dari delik-delik yang ditunjukkan kepada orang serta menganalisa kasus delik yang ditunjukkan kepada orang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Asas berlakunya hkm pidana menurut waktu, tempat, orang 2. Sejarah hkm pidana masa kolonial dan pasca kemerdekaan 3. Kriminologi, viktimologi, psikologi, sosiologi, penologi, ilmu kedokteran kehakiman, kriminalistik, statistik kriminal  Referensi: 1,2,3,5,6,7, 20	15 %

6 - 7	Sub-CPMK-3:  Mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang. [S9, PP4]	Diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian, penggolongan, cara merumuskan norma dalam KUHP serta mampu menganalisa dan menguraikan unsur-unsur delik yang ditunjukkan terhadap orang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah;  b.Diskusi[T M:1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1 +1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Pentingnya penafsiran, penemuan hukum oleh hakim pidana, jenis penafsiran, analogi 2.Istilah, pengertian dan unsur tindak pidana  Referensi: 1, 2, 8, 9, 10	15 %
<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>							
8-9	Sub-CPMK-5:  Mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan Transaksi elektronik [S9, KU1, PP4]	Diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur delik-delik terhadap harta kekayaan beserta contoh kasus.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah;  b.Diskusi[T M:1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1 +1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	1.Perumusan norma dan sanksi, jenis tindak pidana 2.Sebab-akibat /kausalitas, waktu dan tempat terjadinya serta pelaku tindak pidana Referensi: 8, 9, 10, 11	10 %
10-11 - 12	Sub-CPMK-6:  Mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika dan psikotropika. [S9, KU1, PP4]	Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan delik pemalsuan dan unsur-unsurnya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah;  b.Diskusi[T M:1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1 +1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	1.Kesengajaan, kelalaian dan alasan penghapus kesalahan 2.Istilah/pengertian, pidana, pembedaan, teori dan tujuan pidana 3.Jenis pidana, tindakan, aturan pembedaan  Referensi: 12, 13, 14, 15	10 %

13 - 15	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme. [S9, KU9, KK1]	Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan delik yang ditunjukkan terhadap keamanan negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya. -	1. Jenis pidana, tindakan, aturan pemidanaan 2. Samenloop recidive, gugurnya hak menuntut dan melaksanakan pidana  Referensi: 15, 16, 17, 18, 19, 20	20 %
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT





YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM

Kode Dokumen  
FA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBO T (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
PENGANTAR ILMU HUKUM	FA176216	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global; 4. Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	1. Mampu menjelaskan konsep: pengertian ilmu hukum sebagai dasar pengembangan ilmu; 2. Mampu menganalisis: Manusia dan Masyarakat dan Kaedah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya sebagai dasar pengembangan ilmu; 3. Mampu mengidentifikasi: Sumber-sumber Hukum, Pembidangan Hukum, Macam-macam Aliran Hukum sebagai dasar pengembangan ilmu; 4. Mampu mengidentifikasi Penemuan Hukum, Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum b. Mahasiswa dapat menjelaskan Manusia dan Masyarakat c. Mahasiswa dapat menjelaskan Kaedah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya d. Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum e. Mahasiswa dapat menjelaskan Pembidangan Hukum f. Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam Aliran Hukum g. Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Bantu Hukum h. Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum i. Mahasiswa dapat menjelaskan Penemuan Hukum j. Mahasiswa dapat menjelaskan Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum memberikan landasan untuk mendukung mata kuliah lain, sehingga memudahkan pemahaman mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Mata kuliah ini				

	mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum untuk mengantarkan mahasiswa yang mempelajari hukum ke arah yang sebenarnya.						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah</li> <li>2. Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum</li> <li>3. Manusia dan Masyarakat</li> <li>4. Kaedah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya</li> <li>5. Sumber-sumber Hukum</li> <li>6. Pembidangan Hukum</li> <li>7. Macam-macam Aliran Hukum</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Ilmu Bantu Hukum</li> <li>10. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum</li> <li>11. Tujuan hukum dan Fungsi hukum</li> <li>12. Penemuan Hukum</li> <li>13. Metode Penafsiran, Metode Kontruksi hukum.</li> <li>14. Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum</li> <li>15. Persamaan dan perbedaan Unifikasi Hukum dan Kodifikasi Hukum</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.</li> <li>2. R. Soeroso, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>3. L.J. Van Apeldoorn, 1985, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramitha, Jakarta..</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chainur Arrasjid, 1988, Pengantar Ilmu Hukum, Yani Corp Medan. J.B. Dalio, 2000,</li> <li>- Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2000.</li> </ul>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Pengantar Ilmu Hukum						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan Kontrak Kuliah	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan kontrak kuliah pengantar ilmu hukum	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100	a. Kuliah; b. Diskusi [	<b>eLearning dan</b>	1. Istilah Pengantar Ilmu Hukum,	10 %

	dapat menjelaskan Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum		B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	TM:1x(2x50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>platform media lainnya</b>	2. Batasan pengertian tentang ilmu hukum, 3. Kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu Hukum.	
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa dapat menjelaskan Manusia dan Masyarakat	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Hakikat manusia dan masyarakat, 2. Kedudukan manusia dalam masyarakat, 3. Hukum sebagai kebutuhan manusia dan masyarakat	10 %
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat menjelaskan Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Jenis-jenis kaidah sosial, 2. Fungsi kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia, 3. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain, 4. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain.	10 %
5	Sub-CPMK-5 Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Arti sumber hukum, 2. Sumber hukum materil, 3. Sumber hukum formil.	10 %
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa dapat menjelaskan pembedangan hukum .	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D =	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pembedangan Hukum: 1. Pembedangan hukum berdasarkan bentuknya, 2. Pembedangan hukum berdasarkan hal yang diatur, 3. Pembedangan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, 4. Pembedangan hukum berdasarkan tempat berlakunya Alasan Diperlukannya	10%

7	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam Aliran Hukum	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya.</b>	1. Aliran hukum alam, 2. Positivisme hukum, 3. Utilitarianisme, 4. Mazhab sejarah, 5. Sociological jurisprudence, 6. Aliran hukum bebas 7. Critical legal studies, Feminist jurisprudence.	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Bantu Hukum	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+BM :(1+1)x(2x60")]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya.</b>  -	1. Sejarah hukum, 2. Sosiologi hukum, 3. Perbandingan hukum, 4. Antropologi hukum, 5. Psikologi hukum, 6. Logika hukum, 7. Politik hukum, 8. Filsafat hukum.	10 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+BM :(1+1)x(2x60")]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya.</b>	1. Pengertian hukum, 2. Nilai dasar hukum, 3. Asas hukum, 4. Peristiwa hukum, 5. Hubungan hukum, 6. Akibat hukum, 7. Hak dan Kewajiban, 8. Subjek hukum, 9. Objek hukum..	10%
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa dapat menjelaskan Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+BM :(1+1)x(2x60")]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya.</b>	1. Tujuan Hukum 2. Fungsi Hukum	10%
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa dapat menjelaskan Penemuan Hukum	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+BM :(1+1)x(2x60")]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya.</b>	1. Hakim sebagai penemu hukum, Pengertian dan	10%
13	Sub-CPMK-13	Kejelasan dan	A =	a. Kuliah;	<b>eLearni</b>	Metode penemuan hukum,	10%



	Mahasiswa dapat menjelaskan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum	pemahaman	86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>ng dan platform media lainnya</b>	Metode Penafsiran, Metode Kontruksi hukum.	
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mahasiswa dapat menjelaskan unifikasi hukum dan kodifikasi hukum	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearni ng dan platform media lainnya</b>	1. Unifikasi Hukum, 2. Kodifikasi Hukum	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan unifikasi hukum dan kodifikasi hukum	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearni ng dan platform media lainnya</b>	Persamaan dan perbedaan Unifikasi Hukum dan Kodifikasi Hukum	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, 26 Juli 2021

Dosen Pengampu ,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTASHUKUM  
PRODIILMU HUKUM**

**KodeDokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBO T (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
PENDIDIKAN PANCASILA	FA176107	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankanpada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;			
	<b>CapaianPembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	1. Mampu menjelaskan konsep: urgensi Pancasila di Perguruan Tinggi, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai systemetika, dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu; 2. Mampu menganalisis: urgensi Pancasila di Perguruan Tinggi, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu; 3. Mampu mengidentifikasi: urgensi Pancasila di Perguruan Tinggi, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai systemetika, dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu; 4. Mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; 5. Mampu berkata, berbuat dan bertigkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
	<b>Sub-CPMK</b>	a. Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dan urgensi, landasan dan tujuan pendidikan pancasila b. Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia mulai dari masa kerajaan-kerajaan, masa penjajahan , proklamasi sampai sekarang c. Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai sebagai dasar Negara Republik Indonesia			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat</li> <li>e. Mahasiswa mampu menganalisis pancasila sebagai sistem Ideologi Negara, serta mahasiswa mampu membandingkan pancasila dengan ideologi-ideologi besar dunia</li> <li>f. Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai Sistem Etika</li> <li>g. Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu dalam bidang ilmu masing-masing</li> <li>h. Mahasiswa mampu menjelaskan Nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</li> </ul>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Mata kuliah Pendidikan Pancasila menjadikan mahasiswa menjadi ilmuwan yang berjiwapanasila dan bersikap serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, memahami dan menghayati sistem kenegaraan berdasarkan UUD 1945, memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia sehingga dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme serta memiliki wawasan dan pikiran kritis. Selain itu mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui kajian pancasila sebagai filsafat dan sistem filsafat, merancang penilaian dan rubric penilaian dan melakukan studi kasus sehingga mampu berperilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung persatuan bangsa, dan kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p>	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah</li> <li>2. Konsep dan urgensi</li> <li>3. Landasan dan tujuan pendidikan pancasila</li> <li>4. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia mulai dari masa kerajaan-kerajaan,</li> <li>5. Masa penjajahan dan proklamasi sampai sekarang</li> <li>6. Pancasila sebagai sebagai dasar Negara Republik Indonesia.</li> <li>7. Pancasila sebagai sistem filsafat</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Pancasila sebagai sistem Ideologi Negara</li> <li>10. Mahasiswa mampu membandingkan pancasila dengan ideologi-ideologi besar dunia.</li> <li>11. Pancasila sebagai Sistem Etika..</li> <li>12. Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu dalam bidang ilmu masing-masing</li> <li>13. Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu dalam bidang ilmu masing-masing lanjutan</li> <li>14. Nilai-nilai pancasila dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat</li> <li>15. Nilai-nilai pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdulgani, Roeslan. 1979. Pengembangan Pancasila Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Idayu.</li> <li>2. Admoredjo, Sudjito bin. 2009. "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila". Makalah dalam Kongres Pancasila di UGM Yogyakarta, 30 -- 31 Mei s.d. 1 Juni 2009.</li> <li>3. Ali, As'ad Said. 2009. Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: Pustaka LP3ES.</li> <li>4. Asdi, Endang Daruni. 2003. Manusia Seutuhnya Dalam Moral Pancasila. Jogjakarta: Pustaka Raja.</li> <li>5. Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.). 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 -- 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kusuma, A.B. 2004. Lahirnya Undang-undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 6. 2013.</li> <li>- Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia.</li> <li>- Mahfud, M D. 2009. "Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama", Makalah pada Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei 2009.</li> <li>- Magnis-Suseno, Franz. 2011. "Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi" dalam Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-3 Mei 2013.</li> </ul>
--	---

<b>Dosen Pengampu</b>	
-----------------------	--

<b>Matakuliah syarat</b>	Pendidikan Pancasila
--------------------------	----------------------


Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan Kontrak Kuliah	Kejelasan dan Pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan Kontrak Kuliah Pendidikan Pancasila	10%
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu memahami konsep dan urgensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan konsep dan urgensi</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila	10 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu memahami landasan dan tujuan pendidikan pancasila	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan landasan pendidikan pancasila</li> <li>• Menjelaskan tujuan pendidikan pancasila</li> <li>•</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 –	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila</li> <li>2. Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila</li> <li>3. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila</li> <li>4. Esensi dan Urgensi</li> </ol>	10%

			40			Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan	
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu memahami dan menguasai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia mulai dari masa kerajaan-kerajaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia masa kerajaan-kerajaan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia 2. Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.	10 %
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu memahami dan menguasai Pancasila dalam konteks masa penjajahan, proklamasi sampai sekarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia masa penjajahan, proklamasi sampai sekarang</li> <li>Memahami Pancasila dalam konteks sampai sekarang</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia 2. Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.	10%
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu memahami dan menguasai pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan pancasila sebagai sebagai dasar Negara Republik Indonesia</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Konsep Negara, Tujuan Negara dan Urgensi Dasar Negara 2. Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara 3. Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara 4. Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara	10 %
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami dan menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 –	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat 1. Kajian Pancasila sebagai Sistem Filsafat 2. Filsafat Pancasila sebagai Genetivus Objectivus dan Genetivus Subjectivus	10 %

			40			3. Landasan Ontologis Filsafat Pancasila 4. Landasan Epistemologi Filsafat Pancasila 5. Landasan Aksiologis Pancasila.	
<b>8</b>	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
<b>9</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai sistem Ideologi Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis Pancasila sebagai sistem Ideologi Negara</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Ideologi Negara 2. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara 3. Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara 4. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara	10 %
<b>10</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu membandingkan Pancasila dengan ideologi-ideologi besar dunia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan membandingkan Pancasila dengan ideologi-ideologi besar dunia</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara 2. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara 3. Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara 4. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara	10%
<b>11</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menganalisis dan mengimplementasikan Pancasila sebagai Sistem Etika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis dan mengimplementasikan Pancasila sebagai Sistem Etika</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem etika 2. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika	10 %

			D = 41-55 E = 0 - 40	60'')]			
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menjadikan pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu dalam bidang ilmu masing-masing	• Memahami pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu dalam bidang ilmu masing-masing	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 2. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia.	10 %
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menjadikan pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu dalam bidang ilmu masing-masing lanjutan	• Memahami pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu dalam bidang ilmu masing-masing	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 2. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia.	10%
14	Sub-CPMPK-14 Mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat	• Ketepatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Konsep dan urgensi implementasi nilai-nilai pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat/	10%
15	Sub-CPMPK-15 Mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	• Ketepatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	Konsep dan urgensi implementasi nilai-nilai pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara..	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
PENGANTAR HUKUM INDONESIA	FA176217	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;</li> <li>4. Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mampu menjelaskan konsep: Hukum dalam arti tata hukum;</li> <li>6. Mampu menganalisis: Sistem Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum sebagai dasar pengembangan ilmu;</li> <li>7. Mampu mengidentifikasi: Sumber-sumber Hukum dan Pembidangan Hukum.</li> </ol>			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum dalam arti tata hukum.</li> <li>2. Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Tata Hukum Indonesia dan Politik Hukum di Indonesia</li> <li>3. Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum.</li> <li>4. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Tata Negara (HTN).</li> <li>5. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Administrasi Negara (HAN).</li> <li>6. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pidana.</li> <li>7. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perdata.</li> <li>8. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Dagang.</li> <li>9. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Agraria.</li> <li>10. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perburuhan.</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Padamatakuliah ini mahasiswa belajar tentang Hukum dalam arti tata hukum, Sejarah Tata Hukum Indonesia dan Politik Hukum di Indonesia, Sistem Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum, Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan				



<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah</li> <li>2. Hukum dalam arti tata hukum:</li> <li>3. SejarahTataHukumIndonesiadanPolitikHukumdiIndonesia</li> <li>4. SistemHukumdanMacam-macamSistemHukum: SistemhukumEropaKontinentaldan Sistem Hukum Anglo – Saxon, Sistem Hukum Adat, Sistem HukumIslam.</li> <li>5. Perbedaan macam-macamsistem Hukum Indonesia.</li> <li>6. HukumTataNegara(HTN):PengertianHukumTataNegara</li> <li>7. Pengertiandan Sejarah ketatanegaraan RepublikIndonesia</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Lembaga-lembagaNegaraRepublikIndonesia.</li> <li>10. HukumAdministrasiNegara(HAN)</li> <li>11. Hukum Pidana</li> <li>12. Hukum Perdata</li> <li>13. Hukum Dagang</li> <li>14. Hukum Agraria</li> <li>15. Hukum Perburuhan</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>					
<b>Pustaka</b>		Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989.</li> <li>2. R. Abdul Djamali, PengantarHukumIndonesia, Rajawali, Jakarta, 1984</li> </ol> <b>Pendukung :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yulies TienaMasriani, PengantarHukumIndonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2004.</li> <li>- H.Ishaq, Pengantar HukumIndonesia (PHI), Rajawali Pers, Jakarta, 2012 3</li> <li>- IlhamBisri, Sistem HukumIndonesiaPrinsip-prinsip danImplementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.</li> </ul>					
<b>DosenPengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Pengantar Hukum Indonesia					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria &Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan Kontrak Kuliah	Kejelasan dan Pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan Kontrak Kuliah Pengantar Hukum Indonesia	10%
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x	<b>eLearning dan platform</b>	1. Pengertian tata hukum &tata hukum Indonesia 2. Tujuan mempelajari	10 %

	menjelaskan Hukum dalam arti tata hukum		85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	50”]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>m media lainnya.</b>	tata hukum	
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Tata Hukum Indonesia dan Politik Hukum di Indonesia	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Sejarah TataHukumIndonesia dan Politik Hukum diIndonesia: Hakikat manusia dan masyarakat, 1. Sejarah tata hukum Indonesia 2. Politik hukum diIndonesia.	10 %
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswamampu menjelaskanSistem Hukum dan Macam- macam Sistem Hukum	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	1. Sistem hukum EropaKontinental 2. Sistem Hukum Anglo–Saxon 3. Sistem Hukum Adat 4. Sistem HukumIslam.	10 %
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswamampu menjelaskanPerbedaan Macam-macam Sistem Hukum	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	1. Perbedaan macam-macam sistem Hukum 2. Sistem HukumIndonesia	10%
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswamampu menjelaskan Hukum Tata Negara	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Pengertian Hukum Tata Negara dan Menjelaskan Hukum Tata Negara	10 %
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswamampu menjelaskan pengertian dan sejarah ketatanegaraan	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Menjelaskan pengertian dan sejarah ketatanegaraan	10%

			55 E = 0 – 40				
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiwamampu menjelaskan Lembaga- lembaga negara republik Indonesia	• Kejelasan dan Pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Menjelaskan tentang Lembaga-lembaga yang ada di Negara Republik Indonesia	10%
<b>10</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiwamampu menjelaskan Hukum Administrasi Negara (HAN)	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	1. Pengertian HAN 2. Sumber-sumber HAN 3. Objek HAN. 4. Bentuk- bentuk perbuatan pemerintah 5. Peradilan administrasi Negara	10 %
<b>11</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Pidana	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	1. Pengertian hukum pidana 2. Tujuan hokumpidana 3. Pembagianhukum pidana 4. Peristiwa pidana dan perbuatan pidana (delik) 5. Macam- macam perbuatan pidana 6. Kitab undangundang Hukum Pidana 7. Jenis Hukuman pidana	10 %
<b>12</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Perdata	• Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	1. Pengertian hukum perdata 2. Tujuan hokumperdata 3. Pembagianhukum perdata 4. Kitab undan-undang Hukum Perdata	10 %
<b>13</b>	Sub-CPMK-3 Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Dagang:	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D =	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	1. Pengertian hukum dagang 2. Sejarah KUHD 3. HubunganantaraKUH D dengan KUH Perdata.	10%

			41-55 E = 0 - 40				
14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Agraria:	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	1. Pengertian hukum Agraria 2. Sejarah hukum agrarian 3. Asas-asas hukum Agraria 4. Hak-hak atas tanah dalam UUPA.	10%
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Perburuhan:	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	1. Pengertian Hukum Perburuhan 2. Pengertian buruh dan majikan 3. Pengertian hubungan kerja 4. UU yang mengatur hubungan kerja 5. Perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan 6. Perselisihan perburuhan 7. Pemutusan hubungan kerja	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FA176101	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif; serta menggunakannya sesuai paradigma Islam rahmatan lil 'alamin			
<b>CPL3 KETRAM PILAN</b>	1. Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ajaran dan nilai-nilai Islam bagi kepentingan bangsa dan umat manusia				

	<b>KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>		
	CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan esensi relasi manusia dengan Allah, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan alam dalam paradigma Qur'ani;</li> <li>2. Menyajikan hasil penelaahan konseptual dan/atau empiris terkait esensi dan urgensi nilai-nilai spiritualitas Islam sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter;</li> <li>3. Mampu bersikap secara konsisten terhadap koherensi pokok-pokok ajaran Islam sebagai implementasi Iman, Islam, dan Ihsan;</li> </ol>
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>		
	Sub-CPMK	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Manusia dalam Islam;  Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Agama: Mengapa Manusia Butuh Agama  Mahasiswa mampu menjelaskan Agama Islam dan Ruang Lingkupnya  Mahasiswa mampu menjelaskan Akidah/Sistem Teologi dalam Islam.  Mahasiswa mampu menjelaskan Syariah/System Hukum dalam Islam;  Mahasiswa mampu menjelaskan Akhlak dan Kebudayaan dalam Islam;  Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Ibadah dalam Islam;  Mahasiswa mampu menjelaskan IPTEK dalam Islam  Mahasiswa Kerukunan Antar Umat Beragama, HAM dan Demokrasi dalam Pandangan Islam</p>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Konsep Agama: Mengapa Manusia Butuh Agama, Agama Islam dan Ruang Lingkupnya, Akidah/Sistem Teologi dalam Islam, Syariah/System Hukum dalam Islam, Akhlak dan Kebudayaan dalam Islam, Sistem Ibadah dalam Islam, IPTEK dalam Islam, Kerukunan Antar Umat Beragama, HAM dan Demokrasi dalam Pandangan Islam.</p>	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah</li> <li>2. Konsep Agama: Mengapa Manusia Butuh Agama, Agama Islam dan Ruang Lingkupnya</li> <li>3. Akidah/Sistem Teologi dalam Islam</li> <li>4. Syariah/System Hukum dalam Islam</li> <li>5. Tuhan dan spiritualitas Agama dan religiusitas</li> <li>6. implementasi agama dalam kehidupan.</li> <li>7. Akhlak dan Kebudayaan dalam Islam,</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Sistem Ibadah dalam Islam</li> <li>10. IPTEK dalam Islam</li> <li>11. Al-Qur'an sebagai inspirasi peradaban, Sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya dan Ijtihad dan keberlangsungan spirit Islam.</li> <li>12. Memahami, menerima, dan Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni dalam Islam..</li> <li>13. Paradigma Islam tentang Ilmu Pengetahuan</li> <li>14. Amal sholeh dan profesionalitas, Karakter seorang profesional Islam</li> <li>15. Kerukunan Antar Umat Beragama, HAM dan Demokrasi dalam Pandangan Islam.</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p><b>Daftar Referensi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdullah, M. Amin. Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.</li> </ol>	

		2. Ali, Mukti HA. Metode Memahami Agama Islam. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991. 3. Abid Al jabiri, Muh., Binyah al aql al araby, markaz dirasat alwahdah al arabiyah, 2000 4. Al-Khatib, Sulaiman, Al-Falsafah al-‘Aammah wa al-Akhlaaq, Minia: Jami’ah Minia, 5. Aman, Saifudin, Tren Spiritualitas Milenium Ketiga, Jakarta: Ruhama, 2013					
		<b>Pendukung :</b>					
		- Pancasila - UUD 1945 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Pendidikan Agama Islam					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan Kontrak Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan Pemahaman</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50’)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60’)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan kontrak kuliah agama Islam	10%
2	Sub-CPMK-2: memahami gambaran dan pemahaman Konsep Agama: Mengapa Manusia Butuh Agama, Agama Islam dan Ruang Lingkupnya [S9, KU1, KU2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan konsep Tuhan dalam perspektif sosiologis, filsafat, dan teologis</li> <li>membandingkan konsep Tuhan dalam perspektif sosiologis, filsafat, dan teologis</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50’)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60’)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pentingnya Iman Kepada Tuhan, Filsafat Ketuhanan, Sejarah Pemikiran Manusia tentang Tuhan, Pemikiran Umat Islam, Tuhan menurut Agama-agama Wahyu, Pembuktian Wujud Tuhan	10 %
3	Sub-CPMK-3: Memahami dan mampu menjelaskan Akidah/Sistem Teologi dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami tentang Keimanan, Ketaqwaan dan wujud Iman.</li> <li>Memahami</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50’)]; c. [PT+B M:(1+1)x	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Keimanan dan Ketaqwaan, Wujud Iman, Proses terbentuknya Iman., Tanda-	10 %

	Islam	proses terbentuknya Iman	D = 41-55 E = 0 – 40	(2x60’’) ]		tanda Orang Beriman, Korelasi Keimanan dan Ketaqwaan.	
4	Sub-CPMK-4: Memahami dan mampu menjelaskan Syariah/System Hukum dalam Islam [S9, KU1, KU2, PP4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami tentang Keimanan, Ketaqwaan dan wujud Iman.</li> <li>Memahami proses terbentuknya Iman</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50’’)]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60’’) ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Keimanan dan Ketaqwaan, Wujud Iman, Proses terbentuknya Iman., Tanda-tanda Orang Beriman, Korelasi Keimanan dan Ketaqwaan.	10%
5	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan Tuhan dan spiritualitas, Agama dan religiusitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>keberadaan manusia serta hakikat manusia.</li> <li>Mahami Martabat, fungsi dan peran manusia serta tanggung jawabnya</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50’’)]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60’’) ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Keberadaan Manusia, Hakikat Manusia, Martabat Manusia, Fungsi dan Peranan Manusia, Tanggung Jawab Manusia	10 %
6	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan implementasi agama dalam kehidupan [S9, PP4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>keberadaan manusia serta hakikat manusia.</li> <li>Mahami Martabat, fungsi dan peran manusia serta tanggung jawabnya</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50’’)]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60’’) ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Keberadaan Manusia, Hakikat Manusia, Martabat Manusia, Fungsi dan Peranan Manusia, Tanggung Jawab Manusia	10%
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menjelaskan Akhlak dan Kebudayaan dalam Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami pentingnya Akhlak, konsep Etika, Moral dan Akhlak dan indikatornya manusia berakhlak.</li> <li>Memahami Akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50’’)]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60’’) ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pentingnya Akhlak, Konsep Etika, Moral dan Akhlak, Hubungan Tasawuf dengan Akhlak, Indikator Manusia Berakhlak, Akhlak dan Aktualisasinya dalam Kehidupan.	10 %
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu menjelaskan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami pentingnya Akhlak, konsep</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50’’) ]];	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pentingnya Akhlak, Konsep Etika, Moral dan Akhlak,	10%



	Sistem Ibadah dalam Islam	<p>Etika, Moral dan Akhlak dan indikatornya manusia berakhlak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami Akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ul>	<p>C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	c.[PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	<b>media lainnya.</b>	Hubungan Tasawuf dengan Akhlak, Indikator Manusia Berakhlak, Akhlak dan Aktualisasinya dalam Kehidupan.	
10	Sub-CPMK-10 Mahasiswa mampu menjelaskan IPTEK dalam Islam [S9, KU1, PP4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami penggunaan Iptek yang bermartabat</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]</p>	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pentingnya Akhlak, Konsep Etika, Moral dan Akhlak, Hubungan Tasawuf dengan Akhlak, Indikator Manusia Berakhlak, Akhlak dan Aktualisasinya dalam Kehidupan	10%
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menjelaskan Al-Qur'an sebagai inspirasi peradaban, Sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya dan Ijtihad dan keberlangsungan spirit Islam [S9, KU1, PP4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi keanekaragaman corak penafsiran al-Qur'an</li> <li>Menjelaskan makna Sunnah dan hadits</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]</p>	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian Al-Quran, Implementasi Al-Quran, Pengertian Sunnah dan Hadits, Implementasi Sunnah dan Hadits. Membumikan Al-Quran dan Hadits	10 %
12	Sub-CPMK-12: Memahami, menerima, dan Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni dalam Islam [S9, KU1, PP4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami pentingnya IPTEKS dalam kehidupan serta konsep IPTEKS dalam Islam.</li> <li>Memahami Pentingnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi peradaban</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]</p>	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pentingnya IPTEKS dalam Kehidupan, Konsep IPTEK dalam Islam, Syarat-syarat Ilmu, Sumber Ilmu Pengetahuan, Integrasi Iman, Ilmu dan Amal	10 %

13	Sub-CPMK-13: Mampumenjelaskan Paradigma Islam tentang Ilmu Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami pengertian dan konsep Paradigma Ilmu dalam Islam.</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Konsep Paradigma Ilmu dalam Islam, Perkembangan Kebudayaan Islam. Nilai-nilai Karakter Profesional dalam Islam.	10 %
14	Sub-CPMK-14: Mampumenjelaskan Amal sholeh dan profesionalitas, Karakter seorang professional Islam [S9, KU9, KK1]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami Perkembangan Karakter Profesional dan nilai-nilainya dalam Islam</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Konsep Paradigma Ilmu dalam Islam, Perkembangan Kebudayaan Islam. Nilai-nilai Karakter Profesional dalam Islam.	10%
15	Sub-CPMK-15 Mampu menjelaskan Kerukunan Antar Umat Beragama, HAM dan Demokrasi dalam Pandangan Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan memahami Agama Islam sebagai rahmatan lil alamin</li> <li>Ketepatan Memahami pengertian dan kedudukan Politik dalam Islam.</li> <li>Memahami prinsip-prinsip dasar politik dan demokrasi dalam Islam.</li> <li>Memahami Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Islam</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian Agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, Kedudukan Sistem Politik dalam Islam. Prinsip-Prinsip Dasar Politik dalam Islam, Demokrasi dalam Islam, HAM dalam Islam dan contoh, perbedaan prinsip antara Konsepsi HAM dalam Islam dengan Barat..	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTASHUKUM  
PRODIILMU HUKUM**

**KodeDokumen**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Hukum Dagang	FA176225	Pilihan Prodi	T=2 P= 1	III	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
	Selviany, M.H.			<b>Kanti Rahayu, SH, MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius</li> <li>b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa.</li> <li>c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.</li> </ul>			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu</li> <li>b. pengetahuan, Teknologi dan Seni yang berorientasi pada kecakapan hidup ( life skills )</li> <li>c. untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat.</li> <li>d. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks</li> <li>e. pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang</li> <li>f. memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan ilmu hukum.</li> <li>g. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</li> <li>h. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</li> <li>i. teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan</li> <li>j. keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka</li> <li>k. menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik</li> <li>l. hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya</li> <li>m. dalam laman perguruan tinggi.</li> </ul>			
<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu melaksanakan penelitian di bidang Ilmu Hukum berdasarkan kaidah keilmuan yang hasilnya disusun dalam bentuk laporan deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah rancangan baku</li> <li>b. Mampu mempublikasikan hasil skripsi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik</li> <li>c. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang Ilmu Hukum secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil</li> </ul>				

		kerja institusi atau organisasi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja.
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>	
	CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengantar Hukum Dagang.</li> <li>2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Perusahaan.</li> <li>3. Mahasiswa mampu menjelaskan Surat Berharga.</li> <li>4. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan.</li> <li>5. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pertanggungangan</li> <li>6. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Bisnis.</li> <li>7. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Lembaga Pembiayaan.</li> <li>8. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Investasi.</li> <li>9. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pasar Modal.</li> <li>10. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Anti Monopoli</li> </ol>
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>	
	Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan pengetahuan dasar tentang hukum dagang, Istilah dan Pengertian Hukum Dagang, Kedudukan Hukum Dagang Dalam sistem Hukum Indonesia, Sejarah dan perkembangan Hukum Dagang, Ruang lingkup Hukum Dagang</li> <li>b. Menjelaskan Istilah dan Pengertian Perusahaan, Macam-Macam Perusahaan, Firma, Commendite Vennotschap (CV), Perseroan Terbatas (Naamlos Vennotschap)</li> <li>c. Menjelaskan tentang Surat Wesel, Surat Cek, Promes dan Kwitansi, Bilyet Giro, Surat Berharga dalam perkembangan</li> <li>d. Menjelaskan tentang Pengertian Hukum Pengangkutan, Sumber Hukum Pengangkutan, Asas-asas hukum Pengangkutan, Ruang lingkup Pengangkutan, Jenis- jenis Pengangkutan, Objek Hukum Pengangkutan.</li> <li>e. Menjelaskan Pengertian Pertanggungangan, Subjek dan Objek Pertanggungangan, Jenis-Jenis Pertanggungangan, Prinsip-Prinsip Pertanggungangan</li> <li>f. Menjelaskan tentang Istilah dan Pengertian Hukum Bisnis, Kedudukan Hukum Bisnis Dalam sistem Hukum Indonesia, Hubungan Hukum Bisnis dan Hukum Dagang, Sumber Hukum Bisnis, Ruang lingkup Hukum Bisnis.</li> <li>g. Menjelaskan tentang Hukum Pengertian Hukum Lembaga Pembiayaan, Sumber Hukum Lembaga Pembiayaan, Dasar Hukum Pembiayaan, Macam-macam Lembaga Pembiayaan</li> <li>h. Menjelaskan tentang Istilah dan Pengertian Investasi, Dasar Hukum Investasi, Sejarah, Perkembangan Penanaman Modal, Macam-Macam Investasi.</li> <li>i. Menjelaskan tentang Pengertian Pasar Modal, Dasar Hukum Pasar Modal, Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal, Manfaat Pasar Modal, Pelaku Pasar Modal, Produk Pasar Modal.</li> <li>j. Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pengertian Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asas dan Tujuan, Kegiatan yang Dilarang, Perjanjian yang Dilarang, Hal-Hal yang Dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah Hukum Dagang membahas mengenai berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis. Kegiatan Usaha Dagang dewasa ini mengalami banyak perkembangan yang tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tetapi juga di luar KUHD yang tersebar di berbagai peraturan perundang-	

	undangan di bidang perdagangan dan bisnis.						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah</li> <li>2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengantar Hukum Dagang.</li> <li>3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Perusahaan.</li> <li>4. Mahasiswa mampu menjelaskan Surat Berharga.</li> <li>5. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan.</li> <li>6. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pertanggungan</li> <li>7. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Bisnis.</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Lembaga Pembiayaan.</li> <li>10. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Lembaga Pembiayaan Lanjutan.</li> <li>11. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Investasi.</li> <li>12. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pasar Modal.</li> <li>13. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pasar Modal Lanjutan</li> <li>14. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Anti Monopoli</li> <li>15. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Anti Monopoli Lanjutan</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>						
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989</li> <li>b. Dr Zainal Asikin SH.SU. 2014. Hukum Dagang. Rajawali Pers. Jakarta</li> <li>c. Dr.Ramlan. 2009. Intisari Hukum Dagang 1. Ratu jaya, Medan</li> <li>d. Ida Nadirah SH, MH.2014. Buku Ajar Hukum Dagang Indonesia. Ratu Jaya :Medan</li> </ol>						
	<b>Pendukung :</b>						
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. H.M Purwosucipto, 2010. Pengertian Dagang Indonesia 2, jambatan. Jakarta</li> <li>b. Soekardono. 1985. Hukum Dagang Indonesia jilid 1. Jakarta</li> </ol>						
<b>Dosen Pengampu</b>	Dr. Eddie Praptono; Selvianny, M.H.						
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Dagang						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menjelaskan Kontrak Kuliah	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskus [TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menjelaskan Kontrak Kuliah Hukum Dagang	10%

				)]			
2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan teori dasar Hukum Dagang	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Menjelaskan pengetahuan dasar tentang hukum dagang, Istilah dan Pengertian Hukum Dagang, Kedudukan Hukum Dagang Dalam sistem Hukum Indonesia, Sejarah dan perkembangan Hukum Dagang, Ruang lingkup Hukum Dagang	10 %
3	Mahasiswa mampu dalam mendeskripsikan tentang perusahaan.	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Menjelaskan Istilah dan Pengertian Perusahaan, Macam-Macam Perusahaan, Firma, Commendite Vennotschap (CV), Perseroan Terbatas (Naamlos Vennotschap)	10 %
4	Mahasiswa mampu menjelaskan surat berharga	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Menjelaskan tentang Surat Wesel, Surat Cek, Promes dan Kwitansi, Bilyet Giro, Surat Berharga dalam perkembangan	10 %
5	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum pengangkutan	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Menjelaskan tentang Pengertian Hukum Pengangkutan, Sumber Hukum Pengangkutan, Asas-asas hukum Pengangkutan, Ruang lingkup Pengangkutan,	10%

						Jenis-jenis Pengangkutan, Objek Hukum Pengangkutan.	
6	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum pertanggung jawaban	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Menjelaskan Pengertian Pertanggung jawaban, Subjek dan Objek Pertanggung jawaban, Jenis-Jenis Pertanggung jawaban, Prinsip-Prinsip Pertanggung jawaban	10%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum bisnis	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Menjelaskan tentang Istilah dan Pengertian Hukum Bisnis, Kedudukan Hukum Bisnis Dalam sistem Hukum Indonesia, Hubungan Hukum Bisnis dan Hukum Dagang, Sumber Hukum Bisnis, Ruang lingkup Hukum Bisnis.	10%
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
9	Mahasiswa mampu mendeskripsikan hukum Lembaga pembiayaan.	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Menjelaskan tentang Hukum Pengertian Hukum Lembaga Pembiayaan, Sumber Hukum Lembaga Pembiayaan	10%
10	Mahasiswa mampu mendeskripsikan hukum Lembaga pembiayaan Lanjutan	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Dasar Hukum Pembiayaan, Macam-macam Lembaga Pembiayaan	10%
11	Mahasiswa	Kejelasan	A = 86-	a.Kuliah	<b>eLear</b>	Menjelaskan	10%

	mampu memahami tentang hukum investasi	dan pemahaman	100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>ning dan platform media lainnya a.</b>	tentang Istilah dan Pengertian Investasi, Dasar Hukum Investasi, Sejarah, Perkembangan Penanaman Modal, Macam-Macam Investasi.	
12	Mahasiswa mampu memahami tentang hukum pasar modal	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Menjelaskan tentang Pengertian Pasar Modal, Dasar Hukum Pasar Modal	10%
13	Mahasiswa mampu memahami tentang hukum pasar modal lanjutan	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal, Manfaat Pasar Modal, Pelaku Pasar Modal, Produk Pasar Modal.	10%
14	Mahasiswa mampu memahami tentang hukum anti monopoli	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pengertian Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asas dan Tujuan	10%
15	Mahasiswa mampu memahami tentang hukum anti monopoli lanjutan	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya a.</b>	Kegiatan yang Dilarang, Perjanjian yang Dilarang, Hal-Hal yang Dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli.	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBO T (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Perdata	FA176220	Perdata	T=2 P= 1	II	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan Hukum Perdata, mampu mengaplikasikan hukum perdata secara teoritis dan praktis.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
	Sub-CPMK	a. Mampu mahasiswa mampu menjelaskan pengantar hukum perdata; b. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Orang (Natuurlejk Persoon) c. Mahasiswa mampu menjelaskan Badan Hukum d. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Keluarga (Famili Recht). e. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Benda; f. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Waris; g. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perikatan; h. Mahasiswa mampu menjelaskan Pembuktian dan Daluwarsa			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengantar Hukum Perdata, Hukum Orang, Badan Hukum, Hukum Keluarga, Hukum Benda, Hukum Perikatan, Hukum Daluwarsa..				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Kuliah 2. Pengertian Hukum Perdata, Keanekaragaman Hukum Perdata 3. Sejarah Lahirnya Hukum KUHPerdata di Indonesia				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Berlakunya KUHPerdata di Indonesia, Sistematika Hukum Perdata.</li> <li>5. Manusia sebagai subjek hukum, kecakapan dan kewenangan berbuat, pendewasaan, nama, domisili, keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid), catatan sipil.</li> <li>6. Pengertian Badan Hukum, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum, Tanggung jawab Perbuatan Badan Hukum.</li> <li>7. Pengertian Hukum Keluarga,</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Pengertian Perkawinan, Hubungan Keluarga, Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian,</li> <li>10. Akibat Hukum Perkawinan, Putusnya Perkawinan</li> <li>11. Pengertian Hukum Banda(ZAAK), Pengertian dan Macam-Macam Benda, Hak Kebendaan, Azas-Azas Hak Kebendaan, Azas-Azas Hak Kebendaan,</li> <li>12. Sistem Hukum Kebendaan, Berlakunya KUHPerdata Buku II Setelah Berlakunya UUPA</li> <li>13. Pengertian Hukum Waris, Landasan Hukum Kewarisan, Unsur-Unsur Pewarisan, Orang Yang Tidak Patut Mewaris, Cara Memperoleh Warisan, Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Pewaris</li> <li>14. Pengertian Hukum Perikatan, Ketentuan Umum Dalam Perikatan, Asas-Asas Hukum Perikatan, Unsur-Unsur Perikatan, Perikatan yang Dilahirkan dari Perjanjian, Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang, Hapusnya Perikatan</li> <li>15. Pengertian Pembuktian dan Beban Pembuktian, Macam-Macam Pembuktian, Pengertian Daluwarsa, Macam-Macam Daluwarsa</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>
--	---

<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prof. Subekti, S.H., 2009, Pokok-Pokok Hukum Perdata, P.T. Intermasa, Jakarta</li> <li>- P.N.H. Simanjuntak, S.H., 2010, Hukum Perdata Indonesia, Publisher:Jakarta : Prenadamedia Group</li> <li>- Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H.,M.Hum, 2014, Hukum Perdata</li> <li>- Komariah, S.H.,M.Si.,M.Hum, 2005, Hukum Perdata, Malang, UMM Press</li> </ul>
	<b>Pendukung :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> <li>- UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</li> </ul>

<b>DosenPengampu</b>	
----------------------	--

<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Perdata
--------------------------	---------------

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1 Menjelaskan Kontrak Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan dan pemahaman</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan Kontrak Kuliah Hukum Dagang	10%

2	Sub-CPMK-2: memahami gambaran dan pemahaman awal materi hukum perdata. [S9, KU1, KU2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan tentang Pengantar Hukum Perdata</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teori dan Keanekaragaman Hukum Perdata</li> <li>• Ketepatan mengkaji permasalahan melalui pendekatan hukum perdata</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian Hukum Perdata, keanekaragaman hukum perdata di Indonesia	10 %
3	Sub-CPMK-3: memahami gambaran dan pemahaman awal materi hukum perdata. [S9, KU1, KU2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan tentang Pengantar Hukum Perdata</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teori dan Keanekaragaman Hukum Perdata</li> <li>• Ketepatan mengkaji permasalahan melalui pendekatan hukum perdata</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sejarah Lahirnya KUHPerdata di Indonesia, Berlakunya KUHPerdata di Indonesia, Sistematisa Hukum Perdata	10 %
4	Sub-CPMK-4: memahami gambaran dan pemahaman awal materi hukum perdata. [S9, KU1, KU2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan tentang Pengantar Hukum Perdata</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teori dan Keanekaragaman</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Berlakunya KUHPerdata di Indonesia, Sistematisa Hukum Perdata	10 %

		<p>man Hukum Perdata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan mengkaji permasalahan melalui pendekatan hukum perdata</li> </ul>					
5	<p>Sub-CPMK-5: Memahami dan mampu menjelaskan Hukum Orang (Natuurlijk Persoon) [S9, KU1, KU2, PP4]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan Hukum Orang</li> <li>• Ketepatan menginternalisasikan hukum Orang dalam pembelajaran</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]</p>	<p><b>eLearning dan platform media lainnya.</b></p>	<p>Manusia Sebagai Subjek Hukum, Kecakapan, Ketidak-cakapan, Kewenangan Berbuat</p>	10 %
6	<p>Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan Badan Hukum [S9, PP4]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan Badan Hukum</li> <li>• Ketepatan menjelaskan Badan Hukum Dalam Pembelajaran</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]</p>	<p><b>eLearning dan platform media lainnya.</b></p>	<p>Pengertian Badan Hukum, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum, Tanggung jawab Perbuatan Badan Hukum</p>	10 %
7	<p>Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Keluarga. [S9, KU1, PP4]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan hukum keluarga pada pembelajaran</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teoritis dan prinsip hukum Keluarga dalam pengembangan ilmu hukum melalui penelitian</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]</p>	<p><b>eLearning dan platform media lainnya.</b></p>	<p>Pengertian Hukum Keluarga</p>	10 %

8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampumenjela skan HukumKeluarg a.[S9, KU1, PP4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan hukum keluarga pada pembelajaran</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teoritis dan prinsip hukum Keluarga dalam pengembangan ilmu hukum melalui penelitian</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x6 0")]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Pengertian Perkawinan, Hubungan Keluarga, Kekuasaan Orang Tuadan Perwalian	10 %	
10	Sub-CPMK-10 Mahasiswa mampumenjela skan HukumKeluarg a.[S9, KU1, PP4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan hukum keluarga pada pembelajaran</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teoritis dan prinsip hukum Keluarga dalam pengembangan ilmu hukum melalui penelitian</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x6 0")]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Akibat Hukum Perkawinan, Putusnya Perkawinan	10 %	
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampumenjel askan HukumBenda [S9, KU1, PP4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan Hukum Benda</li> <li>• Ketepatan menjelaskan asas dan sistem</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60")]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Pengertian dan Macam- Macam Benda,Hak Keben- daan,Azas- Azas Hak Kebendaan,Azas-Azas Hak Kebendaan	10 %	

		hukum kebendaan	- 40				
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Benda [S9, KU1, PP4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan Hukum Benda</li> <li>• Ketepatan menjelaskan asas dan sistem hukum kebendaan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sistem Hukum Kebendaan, Berlakunya KUHPerduta Buku II Setelah Berlakunya UUPA	10 %
13	Sub-CPMK-13: Mampu menjelaskan Hukum Waris [S9, KU1, PP4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan hukum waris dalam pembelajaran</li> <li>• Kesesuaian dalam menjelaskan unsur- unsur kewarisan dalam pembahasan dan pengkajian permasalahan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian Hukum Waris, Sistem Kewarisan, Landasan Hukum Kewarisan, Unsur- Unsur Pewarisan, Orang yang Tidak Patut Mewaris, Cara Memperoleh Warisan	10 %
14	Sub-CPMK-14: Mampu menjelaskan hukum perikatan [S9, KU9, KK1]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan hukum perikatan dalam pembelajaran</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teoritis dan prinsip hukum perikatan untuk pengembangan ilmu hukum</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	Perikatan, unsur- unsur perikatan, perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang, Hapusnya perikatan	10 %
15	Sub-CPMK-15 Mampu menjelaskan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menginterpretasikan</li> </ul>	A = 86-100 B =	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x	<b>eLearning dan platform</b>	Pengertian Pembuktian dan Beban Pembuktian, Macam-	10%

	Pembuktian dan Daluwarsa	Pembuktian dan Daluwarsa	71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	50"); c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60")]	<b>m media lainnya.</b>	Macam Alat Bukti, Pengertian Daluwarsa, Macam-Macam Daluwarsa.	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTASHUKUM  
PRODIILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusun an</b>
Hukum Surat Berharga	FA176372	HTN	T=2 P= 1	VII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>CapaianPembel ajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius.</li> <li>b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa.</li> <li>c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.</li> </ul>			
	<b>CPL2 KETRAMPI LAN UMUM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu.pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>c. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</li> <li>d. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> <li>e. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus.</li> <li>f. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.</li> </ul>			
	<b>CPL3 KETRAMPI LAN KHUSUS</b>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan aspek hukum surat berharga, sertapentingnya surat berharga dan selain itu mahasiswa mampu mempergunakannyauntuk memecahkan kasus dalam surat berharga.			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan tentang surat-surat berharga (macam-macam, persamaan dan perbedaannya) serta fungsinya dalam perekonomian. Mereka juga mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul berkaitan dengan penggunaan surat-surat berharga.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu memahami arah tujuan pembelajaran mata kuliah.</li> <li>b. Mahasiswa mampu memahami perbedaan Surat berharga dengan Surat yang berharga.</li> <li>c. Mahasiswa menguasai pemahaman tentang dasar-dasar penerbitan surat berharga.</li> </ul>				



			<p>d. Mahasiswa mampu menjelaskan cara peralihan surat berharga</p> <p>e. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang perbedaan, dan fungsi surat wesel, surat Cek dalam keberlakuannya.</p> <p>f. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang surat sanggup, surat promes, dan bilyet giro.</p> <p>g. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang surat saham, dan surat obligasi.</p>		
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini memberikan pengertian-pengertian dasar dan pemahaman tentang surat berharga, khususnya tentang jenis dan penggunaan surat berharga baik yang diatur di dalam KUHD, maupun yang diatur di luar KUHD serta mengenai teori terkait surat berharga.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah dan Pengantar Mata Kuliah.</li> <li>2. Latar belakang penerbitan, pengertian dan fungsi Surat Berharga</li> <li>3. Pengertian dan Pihak-pihak dalam Wesel</li> <li>4. Jenis-jenis Surat Wesel</li> <li>5. Pengertian dan Pihak-pihak dalam Cek</li> <li>6. Dasar hukum penerbitan</li> <li>7. Pemberlakuan Surat Berharga.</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Fungsi dan cara peralihan/operasional Surat Berharga</li> <li>10. Memahami surat wesel</li> <li>11. Surat Cek dalam keberlakuannya.</li> <li>12. Surat Sanggup</li> <li>13. Promes, dan Bilyet Giro.</li> <li>14. Saham</li> <li>15. Obligasi.</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Emmy Pangaribuan Simandjuntak, <i>Hukum Dagang Surat-surat Berharga</i>, Penerbit Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta: 1979</li> <li>2. Gunawan Widjaja, <i>Efek Sebagai Benda</i>, Radja Grafindo Persada, Jakarta: 2005</li> <li>3. Jasso Winarto (Ed), <i>Pasar Modal Indonesia Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ</i>, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1997</li> <li>4. Jusuf Anwar, <i>Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi</i>, PT Alumni, Bandung: 2005</li> <li>5. Koetin, <i>Analisis Pasar Modal</i>, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1996</li> <li>6. Munir Fuady, <i>Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum</i>, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996</li> </ol> <p>Pendukung :</p>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Surat Berharga.				
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>

		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>		
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
<b>1</b>	Sub-CPMK-1: Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami arah dan tujuan pembelajaran mata kuliah serta memahami relevansi mata kuliah.	Ketepatan memahami pentingnya mempelajari mata kuliah Hukum Surat Berharga.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	10 %
<b>2</b>	Sub-CPMK-2: mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan aspek hukum surat berharga, serta pentingnya surat berharga dan selain itu mahasiswa mampu mempergunakannya untuk memecahkan kasus dalam surat berharga.	Ketepatan menjelaskan sejarah dan perjalanan, serta kedudukan dan tujuan konstitusi Ketepatan menjelaskan Kegunaan surat berharga dan memahami dasar penerbitan surat berharga.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Latar belakang penerbitan surat berharga.	10 %
<b>3</b>	Sub-CPMK-3: Mampu memahami fungsi dan dasar hukum penerbitan surat berharga	Ketepatan menjelaskan dasar penerbitan surat berharga dan para pihak yang terlibat didalam wesel.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pihak-pihak yang terlibat dalam surat wesel. Jenis-jenis surat wesel.	10 %
<b>4</b>	Sub-CPMK-4: Mampu memahami fungsi dan dasar hukum penerbitan surat berharga	Ketepatan menjelaskan dasar penerbitan surat berharga dan para	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+B	e-Learning dan platform media lainnya.	Jenis-jenis surat wesel.	10 %

		pihak yang terlibat didalam wesel.	D = 41-55 E = 0 – 40	M:(1+1)x(2x60”)]			
5	Mampumenjelaskan tentang surat cek dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.	Ketepatan menjelaskan Pengertian surat cek dan menelaah pihak-pihat yang terlibat didalamnya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Pengertian Surat Cek. Pihak-pihak yang terlibat dalam surat Cek.	10 %
6	Mampumenjelaskan Dasar-dasar hukum penerbitan dan pemberlakuan surat berharga.	Ketepatan menjelaskan Kekhususan mengenai dasar hukum serta pemberlakuan surat berharga	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Dasar hukum penerbitan surat berharga.	10 %
7	Mampumenjelaskan Dasar-dasar hukum penerbitan dan pemberlakuan surat berharga.	Ketepatan menjelaskan Kekhususan mengenai dasar hukum serta pemberlakuan surat berharga	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c. Kuliah; d. Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Pemberlakuan surat berharga.	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
9	Sub-CPMK-9: Mampumenjelaskan Berbagai aspek surat berharga meliputi fungsi dan pentingnya, serta operasional surat berharga..	Ketepatan menjelaskan Fungsi surat berharga dan operasionalnya.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Fungsi surat berharga. Operasional surat berharga.	10 %
10	Sub-CPMK-10: Mampumemahami surat wesel.	Ketepatan menjelaskan Makna surat wesel.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Memahami surat wesel	10 %
11	Sub-CPMK-11: Mampumemahami	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100	a. Kuliah; b. Diskusi	e-Learnin	Memahami surat surat cek	10 %

	mi surat cek	Makna surat cek	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c. [TM:1x (2x50”); [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	g dan platform media lainnya.			
12	Sub-CPMK-12: Mampumemahami surat sanggup	Ketepatan menjelaskan Surat sanggup	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”); c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Memahami surat sanggup	10 %	
13	Sub-CPMK-13: Mampumemahami promes dan bilyet giro	Ketepatan menjelaskan Makna promes dan bilyet giro	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”); c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Memahami surat promes dan bilyet giro	10 %	
14	Sub-CPMK-14: Mampumemahami yang dimaksud dengan saham	Ketepatan menjelaskan saham	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”); c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Memahami surat saham	10 %	
13	Sub-CPMK-15: Mampumemahami yang dimaksud dengan obligasi.	Ketepatan menjelaskan obligasi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”); c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya. -	Memahami obligasi.	10 %	
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>							





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTASHUKUM  
PRODIILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusun an</b>
<b>Perancangan Peraturan Per-UU-an</b>	<b>FA176259</b>	HTN	T=2 P= 1	VII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>CapaianPembel ajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius.</li> <li>Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa.</li> <li>Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMPI LAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu,pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</li> <li>Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> <li>Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus.</li> <li>Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMPI LAN KHUSUS</b>	Mampu dan memahami tata cara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dan memahami proses dan mekanismenya, serta penerapan bahasa dan penulisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
<b>CPMK</b>	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar konstitusi dan hukum konstitusi dengan benar.</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan tentang eksistensi konstitusi dan hukum konstitusi dalam konstelasi ketatanegaraan modern dengan baik.</p>				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu memahami arah tujuan pembelajaran mata kuliah.</li> <li>Mampu menjelaskan rangkaian dan landasan hukum penyusunan perundang-undangan</li> <li>Mampu menjelaskan proses, mekanisme, dan sistematika</li> </ol>				

		<p>penyusunan UU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mampu menjelaskan susunan, penulisan, dan tahapan pembentukan PERPPU.</li> <li>5. Mampu memahami proses dan mekanisme penyusunan PP.</li> <li>6. Mampu memahami proses dan mekanisme penyusunan Perda</li> <li>7. Memahami Bahasa peraturan per-UU-an dan bentuk rancangan suatu UU.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan hukum dalam bidang perancangan Perundang-undangan, serta kemampuan berpikir logis dan sistematis yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan Perundang-undangan di Indonesia, sehingga mahasiswa diharapkan dapat memahami, mengerti serta mampu secara praktis menyusun dan merancang suatu Peraturan Perundang-undangan	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah dan Pengantar Mata Kuliah.</li> <li>2. Pengertian Perancangan dan Landasan Hukum Penyusunan Per-UU-an.</li> <li>3. Pengertian Perancangan dan Landasan Hukum Penyusunan Per-UU-an lanjutan</li> <li>4. Proses dan Mekanisme Pembentukan Undang-Undang</li> <li>5. Sistematika dan Kerangka Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>6. Susunan Penulisan dan Proses dan Mekanisme Pembentukan PERPPU.</li> <li>7. Susunan Penulisan dan Proses dan Mekanisme Pembentukan PERPPU lanjutan</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Proses dan Mekanisme Pembentukan PP.</li> <li>10. Proses dan Mekanisme Pembentukan PP lanjutan</li> <li>11. Proses dan Mekanisme Pembentukan Perpres.</li> <li>12. Proses dan Mekanisme Peraturan Daerah</li> <li>13. Bahasa Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>14. Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>15. Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan lanjutan</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p><b>Daftar Referensi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HAS Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan, Konpress dan Tatanusa, Jakarta, 2010.</li> <li>2. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konpress, Jakarta, 2010.</li> <li>3. Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandar Maju, Bandung, 1995.</li> <li>4. Rosyidi Ranggawidjaja, Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>5. Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.</li> </ol> <p>Pendukung :</p>	
<b>Dosen Pengampu</b>		
<b>Matakuliah syarat</b>	<b>Perancangan Peraturan Per-UU-an.</b>	

Ming gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobo tPeni ilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami arah dan tujuan pembelajaran mata kuliah serta memahami istilah dalam perancangan peraturan.	Ketepatan memahami tahapan pembelajaran semester dan memahami perlunya mempelajari mata kuliah Perancangan peraturan per-UU-an.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	10 %
2	Sub-CPMK-2: dapat mengetahui dan memahami pengertian dan dasar-dasar hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.	Ketepatan menjelaskan pengertian perumusan peraturan perundang-undangan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian perancangan dan perumusan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum penyusunan peraturan perundang-undangan	10 %
3	Sub-CPMK-3: dapat mengetahui dan memahami pengertian dan dasar-dasar hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan lanjutan	Ketepatan menjelaskan pengertian perumusan peraturan perundang-undangan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian perancangan dan perumusan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum penyusunan peraturan perundang-undangan lanjutan	10%
4	Sub-CPMK-4: Mampumemaha mi proses dan mekanisme	Ketepatan menjelaskan proses, tahapan	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”)]	e-Learning dan platform	Proses dan mekanisme pembentukan UU	10 %



	pembentukan UU	pembentukan UU	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	]; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60 ”)]	media lainnya.		
5	Sub-CPMK-5: Mampumemahami proses dan mekanisme pembentukan UU	Ketepatan menjelaskan proses, tahapan pembentukan UU	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”) ]; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60 ”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Sistematika kerangka perundang-undangan.	10 %
6	Mampumenjelaskan susunan penulisan dan mekanisme pembentukan PERPPU	Ketepatan menjelaskan kekhususan tata cara penulisan dalam pembentukan Perppu	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”) ]; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60 ”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Susunan penulisan dan proses pembentukan Perppu. Mekanisme pembentukan Perppu.	10 %
7	Mampumenjelaskan susunan penulisan dan mekanisme pembentukan PERPPU lanjutan	Ketepatan menjelaskan kekhususan tata cara penulisan dalam pembentukan Perppu	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”) ]; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60 ”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Susunan penulisan dan proses pembentukan Perppu. Mekanisme pembentukan Perppu lanjutan	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
9	Sub-CPMK-9: Mampumenjelaskan mekanisme Pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden..	Ketepatan menjelaskan Kekhususan tahapan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”) ]; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60 ”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Proses dan mekanisme pembentukan PP.	10 %
10	Sub-CPMK-10: Mampumenjelaskan mekanisme Pembentukan peraturan pemerintah dan	Ketepatan menjelaskan Kekhususan tahapan pembentukan peraturan pemerintah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50”) ]; c. [PT+B M:(1+1)	e-Learning dan platform media lainnya.	Proses dan mekanisme pembentukan PP lanjutan	10 %

	peraturan presiden..	dan peraturan presiden.		)x(2x60”)]			
11	Sub-CPMK-11: Mampumenjelaskan mekanisme pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden..	Ketepatan menjelaskan Kekhususan tahapan pembentukn peraturan pemerintah dan peraturan presiden.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Proses dan mekanisme pembentukan Perpres.	10 %
12	Sub-CPMK-12: Mampumenjelaskan proses pembentukan peraturan daerah bail provinsi dan kabupaten.	Ketepatan menjelaskan Kekhususan tentan mekanisme dan isi peraturan daerah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Proses dan mekanisme pembentukan peraturan daerah. Perda Provinsi dan perda abupaten.	10 %
13	Sub-CPMK-13: Mampumenjelaskan Dan memahami bahasa dalam perundang-undangan, bentuk Rancangan Undang-Undang	Ketepatan menjelaskan kekhususan lembaga, konsep, dan perbandingan, serta perbedaan sifat konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Bahasa peraturan perundang-undangan	10 %
14	Sub-CPMK-14: Mampumenjelaskan Dan memahami bahasa dalam perundang-undangan, bentuk Rancangan Undang-Undang	Ketepatan menjelaskan kekhususan lembaga, konsep, dan perbandingan, serta perbedaan sifat konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Bentuk rancangan perundang-undangan	10 %
15	Sub-CPMK-15: Mampumenjelaskan Dan memahami bahasa dalam perundang-undangan, bentuk Rancangan Undang-	Ketepatan menjelaskan kekhususan lembaga, konsep, dan perbandingan, serta perbedaan sifat konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kulia h; b. Disku si[TM :1x(2 x50”)]; c. [PT+ BM:(1+1)x	e-Learning dan platform media lainnya.	Bentuk rancangan perundang-undangan lanjutan	10 %

	Undang			(2x60 ”]			
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTASHUKUM  
PRODIILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusun an</b>
<b>Hukum Kepemiluan</b>	<b>FA176378</b>	HTN	T=2 P= 1	VII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	

<b>CapaianPembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>	
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius.</li> <li>b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa.</li> <li>c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.</li> </ul>
	<b>CPL2 KETRAMPI LAN UMUM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu,pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>c. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</li> <li>d. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> <li>e. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus.</li> <li>f. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.</li> </ul>
	<b>CPL3 KETRAMPI LAN KHUSUS</b>	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memiliki pemahaman dankemampuan mandiri menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yangterjadi dalam penyelenggaraan Pemilu.
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>	
	<b>CPMK</b>	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar konstitusi dan hukum konstitusi dengan benar.</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan tentang eksistensi konstitusi dan hukum konstitusi dalam konstelasi ketatanegaraan modern dengan baik.</p>
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>	
<b>Sub-CPMK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami arah tujuan pembelajaran mata kuliah.</li> <li>2. Mampu menjelaskan perlunya Pemilu dalam negara demokrasi</li> <li>3. Mampu menjelaskan hubungan Pemilu dengan penyelenggaraan negara.</li> <li>4. Mampu menjelaskan fungsi, dasar, dan sistem Pemilu.</li> </ul>	

					<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mampu memahami sejarah kepemiluan di Indonesia.</li> <li>6. Mampu memahami peranan partai politik dan dasar-dasar demokrasi.</li> <li>7. Memahami permasalahan, kedudukan, peserta, penyelenggara, dan proses tahapan Pemilu.</li> </ol>		
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan hukum dalam bidang perancangan Perundang-undangan, serta kemampuan berpikir logis dan sistematis yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan Perundang-undangan di Indonesia, sehingga mahasiswa diharapkan dapat memahami, mengerti serta mampu secara praktis menyusun dan merancang suatu Peraturan Perundang-undangan						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah, latar belakang dan arti penting pembelajaran mata kuliah</li> <li>2. Gambaran umum pengertian pemilu dan patrtai politik.</li> <li>3. Gambaran umum pengertian pemilu dan patrtai politik lanjutan</li> <li>4. Pengertian Pemilu</li> <li>5. Pengertian landasan hukum</li> <li>6. Pengertian demokrasi</li> <li>7. Fungsi, asas, dan sistem pemilu di Indonesia</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Sejarah Pemilu di Indonesia</li> <li>10. Sejarah Pemilu di Indonesia lanjutan</li> <li>11. Sejarah Partai Politik dan Pemilu</li> <li>12. Sejarah Partai Politik dan Pemilu lanjutan</li> <li>13. Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu.</li> <li>14. Tahapan Pemilu.</li> <li>15. Tahapan Pemilu Lanjutan</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Affan Gaffar, Politik, Demokrasi, dan Faham Integralistik, Dalam Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.</li> <li>2. Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia Jakarta, 1986.</li> <li>3. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu, Dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Konteks Demokrasi Pancasila, Kumpulan Esay Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.</li> <li>4. Bondan Gunawan, Apa itu Demokrasi. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.</li> <li>5. Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002.</li> </ol> <p>Pendukung :</p>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Kepemiluan						
Ming gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ <i>Estimasi Waktu</i> ]		Materi Pembelajaran [ <i>Pustaka</i> ]	Bobo tPeni laian (%)
		(3)	Kriteria & Bentuk	Luring ( <i>offline</i> )	Daring ( <i>online</i> )		

(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memahami arah dan tujuan pembelajaran mata kuliah serta memahami istilah dalam perancangan peratu	Mahasiswa memahami urgensi memahami hukum Pemilu dalam kerangka konsentrasi Hukum Tata Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu Menjelaskan Latar belakang dan arti penting mempelajari mata kuliah Pemilu dan Kepartaian	Ketepatan menjelaskan latar belakang dan arti penting Pemilu	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Gambaran umum pengertian pemilu dan partai politik.	10 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu Menjelaskan Latar belakang dan arti penting mempelajari mata kuliah Pemilu dan Kepartaian Lanjutan	Ketepatan menjelaskan latar belakang dan arti penting Pemilu	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Gambaran umum pengertian pemilu dan partai politik lanjutan	10 %
4	Sub-CPMK-4: Mampu menjelaskan Pengertian Pemilu	Ketepatan menjelaskan Relevansi Pemilu dengan negara Demokrasi, serta memahami peranan Partai Politik.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian Seputar Pemilu	10 %
5	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan kaitan pemilu dengan negara hukum	Ketepatan menjelaskan Relevansi Pemilu dengan negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+B	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian Seputar landasan hukum	10 %

	PengertianPartai Politik,Kaitan Partai politik dengannegara hukumdan demokrasi	Demokrasi, serta memahami peranan Partai Politik.	D = 41-55 E = 0 – 40	M:(1+1)x(2x60”)]			
6	Sub-CPMK-6: MampumenjelaskanKaitan Partai politik dengannegara hukumdan demokrasi	Ketepatan menjelaskan Relevansi Pemilu dengan negara Demokrasi, serta memahami peranan Partai Politik.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Pengertian Seputar Pemilu demokrasi	10%
7	Mahasiswamampu Menjelaskanfungsi, asas dansistem pemilu, fungsi dan sistemkepartaia n	Ketepatan menjelaskan fungsi, asas, dan sistem Pemilu	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Fungsi, asas, dan sistem pemilu dan sejarah Pemilu di Indonesia	10 %
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswamampu Menjelaskansejarah pemilu dan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia	.Ketepatan menjelaskan sejarah pemilu berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Sejarah Pemilu di Indonesia	10 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswamampu Menjelaskansejarah pemilu dan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia lanjutan	.Ketepatan menjelaskan sejarah pemilu berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learnin g dan platform media lainnya.	Sejarah Pemilu di Indonesialanjutan	10 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswamampu Menjelaskansejarah pemilu dan	.Ketepatan menjelaskan sejarah pemilu berdasarkan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)];	e-Learnin g dan platform media	Sejarah Partai Politik dalam kontek Pemilu	10 %

	konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia	konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.	E = 0 – 40	c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	lainnya.		
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu Menjelaskan sejarah pemilu dan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia lanjutan	.Ketepatan menjelaskan sejarah pemilu berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Sejarah Partai Politik dalam konteks Pemilu lanjutan	10 %
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu Menjelaskan tentang partai politik, dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	Ketepatan menjelaskan Dan mengetahui peranan Partai Politik dan asas penyelenggaraan Pemilu.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu.	10 %
14	Sub-CPMK-14: Mahasiswa mampu menjelaskan masalah pemilihan peserta Pemilu, tahapan pemilu dan sengketa pemilu	Ketepatan dalam menjelaskan masalah pemilihan meliputi norma, peserta, penyelenggara,	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Tahapan Pemilu dari awal sampai akhir penyelenggaraan.	10 %
15	Sub-CPMK-15: Mahasiswa mampu menjelaskan masalah pemilihan peserta Pemilu, tahapan pemilu dan sengketa Pemilu lanjutan	Ketepatan dalam menjelaskan masalah pemilihan meliputi norma, peserta, penyelenggara,	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Tahapan Pemilu dari awal sampai akhir penyelenggaraan.	10 %
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						






RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	FA176108	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
<b>CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila</li> <li>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa</li> <li>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> <li>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur</li> <li>Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data</li> </ol>				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar dan Kontrak Pembelajaran, Hakikat dan Tantangan KWN, Esensi dan Urgensi Identitas Nasional serta Dinamika dan Tantangannya</li> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan Urgensi Integrasi Nasional dan tantangannya, Nilai dan Norma Konstitusional UUD RI 1945 serta Dinamika dan Tantangan Konstitusi, Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dan Tantangannya</li> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Hak Asasi Manusia</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Kewarganegaraan (Kwn) pada dasarnya membahas tentang ke-Indonesiaan yakni: menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia, dengan demikian akan dapat menjadi warga negara yang baik dan terdidik (Smart and good citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis..				
<b>Bahan Kajian /</b>	1. Kontrak Kuliah				

<b>Materi Pembelajaran</b>		2. Hakikat KWN 3. Tantangan KWN 4. Esensi dan Urgensi Identitas Nasional 5. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional 6. Urgensi Integrasi Nasional 7. Tantangan Urgensi Integrasi Nasional 8. Ulangan Akhir Semester 9. Nilai dan Norma Konstitusional UUD RI 1945 10. Dinamika dan Tantangan Konstitusi 11. Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dan Tantangannya 12. Hakikat Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 13. Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 14. Hak Asasi Manusia 15. Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia 16. Ulangan Akhir Semester					
<b>Pustaka</b>		Daftar Referensi: 1. Kemenristekdikti. 2016. Modul Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristekdikti. <b>Pendukung :</b> - Armaidly Armawi, Geostrategi Indonesia, Jakarta, Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi, 2006 - Azyumardi Azra, paradigma Baru Pendidikan Nasional dan Rekonstruksi dan Demokratisasi, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002 - Bahar, Dr. Saefrodin, "Konteks Kenegaraan, Hak Asasi Manusia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000. - Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, UGM Press, Yogyakarta 2005. - Slamet Soemiarso, Geopolitik Indonesia, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006.					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Pendidikan Kewarganegaraan					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan Kontrak dan Pengantar Kuliah	Kejelasan dan Pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menejelaskan Kontrak dan Pengantar Kuliah	10%
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa	• Ketepatan menjelaskan	A = 86-100	a. Kuliah; b. Diskusi [	<b>eLearning dan</b>	1. Konsep dan Urgensi Pendidikan	10 %

	Memahami hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	TM:1x(2x50"); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>platform media lainnya.</b>	2. Alasan Diperlukannya Pendidikan Kewarganegaraan 3. Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Kewarganegaraan	
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa Memahami hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	• Ketepatan menjelaskan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50"); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	4. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan	10 %
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu memahami dan menguasai Esensi dan Urgensi Identitas Nasional	• Memahami Kewarganegaraan dalam konteksekarang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50"); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Konsep dan Urgensi Kewarganegaraan dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia 2. Kewarganegaraan dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.	10 %
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu memahami dan menguasai Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional	• Memahami Kewarganegaraan dalam konteksekarang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50"); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Konsep dan Urgensi Kewarganegaraan dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia 2. Kewarganegaraan dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.	10%
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu memahami dan menguasai mengenai Urgensi Integrasi Nasional	• Mampu menjelaskan Urgensi Integrasi Nasional dan tantangannya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50"); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60") ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Konsep Urgensi Integrasi Nasional dan tantangannya 2. Alasan pentingnya Kajian Urgensi Integrasi Nasional dan tantangannya 3. Argumen tentang Urgensi Integrasi Nasional dan tantangannya	10 %
7	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mampu memahami dan menguasai	• Mampu menjelaskan Urgensi Integrasi Nasional dan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50"); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Konsep Urgensi Integrasi Nasional dan tantangannya 2. Alasan pentingnya Kajian Urgensi	10 %

	tantangan urgensi integrasi nasional	tantangannya	70 D = 41-55 E = 0 – 40	M:(1+1)x(2x60")]	<b>lainnya.</b>	Integrasi Nasional dan tantangannya 3. Argumen tentang Urgensi Integrasi Nasional dan tantangannya	
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9</b>	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik	• Memahami dan menganalisis internalisasi nilai, norma, dan etika akademik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Pengertian nilai, norma, dan etika akademik; 2. Alasan pentingnya Kajian internalisasi nilai, norma, dan etika akademik	10 %
<b>10</b>	Sub-CPMK-10 Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik lanjutan	• Memahami dan menganalisis internalisasi nilai, norma, dan etika akademik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Pengertian nilai, norma, dan etika akademik; 2. Alasan pentingnya Kajian internalisasi nilai, norma, dan etika akademik	10 %
<b>11</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menganalisis Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dan Tantangannya	• Menganalisis Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dan Tantangannya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Argumen tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara 2. Argumen tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara	10 %
<b>12</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menganalisis Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945	• Menganalisis dan mengimplementasikan Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Dinamika dan Tantangan Demokrasi Indonesia 2. Esensi dan Urgensi Demokrasi	10 %
<b>13</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menjelaskan Hak Asasi Manusia	• Memahami dan mengimplementasikan HAM	A = 86-100 B = 71-85 C =	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM	<b>eLearning dan platform media</b>	1. Sumber Historis, Sosiologis, Pemberlakuan HAM 2. Pelaksanaan HAM di Indonesia	10 %

			56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	:(1+1)x(2x 60”)]	<b>lainnya.</b>			
<b>14</b>	Sub-CPMK-14: Mahasiswa mampu menjelaskan Hak Asasi Manusia lanjutan	• Memahami dan mengimpleme ntasikan HAM	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x6 0”)]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya.</b>	1. Sumber Historis, Sosiologis, Pemberlakuan HAM 2. Pelaksanaan HAM di Indonesia	10 %	
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu menjelaskan Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia	Ketepatan dalam menjelaskan Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya.</b>	Konsep dan urgensi implementasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia.	10%	
<b>15</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>							

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTASHUKUM PRODIILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>	
	<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>	

<b>KEWIRAUSAHAAN</b>	FA176114	MKDU	T=2 P= 1	II	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> <li>Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu melaksanakan fungsi organisasi (pemasaran, operasi, sumber daya manusia, keuangan, dan strategi) pada level operasional di berbagai tipe organisasi;</li> <li>Mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis menjadi rencana operasional organisasi pada level fungsional;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi;			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu mahasiswa mampu Memiliki Karakter Kewirausahaan</li> <li>Mahasiswa mampu Memiliki Kompetensi Komunikasi dan Interperson</li> <li>Mahasiswa mampu Menguasai Prinsip-prinsip Kepemimpinan dan Motivasi</li> <li>Mahasiswa Memiliki Kemampuan Inovasi serta Menciptakan Produk dan Layanan yang Unggul</li> <li>Mahasiswa Menguasai Konsep Manajemen Pemasaran;</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah kewirausahaan mengajarkan bagaimana menjadi wirausahawan yang memiliki ide atau gagasan usaha menjadi suatu lapangan usaha dan dengan memahami situasi dan kondisi yang terjadi disekitar dapat mencetak wirausahawan yang sukses dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Mata kuliah tersebut juga merupakan implementasi dari berbagai teori yang diajarkan dalam kewirausahaan sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi wirausahawan baru yang memiliki ide dan implementasi mengenai lapangan usaha baru yang dapat memajukan perekonomian pribadi, perusahaan, agama, dan negara				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak dan Pengantar Kuliah</li> <li>Karakter Kewirausahaan</li> <li>Kompetensi Komunikasi dan Interperson.</li> <li>Prinsip-prinsip Kepemimpinan dan Motivasi.</li> <li>Prinsip-prinsip Kepemimpinan dan Motivasi lanjutan</li> <li>Inovasi serta Menciptakan Produk dan Layanan yang Unggul</li> <li>Inovasi serta Menciptakan Produk dan Layanan yang Unggul lanjutan</li> <li>Ulangan Tengah Semester</li> </ol>				


	9. Menguasai Konsep Manajemen Pemasaran 10. Menguasai Konsep Manajemen Pemasaran Lanjutan 11. Konsep Manajemen Organisasi 12. Nilai-nilai Ekonomi Etika Bisnis 13. Nilai-nilai Etika Bisnis 14. Mengimplementasikan Konsep Kewirausahaan 15. Mengimplementasikan Konsep Kewirausahaan lanjutan 16. Ulangan Akhir Semester						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi:						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suryana (2013), Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta</li> </ul>						
	<b>Pendukung :</b> Panduan penyusunan Proposal PKM-K, Belmawa, Kemristek Dikti, 2015, Jakarta						
<b>DosenPengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Kewirausahaan						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria&Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menjelaskan Kontrak dan Pengantar Kuliah	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menjelaskan Kontrak dan Pengantar Kuliah Kewirausahaan	10%
2	Memahami dan Memiliki Karakter Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa dapat menyebutkan konsep dasar kewirausahaan</li> <li>Mahasiswa dapat menyebutkan sifat wirausaha</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Karakter Kewirausahaan 2. Menentukan Peluang Usaha 3. Ketegasan dalam Aspek Produksi	10 %
3	Memahami dan Memiliki Kompetensi Komunikasi dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa dapat lancar dan tepat dalam berkomunikasi</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C =	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B	<b>eLearning dan platform media</b>	1. Ilmu Komunikasi 2. Berinteraksi	10 %

	Interpersonal	dengan orang lain	56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	M:(1+1)x (2x60")]	<b>lainnya.</b>		
4	Mampu Menguasai Prinsip-prinsip Kepemimpinan dan Motivasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa dapat dengan lancar dan tepat untuk memimpin orang</li> <li>• Mahasiswa dapat dengan lancar dan tepat untuk memotivasi diri dan orang lain</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kepemimpinan dan Motivasi Manajemen Organisasi	10 %
5	Mampu Menguasai Prinsip-prinsip Kepemimpinan dan Motivasi Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa dapat dengan lancar dan tepat untuk memimpin orang</li> <li>• Mahasiswa dapat dengan lancar dan tepat untuk memotivasi diri dan orang lain</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kepemimpinan dan Motivasi Manajemen Organisasi	10 %
6	Memiliki Kemampuan Inovasi serta Menciptakan Produk dan Layanan yang Unggul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa secara lancar dan tepat dapat memberikan keunggulan bersaing dan menjadikan kreatifitas sebagai pola hidup</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kreativitas dan Inovasi Penetapan, Produk Unggul Manajemen, Inovasi	10 %
7	Memiliki Kemampuan Inovasi serta Menciptakan Produk dan Layanan yang Unggul lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa secara lancar dan tepat dapat memberikan keunggulan bersaing dan menjadikan kreatifitas sebagai pola hidup</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kreativitas dan Inovasi Penetapan, Produk Unggul Manajemen, Inovasi	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						



9	Mahasiswa mampu Menguasai Konsep Manajemen Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa dapat merancang strategi bauran pemasaran</li> <li>Mahasiswa dapat membuat segmen dan menentukan target pasar</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pemasaran, Produk yang Unggul	10 %
10	Mahasiswa mampu Menguasai Konsep Manajemen Pemasaran lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa dapat merancang strategi bauran pemasaran</li> <li>Mahasiswa dapat membuat segmen dan menentukan target pasar</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pemasaran, Produk yang Unggul	10 %
11	Menguasai Konsep Manajemen Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>merancang struktur organisasi dalam perusahaan</li> <li>Mahasiswa dapat mengatur bagaimana mengatasi konflik dalam perusahaan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Manajemen • Organisasi dan Evaluasi Kinerja	10 %
12	Mampu Menginternalisasi Nilai-nilai Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa dapat mengetahui dasar pemikiran ekonomi</li> <li>Mahasiswa dapat merancang kebijakan yang didasarkan etika bisnis</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Etika Bisnis	10 %
13	Mampu Menginternalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa dapat</li> </ul>	A = 86-100	a. Kuliah; b. Diskusi[	<b>eLearning dan</b>	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Etika	10 %

	si Nilai-nilai Etika Bisnis	mengetahui dasar pemikiran ekonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa dapat merancang kebijakan kebijakan yang didasarkan etika bisnis</li> </ul>	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	TM:1x(2x50"); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>platform media lainnya.</b>  -	Bisnis	
14	Mengimplementasikan Konsep Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan hingga akhir semester</li> <li>Mahasiswa mampu melakukan praktik usaha</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50"); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Praktik Kewirausahaan	10%
15	Mengimplementasikan Konsep Kewirausahaan lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan hingga akhir semester</li> <li>Mahasiswa mampu melakukan praktik usaha</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50"); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Praktik Kewirausahaan	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>

<b>HUKUM ISLAM</b>	FA176224	MKDU	<b>T=2 P= 1</b>	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>2. Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif; serta menggunakannya sesuai paradigma Islam rahmatan lil ‘alamin</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ajaran dan nilai-nilai Islam bagi kepentingan bangsa dan umat manusia</li> <li>2. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan hukum islam dalam sistem hukum Indonesia</li> <li>2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, konsep asas dan sumber hukum Islam;</li> </ol>			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan Syariat, Hukum Islam, Fiqih;</li> <li>2. Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber-sumber Hukum Islam</li> <li>3. Mahasiswa mampu menjelaskan Prinsip-prinsip dan Tujuan Hukum Islam</li> <li>4. Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-asas Sistem Tata Negara Dalam Hukum Islam.</li> <li>5. Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-asas Sistem pemerintahan dalam Hukum Islam</li> <li>6. Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-asas Hukum Pidana Islam</li> <li>7. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Islam di Indonesia</li> <li>8. Mahasiswa mampu menjelaskan Peradilan Agama di Indonesia</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Syariat, Hukum Islam, Fiqih; Sumber Hukum Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuan Hukum: Islam: Asas-Asas Sistem Tata Negara Dalam Hukum Islam: Asas-Asasa Sistem Pemerintahan Dalam Hukum Islam: AsasAsas Hukum Pidana Islam: Hukum Islam di Indonesia: Peradilan Agama di Indonesia.</p>				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak dan Pengantar Kuliah</li> <li>2. Pengertian dan defenisi Syariat, Hukum Islam, Fiqih</li> <li>3. Perbedaan antara Syariat dan Fiqih</li> <li>4. Perbandingan antara Syariat, Fiqih;</li> </ol>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengertian Sumber Hukum Islam, Sumber-Sumber Hukum Islam: AlQuraan; Sunnah (Hadist); Al Ra'yu (Ijtihad); Kaidah-Kaidah Fiqih dan al Ahkam alKhamza</li> <li>6. Prinsip-Prinsip Hukum Islam; Ciri-Ciri Hukum Islam:</li> <li>7. Sendi-Sendi Hukum Islam; Tujuan Hukum Islam.</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Konsep Negara dalam Islam, Tujuan Negara dalam Islam</li> <li>10. Dasar Hukum Ketatanegaraan dalam Islam, Asas-Asas Hukum Ketatanegaraan dalam Islam,</li> <li>11. Sistem Pemerintahan dalam Islam, Asas-Asas Pemerintahan dalam Islam, Dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam, Macam-macam Pemerintahan dalam Islam, Tugas dan kewenangan pemerintahan dalam Islam..</li> <li>12. Pengertian dan Defenisi Hukum Pidana Islam: Objek, Kajian, Tujuan dan Kegunaan Hukum Pidana Islam; Sistem Hukum Pidana Islam, Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif..</li> <li>13. Eksistensi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia, Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, Formalisasi Syariat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI).</li> <li>14. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia,</li> <li>15. Sumber Hukum Peradilan Agama, Kompetensi Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>
--	--

<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, 2006, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor; Ghalia Indonesia.</li> <li>2. Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih, dan Kanun, Jakarta: Sinar Grafika Abdul Wahhab Khallaf, 1994, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama</li> <li>3. Ahmad Hanafi, 1989, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5</li> <li>4. A. Djazuli, 2012, Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-8</li> <li>5. Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Total Kreasi Media</li> </ol>
	<b>Pendukung :</b> - Kompilasi Hukum Islam

<b>Dosen Pengampu</b>	
-----------------------	--

<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Islam
--------------------------	-------------


Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1 Menjelaskan Kontrak dan	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-	a. Kuliah; b. Diskusi TM: 1x(2x	<b>eLearning dan platform</b>	Menjelaskan kontrak dan pengantar kuliah hukum islam	10%

	Pengantar Kuliah		85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>m media lainnya.</b>		
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Syariat, Hukum Islam, Fiqih	• Ketepatan menjelaskan tentang Syariat, Hukum Islam, Fiqih	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian dan defenisi Syariat, Hukum Islam, Fiqih	10 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Syariat, Hukum Islam, Fiqih	• Ketepatan dalam menggunakan konsep teori dan prinsip syariat, hukum islam dan fiqh dalam pengembangan hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Perbedaan antara Syariat dan Fiqih	10 %
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Syariat, Hukum Islam, Fiqih	• Ketepatan dalam menggunakan konsep teori dan prinsip syariat, hukum islam dan fiqh dalam pengembangan hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Perbandingan antara Syariat, Fiqih; Latar belakang munculnya fikih; Ruang Lingkup Hukum Islam	10 %
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber Hukum Islam	• Ketepatan dalam menjelaskan sumber-sumber hukum islam • Ketepatan menginternalisasikan sumber-sumber hukum islam dalam pembelajaran	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian Sumber Hukum Islam, Sumber Sumber Hukum Islam: AlQuraan; Sunnah (Hadist); Al Ra’yu (Ijtihad); KaidahKaidah Fiqih dan al Ahkam alKhamza.	10 %
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu menjelaskan Prinsip dan Tujuan	• Ketepatan menginternalisasikan prinsip dan tujuan hukum islam dalam	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Asas-asas dan Prinsip Prinsip Hukum Islam; CiriCiri Hukum Islam	10 %

	Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>pembelajaran</li> <li>• Ketepatan memanfaatkan prinsip dan tujuan hukum islam dalam pemecahan masalah</li> </ul>	D = 41-55 E = 0 – 40	(2x60'')]			
7	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mampu menjelaskan Prinsip dan Tujuan Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menginternalisasikan prinsip dan tujuan hukum islam dalam pembelajaran</li> <li>• Ketepatan memanfaatkan prinsip dan tujuan hukum islam dalam pemecahan masalah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sendi-Sendi Hukum Islam; Tujuan Hukum Islam.	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas Sistem Tata Negara dalam Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menginternalisasikan asas-asas sistem Tata Negara dalam hukum islam pada pembelajaran</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teoritis dan prinsip hukum Sistem Tata Negara dalam Hukum Islam</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Konsep Negara dalam Islam, Tujuan Negara dalam Islam	10 %
10	Sub-CPMK-10 Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas Sistem Tata Negara dalam Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menginternalisasikan asas-asas sistem Tata Negara dalam hukum islam pada pembelajaran</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Dasar Hukum Ketatanegaraan dalam Islam, Asas-Asas Hukum Ketatanegaraan dalam Islam.	10 %

		teoritis dan prinsip hukum Sistem Tata Negara dalam Hukum Islam					
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas Sistem Pemerintahan Dalam Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menginternalisasikan asas-asas sistem Pemerintahan dalam hukum islam pada pembel-ajaran</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teoritis dan prinsip hukum Sistem Pemerintahan dalam Hukum Islam untuk pengembangan ilmu hukum</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sistem Pemerintahan dalam Islam, Asas-Asas Pemerintahan dalam Islam, Dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam, Macammacam Pemerintahan dalam Islam, Tugas dan kewenangan pemerintahan dalam Islam.	10 %
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas Hukum Pidana Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menginternalisasikan asas-asas Pidana Islam</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teoritis dan prinsip hukum pidana Islam untuk pengembangan ilmu hukum</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Objek, Kajian, Tujuan dan Kegunaan Hukum Pidana Islam; Sistem Hukum Pidana Islam, Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif; Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam	10 %
13	Sub-CPMK-13: Mampu Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Islam di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menginternalisasikan hukum islam di Indonesia</li> <li>• Kesesuaian pemahaman dengan penggunaan konsep konsep hukum Islam di Indonesia</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	Eksistensi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia, Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, Formalisasi Syariat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam	10 %

14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu menjelaskan Peradilan Agama di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menginternalisasi konsep dan teori peradilan agama di Indonesia dalam pembelajaran.</li> <li>• Kesesuaian penguasaan konsep dan teori dengan penerapan dalam peradilan agama</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	10%
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu menjelaskan Peradilan Agama di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menginternalisasi konsep dan teori peradilan agama di Indonesia dalam pembelajaran.</li> <li>• Kesesuaian penguasaan konsep dan teori dengan penerapan dalam peradilan agama</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sumber Hukum Peradilan Agama, Kompetensi Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama.	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM WARIS</b>	FA176235	MKDU	<b>T=2</b>	I	Juli 2021




(ADAT DAN BW)			P= 1	
	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua PRODI	
			Kanthi Rahayu,SH.,MH	
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>			
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>		
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> </ol>		
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;</li> </ol>		
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>			
	CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan dalam kasus dan konflik waris berdasarkan hukum adat yang bersifat plural, aneka ragam (bhinneka).</li> <li>Mahasiswa mampu memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan dalam kasus dan konflik waris berdasarkan hukum BW</li> </ol>		
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>			
Sub-CPMK	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis persoalan hukum berdasarkan konsep-konsep, teori, dan pendapat hukum serta mampu berpikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum mengenai waris berdasarkan Hukum Adat dan Hukum BW			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Mata kuliah ini membahas mengenai teori tentang materi hukum waris menurut Adat dan BW yaitu Sifat dan Sistem Waris Adat; Ahli Waris Dalam Hukum Adat dan Cara Pembagian Waris; Harta Yang Diwariskan Perkembangan Hukum Waris Adat, pembagian golongan ahli waris dan cara-cara mewaris, pengertian pewarisan berdasarkan Ab intestate dan testamentair, serta jenis-jenis testamen, kapan warisan terbuka menurut BW dan bagaimana jika antar pewaris meninggal dunia dalam waktu bersamaan, legitime portie ahli waris dari berbagai golongan, pewaris anak luar kawin yang diakui, pewarisan dalam perkawinan kedua, pewarisan bersama ahli waris anak luar kawin yang diakui, pewarisan janda/balu dalam perkawinan kedua, jenis harta waris menurut BW : harta campur, persatuan untung dan rugi serta persatuan hasil dan pendapatan, pewarisan dengan adanya ibreng si pewaris ketika masih hidup sesuai ketentuan Pasal 1086 dan Pasal 1096 BW, memahami lebih detail pewarisan testamentair dengan adanya olografis wasiat, open baar, dan geheim wasiat, pengertian legitime portie dan pergantian tempat, serta jenis wasiat erfsterlling dan legaat..</p>			
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak dan Pengantar Kuliah</li> <li>Sifat dan Sistem Waris Adat;</li> <li>Ahli Waris Dalam Hukum Adat</li> <li>Cara Pembagian Waris;</li> <li>Harta Yang Diwariskan Perkembangan Hukum Waris Adat</li> <li>Pengertian pewarisan berdasarkan Ab intestate dan testamentair</li> <li>jenis-jenis testamen</li> </ol>			

	8. Ulangan Tengah Semester 9. Warisan terbuka menurut BW 10. bagaimana jika antar pewaris meninggal dunia dalam waktu bersamaan 11. Legitime portie ahli waris dari berbagai golongan 12. Status pewaris anak luar kawin yang diakui 13. legitime portienya 14. wasiat erfsterlling dan legaat 15. wasiat erfsterlling dan legaat lanjutan 16. Ulangan Akhir Semester						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: 1. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, 2. aimbang Daru Nugroho, Hukum Waris di Indonesia, Penerbit Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, 2019, 3. Pitlo. 2004. Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda. Internusa : Jakarta 4. Mohd. Idris Ramulyono. 1993. Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat. Sinar Grafika : Jakarta <b>Pendukung :</b> KUH Perdata						
<b>DosenPengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Waris (Adat dan BW)						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan kontrak dan pengantar kuliah	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan Kontrak dan Pengantar Kuliah Hukum Waris	10%
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan mengenai sifat dan sistem waris adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Menjelaskan sifat dan sistem waris adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 –	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sifat dan Sistem Waris Adat	10 %

			40				
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa menjelaskan mengenai para ahli waris dan cara pembagian waris dalam hukum adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan Menjelaskan mengenai para ahli waris dan cara pembagian waris dalam hukum adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Ahli Waris Dalam Hukum Adat	10 %
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa menjelaskan mengenai para ahli waris dan cara pembagian waris dalam hukum adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan Menjelaskan mengenai para ahli waris dan cara pembagian waris dalam hukum adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Cara Pembagian Waris	10 %
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan mengenai harta yang diwariskan dan perkembangan hukum waris adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan Menjelaskan harta yang diwariskan dan perkembangan hukum waris adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Harta Yang Diwariskan 2. Perkembangan Hukum Waris Adat	10 %
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu menguraikan pengertian pewarisan berdasarkan Ab intestate dan testamentair, serta jenis-jenis testamen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan pengertian pewarisan berdasarkan Ab intestate dan testamentair, serta jenis-jenis testamen.</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian pewarisan berdasarkan Ab intestate dan testamentair;	10 %
7	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mampu menguraikan pengertian pewarisan berdasarkan Ab intestate dan testamentair,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan pengertian pewarisan berdasarkan Ab intestate dan testamentair, serta jenis-jenis testamen.</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Jenis-jenis testamen.	10 %

	serta jenis-jenis testamen.						
<b>8</b>	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
<b>9</b>	Sub-CPMK 9: Mahasiswa mampu menentukan kapan warisan terbuka menurut BW dan bagaimana jika antar pewaris meninggal dunia dalam waktu bersamaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan pengertian pewarisan berdasarkan Ab intestate dan testamentair, serta jenis-jenis testamen</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Warisan terbuka menurut BW	10 %
<b>10</b>	Sub-CPMK 10: Mahasiswa mampu menentukan kapan warisan terbuka menurut BW dan bagaimana jika antar pewaris meninggal dunia dalam waktu bersamaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan pengertian pewarisan berdasarkan Ab intestate dan testamentair, serta jenis-jenis testamen</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Bagaimana jika antar pewaris meninggal dunia dalam waktu bersamaan?	10 %
<b>11</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menganalisis legitime portie ahli waris dari berbagai golongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan legitime portie ahli waris dari berbagai golongan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Legitime portie ahli waris dari berbagai golongan	10 %
<b>12</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menganalisis status pewaris anak luar kawin yang diakui dan legitime portienya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan status pewaris anak luar kawin yang diakui dan legitime portienya</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pewaris anak luar kawin yang diakui	10 %
<b>13</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menganalisis status pewaris anak luar kawin yang diakui dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan status pewaris anak luar kawin yang diakui dan legitime</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D =	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Legitime portienya	10 %

	legitime portienya	portienya	41-55 E = 0 - 40		-		
14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu membedakan jenis wasiat erfsterling dan legaat	• Ketepatan menjelaskan jenis wasiat erfsterling dan legaat	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	eLearning dan platform media lainnya.	Jenis wasiat erfsterling dan legaat	10%
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu membedakan jenis wasiat erfsterling dan legaat lanjutan	• Ketepatan menjelaskan jenis wasiat erfsterling dan legaat	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	eLearning dan platform media lainnya.	Jenis wasiat erfsterling dan legaat	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>	
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>						
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>	

<b>HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS ISLAM</b>	FA176236	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang Hukum Perkawinan dan Waris Islam, dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi			
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
<b>Sub-CPMK</b>	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis dalam hukum perkawinan dan waris Islam sebagai dasar dalam penyelesaian masalah.				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar, azas-azas hukum perkawinan, perjanjian kawin, akibat perkawinan, bubar dan akibatnya perkawinan, dasar hukum, pengertian, dan sifat harta perkawinan, pembagian harta perkawinan dan membahas mengenai waris berdasarkan ajaran Islam, dasar hukum wars Islam, tujuan hukum kewarisan Islam, sistem kekerabatan dalam hukum waris Islam, asas/prinsip hukum waris Islam, unsur-unsur kewarisan Islam, hukum waris Islam diantara media media peralihan hak dalam Islam, jenis-jenis dan pembagian hukum ahli waris Islam, pola-pola pembagian warisan, pembagian warisan untuk kondisi-kondisi tertentu dan pembagian ahli waris Islam, dan pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak dan Pengantar Kuliah</li> <li>2. Pengertian dan azas-azas hukum perkawinan</li> <li>3. Pengertian dan azas-azas hukum perkawinan lanjutan</li> <li>4. Syarat materil perkawinan</li> <li>5. Syarat formil perkawinan</li> <li>6. Perjanjian kawin</li> <li>7. Putusnya perkawinan dan akibat-akibat</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Dasar hukum kewarisan Islam</li> <li>10. Dasar hukum kewarisan Islam lanjutan</li> <li>11. Asas/prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam</li> </ol>				

	12. Asas/prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam lanjutan 13. Jenis Ahli Waris 14. Cara pembagian ahli waris 15. Radd dan 'aul 16. Ulangan Akhir Semester						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi:						
	1. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, Airlangga UP, Surabaya, 2006. 2. H. Saifuddin Arief. 2007. Hukum Waris Islam. PP Darujannah : Jakarta						
	<b>Pendukung :</b>						
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - Kompilasi Hukum Islam (KHI)							
<b>DosenPengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Perkawinan dan Waris Islam						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan kontrak dan pengantar kuliah	Kesejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan kontrak dan pengantar kuliah hukum perkawinan dan waris islam	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampumenguraikan mengenai Pengertian dan Azas-Azas perkawinan	• Ketepatan menjelaskan mengenai Pengertian dan Azas-Azas perkawinan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Dasar hukum perkawinan; 2. Pengertian perkawinan;	10 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampumenguraikan mengenai Pengertian dan	• Ketepatan menjelaskan mengenai Pengertian dan Azas-	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B	<b>eLearning dan platform media</b>	1. Azas – azas hukum perkawinan; 2. Unsur – unsur/ pranata hukum perkawinan.	10 %

	Azas-Azas perkawinan	Azas perkawinan	70 D = 41-55 E = 0 – 40	M:(1+1)x (2x60'')	<b>lainnya.</b>		
<b>4</b>	Sub-CPMK-4: Mahasiswa menguraikan syarat materil dan formil perkawinan	• Ketepatan menguraikan syarat materil dan formil perkawinan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Syarat – syarat perkawinan: Syarat materil	10 %
<b>5</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa menguraikan syarat materil dan formil perkawinan	• Ketepatan menguraikan syarat materil dan formil perkawinan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Syarat – syarat perkawinan: Syarat formil	10 %
<b>6</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu menguraikan perjanjian kawin	• Ketepatan menguraikan perjanjian kawin	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Perjanjian kawin	10%
<b>7</b>	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menganalisis penyebab putusnya perkawinan dan akibat-akibat putusnya perkawinan	• Ketepatan menganalisis penyebab putusnya perkawinan dan akibat-akibat putusnya perkawinan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Bubarnya perkawinan dan akibatnya	10 %
<b>8</b>	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						



9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan dasar hukum kewarisan Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan dasar hukum kewarisan Islam</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Dasar hukum waris Islam baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat positif di Indonesia;	10 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan dasar hukum kewarisan Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan dasar hukum kewarisan Islam</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Praktek-praktek kewarisan Islam dalam masyarakat Indonesia	10 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menganalisis asas/prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menganalisis asas/prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Beberapa prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam;	10 %
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menganalisis asas/prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menganalisis asas/prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam</li> <li>•</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Asas/prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam dalam kehidupan masyarakat muslim	10 %
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu mengkategorikan jenis dan pembagian ahli waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan mengkategorikan jenis dan pembagian ahli waris</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebab-sebab kewarisan dalam hukum waris Islam;</li> <li>2. Syarat dan kriteria ahli waris dalam ajaran Islam;</li> <li>3. Hijab (penghalang) dan mahjub dalam penentuan ahli waris.</li> </ol>	10 %

14	Sub-CPMK-14: Mahasiswa mampu mengkategorikan jenis dan pembagian ahli waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan mengkategorikan jenis dan pembagian ahli waris</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Cara pembagian ahli waris	10 %
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu menganalisis masalah-maslaah radd dan aul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menganalisis masalah-maslaah radd dan aul</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Cara pembagian tirkah dalam kasus radd dan aul	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
<b>HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KEPEGAWAIAN</b>	FA176228	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>	
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> </ol>
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;</li> </ol>
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>	
	<b>CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia</li> <li>Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi</li> </ol>
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>	
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa memahami tentang pengertian dan ruang lingkup ketenagakerjaan dan Kepegawaian</li> <li>Mahasiswa memahami tentang para pihak dalam hukum ketenagakerjaan dan Kepegawaian</li> <li>Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja dan aspek-aspek dalam hukum ketenagakerjaan dan Kepegawaian</li> <li>Mahasiswa memahami cara-cara dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja serta cara-cara penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dan Kepegawaian</li> </ol>	
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan dunia kerja beserta segala dinamika permasalahannya. Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak; syarat sah perjanjian; serta prosedur penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian. Mata kuliah ini sangat penting dan bermanfaat bagi para mahasiswa mengingat semakin berkembangnya praktik hukum ketenagakerjaan dan kepegawaian di Indonesia. Persoalan regulasi, implementasi	

	sampai eksekusi sistem hukum ketenagakerjaan dan kepegawaian masih sangat menarik dan aktual untuk mendapat kajian mendasar dari seluruh civitas akademika. Selain itu kemungkinan mahasiswa berurusan dengan ketenagakerjaan dan kepegawaian ketika kerja nanti akan sangat besar, sehingga mahasiswa sudah mempunyai modal yang cukup ketika berurusan dengan ketenagakerjaan dan kepegawaian di tempatnya bekerja						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak dan Pengantar Kuliah</li> <li>2. Pengertian dan ruang lingkup hukum ketenagakerjaan</li> <li>3. Pihak dalam hukum ketenagakerjaan</li> <li>4. Hubungan kerja dan Aspek-aspek hukum ketenagakerjaan</li> <li>5. Hubungan kerja dan Aspek-aspek hukum ketenagakerjaan lanjutan</li> <li>6. Pemutusan hubungan kerja dan Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan</li> <li>7. Pemutusan hubungan kerja dan Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan lanjutan</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Pengertian dan ruang lingkup, kedudukan, dan sumber hukum kepegawaian,</li> <li>10. Asas penyelenggaraan dan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN)</li> <li>11. Pengertian, jenis, status, kedudukan, fungsi, tugas, dan peran ASN, jabatan ASN, kelembagaan ASN, manajemen ASN, manajemen PPPK, hak dan kewajiban ASN, pelanggaran disiplin PNS,</li> <li>12. Penegakan hukuman disiplin PNS,</li> <li>13. pemberhentian PNS,</li> <li>14. Sengketa kepegawaian,</li> <li>15. Penyelesaian kasus-kasus dibidang kepegawaian (ASN).</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lalu Husni. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.</li> <li>2. Zulaimi Wahab, 2001. Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.</li> <li>3. Rozali Abdullah, SH, Hukum Kepegawaian</li> <li>4. Sastra Djatmika, SH., Drs. Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia</li> </ol> <b>Pendukung :</b> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan Kontrak Kuliah dan Pengantar Kuliah	Kejelasan dan Pemahaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan Kontrak Kuliah dan Pengantar Kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian	10 %


			D = 41-55 E = 0 – 40	(2x60'')			
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mengerti tentang konsep hukum ketenagakerjaan, Asas dan pemakaian istilah buruh, pekerja, pegawai dan karyawan dan mampu mengerti kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan konsep hukum ketenagakerjaan</li> <li>Mengidentifikasi pemakaian istilah buruh, pekerja, pegawai dan karyawan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian hukum ketenagakerjaan</li> <li>Asas hukum ketenagakerjaan</li> <li>Pengertian (pemakaian istilah) buruh, pekerja, pegawai, karyawan, tenaga kerja</li> <li>Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia: Ranah hukum privat ranah hukum public</li> </ol>	10 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mengerti tentang konsep hukum ketenagakerjaan, Asas dan pemakaian istilah buruh, pekerja, pegawai dan karyawan dan mampu mengerti kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan konsep hukum ketenagakerjaan</li> <li>Mengidentifikasi pemakaian istilah buruh, pekerja, pegawai dan karyawan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pihak dalam hukum ketenagakerjaan	10 %
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hubungan kerja: Hak dan kewajiban pekerja dan majikan	10 %

	kerja melalui perjanjian kerja		E = 0 – 40				
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hubungan kerja: Hak dan kewajiban pekerja dan majikan	10 %
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa memahami caracara dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan sifat hukum adat</li> <li>Membedakan corak hukum adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pemutusan Hubungan Kerja	10 %
7	Sub-CPMK-7: Mahasiswa memahami caracara dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan sifat hukum adat</li> <li>Membedakan corak hukum adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pemutusan Hubungan Kerja Lanjutan	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mengetahui bagaimana cara atau proses penyelesaian suatu sengketa antara tenaga kerja dan majikan/pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi cara atau proses penyelesaian suatu sengketa antara tenaga kerja dan majikan/pengusaha</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; ; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa: a. arbitrase b. mediasi c. Konsiliasi 2. Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui pengadilan (pengadilan Hubungan industrial):	10 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis dan menguraikan ruang lingkup, kedudukan dan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C =	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; ;	<b>eLearning dan platform media</b>	1. Ruang lingkup hukum kepegawaian 2. Kedudukan hukum kepegawaian dalam tata hukum Indonesia	10 %

	kedudukan dan sumber-sumber hukum kepegawaian di Indonesia.	sumber-sumber hukum kepegawaian di Indonesia.	56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>lainnya.</b>	3. Sumber Hukum Kepegawaian	
<b>11</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan asas, prinsip, nilai dan kode etik dalam penyelenggaraan manajemen ASN	• Mendeskripsikan asas, prinsip, nilai dan kode etik dalam penyelenggaraan manajemen ASN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN 2. Prinsip yang menjadi landasan profesi ASN 3. Kode Etik profesi ASN 4. Pengertian ASN 5. Jenis, Status dan Kedudukan ASN 6. Fungsi, tugas, dan peran ASN 7. Manajemen ASN	10 %
<b>12</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menganalisis hak-hak dan kewajiban ASN, pelanggaran disiplin PNS, serta akibat hukumnya	• Menganalisis hak-hak dan kewajiban ASN, pelanggaran disiplin PNS, serta akibat hukumnya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b> -	1. Penegakan hukuman disiplin bagi PNS 2. Jenis-jenis pemberhentian PNS	10 %
<b>13</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menganalisis hak-hak dan kewajiban ASN, pelanggaran disiplin PNS, serta akibat hukumnya	• Menganalisis hak-hak dan kewajiban ASN, pelanggaran disiplin PNS, serta akibat hukumnya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b> -	1. Jenis-jenis pemberhentian PNS 2. Tata cara dan Prosedur pemberhentian PNS 3. Hak-hak PNS yang diberhentikan	10 %
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu menerapkan norma dalam penyelesaian sengketa kepegawaian.	Menjelaskan norma dalam penyelesaian sengketa kepegawaian.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Pengertian sengketa kepegawaian – 2. Penyelesaian sengketa kepegawaian: 3. -Keberatan -Banding administrative -Upaya hukum	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu menerapkan norma dalam	Menjelaskan norma dalam penyelesaian sengketa kepegawaian.	A = 86-100 B = 71-85 C =	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]	<b>eLearning dan platform media</b>	1. Pengertian sengketa kepegawaian – 2. Penyelesaian sengketa kepegawaian: 3. -Keberatan	10%

	penyelesaian sengketa kepegawaian.		56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60") ]	<b>lainnya.</b>	4. -Banding administrative 5. -Upaya hukum	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



		<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>			Kode Dokumen FA
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks) T=2 P= 1	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM AGRARIA	FA176231	MKDU		I	Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang Hukum Agraria dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	1. Mahasiswa mampu Memahami dan mendalami pengertian agraria, hukum agraria, hukum tanah, pembedaan dan pokok bahasan hukum agraria 2. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum dan politik agraria kolonial yang meliputi hukum agraria kolonial dan politik agraria kolonial 3. Mahasiswa mampu memahami upaya penyusunan hukum agraria nasional, faktor- faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional, dan sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria 4. Mahasiswa mampu memahami Undang- Undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria Nasional, peraturan dan keputusan yang dicabut oleh UUPA, Tujuan UUPA, asas-asas dalam UUPA, dan UUPA didasarkan Pada Hukum Adat 5. Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Bangsa Indonesia dan hak menguasai dari negara atas tanah 6. Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat dan Hirarki hak atas tanah				


		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Ruang lingkup Hak Atas Tanah, dan Hak Milik Atas Tanah dan Hak Guna Usaha</li> <li>8. Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, dan Hak Atas Tanah yang bersifat sementara, Pengaturan Hak Pengelolaan, pengertian, subyek, dan kedudukan hak pengelolaan, terjadinya hak pengelolaan, kewenangan dalam hak pengelolaan</li> </ol>			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ilmu yang komprehensif mengenai hukum agraria positif yang didasarkan pada UUD 1945, beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Pembahasan tentang pengertian agraria, hukum agraria kolonial dan hukum agraria nasional, macam-macam hak atas tanah dalam UUPA UU No. 5 Tahun 1960, termasuk hak pengelolaan, perombakan penguasaan dan pemilikan tanah melalui Land Reform, perencanaan penggunaan tanah melalui penatagunaan tanah dan pembahasan mengenai pendaftaran tanah.</p>				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah dan Pengantar Kuliah</li> <li>2. Sejarah Hukum Agraria</li> <li>3. Sejarah Hukum Tanah</li> <li>4. Hukum dan politik agraria kolonial</li> <li>5. Hukum dan politik agraria kolonial lanjutan</li> <li>6. Sejarah hukum agraria kolonial</li> <li>7. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria nasional</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Hak ulayat masyarakat hukum adat</li> <li>10. Hak ulayat masyarakat hukum adat lanjutan</li> <li>11. Penjelasan tentang hak penguasaan atas tanah</li> <li>12. Penjelasan tentang hak penguasaan atas tanah lanjutan</li> <li>13. Hak – hak atas tanah</li> <li>14. Hak pengelolaan</li> <li>15. Land reform</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Boedi Harsosno; Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Waskito dan Hardi Arnowo. 2017. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Jakarta : Prenadamedia Group</li> <li>2. Boedi Harsono. Edisi Revisi 2007. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya). Jilid 1, Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.</li> <li>3. Urip Santoso. 2007. Hukum Agraria &amp; Hak – hak atas Tanah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.</li> <li>4. Widhi Handoko. Kebijakan Hukum Pertanahan : Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif Penulis. Thafa Media</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan pelaksanaannya</p>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Agraria				
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>

			Mahasiswa, [ Estimasi Waktu ]				
			Indikator	Kriteria & Bentuk			Luring (offline)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan kontrak kuliah dan pengantar kuliah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [ TM: 1x(2x50'') ]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan Kontrak Kuliah Hukum Agraria	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu memahami dan mendalami pengertian agraria, hukum agraria, hukum tanah, pembedangan dan pokok bahasan hukum agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman Hukum Agraria dan hukum tanah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [ TM: 1x(2x50'') ]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian hukum agraria	10 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu memahami dan mendalami pengertian agraria, hukum agraria, hukum tanah, pembedangan dan pokok bahasan hukum agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman Hukum Agraria dan hukum tanah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [ TM: 1x(2x50'') ]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian hukum tanah	10 %
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum dan politik agraria kolonial yang meliputi hukum agraria kolonial dan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman tentang hukum dan politik agraria kolonial</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [ TM: 1x(2x50'') ]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum dan politik agraria kolonial	10 %

	agraria kolonial						
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum dan politik agraria kolonial yang meliputi hukum agraria kolonial dan politik agraria kolonial lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman tentang hukum dan politik agraria kolonial</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM:1x(250'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum dan politik agraria kolonial lanjutan	10 %
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu memahami upaya penyusunan hukum agraria nasional, hukum agraria nasional, dan sejarah penyusunan Undang - Undang Pokok Agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman tentang sejarah hukum agraria kolonial</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sejarah hukum agraria kolonial	10 %
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu memahami Undang - Undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman tentang UUPA sebagai hukum agraria nasional</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	UUPA sebagai hukum agraria nasional	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hak ulayat masyarakat hukum adat	10 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu memahami dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman mengenai hak ulayat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM:1x(2x50'')];	<b>eLearning dan platform</b>	Hak ulayat masyarakat hukum adat lanjutan	10 %

	mendalami Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat	masyarakat hukum adat adat	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	c.[PT+BM: (1+1)x(2x60 <sup>''</sup> )]	<b>media lainnya.</b>		
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Bangsa Indonesia dan hak menguasai dari negara atas tanah	• Kejelasan dan pemahaman tentang hak penguasaan atas tanah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>''</sup> )]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x60 <sup>''</sup> )]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Penjelasan tentang hak penguasaan atas tanah	10 %
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Bangsa Indonesia dan hak menguasai dari negara atas tanah	• Kejelasan dan pemahaman tentang hak penguasaan atas tanah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>''</sup> )]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x60 <sup>''</sup> )]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Penjelasan tentang hak penguasaan atas tanahlanjutan	10 %
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Ruang lingkup Hak Atas Tanah	• Kejelasan dan pemahaman mengenai hak - hak atas tanah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50 <sup>''</sup> )]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60 <sup>''</sup> )]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hak - hak penguasaan atas tanah	10 %
14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Pengaturan Hak Pengelolaan dan Land Reform	• Kejelasan dan pemahaman tentang hak pengelolaanda n Land Reform	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50 <sup>''</sup> )]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60 <sup>''</sup> )]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hak pengelolaan	10%
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Pengaturan Hak Pengelolaan dan Land Reform	• Kejelasan dan pemahaman tentang hak pengelolaanda n Land Reform	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50 <sup>''</sup> )]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60 <sup>''</sup> )]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Land Reform	10%

			E = 0 - 40				
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM ADAT</b>	FA176226	MKDU	<b>T=2 P= 1</b>	I	Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hukum adat, dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi			
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
<b>Sub-CPMK</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai definisi, sifat, corak, nilai universal hukum adat, karakteristik dan struktur masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat, hukum tanah adat, hukum waris adat dan hukum pidana adat				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Hukum Adat adalah mata kuliah yang mempelajari hukum asli bangsa Indonesia, yang wujudnya tidak tertulis. Hukum adat adalah bagian dari disiplin ilmu hukum sekaligus menjadi sumber dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak dan Pengantar Kuliah 2. Definisi dan Sifat hukum Adat 3. Nilai dan corak universal hukum adat 4. Karakteristik masyarakat hukum adat 5. Struktur hukum adat 6. Hukum perkawinan adat 7. Hukum perkawinan adat lanjutan 8. Ulangan Tengah Semester 9. Hukum tanah adat 10. Hukum tanah adat lanjutan 11. Hukum perkawinan adat				

	12. hukum perkawinan adat lanjutan 13. hukum tanah adat 14. hukum waris adat 15. hukum pidana adat 16. Ulangan Akhir Semester						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi:						
	1. Soerojo Wignjodipoero, 1985. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung 2. Hilman Hadikusuma, 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung : Alumni						
	<b>Pendukung :</b>						
<b>DosenPengampu</b>	Soepomo, 2007. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta : Pradnya Paramita						
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Adat						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria &Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan kontrak kuliah dan pengantar kuliah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan Kontrak Kuliah Hukum Adat	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampuMenjelaskan dan mendefinisikan dan sifat hukum adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan pengertian hukum adat dari berbagai ahli.</li> <li>Mengidentifikasi ruang lingkup dan sumber Hukum Adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Timbulnya Hukum Adat 2. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Adat 3. Sumber-Sumber Hukum Adat	10 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu mengidentifikasi Corak dan Sifat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan pengertian hukum adat dari berbagai ahli.</li> <li>Mengidentifikasi ruang lingkup dan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Nilai universal hukum adat 2. Sifat dan Corak Hukum Adat	10 %



		sumber Hukum Adat	E = 0 – 40					
4	Sub-CPMK-4 Menganalisis karakteristik Masyarakat Hukum Adat (MHA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi struktur, karakteristik MHA dan pengaturannya dalam UU</li> <li>• Mengidentifikasi MHA yang masih eksis di Indonesia</li> <li>• Menganalisis beberapa UU yang mengatur Hukum Adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50''); c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian, Struktur dan Karakteristik MHA</li> <li>2. Pengaturan MHA.</li> <li>3. MHA yang masih eksis di Indonesia</li> <li>4. UU yang mengatur Hukum Adat</li> </ol>	10 %	
5	Sub-CPMK-5 Menganalisis karakteristik Masyarakat Hukum Adat (MHA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi struktur, karakteristik MHA dan pengaturannya dalam UU</li> <li>• Mengidentifikasi MHA yang masih eksis di Indonesia</li> <li>• Menganalisis beberapa UU yang mengatur Hukum Adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50''); c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian, Struktur dan Karakteristik MHA</li> <li>2. Pengaturan MHA.</li> <li>3. MHA yang masih eksis di Indonesia</li> <li>4. UU yang mengatur Hukum Adat</li> </ol>	10 %	
6	Sub-CPMK-6: Menganalisis Hukum Perkawinan Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan mengkaji pengertian, asas-asas hukum perkawinan adat</li> <li>• Menganalisis perkembangan hukum perkawinan adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50''); c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian Hukum Perkawinan Adat	10 %	
7	Sub-CPMK-7: Menganalisis Hukum Perkawinan Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan mengkaji pengertian, asas-asas hukum perkawinan adat</li> <li>• Menganalisis perkembangan hukum perkawinan adat</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50''); c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Asas-asas hukum perkawinan adat	10 %	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu Menganalisis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkomparasikan beberapa</li> </ul>	A = 86-100 B =	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x	<b>eLearning dan platform</b>	Pengertian Hukum Tanah Adat	10 %	

	Hukum Tanah Adat	<p>pengertian hukum tanah adat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis perkembangan hukum waris adat</li> </ul>	<p>71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	<p>50”); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p>	<p>m media lainnya.</p>		
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu Menganalisis Hukum Tanah Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkomparasikan beberapa pengertian hukum tanah adat</li> <li>• Menganalisis perkembangan hukum waris adat</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	<p>a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p>	<p>eLearning dan platform media lainnya.</p>	<p>Asas-asas hukum tanah adat</p>	<p>10 %</p>
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu Menganalisis Hukum Tanah Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkomparasikan beberapa pengertian hukum tanah adat</li> <li>• Menganalisis perkembangan hukum waris adat</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	<p>a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p>	<p>eLearning dan platform media lainnya. -</p>	<p>1. Transaksi yang berkaitan dengan tanah Hak Ulayat 2. Pengaturan Hak Ulayat dalam UUPA</p>	<p>10 %</p>
12	Sub-CPMK-12: Menganalisis Hukum Perkawinan Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan mengkaji pengertian, asas-asas hukum perkawinan adat</li> <li>• Menganalisis perkembangan hukum perkawinan adat</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	<p>a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p>	<p>eLearning dan platform media lainnya.</p>	<p>Pengertian HukumPerkawinan Adat lanjutan</p>	<p>10 %</p>
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu Mahasiswa mampu Hukum Waris Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendeskripsikan pengertian, asas-asas hukum waris adat</li> <li>• Menganalisis perkembangan hukum waris adat</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	<p>a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p>	<p>eLearning dan platform media lainnya.</p>	<p>1. Pengertian Hukum Waris Adat 2. Asas-asas hukum waris adat.</p>	<p>10 %</p>
14	Sub-CPMK-14: Mahasiswa mampu Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendeskripsikan pengertian, asas-asas</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85</p>	<p>a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)];</p>	<p>eLearning dan platform</p>	<p>1. Pengertian Hukum Waris Adat 2. Asas-asas hukum waris adat.</p>	<p>10 %</p>

	mampu Hukum Waris Adat	<p>hukum waris adat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis perkembangan hukum waris adat</li> </ul>	<p>C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>media lainnya.</b>		
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu menganalisis Hukum Delik Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan unsur-unsur hukum delik adat</li> <li>• Menjelaskan sifat-sifat hukum delik adat</li> </ul>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	<p>a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p>	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur-Unsur Hukum Delik Adat</li> <li>2. Sifat Hukum Delik Adat</li> <li>3. Delik dalam Hukum Adat</li> <li>4. Cara Penyelesaian Delik Adat</li> </ol>	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBO T (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
BAHASA INGGRIS	FA176113	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	1. Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Inggris dalam kepentingan dunia akademik 2. Mahasiswa mampu menerapkan penulisan bahasa Inggris dalam setiap pembuatan laporan, tugas, proposal, maupun dalam penyelesaian skripsi			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	1. memiliki pengetahuan konseptual tentang present and past tense 2. menguasai pengetahuan konseptual tentang progressive and perfect; 3. menguasai pengetahuan konseptual tentang future tense; 4. mengetahui pengetahuan konseptual tentang Passive Voice; 5. menguasai pengetahuan prosedural tentang reading comprehension; 6. mengetahui pengetahuan prosedural tentang adjective clause; 7. mengetahui pengetahuan prosedural tentang noun clouses; 8. mengetahui pengetahuan prosedural tentang gerund and infinitif;				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini membahas penggunaan bahasa inggris dalam lisan maupun tulisan dengan tata bahasa yang baik dan benar seperti penggunaan tense, verb, grammar, dsb..				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah;</li> <li>2. Present Tense;</li> <li>3. Past Tense;</li> <li>4. Progressive</li> <li>5. Perfect;</li> <li>6. Future Tense;</li> <li>7. Passive Voice;</li> <li>8. UTS</li> <li>9. Reading Comprehension;</li> <li>10. Adjective Clause;</li> </ol>				


	11. Adjective Clause; 12. Noun Clouses; 13. Noun Clouses; 14. Gerund And Infinitive. 15. Gerund And Infinitive. 16. UAS						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi:						
	1. G.P. Ladousse. Speaking Personally. 2. Jill Hadfield. Beginners' Communication Games, Longman.						
	<b>Pendukung :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Complete English as a Foreign Language</li> <li>Donald, R.H. Byrd. React-Interact. New York: Addison Wesley Longman Inc. 2001.</li> </ul>						
<b>DosenPengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Bahasa Inggris						
Min gg u Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilai an (%)
		Indikator	Kriteria &Bentu k	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan kontrak kuliah dan pengantar kuliah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Menjelaskan Kontrak Kuliah Bahasa Inggris	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mengetahui penerapan present tense dalam media.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menggunakan bentuk present &amp; past tense</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Present tense	10 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mengetahui penerapan present tense dalam media.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menggunakan bentuk present &amp; past tense</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Past tense	10 %

			D = 41-55 E = 0 – 40	(2x60'')			
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa memahami penerapan bentuk progressive	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan dan menggunakan bentuk Progressive dan perfect dalam past &amp; present tense</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Progressive	10 %
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa memahami penerapan bentuk perfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan dan menggunakan bentuk Progressive dan perfect dalam past &amp; present tense</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Bentuk Perfect.	10 %
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa memahami penerapan future tense	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mengenal dan mampu menggunakan bentuk future tense</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Future tense	10%
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa memahami teknik textPassive Voice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa berlatih membaca text</li> <li>Mahasiswa berlatih membuat kalimat pasif</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Reading comprehension 2. Passive voice	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa memahami teknik Reading comprehension	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu membuat paragraph Inggris dengan benar</li> <li>Mahasiswa berlatih membaca text</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+BM :(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Reading comprehension Passive voice	10 %

			E = 0 - 40				
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa memahami penggunaan Adjective clause	• Mengenal dan menemukan bentuk adjective clause	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	eLearning dan platform media lainnya.	Penggunaan which, who, whom dan whose	10 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa memahami penggunaan Adjective clause	• Mengenal dan menemukan bentuk adjective clause	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	eLearning dan platform media lainnya.	Penggunaan which, who, whom dan whose	10 %
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa memahami penggunaan Noun clauses	• Mengenal dan menemukan noun clause	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	eLearning dan platform media lainnya.	Penggunaan if, that wether.	10 %
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa memahami penggunaan Noun clauses	• Mengenal dan menemukan noun clause	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	eLearning dan platform media lainnya.	Penggunaan if, that wether.	10 %
14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa memahami penggunaan Gerund and Infinitif	• Mahasiswa memahami penggunaan Gerund and Infinitif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	eLearning dan platform media lainnya.	Penggunaan by and with dalam kalimat..	10%
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa	• Mahasiswa memahami	A = 86-100	a. Kuliah; b. Diskusi [	eLearning dan	Penggunaan by and with dalam kalimat..	10%

	memahami penggunaan Gerund and Infinitif	penggunaan Gerund and Infinitif	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	TM: 1x(2x 50"); c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	platform media lainnya.		
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>BAHASA INDONESIA</b>	FA176109	MKDU	<b>T=2 P= 1</b>	I	Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	1. Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan kampus maupun masyarakat dan sebagai pencerminan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air 2. Mahasiswa mampu menerapkan penulisan bahasa Indonesia dalam setiap pembuatan laporan, tugas, proposal, maupun dalam penyelesaian skripsi			
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian dan fungsi bahasa dalam kehidupan Dan Pengertian dan sejarah bahasa Indonesia b. Mahasiswa mampu menjelaskan Ragam bahasa Indonesia dan dialeg bahasa di kehidupan sehari-hari c. Pengertian dan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan d. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian dan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan, Pengertian dan Ciri Bahasa Indonesia Ilmiah, Mengenal karangan ilmiah, dan Penulisan karya ilmiah sebagai parameter keberhasilan				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa dengan menekankan keterampilan dalam penggunaan bahasa Indonesia baik berbicara, mendengar, membaca maupun dalam penulisan lebih utamanya ketika akan membuat tugas, proposal, laporan, dan skripsi.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Kuliah 2. Pengertian dan fungsi bahasa dalam kehidupan 3. Pengertian dan sejarah bahasa Indonesia 4. Pengertian dan sejarah bahasa Indonesia lanjutan 5. Ragam bahasa Indonesia dan dialeg bahasa di kehidupan sehari-hari 6. Ragam bahasa Indonesia dan dialeg bahasa di kehidupan sehari-hari lanjutan 7. Pengertian dan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan				

	8. Ulangan Tengah Semester 9. Pengertian dan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan lanjutan 10. Pengertian dan Ciri Bahasa Indonesia Ilmiah 11. Pengertian dan Ciri Bahasa Indonesia Ilmiah lanjutan 12. Mengetahui karangan ilmiah 13. Mengetahui karangan ilmiah lanjutan 14. Penulisan karya ilmiah sebagai parameter keberhasilan 15. Penulisan karya ilmiah sebagai parameter keberhasilan 16. Ulangan Akhir Semester						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: 1. Chaer, Abdul. 1994. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta. 2. Keraf, Gorys. 1989. Tata Bahasa Indonesia. NTT: Nusa Indah. 3. Kridalaksasna, Harimurti. 1993. Kamus Linguistik (Ed. Tiga). Jakarta: Gramdia. 4. Samsuri. 1991. Analisis Bahasa. Jakarta: Erlangga. 5. Setiawan, D. O. 2001. Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Yrama Widya. <b>Pendukung :</b> - Mustakim. 1994. Membina Kemampuan Berbahasa: Panduan ke Arah Kemahiran Berbahasa. Jakarta: Gramedia. - Putrayas, Ide Bagus. 2006. Tata Kalimat Bahasa Indonesia. Bandung: Refika Aditama. - Rahayu, Minoto. 2007. Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Jakarta: Grasindo.						
<b>DosenPengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Bahasa Indonesia						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan kontrak kuliah dan pengantar kuliah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan pemahaman</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan Kontrak Kuliah Bahasa Indonesia	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menerapkan praktek pemahaman berbahasa Indonesia yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan pemakaian bahasa Indonesia dalam individu, keluarga dan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar 2. Pengertian Bahasa Indonesia yang baik 3. Pengertian bahasa Indonesia yang benar	10 %

	dan benar.	masyarakat	E = 0 – 40					
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu memahami tentang Bahasa Indonesia baku	• Mampu menjelaskan pengertian Bahasa Indonesia baku	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku 2. Ciri-ciri bahasa Indonesia tak baku.	10 %	
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu memahami penggunaan kaidah ejaan dengan benar (EYD)	• Mampu menjelaskan kaidah ejaan dengan benar (EYD)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Penulisan Huruf Kapital 2. Penulisan Huruf Miring 3. Penulisan Kata Turunan 4. Penulisan Gabungan Kata 5. Penulisan Partikel	10 %	
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu memahami penggunaan kaidah ejaan dengan benar (EYD)	• Mampu menjelaskan kaidah ejaan dengan benar (EYD)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	6. Penulisan Singkatan 7. Penulisan Akronim 8. Penulisan Angka 9. Penulisan Lambang Bilangan	10 %	
6	Sub-CPMK-6 Dapat Mampu menjelaskan kalimat-kalimat efektif	• Dapat membuat kalimat-kalimat efektif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. kesepadanan dan kesatuan 2. kesejajaran	10 %	
7	Sub-CPMK-7 Dapat Mampu menjelaskan kalimat-kalimat efektif	• Dapat membuat kalimat-kalimat efektif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	3. kesepadanan dan kesatuan 4. kesejajaran 5. penekanan 6. kehematan, 7. kevariasian .	10 %	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK-9:	• Mampu	A =	a. Kuliah;	<b>eLearning</b>	1. Pengertian paragraf –	10 %	

	Mahasiswa mampu membuat paragraf dengan benar	membuat paragraph dengan benar	86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	ng dan platform media lainnya.	2. Kegunaan paragraf – 3. Macam-macam paragraph	
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu membuat paragraf dengan benar	• Mampu membuat paragraph dengan benar	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya.	4. Syarat-syarat pembentukan paragraf 5. Letak kalimat topik	10 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menganalisis penulisan, bahan, dan kerangka karangan	• Mampu memahami tujuan penulisan, bahan, dan kerangka karangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Mempelajari seputar kerangka karangan 2. Bentuk kerangka	10 %
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu membuat karya tulis ilmiah (makalah/skripsi) dengan tatacara yang benar	• Memahami bagaimana membuat karya tulis ilmiah (makalah/skripsi) dengan tatacara yang benar	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Pemakaian Dan Penulisan Huruf 2. Penulisan Kata 3. Penulisan Unsur Serapan	10%
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu membuat karya tulis ilmiah (makalah/skripsi) dengan tatacara yang benar	Memahami bagaimana membuat karya tulis ilmiah (makalah/skripsi) dengan tatacara yang benar	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya.	4. Tanda Baca 5. Kutipan 6. Catatan Kaki Daftar Pustaka.	10%
14	Sub-CPMK-14: Mahasiswa mampu Menjelaskan tata tulis ilmiah	• Mampu menerapkan tata tulis ilmiah dengan benar	A = 86-100 B = 71-85 C =	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM	eLearning dan platform media	1. Bagian Pendahuluan 2. Bagian Isi	10%

			56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	:(1+1)x(2x 60”)]	<b>lainnya.</b>		
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu Menjelaskan tata tulisan ilmiah	• Mampu menerapkan tata tulis ilmiah dengan benar	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	3. Bagian Penutup.	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTASHUKUM  
PRODIILMU HUKUM**

**KodeDokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Etika dan tanggungjawab Profesi Hukum</b>	FA206384	Pidana	T=2 P= 1	VIII	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankanpada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>2. Berkontribusi dalampeningkatanmutukehidupanbermasyarakat,berbangsa,berne-gara,dan kemajuanperadaban;</li> <li>3. Taat hukum, taat nilai, etika, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaiinternalisasi literasi hukum;</li> <li>4. Memiliki wawasan tentang perkembangan hukum secara global.</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampumenerapkanpemikiranlogis,kritis,sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>2. Mampumengkajiimplikaspengembanganatauiimplementasiilmupengetahuanhu-kumdanmenyelesaikan persoalan-persoalanhukumdalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalupenerapanmetodeberfikiryuridis;</li> <li>2. Mampu berargumentasi berdasarkanpengetahuanteoretistentangsumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positifIndonesia;</li> <li>3. Mampu menunjukan keahlian dalam menjalankan profesi hukum</li> </ol>			
	<b>CapaianPembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teoritis mengenai politik hukum, perkembangan politik hukum di Indonesia pada umumnya serta latar belakang perkembangan politik hukum serta teori-teori yang mendasarinya.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan etika dan tanggung jawab profesi hukum.</li> <li>2. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi etika dan aspek-aspeknya</li> <li>3. Mahasiswa mampu menjelaskan moral dan ciri-ciri nilai moral serta factor-faktor penentu moralitas</li> <li>4. Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika etika dan peranan etika serta bagaimana pengertian moralitas secara umum.</li> <li>5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hati nurani, tanggung jawab dalam etika pada umumnya</li> <li>6. Mahasiswa mampu menjelaskan Profesi hukum dan tanggung jawab etika dalam bidangnya masing-masing</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum ini mempelajari Pengertian Etika dan Perbandingan Etika dan Etiket, . Fungsi Etika dan Aspek-aspeknya , Moral dan Ciri-ciri Nilai Moral serta dan Menguraikan Faktor- faktor Penentu Moralitas , Sistematika Etika dan Peranan				

	Etika serta Pengertian Moralitas, Hati Nurani dan Tanggung Jawab dan Tema Penting Dalam Etika Umum, Sistem-sistem Etika Yang Sangat Berpengaruh Bagi Kehidupan Manusia, Konflik antara Profesi dan Bisnis serta Mencari Dasar Legitimasi Profesi dan mampu memahami tentang Kode Etik Profesi Hukum dan Tanggung Jawab Profesi Hukum				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah dan Pengantar Kuliah</li> <li>2. Pengertian Etika</li> <li>3. Perbandingan Etika dan Etiket</li> <li>4. Fungsi Etika</li> <li>5. Aspek-aspek etika</li> <li>6. Pengertian Moral dan Ciri-ciri Nilai Moral serta</li> <li>7. Menguraikan Faktor-faktor Penentu Moralitas</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Sistematika Etika dan Peranan Etika</li> <li>10. Pengertian Moralitas</li> <li>11. Hati Nurani dan Tanggung Jawab dan Tema Penting Dalam Etika Umum</li> <li>12. Sistem-sistem Etika Yang Sangat Berpengaruh Bagi Kehidupan Manusia</li> <li>13. Konflik antara Profesi dan Bisnis serta Mencari Dasar Legitimasi Profesi</li> <li>14. Kode Etik Profesi Hukum</li> <li>15. Tanggung Jawab Profesi Hukum</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C. S. T Kansil, 2009, <i>Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum</i>, Pradnya Paramita.</li> <li>2. E. Sumaryon, 1995, <i>Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum</i>, Kanisius, Yogyakarta.</li> <li>3. -----, 2009, <i>Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas</i>, Kanisius, Jakarta.</li> <li>4. I Gede Abwiranta, 2005, <i>Dasar-Dasar Etika dan Moralitas ( Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)</i>, Bandung, Citra Aditya Bakti.</li> <li>5. Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, <i>Etika Profesi Hukum</i>, Diponegoro, Semarang.</li> <li>6. <u>Supriadi</u>, 2006, <i>Etika &amp; Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia</i>, Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>7. Suhrawardi, 1994, <i>Etika Profesi Hukum</i>, Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>8. Suparman Usman, 2008, <i>Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia</i>, Gaya Media Pratama.</li> <li>9. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian</li> <li>10. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman</li> </ol>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Pidana				
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>


		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>		
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
<b>1</b>	Sub-CPMK-1: mahasiswa mampu memahami tentang mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum . [S9, KU1, KU2]	Pembukaan perkuliahan (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan Penjelasan mengenai mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Deskripsi mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	10 %
<b>2</b>	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Moralidan Ciri-ciri Nilai Moral serta dan Menguraikan Faktor- faktor Penentu Moralitas [S9, KU1, KU2, PP4]	Pengertian Moralidan Ciri-ciri Nilai Moral serta dan Menguraikan Faktor- faktor Penentu Moralitas	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian Pengertian Etika	10 %
<b>3</b>	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Moralidan Ciri-ciri Nilai Moral serta dan Menguraikan Faktor- faktor Penentu Moralitas [S9, KU1, KU2, PP4]	Pengertian Moralidan Ciri-ciri Nilai Moral serta dan Menguraikan Faktor- faktor Penentu Moralitas	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x6 0”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Perbandingan Etika dan Etiket	10 %
<b>4</b>	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu menjelaskanPen	Pengertian Moralidan Ciri-ciri Nilai Moral serta	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)];	<b>eLearning dan platform m</b>	- Fungsi Etika - Fungsi secara Objektif dan Subjektif	10 %



	gertian Moralidan Ciri-ciri Nilai Moral serta dan Menguraikan Faktor- faktor Penentu Moralitas [S9, KU1, KU2, PP4]	dan Menguraikan Faktor- faktor Penentu Moralitas	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>media lainnya.</b>		
<b>5</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Moralidan Ciri-ciri Nilai Moral serta dan Menguraikan Faktor- faktor Penentu Moralitas [S9, KU1, KU2, PP4]	Pengertian Moralidan Ciri-ciri Nilai Moral serta dan Menguraikan Faktor- faktor Penentu Moralitas	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Aspek-aspek etika	10 %
<b>6</b>	Sub-CPMK-6: Mampu menganalisis sifat,hakekat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum. [S9, PP4]	sifat,hakekat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Klasifikasi Pengertian Morali 2. Ciri-ciri Nilai Moral	10 %
<b>7</b>	Sub-CPMK-7: Mampu menganalisis sifat,hakekat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum. [S9, PP4]	sifat,hakekat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	3. Faktor- faktor Penentu Moralitas.	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9</b>	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu menjelaskan Sistematika Etika dan Peranan Etika serta Pengertian Moralitas	Sistematika Etika dan Peranan Etika serta Pengertian Moralitas	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Sistematika Etika 2. Peranan Etika	10 %

	Moralitas [S9, KU1, PP4]						
10	Sub-CPMK-10 Mahasiswa mampu menjelaskan Sistematika Etika dan Peranan Etika serta Pengertian Moralitas [S9, KU1, PP4]	Sistematika Etika dan Peranan Etika serta Pengertian Moralitas	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x6 0”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	3. Pengertian Moralitas	10 %
11	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Hati Nurani dan Tanggung Jawab dan Tema Penting Dalam Etika Umum.	Hati Nurani dan Tanggung Jawab dan Tema Penting Dalam Etika Umum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hati Nurani dan Tanggung Jawab dan Tema Penting Dalam Etika Umum.	10 %
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem-sistem Etika Yang Sangat Berpengaruh Bagi Kehidupan Manusia [S9, KU1, PP4]	Sistem-sistem Etika Yang Sangat Berpengaruh Bagi Kehidupan Manusia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sistem-sistem Etika Yang Sangat Berpengaruh Bagi Kehidupan Manusia	10 %
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu Menjelaskan Konflik antara Profesi dan Bisnis. [S9, KU9, KK1]	Konflik antara Profesi dan Bisnis	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Konflik antara Profesi dan Bisnis	10 %
14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu Menjelaskan Dasar Legitimasi Profesi	Dasar Legitimasi Profesi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Dasar Legitimasi Profesi	10%
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu	Kode Etik Profesi Hukum dan	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x	<b>eLearning dan platform</b>	Kode Etik Profesi Hukum dan Tanggung Jawab	10%

	menyelesaikan dan mampu memahami tentang Kode Etik Profesi Hukum dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	Tanggung Jawab Profesi Hukum	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>m media lainnya.</b>	Profesi Hukum	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTASHUKUM PRODIILMU HUKUM</b>				<b>KodeDokumen FA</b>	
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>						
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>	
<b>Hukum Kekayaan Intelektual</b>	FA206249	Perdata	<b>T=2 P= 1</b>	V	Juli 2021	
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>		
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankanpada MK</b>					
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasilais danberperilaku sesuaidengannilai-nilaiPancasiladanberakhlakmulia; 2. Menjunjungtingginilaikemanusiaan, moral dan etika dalammenjalankantugas; 3. Berkontribusidalampeningkatanmutukehidupanbermasyarakat,berbangsa,berne-gara,dan kemajuanperadaban;				
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Mampumenerapkanpemikiranlogis,kritis,sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampumenunjukkankinerjamandiri, bermutu,danterukur; 3. Mampumengkajiimplikaspengembanganatauiimplementasiilmupengetahuanhuk-umdanmenyelesaikan persoalan-persoalanhukumdalam masyarakat;				
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalupenerapanmetodeberfikiryuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkanpengetahuanteoretitentangsumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positifIndonesia; 3. Mampu menunjukan keahlian dalam menjalankanprofesihukum;				
	<b>CapaianPembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
	<b>CPMK</b>	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis kebijakan atau regulasi hukum kekayaan intelektual (HKI). ruang lingkup HKI dan sifat HKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Konvensi dan Perjanjian Internasional di bidang HKI				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>						
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup HKI dan sifat HKI. b. Mahasiswa dapat mengelaborasi secara sistematis kebijakan atau regulasi hukum kekayaan intelektual (HKI).. c. Mahasiswa dapat memahami perkembangan Hak Cipta d. Mahasiswa dapat memahami perkembanganPaten e. Mahasiswa dapat memahami perkembangan Merek f. Mahasiswa dapat memahami perkembangan Indikasi Geografis g. Mahasiswa dapat memahami perkembangan Rahasia Dagang h. Mahasiswa dapat memahami perkembangan Desain Industri i. Mahasiswa dapat memahami perkembangan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu j. Mahasiswa dapat memahami perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman k. Mahasiswa dapat memahami Konvensi dan Perjanjian Internasional di bidang HKI					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual menyajikan ruang lingkup HKI dan sifat HKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak					

	Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Konvensi dan Perjanjian Internasional di bidang HKI
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah dan Pengantar Kuliah</li> <li>2. Ruang lingkup HKI dan sifat HKI.</li> <li>3. Kebijakan atau regulasi hukum kekayaan intelektual (HKI).</li> <li>4. Perkembangan Hak Cipta</li> <li>5. Perkembangan Paten</li> <li>6. Perkembangan Merek</li> <li>7. Perkembangan Indikasi Geografis</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Perkembangan Rahasia Dagang</li> <li>10. Perkembangan Desain Industri</li> <li>11. Perkembangan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</li> <li>12. Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman</li> <li>13. Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman Lanjutan</li> <li>14. Konvensi dan Perjanjian Internasional di bidang HKI</li> <li>15. Konvensi dan Perjanjian Internasional di bidang HKI Lanjutan</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.</li> <li>- Abdulkadir Muhammad, Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001.</li> <li>- Betsy Rosenblatt, 1998. Moral Rights Basics, Harvard Law School.</li> <li>- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.</li> <li>- Dwi A. Kurniasih, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off ( Pemboncengan Reputasi) Bagian II, Media HKI, Vol. VI/No.1/Februari 2009, penerbit ditjen HKI, Jakarta, 2009.</li> <li>- Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan, Jakarta: Penerbit Ind, Hil-Co, 2000.</li> <li>- H.R.Otje Salman dan Anthon F.Susanto, Teori Hukum : Mengingat , Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Refika Aditama, Bandung,2005.</li> <li>- Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.</li> <li>- Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2003.</li> <li>- Lindsay, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group &amp; Alumni, Bandung, 2006</li> <li>- Mochtar Kusumaatmadja hukum pembangunan yang berpengaruh di Indonesia. “Fungsi dan Perkembangan Hukum dan Pembangunan Nasional” Bandung, 1995.</li> <li>- Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.</li> <li>- M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya, Bandung, 1997</li> <li>- OK. Sadikin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” Intellectual Property Right, cet 4, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.</li> <li>- Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung,, 2004.</li> <li>- Rachmadi Usman, Hukum Hak atas kekayaan intelektual, PT.Alumni, Bandung,2003.</li> <li>- Riduan Syahraini, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2004.</li> <li>- Ridwan Khairandy, Kapita Selektta Hak Atas Kekayaan Intelaktual, Ctk pertama, Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, Yayasan Klinik HAKI , Jakarta,</li> <li>- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hak Milik Intelektual Indonesia dan</li> </ul>

	<p>Perjanjian Internasional TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994 •</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- _____, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia dalam Rangka WTO, TRIPs, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.</li> <li>- _____, Kovensi-Kovensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.</li> <li>- Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.</li> <li>- Tomi Suryo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Jakarta, 2009.</li> <li>- Yusran Isnaini, Buku Pintar HAKI tanya Jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual, Ghalia Indonesia, Bogor.2010.</li> </ul>
--	---

<b>Dosen Pengampu</b>	
-----------------------	--

<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Perdata
--------------------------	---------------

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: mahasiswa mampu memahami tentang mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual [S9, KU1, KU2]	Pembukaan perkuliahan (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan Penjelasan mengenai mata kuliah hukum kekayaan intelektual	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang: 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Deskripsi mata kuliah Hukum kekayaan Intelektual	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup HKI berdasarkan konvensi internasional dan TRIPs [S9, KU1, KU2, PP4]	ruang lingkup HKI berdasarkan konvensi internasional dan TRIPs	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Pengertian HKI; 2. Konsep Perlindungan HKI;	10 %

3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup HKI berdasarkan konvensi internasional dan TRIPs [S9, KU1, KU2, PP4]	ruang lingkup HKI berdasarkan konvensi internasional dan TRIPs	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	3. Latar Belakang Pengaturan HKI di Indonesia dan Ruang Lingkup HKI Menurut TRIP's	10 %
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan HKI menurut hukum di Indonesia dan internasionalisasi Hukum HKI [S9, PP4]	pengaturan HKI menurut hukum di Indonesia dan internasionalisasi Hukum HKI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Pengaturan HKI Menurut hukum di Indonesia	10 %
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan HKI menurut hukum di Indonesia dan internasionalisasi Hukum HKI [S9, PP4]	pengaturan HKI menurut hukum di Indonesia dan internasionalisasi Hukum HKI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	2. internasionalisasi Hukum HKI	10 %
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat memahami perkembangan permasalahan di bidang Hukum Hak Cipta (HC):... [S9, KU1, PP4]	Perkembangan Hak Cipta.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Fungsi HC; 2. Sifat hak cipta; 3. Prinsip dasar hak cipta; 4. Hak terkait, 5. Perkecualian dan batasan hak cipta;	10 %
7	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat memahami	Perkembangan Hak Cipta.	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")];	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	6. Perkecualian dan batasan hak cipta; 7. Pendaftaran Hak Cipta di	10 %

	perkembangan permasalahan di bidang Hukum Hak Cipta (HC):.. [S9, KU1, PP4]		C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>media lainnya.</b>	Indonesia; 8. Jangka Waktu Perlindungan, 9. Pemegang hak cipta. 10. Pelanggaran dan sanksi	
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat memahami berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang hukum Merek dan Indikasi Geografis [S9, KU1, PP4]	Usaha dan perkembangan Merek dan Indikasi Geografis	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Pengertian, ruang lingkup hak merek, 2. pendaftaran merek,	10 %
<b>10</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat memahami berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang hukum Merek dan Indikasi Geografis [S9, KU1, PP4]	Usaha dan perkembangan Merek dan Indikasi Geografis	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	3. pengalihan hak atas merek terdaftar, 4. indikasi geografis dan indikasi asal, 5. penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek	10 %
<b>11</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa dapat memahami berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang Hukum Paten [S9, KU1, PP4]	Perkembangan Paten	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Paten (pengertian, ruang lingkup paten, 2. subyek dan obyek perlindungan paten, 3. persyaratan perolehan hak paten,	10 %
<b>12</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa dapat memahami berbagai alternatif solusi dalam permasalahan	Perkembangan Paten	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	4. jangka waktu perlindungan paten 5. hak dan kewajiban pemegang paten, 6. pelanggaran dan sanksi)	10 %



	di bidang Hukum Paten [S9, KU1, PP4]						
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat memahami berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang (RD) [S9, KU9, KK1]	Perkembangan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50''); c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	1. Pengertian, ruang lingkup perlindungan DTLST, 2. subyek dan Obyek DTLST, 3. perolehan Hak DTLST, 4. jangka waktu perlindungan, 5. peralihan Hak, 6. pelanggaran dan sanksi DTLST 7. Pengertian, ruang lingkup, subyek dan obyek, 8. cara memperoleh hak RD, 9. jangka waktu perlindungan, dan kewajiban pemegang hak, 10. peralihan hak, pelanggaran dan sanksi	10 %
14	Sub-CPMK-7 Mahasiswa dapat memahami berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang Hukum Desain Industri dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	Perkembangan Desain Industri	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50''); c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Pengertian, ruang lingkup, 2. subyek dan obyek, 3. cara memperoleh hak Desain Industri dan Varietas Tanaman 4. jangka waktu perlindungan, dan kewajiban pemegang hak, 5. peralihan hak, pelanggaran dan sanksi	10%
15	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menjelaskan Konvensi dan Perjanjian Internasional di bidang HKI	Konvensi dan Perjanjian Internasional di bidang HKI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50''); c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Konvensi dan Perjanjian Internasional di bidang HKI	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Asuransi	FA206238	Perdata	T=2 P= 1	IV	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;			
		2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;			
		3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;			
		2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;			
		3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;				
	2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;				
	3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;				
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan Hukum Asuransi di Indonesia				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
Sub-CPMK	a. Mahasiswa dapat memahami konsep asuransi secara historis, definisi, fungsi, kelembagaan, asas, unsur, jenis, dan kedudukannya dalam lembaga keuangan. b. Mahasiswa dapat mengelaborasi konsep, gagasan asuransi yang diintegrasikan dengan nilai syariah dan yang berlaku digunakan di Indonesia. c. Mahasiswa dapat memahami perkembangan produk asuransi syariah di Indonesia secara obyektif, sehingga menghantarkan kepada pemahaman tentang pegadaian syariah secara utuh, integral, dan komprehensif. d. Mahasiswa dapat memahami sistem operasional (ilmu terapan) asuransi konvensional dan syariah yang sah dan sesuai dengan nilai syariat dan hukum Indonesia. e. Mahasiswa mampu memahami dan membandingkan hukum asuransi syariah dan konvensional.				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Hukum Asuransi menyajikan dan memadukan kajian historis, definisi, kedudukan, fungsi, dan peran Asuransi baik asuransi konvensional maupun syariah. Selanjutnya, penjelasan terhadap sisi hukumnya, asas, kelembagaan, unsur-unsurnya, polis dan kontrak asuransi dan ragamnya. Kemudian menyajikan bagaimana proses penyaluran premi yang dibayar, mekanisme profit, investasi, claim, pemisahan dari unsur gharar, riba, dan maisir, dan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi..				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Kuliah dan Pengantar Kuliah 2. Konsep asuransi secara historis 3. Definisi Lembaga keuangan				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Fungsikelembagaan keuangan</li> <li>5. asas, unsur, jenis kelembagaan keuangan</li> <li>6. kedudukannya dalam lembaga keuangan.</li> <li>7. Gagasan asuransi yang diintegrasikan dengan nilai syariah dan yang berlaku digunakan di Indonesia.</li> <li>8. Gagasan asuransi yang diintegrasikan dengan nilai syariah dan yang berlaku digunakan di Indonesia lanjutan</li> <li>9. Ulangan Tengah Semester</li> <li>10. Perkembangan produk asuransi syariah di Indonesia secara obyektif, sehingga menghantarkan kepada pemahaman tentang pegadaian syariah secara utuh, integral, dan komprehensif.</li> <li>11. Perkembangan produk asuransi syariah di Indonesia secara obyektif, sehingga menghantarkan kepada pemahaman tentang pegadaian syariah secara utuh, integral, dan komprehensif lanjutan</li> <li>12. Sistem operasional (ilmu terapan) asuransi konvensional dan syariah yang sah dan sesuai dengan nilai syariat dan hukum Indonesia.</li> <li>13. Sistem operasional (ilmu terapan) asuransi konvensional dan syariah yang sah dan sesuai dengan nilai syariat dan hukum Indonesia lanjutan</li> <li>14. Membandingkan hukum asuransi syariah dan konvensional</li> <li>15. Membandingkan hukum asuransi syariah dan konvensional lanjutan</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>
<p><b>Pustaka</b></p>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung</li> <li>- Ali Yafie, KH. 1994, Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial, Mizan Bandung. Dewan Asuransi Indonesia,.</li> <li>- Hamid Hisan Husin, Hukmu al-Syariah al-Islamiah fi Uqudi al-Ta'min (Kairo : Darul I'tisham) -----, Hukmu al-Syariah al-Islamiah fi Uqudi al-Ta'min (Kairo : Darul I'tisham) Hartono, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisia, Yogyakarta</li> <li>- Heri Sudarsono, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah : Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia, Yogyakarta</li> <li>- Husain Hamid Hisan, Hukmu Syar'iyah al-Islamiah fi Uqudi al-Ta'min (Kairo : Darul I'tisham)</li> <li>- Joko Prakoso dan I Ketut M., 2000, Hukum Asuransi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta</li> <li>- Kasmir, 2005, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta</li> <li>- Masjfuk, 1998, Masail Fiqhiyah, Haji Masagung, Jakarta</li> <li>- Moh. Muslehudin Wardana, 1989, Asuransi Dalam Islam, Bumi Aksara, Jakarta</li> <li>- Muhammad Syakir Sula, 2004, Asuransi Syariah ; Life and General, Gema Insani Press, Jakarta</li> <li>- Muhammad Syauqi al-Fanjari, 1994, al-Islam wa al-Ta'min. Riyadh</li> <li>- Mustafa Edwin Nasution, 2010, Pengenalan Eksklusif EKONOMI ISLAM, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.</li> <li>- Musthafa Ahmad Zarqa, 1968, al-Iqtishad al-Islamiah : Nizhamu Ta'min. Darul Fikr, Beirut O.P.</li> <li>- Simorangkir, 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Ghalia Indonesia, Jakarta</li> <li>- Radiks Purba, 1992, Memahami Asuransi di Indonesia, PT. Binaman Pressindo, Jakarta. Sri</li> <li>- Rejeki Hartono, 2001, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta</li> <li>- -----, 1985, Hukum Dagang : Asuransi dan Hukum Asuransi, IKIP Semarang Press, Semarang</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sri Rejeki Hartono, 1992, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lain; Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta</li> </ul>
	<b>Pendukung :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPER)</li> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> <li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaan tentang usaha perasuransian, Edisi 2003, DAI</li> </ul>

**DosenPengampu**

**Matakuliah syarat** Hukum Perdata

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: mahasiswa mampu memahami tentang mata kuliah Hukum Asuransi [S9, KU1, KU2]	Pembukaan perkuliahan (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan Penjelasan mengenai mata kuliah kuliah hukum asuransi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang: 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Deskripsi mata kuliah Hukum asuransi	10 %
2	Sub-CPMK-2: Memahami mengenai kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan-badan peradilan dan untuk acara perdata pada badan peradilan umum [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang kekuasaan kehakiman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Perkembangan Kekuasaan kehakiman, asas-asas kekuasaan kehakiman	10 %
3	Sub-CPMK-3: Memahami mengenai	Kejelasan dan	A = 86-100	a. Kuliah; b. Diskusi [	<b>eLearning dan</b>	lingkup peradilan, tugas hakim dalam	10 %


	kenaikan kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan-badan peradilan dan untuk acara perdata pada badan peradilan umum [S9, KU1, KU2, PP4]	pemahaman tentang kekuasaan kehakiman	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	TM: 1x(2x50"); c.[PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>platform media lainnya.</b>	lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan.	
4	Sub-CPMK-4: Mampu memahami mengenai pengajuan gugatan, permohonan, kewenangan absolut dan relatif, pihak yang berperkara, konsep perwakilan dan kuasa [S9, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang pengajuan gugatan dan pengadilan yang berwenang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50"); c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian permohonan dan gugatan	10%
5	Sub-CPMK-5: Mampu memahami mengenai pengajuan gugatan, permohonan, kewenangan absolut dan relatif, pihak yang berperkara, konsep perwakilan dan kuasa [S9, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang pengajuan gugatan dan pengadilan yang berwenang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50"); c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kewenangan absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak yang berperkara, perwakilan, surat kuasa	10%
6	Sub-CPMK-4 Mampu memahami tentang surat gugatan yang menjadi dasar pengajuan gugatan. [S9,	Kejelasan dan pemahaman tentang surat gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50"); c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Substansi surat gugatan	10 %

	KU1, PP4]		E = 0 – 40				
7	Sub-CPMK-4 Mampu memahami tentang surat gugatan yang menjadi dasar pengajuan gugatan. [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang surat gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Bentuk dan format, syarat formil surat gugatan	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-5: mampu memahami; jawaban tergugat, pengajuan jawaban,, jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara, bentuk dan penyusunan surat jawaban memahami mengenai pemeriksaan gugur dan verstek serta upaya hukum terhadap putusan verstek [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman mengenai jawab menjawab dalam persidangan Kejelasan dan pemahaman mengenai pemeriksaan gugur dan verstek dan persyaratannya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Penjelasan tentang substansi jawaban, eksepsi, replik, duplik	10 %
10	Sub-CPMK-5: mampu memahami; jawaban tergugat, pengajuan jawaban,, jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara, bentuk dan penyusunan surat jawaban memahami mengenai pemeriksaan gugur dan verstek serta	Kejelasan dan pemahaman mengenai jawab menjawab dalam persidangan Kejelasan dan pemahaman mengenai pemeriksaan gugur dan verstek dan persyaratannya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	kesimpulan Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek	10 %

	upaya hukum terhadap putusan verstek [S9, KU1, PP4]						
11	Sub-CPMK-6: Memahami tentang sita jaminan sebagai lembaga yang memberikan jaminan jika penggugat menang. mampu menjelaskan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang sita jaminan dan kemampuan menyusun permohonan sitajaminan Kejelasan dan pemahaman tentang pembuktian .	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan	10 %
12	Sub-CPMK-6: Memahami tentang sita jaminan sebagai lembaga yang memberikan jaminan jika penggugat menang. mampu menjelaskan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang sita jaminan dan kemampuan menyusun permohonan sitajaminan Kejelasan dan pemahaman tentang pembuktian .	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x6 0”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti	10 %
13	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan putusan pengadilan. [S9, KU9, KK1]	Kejelasan dan pemahaman tentang putusan pengadilan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Definisi putusan, macam macam putusan hakim, kekuatan putusan, susunan dan isi putusan	10 %
14	Sub-CPMK-7 Mampumengetahui dan memahami prosedur pengajuan	Kejelasan dan pemahaman pengajuan upaya hukum, dan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 –	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Upaya hukum; banding, kasasi, peninjauan kembali, membuat memori banding dan kasasi	10%



	banding, kasasi, peninjauan kembali	kemampuan membuat memori	40	60”)]			
15	Sub-CPMK-7 memahami tentang eksekusi memahami tentang upaya hukum terhadap sita jaminan dan eksekusi Kajian terhadap kasus hukum acara perdata	Kejelasan dan pemahaman tentang eksekusi Kejelasan dan pemahaman tentang permohonan perlawanan Mengkaji sebuah kasus	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pelaksanaan putusan hakim(eksekusi) - Pengertian dan asas eksekusi - Tata cara eksekusi - Penyusunan permohonan eksekusi - Eksekusi pembayaran sejumlah uang Perlawanan terhadap sita jaminan dan eksekusi - Perlawanan tidak menunda eksekusi - Tata cara pengajuan perlawanan - Perlawanan oleh pihak ketiga Menganalisa putusan	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Kapita Selektta Hukum Pidana</b>	FA206369	Pidana	<b>T=2 P= 1</b>	VII	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	

			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>		
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>	
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>	
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>	
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>		
	<b>CPMK</b>	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis Kapita Selekta Hukum Pidana	
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>		
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menganalisis berbagai dasar hukum, teori dan asas-asas hukum pidana Indonesia dikaji dari perspektif normatif;</li> <li>Mampu mempelajari secara teoritis, perbandingan dan pembaharuan hukum;</li> <li>Mahasiswa mampu menganalisis teori pidana dan pembuktian dalam konteks filsafat pidana menurut sistem peradilan pidana Indonesia dikaji dari perspektif teoritis dan praktik..</li> <li>Mampu menguasai kebijakan legislasi terhadap pengaturan korban kejahatan dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia dan beberapa negara;</li> <li>Mampu mempelajari sistem perumusan jenis sanksi pidana menurut ilmu hukum pidana;</li> <li>Mampu mempelajari dimensi kebijakan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana, tindak pidana ekonomi, pelanggaran HAM berat dan tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana kepabeanaan;</li> <li>Mampu Memiliki Kejujuran Akademik dalam menyajikan karya tulis yang berkaitan dengan kapita selekta hukum pidana</li> </ol>		
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari tentang asas-asas hukum pidana Indonesia dikaji dari perspektif normatif, teoritis, perbandingan dan pembaharuan hukum, teori pidana dan pembuktian dalam konteks filsafat pidana menurut sistem peradilan pidana Indonesia dikaji dari perspektif teoritis dan praktik, kebijakan legislasi terhadap pengaturan korban kejahatan dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia dan beberapa negara, sistem perumusan jenis sanksi pidana menurut ilmu hukum pidana, dimensi kebijakan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana, tindak pidana ekonomi, pelanggaran HAM berat dan tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana kepabeanaan		
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak Kuliah</li> <li>Asas legalitas dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan kajian perbandingan hukum.</li> <li>Asas legalitas dari perspektif ius Constituendum dalam Rancangan KUHPidana.</li> <li>Asas perbutan melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia</li> <li>Asas hukumpidana dalam konteks mediasi penal dikaji dari perspektif pembaharuan hukum</li> <li>Teori pidana dalam konteks filsafat pidana menurut sistem peradilan pidana</li> </ol>		

	<p>Indonesia dikaji dari perspektif teoritis dan praktis (Retributive, Deterren, Rehabilitasi dan Integratif)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Teori-teori tentang sistem pembuktian dikaji dari prespektif normatif, teoritis dan praktis peradilan (Sistem pembuktian menurut UU secara positif, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, dan sistem pembuktian menurut UU secara negatif.</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Teori pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi (<i>Teori omkering van het bewijslast/shifting of burden of proof dan Teori balanced probability principles</i>).</li> <li>10. Pengaturan korban kejahatan dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia dan beberapa negaraMenguraikan dimensi kebijakan hukum pidana</li> <li>11. sistem perumusan jenis sanksi pidana menurut ilmu hukum pidana dimensi kebijakan hukum pidana</li> <li>12. pembaharuan hukum pidana</li> <li>13. tindak pidana ekonomi</li> <li>14. pelanggaran HAM berat</li> <li>15. penyelundupan dan tindak pidana kepabeanan</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>
--	--

<b>Pustaka</b>	
	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Achmad S.Soemoedipradja, 1984, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, PT. Alumni.</li> <li>2. Djoko Prakoso, 1988, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Yogyakarta, Liberty.</li> <li>3. Martiman, 1999, Komentar atas KUHAP, Jakarta, PT Pradya Paramita.</li> <li>4. Muladi, 1995, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, UNDIP.</li> <li>5. P.A.F. Lamintang, 1987, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung, Sinar Baru.</li> <li>6. Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada Group.</li> <li>7. Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana : Konsep dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Padjajaran, Widya.</li> </ol> <p>-</p>
	<b>Pendukung :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPER)</li> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> <li>- Peraturan Perundang-undangan</li> </ul>

<b>DosenPengampu</b>	
----------------------	--

<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Pidana
--------------------------	--------------

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	BobotPenilaian (%)
		Indikator	Kriteria &Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	mahasiswa mampu menguraikan tentang mata	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang :	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50")];	eLearn ng dan platform	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan	10 %


	kuliah kapita selekta hukum pidana	1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Deskripsi mata kuliah Penjelasan mengenai mata kuliah kapita selekta hukum pidana	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>media lainnya.</b>	Penjelasan mengenai mata kuliah kapita selekta hukum pidana	
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa menguraikan asas-asas hukum pidana Indonesia	Perkembangan asas-asas hukum pidana Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Asas legalitas dalam perspektif hukum Pidana Indonesia dan Kajian Perbandingan Hukum 2. Asas legalitas dari perspektif Ius Constituendum dalam Rancangan KUH Pidana	10%
3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa menguraikan asas-asas hukum pidana Indonesia	Perkembangan asas-asas hukum pidana Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	3. Asas Perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia 4. Asas hukum Pidana dalam Konteks mediasi penal dikaji dari perspektif pembaharuan hukum	10%
4	Sub-CPMK-3: mampu menganalisis teori-teori hukum pidana umum	Teori pemidanaan dalam konteks filsafat pemidanaan menurut sistem peradilan pidana Indonesia dikaji dari perspektif teoritis dan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Teori Retributive 2. Teori Deterren	10 %

		praktik					
5	Sub-CPMK-3: mampu menganalisis teori-teori hukum pidana umum	Teori pemidanaan dalam konteks filsafat pemidanaan menurut sistem peradilan pidana Indonesia dikaji dari perspektif teoritis dan praktik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x6 0")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	3. Teori Rehabilitasi 4. Teori Integratif	10 %
6	Sub-CPMK-4 Mampu memahami tentang sistem pembuktian dikaji dari perspektif normatif, teoritis dan praktik peradilan serta memahami teori pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi[S9, KU1, PP4]	sistem pembuktian dikaji dari perspektif normatif, teoritis dan praktik peradilan serta memahami teori pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x6 0")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Sistem pembuktian menurut UU secara positif 2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim	10 %
7	Sub-CPMK-4 Mampu memahami tentang sistem pembuktian dikaji dari perspektif normatif, teoritis dan praktik peradilan serta memahami teori pembalikan beban pembuktian	sistem pembuktian dikaji dari perspektif normatif, teoritis dan praktik peradilan serta memahami teori pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x6 0")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	3. Sistem pembuktian menurut UU secara positif 4. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim 5. Sistem pembuktian menurut UU secara negatif 6. Teori <i>omkering van het bewijslast/shifting of burden of</i>	10 %

	dalam tindak pidana korupsi [S9, KU1, PP4]	korupsi				<i>proof</i> 7. Teori <i>balanced probability principles</i>	
<b>8</b>	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
<b>9</b>	Sub-CPMK-5: mampu memahami dan menganalisis kebijakan legislasi terhadap pengaturan korban kejahatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan beberapa Negara; [S9, KU1, PP4]	Kebijakan dalam KUHP, dalam KUHP dan dalam Ketentuan hukum pidana diluar KUHP maupun diluar KUHP	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Penjelasan tentang kebijakan legislasi terhadap pengaturan korban kejahatan dalam perspektif	10 %
<b>10</b>	Sub-CPMK-5: mampu memahami dan menganalisis kebijakan legislasi terhadap pengaturan korban kejahatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan beberapa Negara; [S9, KU1, PP4]	Kebijakan dalam KUHP, dalam KUHP dan dalam Ketentuan hukum pidana diluar KUHP maupun diluar KUHP	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan beberapa Negara	10 %
<b>11</b>	Sub-CPMK-6: Memahami dan Menguraikan Sistem perumusan jenis Sanksi Pidana Menurut Ilmu Hukum Pidana [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang : 1. Sistem perumusan tunggal/imperatif 2. Sistem perumusan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sistem perumusan jenis Sanksi Pidana Menurut Ilmu Hukum Pidana	10 %

		n alternatif 3. Sistem perumusan kumulatif 4. Sistem perumusan kumulatif-alternatif					
12	Sub-CPMK-6: Memahami dan Menguraikan Sistem perumusan jenis Sanksi Pidana Menurut Ilmu Hukum Pidana [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang : 5. Sistem perumusan tunggal/imperatif 6. Sistem perumusan alternatif 7. Sistem perumusan kumulatif Sistem perumusan kumulatif-alternatif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sistem perumusan jenis Sanksi Pidana Menurut Ilmu Hukum Pidana	10 %
13	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan Dimensi kebijakan hukum pidana. [S9, KU9, KK1]	1. Dimensi kebijakan hukum pidana 2. Kriminalisasi dan kebijakan dalam penggunaan hukum pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	Definisi kebijakan hukum pidana dan kriminalisasi dan kebijakan dalam penggunaan hukum pidana	10 %
14	Sub-CPMK-7 Mampu Menganalisis tentang tindak pidana ekonomi dan tentang pelanggaran HAM berat	1. Dasar hukum 2. Pengertian tindak pidana ekonomi 3. Kekhususan TPE 4. Penegakan Hukum 5. Perkemba	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	tindak pidana ekonomi dan tentang pelanggaran HAM berat	10%

		<p>ngan TPE</p> <p>6. Dasar Hukum dan Pengertian HAM Berat</p> <p>7. Penanganan Pelanggaran HAM Berat</p>					
15	Sub-CPMK-7 Menganalisis tentang tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana kepabeanaan	<p>1. Dasar Hukum</p> <p>2. Pengertian</p> <p>3. Penyidikan</p> <p>4. Penuntutan dan peradilan</p>	<p>A = 86-100</p> <p>B = 71-85</p> <p>C = 56-70</p> <p>D = 41-55</p> <p>E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah;</p> <p>b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")];</p> <p>c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]</p>	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	tentang tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana kepabeanaan	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Politik Hukum Pidana</b>	FA206368	Pidana	T=2 P= 1	VII	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu, SH., MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;			



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> <li>3. Taat hukum, taat nilai, etika, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai internalisasi literasi hukum;</li> </ol>
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>3. Mampu bersikap etis, adil, dan taat hukum dimasyarakat.</li> </ol>
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>		
	CPMK	Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teoritis mengenai politik hukum, perkembangan politik hukum di Indonesia pada umumnya serta latar belakang perkembangan politik hukum serta teori-teori yang mendasarinya.
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>		
	Sub-CPMK	<p>Mata kuliah ini mempelajari tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fungsi, kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum;</li> <li>b. pengertian, sifat, hakikat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum;</li> <li>c. sejarah perkembangan politik hukum nasional, negara hukum dan kekuasaan;</li> <li>d. hubungan politik dan hukum,</li> <li>e. sistem hukum dan politik;</li> <li>f. paradigma bidang politik dan hukum;</li> <li>g. karakter produk hukum;</li> <li>h. teori campur tangan Negara;</li> <li>i. perbandingan politik hukum, politik hukum dengan pendekatan budaya, serta politik hukum dan otonomi daerah.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari tentang fungsi, kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum, pengertian, sifat, hakikat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum, sejarah perkembangan politik hukum nasional, negara hukum dan kekuasaan, hubungan politik dan hukum, sistem hukum dan politik, paradigma bidang politik dan hukum, karakter produk hukum, teori campur tangan negara, perbandingan politik hukum, politik hukum dengan pendekatan budaya, serta politik hukum dan otonomi daerah.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kontrak kuliah</li> <li>2. fungsi, kedudukan</li> <li>3. tujuan mata kuliah politik hukum;</li> <li>4. pengertian, sifat, hakikat</li> <li>5. tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum;</li> <li>6. sejarah perkembangan politik hukum nasional, negara hukum dan kekuasaan;</li> <li>7. hubungan politik dan hukum</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. sistem hukum dan politik;</li> <li>10. paradigma bidang politik dan hukum;</li> <li>11. karakter produk hukum;</li> <li>12. teori campur tangan Negara;</li> <li>13. perbandingan politik hukum,</li> <li>14. politik hukum dengan pendekatan budaya</li> <li>15. politik hukum dan otonomi daerah</li> </ol>	


16. Ulangan Akhir Semester							
<b>Pustaka</b>							
Daftar Referensi:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. <i>Politik Hukum</i>, Sinar Grafika:Jakarta.</li> <li>- Imam Syaukani. 2010. <i>Dasar-Dasar Politik Hukum</i>, PT RajaGrafindo:Jakarta.</li> <li>- Jazim Hamidi, dkk. 2009. <i>Teori dan Politik Hukum</i>, Total Media:Yogyakarta.</li> <li>- Mahfud MD. 2012. <i>Politik Hukum di Indonesia</i>, Pustaka LP3ES Indonesia:Jakarta.</li> <li>- MahfudMD.2010.<i>MembangunPolitikHukumMenegakkanKonstitusi</i>.RajawaliPers:Jakarta.</li> <li>- Regen, B.S. 2006. <i>Politik Hukum</i>, Utomo:Bandung.</li> <li>- SunaryatiHartono.1991.<i>PolitikHukumMenujuSatuSistemHukumNasional</i>,Alumni:Bandung.</li> <li>- DanielS.Lev.1990.<i>HukumdanPolitikdiIndonesia,KesinambunganandanPerubahan</i>,LP3S:Jakarta.</li> </ul>							
<b>Pendukung :</b>							
- RUUKUHP							
<b>DosenPengampu</b>							
Hukum Pidana							
<b>Matakuliah syarat</b>							
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	BobotPenilaian (%)
		Indikator	Kriteria &Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami mahasiswa mampu menguraikan tentang mata kuliah politik hukum pidana . [S9, KU1, KU2]	Pembukaan perkuliahan (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan Penjelasan mengenai mata kuliah politik hukum pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Deskripsi mata kuliah Penjelasan mengenai mata kuliah politik hukum pidana	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menguraikan fungsi, kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang Fungsi , kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Pengertian Politik Hukum	10 %
3	Sub-CPMK-2:	Kejelasan	A = 86-	a. Kuliah;	<b>eLearn</b>	2. Fungsi	10 %

	Mahasiswa mampu menguraikan fungsi, kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum [S9, KU1, KU2, PP4]	dan pemahaman tentang Fungsi, kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum	100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>ng dan platform media lainnya.</b>	kedudukan dan Tujuan Politik Hukum	
<b>4</b>	Sub-CPMK-3: Mampu menganalisis sifat,hakekat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum. [S9, PP4]	sifat,hakekat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sifat dan hakekat Politik hukum;	10 %
<b>5</b>	Sub-CPMK-3: Mampu menganalisis sifat,hakekat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum. [S9, PP4]	sifat,hakekat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum.	10 %
<b>6</b>	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu menguraikan sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pemerintahan pasca Kemerdekaan, serta sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan orde baru dan masa pemerintahan	1. sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pemerintahan pasca Kemerdekaan 2. sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan orde baru dan masa pemerintahan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sejarah perkembangan politik hukum nasional 1. Politik hukum pemerintah Hindia Belanda 2. Politik Hukum pemerintah pascakemerdekaan	10 %

	pasca orde baru [S9, KU1, PP4]	an pasca orde baru					
<b>7</b>	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu menguraikan sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pemerintahan pasca Kemerdekaan, serta sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan orde baru dan masa pemerintahan pasca orde baru [S9, KU1, PP4]	3. sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pemerintahan pasca Kemerdekaan 4. sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan orde baru dan masa pemerintahan pasca 5. orde baru	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sejarah perkembangan politik hukum nasional 1. Politik hukum pemerintah orde baru 2. politik hukum pemerintahan pasca orde baru	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9</b>	Mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara negara hukum dan Kekuasaan, membedakan politik dan hukum serta hubungan antara keduanya	negara hukum dan Kekuasaan, membedakan politik dan hukum serta hubungan antara keduanya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Penjelasan tentang negara hukum dan Kekuasaan,	10 %
<b>10</b>	Mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara negara hukum dan Kekuasaan, membedakan politik dan hukum serta hubungan antara keduanya	negara hukum dan Kekuasaan, membedakan politik dan hukum serta hubungan antara keduanya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	2. membedakan politik dan hukum serta hubungan antara keduanya	10 %
<b>11</b>	Sub-CPMK-6: Memahami tentang sita	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x	<b>eLearning dan platform</b>	Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan,	10 %

	jaminan sebagai lembaga yang memberikan jaminan jika penggugat menang. mampu menjelaskan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti [S9, KU1, PP4]	tentang sita jaminan dan kemampuan menyusun permohonan sitajaminan Kejelasan dan pemahaman tentang pembuktian .	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	50”); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>m media lainnya.</b>		
<b>12</b>	Sub-CPMK-6: Memahami tentang sita jaminan sebagai lembaga yang memberikan jaminan jika penggugat menang. mampu menjelaskan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang sita jaminan dan kemampuan menyusun permohonan sitajaminan Kejelasan dan pemahaman tentang pembuktian .	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x6 0”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti	10 %
<b>13</b>	Sub-CPMK-7: menganalisis paradigma di bidang politik dan hukum. [S9, KU9, KK1]	Kejelasan dan pemahaman tentang paradigma di bidang politik dan hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	paradigma di bidang politik dan hukum	10 %
<b>14</b>	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan karakter produk hukum, teori campur tangan negara	Kejelasan dan pemahaman karakter produk hukum, teori campur tangan negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	karakter produk hukum, teori campur tangan negara	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-7 memahami perbandingan politik hokum,	Kejelasan dan pemahaman tentang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)];	<b>eLearning dan platform m</b>	1. perbandingan politik hokum, 2. keterkaitan antarapolitikhuku	10%

	keterkaitan antarapolitikhukum dan otonomidaerah	perbandingan politik hukum, keterkaitan antarapolitikhukum dan otonomidaerah	D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>media lainnya.</b>	mdan otonomidaerah	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>	
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>						
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>	
Hukum Cyber	FA206371	Pidana	T=2 P= 1	VII	Juli 2021	
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>		
				<b>Kanthi Rahayu, SH., MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> <li>3. Taat hukum, taat nilai, etika, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai internalisasi literasi hukum;</li> </ol>				

		4. Memiliki wawasan tentang perkembangan hukum secara global.
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat; 3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesakhian dan mencegah plagiasi.
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>		
	CPMK	Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mahasiswa mampu menjelaskan Ruang Lingkup Cyber Law
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>		
	Sub-CPMK	Mata kuliah ini mempelajari tentang a. pengertian hukum siber, b. sejarah hukum siber, c. prinsip ketentuan internasional d. ruang lingkup cyber law e. Asas teritorial dan asas nasional aktif dan pasif f. Urgensi pengaturan teknologi informasi g. Fungsi internet secara positif dan negatif h. Perdagangan secara elektronik i. Ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE j. Alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mahasiswa mampu menjelaskan Ruang Lingkup Cyber	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah</li> <li>2. pengertian hukum siber,</li> <li>3. sejarah hukum siber,</li> <li>4. prinsip ketentuan internasional</li> <li>5. ruang lingkup cyber law</li> <li>6. Asas teritorial</li> <li>7. asas nasional aktif</li> <li>8. ulangan tengah semester</li> <li>9. asas nasional pasif</li> <li>10. Urgensi pengaturan teknologi informasi</li> <li>11. Fungsi internet secara positif</li> <li>12. Fungsi internet secara negatif</li> <li>13. Perdagangan secara elektronik</li> <li>14. Ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE</li> <li>15. Alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- S. M. H. Dr. Bambang Sutiyoso, Manajemen, Etika &amp; Hukum Teknologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015.</li> <li>- B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi [Cybercrime] - Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. 2012.</li> <li>- J. Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw – Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT</li> </ul>	

		<p>Tatanusa, 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi</li> <li>- Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli</li> <li>- Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al</li> </ul>					
		<b>Pendukung :</b>					
		- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Hukum Pidana					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami mahasiswa mampu menguraikan tentang mata kuliah Hukum Siber . [S9, KU1, KU2]	Pembukaan perkuliahan (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan Penjelasan mengenai mata kuliah Hukum Siber	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Deskripsi mata kuliah Hukum Siber	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu memahami pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mampu menjelaskan ruang lingkup cyber law [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang Ruang Lingkup Cyber Law	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. pengertian hukum siber, 2. sejarah hukum siber,	10 %
3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu memahami pengertian	Kejelasan dan pemahaman tentang Ruang Lingkup	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM:	<b>eLearning dan platform media</b>	3. prinsip ketentuan internasional 4. ruang lingkup cyber law	10 %



	hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mampu menjelaskan ruang lingkup cyber law [S9, KU1, KU2, PP4]	Cyber Law	70 D = 41-55 E = 0 – 40	(1+1)x(2x60”)]	<b>lainnya.</b>		
4	Sub-CPMK-3: Mampu menjelaskan mengenai tujuan dan asas serta urgensi pengaturan teknologi informasi.. [S9, PP4]	tujuan dan asas serta mampu menjelaskan mengenai urgensi pengaturan teknologi informasi..	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Asas teritorial dan asas nasional aktif dan pasif	10 %
5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelaskan mengenai tujuan dan asas serta urgensi pengaturan teknologi informasi.. [S9, PP4]	tujuan dan asas serta mampu menjelaskan mengenai urgensi pengaturan teknologi informasi..	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	2. Urgensi pengaturan teknologi informasi.	10 %
6	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu mampu menjelaskan mengenai fungsi internet serta menjelaskan mengenai perdagangan secara elektronik. [S9, KU1, PP4]	fungsi internet serta menjelaskan mengenai perdagangan secara elektronik (ecommerce)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Fungsi internet secara positif dan negatif	10 %
7	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu mampu menjelaskan mengenai fungsi internet serta menjelaskan	fungsi internet serta menjelaskan mengenai perdagangan secara elektronik (ecommerce)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	2. Perdagangan secara elektronik	10 %

	mengenai perdagangan secara elektronik. [S9, KU1, PP4]		E = 0 – 40				
<b>8</b>	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
<b>9</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE, selain itu mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.	ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE, alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan .	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE	10 %
<b>10</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE, selain itu mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.	ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE, alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan .	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan	10 %
<b>11</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mengerti dan memahami perlindungan HAKI dalam cyber space, selain itu mampu menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait nama domein [S9, KU1, PP4]	perlindungan HAKI dalam cyber space, dan pelanggaran - pelanggaran terkait nama domein	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Perlindungan HAKI dalam cyber space	10 %
<b>12</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa	perlindungan HAKI	A = 86-100	a. Kuliah; b.Diskusi[	<b>eLearning dan</b>	Pelanggaran yang terkait nama domein	10 %

	mengerti dan memahami perlindungan HAKI dalam cyber space, selain itu mampu menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait nama domein [S9, KU1, PP4]	dalam cyber space, dan pelanggaran - pelanggaran terkait nama domein	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	TM:1x(2x 50”); c.[PT+BM: (1+1)x(2x6 0”)]	<b>platfor m media lainnya.</b>		
<b>13</b>	Sub-CPMK-7: mahasiswa mampu Mengerti dan memahami perlindungan konsumen dalam cyber space. [S9, KU9, KK1]	perlindungan konsumen dalam cyber space	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”); c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya.</b>  -	Perlindungan konsumen dalam cyber space	10 %
<b>14</b>	Sub-CPMK-7 Mengerti dan memahami mengenai implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE	implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”); c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya.</b>	1. implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-7 Mengerti dan memahami menjelaskan macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan sanksi	macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”); c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya.</b>	3. Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE 4. Penerapan sanksi pidana	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen**  
FA

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Perbandingan Hukum Pidana	FA206370	Pidana	T=2 P= 1	VII	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban; 3. Taat hukum, taat nilai, etika, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai internalisasi literasi hukum;			
	<b>CPL2 KETRAM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;			

	<b>PILAN UMUM</b>	2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu bersikap etis, adil, dan taat hukum dimasyarakat.
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>		
	CPMK	Mampu menjelaskan perbandingan hukum pidana, perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem hukum yang berbeda.
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>		
	Sub-CPMK	a. Mampu menganalisis perbandingan hukum pidana; b. Mampu menganalisis tujuan perbandingan hukum pidana; c. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai perbandingan Hukum Pidana sebagai metode penelitian. d. Mampu memahami sumber-sumber hukum pidana dan perbandingannya; e. Mampu memahami pelaksanaan hukum pidana di Indonesia
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah perbandingan hukum pidana, membahas tentang perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem hukum yang berbeda.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah</li> <li>2. Istilah dan Pengertian Hukum Pidana</li> <li>3. Perbandingan hukum pidana;</li> <li>4. Sejarah perbandingan hukum pidana.</li> <li>5. Metode perbandingan hukum pidana</li> <li>6. Perbandingan sistem-sistem hukum di Dunia</li> <li>7. Penjelasan tentang Legal Families</li> <li>8. Ulangan Tengah Semester</li> <li>9. Penjelasan tentang Sistem hukum pidana indonesia.</li> <li>10. Perbandingan sistem hukum indonesia dengan Belanda</li> <li>11. Perbandingan sistem hukum indonesia dengan Inggris</li> <li>12. Perbandingan sistem hukum indonesia dengan Jepang</li> <li>13. Penjelasan tentang ajaran dalam hukum pidana indonesia</li> <li>14. Perbandingan KUHP Indonesia dengan KUHP Asing</li> <li>15. Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana</li> <li>16. Ulangan Akhir Semester</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: - Frans Maramis, <i>Perbandingan Hukum Pidana</i> , Pustaka Sinar harapan, Jakarta - A.Z. Abidin, <i>Bunga Rampai Hukum Pidana</i> , Pradnya Paramita, Jakarta, Jakarta - J.M. Van Bemmelen, <i>Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Materiil bagian umum</i> , Binacipta - Soedjono Dirdjosisworo, <i>Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum</i> , Armico, Bandung - H.A.R. Gibb, <i>Islam dalam lintas sejarah</i> , terjemahan Abusalamah, Bhratama - Barda Nawawi Arief, <i>Perbandingan hukum pidana</i> , Raja grafindo persada, Jakarta - Soerjono Soekanto, <i>Perbandingan Hukum</i> , Alumni, Bandung - Sudarto, <i>Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)</i> , Badan Penyediaan bahan kuliah FH Undip, Semarang -	
	<b>Pendukung :</b>	
<b>Dosen Pengamp</b>		

u							
Matakuliah syarat		Hukum Pidana					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: mahasiswa mampu menguraikan tentang mata kuliah perbandingan hukum pidana. [S9, KU1, KU2]	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Deskripsi mata kuliah Penjelasan mengenai mata kuliah perbandingan hukum pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan Penjelasan mengenai mata kuliah perbandingan hukum pidana	10 %
2	Sub-CPMK-2: Memahami pengertian perbandingan hukum pidana [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang istilah, pengertian, tujuan serta manfaat perbandingan hukum Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Istilah perbandingan hukum pidana 2. Pengertian Perbandingan hukum pidana	10 %
3	Sub-CPMK-2: Memahami pengertian perbandingan hukum pidana [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang istilah, pengertian, tujuan serta manfaat perbandingan hukum Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	3. Tujuan dan manfaat perbandingan hukum pidana	10 %
4	Sub-CPMK-3:	Kejelasan	A = 86-	a. Kuliah;	<b>eLearn</b>	Sejarah	10 %

	Mampu memahami mengenai sejarah perbandingan hukum pidana [S9, PP4]	dan pemahaman tentang sejarah singkat perbandingan hukumpidana	100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	ng dan platform media lainnya.	perbandingan hukum pidana	
5	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai sejarah perbandingan hukum pidana [S9, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang sejarah singkat perbandingan hukumpidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x6 0”)]	eLearning dan platform media lainnya.	Sejarah perbandingan hukum pidana	10 %
6	Sub-CPMK-4 Mampu Menganalisis metode perbandingan hukum pidana. [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang perbandingan hukum pidana sebagai metode	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x6 0”)]	eLearning dan platform media lainnya.	1. comparative law, 2. foreign law	10 %
7	Sub-CPMK-4 Mampu Menganalisis metode perbandingan hukum pidana. [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang perbandingan hukum pidana sebagai metode	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x6 0”)]	eLearning dan platform media lainnya.	1. comparative law, 2. foreign law	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-5: mampu memahami;sistem-sistem hukum didunia dan <i>legal families</i> [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman mengenai Sistem Common law, Sistem Civil Law, sistem sosialis law	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Sistem Common Law	10 %
10	Sub-CPMK-5: mampu memahami;sistem	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x	eLearning dan platform	2. Sistem Civil Law 3. Sistem Sosialis Law	10 %

	m-sistem hukum didunia dan <i>legal families</i> [S9, KU1, PP4]	mengenai Sistem Common law, Sistem Civil Law, sistem sosialis law	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	50”); c.[PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>m media lainnya.</b>		
<b>11</b>	Sub-CPMK-6: Memahami Sistem hukum pidana indonesia [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang pandangan monistis dan pandangan dualistis	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	pandangan monistis	10 %
<b>12</b>	Sub-CPMK-6: Memahami Sistem hukum pidana indonesia [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang pandangan monistis dan pandangan dualistis	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	pandangan dualistis	10 %
<b>13</b>	Sub-CPMK-7: Menganalisa sistem hukum Indonesia dengan Inggris, Belanda dan Jepang. [S9, KU9, KK1]	Perbandingan sistem hukum Indonesia dengan Inggris, Belanda dan Jepang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	1.Perbandingan sistem hukum indonesia dengan Inggris 2.Perbandingan sistem hukum indonesia dengan Belanda 3.Perbandingan sistem hukum indonesia dengan jepang	10 %
<b>14</b>	Sub-CPMK-7 Mampu mengetahui dan memahami perkembangan hukum pidsna indonesia	Perkembangan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemedanaan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1.Perkembangan tindak pidana 2.Perkembangan pertanggungjawaban pidana 3.Perkembangan pemedanaan	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-7 memahami tentang perbandingan KUHP Indonesia dengan KUHP	perbandingan KUHP Indonesia dengan KUHP Asing	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. perbandingan KUHP Indonesia dengan KUHP Asing 2. Perspektif pembaharuan hukum pidana	10%



	Asing, dan perspektif pembaharuan hukum pidana						
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum dan Politik	FA176379	HTN	T=2 P= 1	VII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius. b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu,pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. c. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. d. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. e. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. f. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mahasiswa memiliki kompetensi dapat menganalisis perkembangan hukum dan politik negara , lingkungan dalam sistem dan prospek politik hukum Indonesia, dapat memahami, menganalisis, menjabarkan sifat dan ruang lingkup hukum dan politik di Indonesia.			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Memiliki kemampuan memahami dengan baik konsep-konsep dan teori yang berkenaan dengan hukum dan politik dalam pemikiran dan gagasan terkait dengan tujuan politik hukum nasional dan agenda strategi pembangunan sistem hukum nasional			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu memahami arah tujuan pembelajaran mata kuliah. b. Mahasiswa mampu memahami pengertian hukum dan politik dalam aspek keilmuan. c. Mahasiswa menguasai pemahaman hukum dan politik sebagai kebijakan publik. d. Mahasiswa memahami maksud hal-hal yang masuk dalam cakupan hukum dan politik. e. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai konsep, indikator, dan isi hukum dan politik f. Mahasiswa mengetahui dan memahami politik pembentukan hukum di Indonesia. g. Mahasiswa memahami ukuran, sasaran, dan arah pembentukan perundang-undangan. h. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek hukum dan politik, dan alur pikir sebagai kebijakan hukum..				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah ini mempelajari perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. Pembahasan difokuskan pada proses pembentukan ius constituendum dari ius constitutum dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat. Dibahas pula produk perubahan hukum (ius constituendum) yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak kuliah dan Pengantar Mata Kuliah. 2. Pengertian Hukum dan Politik, 3. Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Hukum. 4. Hukum dan Politik dalam Kajian HTN 5. Konsepsi dan Indikator Tentang Hukum dan Politik Hukum 6. Teori Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum, dan Negara Hukum Yang Demokratis 7. Pengertian dan Tujuan Politik Hukum Nasional <b>8. Ujian Tengah Semester.</b> 9. Politik Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Negara 10. Mekanisme Perumusan Politik Hukum Nasional. 11. Politik Pembentukan Perundang-undangan Indonesia 12. Dimensi dan Sasaran Politik Pembentukan Perundang-undangan Indonesia 13. Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional 14. Aspek-aspek Hukum dan Politik Nasional. 15. Alur Pikir Politik Hukum Sebagai Legal Policy: <b>16. Ujian Akhir Semester.</b>				
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: 1. Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, Penerbit LP3ES: Jakarta, 1990.				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004.</li> <li>3. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1996.</li> <li>4. Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 1998.</li> <li>5. Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Nasional ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.</li> </ol>							
	Pendukung :							
<b>Dosen Pengampu</b>								
<b>Mata kuliah syarat</b> Hukum dan Poitik.								
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)	
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Sub-CPMK-1: Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami arah dan tujuan pembelajaran mata kuliah serta memahami relevansi mata kuliah.	Ketepatan memahami pentingnya mempelajari mata kuliah Hukum dan Politik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	20 %	
2	Sub-CPMK-2 Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami pengertian Hukum dan Politik.	Ketepatan menjelaskan dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Pengertian Hukum dan Politik. Dalam keilmuan.	15 %	
3	Sub-CPMK-3 Mahasiswa dapat menjelaskan Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Hukum.	Ketepatan menjelaskan dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Hukum.		
4	Sub-CPMK-4 Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum dan Politik Dalam Kajian HTN.	Ketepatan menjelaskan dan memahami.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Hukum dan Politik dalam Kajian HTN	15 %	
5	Sub-CPMK-5 Mahasiswa dapat menjelaskan Konsepsi dan Indikator Tentang Hukum dan Politik.	Ketepatan menjelaskan dan memahami.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Konsepsi dan Indikator Tentang Politik dan Hukum		
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa dapat menjelaskan Teori Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Teori Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum Dan Negara Hukum Yang Demokratis	10 %	
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan Tujuan Hukum dan Politik.	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Pengertian dan Tujuan Politik Hukum Nasional 2. Aspek-aspek Politik Hukum Nasional Dalam Penyelenggara Negara		
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester</b>							
9	Sub-CPMK-9 Mahasiswa dapat menjelaskan Beberapa Aspek Hukum dan Politik dalam Praktek Penyelenggaraan Negara.	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Aspek-aspek Politik Hukum Nasional Dalam Penyelenggara Negara	10 %	
10	Sub-CPMK-10 Mahasiswa dapat menjelaskan Mekanisme Perumusan	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Perumusan Pembentukan Politik Hukum Nasional.		

	Pembentukan Politik Hukum Nasional.							
<b>11</b>	Sub-CPMK-11 Mahasiswa dapat menjelaskan Politik Pembentukan Perundang-undangan Indonesia.	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Politik Pembentukan Perundang-undangan Indonesia	<b>10 %</b>	
<b>12</b>	Sub-CPMK-12 Mahasiswa dapat menjelaskan Dimensi dan Sasaran Politik Pembentukan Perundang-undangan Indonesia.	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; f. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Dimensi dan Sasaran Politik Pembentukan Perundang-undangan Indonesia		
<b>13</b>	Sub-CPMK-13 Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia.	Ketepatan menjelaskan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional	<b>20 %</b>	
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mahasiswa dapat menjelaskan Aspek-aspek Politik Hukum Nasional.:	Ketepatan menjelaskan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; f. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Aspek-aspek Hukum dan Politik Nasional.		
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa dapat menjelaskan Aspek-aspek Alur Pikir Politik Hukum Sebagai Legal Policy:	Ketepatan menjelaskan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	g. Kuliah; h. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; i. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Alur Pikir Politik Hukum Sebagai Legal Policy:		
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>							

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Kapita Selekta Hukum Bisnis	FA176396	HTN	T=2 P= 1	VIII	Juli 2021	
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI		
				Kanthi Rahayu,SH.,MH		
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	<b>CPL1 SIKAP</b>	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius. b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.				
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu,pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. c. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. d. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. e. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. f. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.				
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mahasiswa dapat menguasai Perkembangan teori-teori hukum perusahaan dalam hubungan dengan tenaga kerja, memiliki pengetahuan mengenai praktek perusahaan dan pengalihan aset berdasarkan hak transfer dan repatriasi modal dalam rangka penanaman modal				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK	Mampu memahami secara filosofis, teoretik, dan dogmatik, serta praktik hukum pengelolaan perusahaan yang baik ( <i>good corporate governance</i> )				
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
	Sub-CPMK	a. Mampu memahami arah tujuan pembelajaran mata kuliah. b. Mahasiswa mampu memahami pengertian Hukum Bisnis dan Tanggung Jawab sosial perusahaan c. Mahasiswa menguasai pemahaman pengaturan dalam hukum perusahaan d. Mahasiswa memahami penggabungan, pemisahan, dan privatisasi perusahaan e. Mahasiswa memiliki pengetahuan praktek pengalihan aset perusahaan. f. Mahasiswa mengetahui teori-teori perlindungan hukum UKM dan koperasi.. g. Mahasiswa memahami praktek hukum perlindungan tenaga kerja pada perusahaan PMA. h. Mahasiswa memiliki pengetahuan pengaturan dan praktek hukum kontrak bisnis.				
	<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini merupakan kumpulan pembahasan topik/bidang kajian hukum bisnis yang terpilih dari berbagai peraturan-peraturan yang mengatur masalah hukum dagang yang berlaku bagi subjek dan hukumnya demi mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Hukum bisnis (business law) dalam isitilah ini banyak dikenal dengan hukum dagang atau trade law atau commercial law mungkin banyak berpikit ini termasuk yang terangkum dalam hukum ekonomi. Hukum dagang dalam system hukum civil law tercakup pada hukum perdata sedangkan dalam system hukum common law ini suatu hukum yang terpisah. Dimana hukum yang bisnis tercakup dalam kitab hukum dagang dan beberapa peraturan undang-undang contohnya Undang-Undang PT				
	<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak kuliah dan Pengantar Mata Kuliah. 2. Memahami pengertian Kapita selekta Hukum Bisnis, 3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 4. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan, 5. Penggabungan, Pemisahan Perusahaan, 6. Privatisasi, Korporotasi Perusahaan. 7. Praktek Pengalihan Aset Berdasarkan Transfer dan Repatriasi. 8. <b>Ujian Tengah Semester.</b> 9. Praktik hukum privatisasi dankorporatisasi badan usaha milik negara 10. Perkembangan teori-teori hukum perlindungan tenaga kerja dalam perusahaan penanaman modal asing 11. Penyelesaian sengketa penanaman modal, yang bermanfaat bagi praktik hukum penanaman modal 12. Perkembangan pengaturan dan praktik hukum kontrak bisnis secara elektronik di Indonesia. 13. Penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik ( <i>e-business dispute settlement</i> ) 14. Perkembangan teori-teori hukum, pengaturan dan praktek perlindungan konsumen jasa pelayanan rumah sakit 15. Perkembangan teori-teori hukum, pengaturan dan praktek perlindungan investor dalam transaksi reksadana di pasar modal 16. <b>Ujian Ahir Semester</b>				
<b>Pustaka</b>						
	Daftar Referensi:					

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyoman Tjager, dkk., Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2003.</li> <li>2. Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.</li> <li>3. Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, Penerbit Ray Indonesia, Jakarta, 2005.</li> <li>4. Yuwa Wei, Comparative Corporate Governance, Kluwer Law Internasional, The Hague/London/ New York, 2003.</li> </ol>					
		Pendukung :					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Mata kuliah syarat</b>		Kapita Selekta Hukum Bisnis.					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami arah dan tujuan pembelajaran mata kuliah serta memahami relevansi mata kuliah.	Ketepatan memahami pentingnya mempelajari mata kuliah Hukum dan Politik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	20 %
2	Sub-CPMK-2 Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami pengertian kapita selekta dalam hukum bisnis.	Ketepatan menjelaskan dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	g. Kuliah; h. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; i. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Memahami pengertian Kapita Selekta Hukum Bisnis.	15 %
3	Sub-CPMK-3 Mahasiswa dapat memahami pengertian tanggung jawab sosial perusahaan, yang bermanfaat bagi praktik hukum perusahaan	Ketepatan menjelaskan dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	j. Kuliah; k. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; l. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Perkembangan pengaturan dan praktik hukum tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.	
4	Sub-CPMK-4 Mahasiswa dapat memahami Perkembangan pengaturan dan praktik hukum tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.	Ketepatan menjelaskan dan memahami.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	g. Kuliah; h. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; i. [PT+BM⊗1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Perkembangan pengaturan dan praktik hukum tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.	15 %
5	Sub-CPMK-5 Mahasiswa dapat memahami hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perusahaan, yang bermanfaat bagi praktik hukum perusahaan	Ketepatan menjelaskan dan memahami.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	j. Kuliah; k. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; l. [PT+BM⊗1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Pengaturan dan Tata Cara Penggabungan, Pemisahan Perusahaan	
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa dapat memahami praktik hukum privatisasi dan korporatisasi badan usaha milik negara	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	g. Kuliah; h. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; i. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Praktik hukum privatisasi dan korporatisasi badan usaha milik negara.	10 %
7	Su-CPMK-7 Mahasiswa dapat memahami pengalihan aset	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	j. Kuliah; k. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; l. [PT+BM:(1+	e-Learning dan platform media	1. Pengalihan aset berdasarkan hak transfer dan repatriasi modal dalam praktik hukum	

	berdasarkan hak transfer dan repatriasi modal dalam praktik hukum penanaman modal		E = 0 – 40	1)x(2x60'')	lainnya.	penanaman modal	
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
<b>9</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan teori-teori hukum tentang Privatisasi Perusahaan d	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	g. Kuliah; h. Diskusi[TM: 1x(2x50''); i. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Perkembangan teori-teori hukum dalam Privatisasi perusahaan	10 %
<b>10</b>	Sub-CPMK-10 Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan teori-teori hukum perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam rangka penanaman modal	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	j. Kuliah; k. Diskusi[TM: 1x(2x50''); l. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Perkembangan Hukum Perlindungan UKM	
<b>11</b>	Sub-CPMK-11 Mahasiswa dapat memahami Perkembangan teori-teori hukum perlindungan tenaga kerja dalam perusahaan penanaman modal asing	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	g. Kuliah; h. Diskusi[TM: 1x(2x50''); i. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Penyelesaian sengketa penanaman modal, yang bermanfaat bagi praktik hukum penanaman modal	10 %
<b>12</b>	Sub-CPMK-12 Mahasiswa dapat memahami Perkembangan pengaturan dan praktik hukum kontrak bisnis secara elektronik di Indonesia	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	j. Kuliah; k. Diskusi[TM: 1x(2x50''); l. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Mengetahui Kontrak Bisnis elektronik dan Norma hukumnya	
<b>13</b>	Sub-CPMK-13 Mahasiswa dapat memahami penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik ( <i>e-business dispute settlement</i> ) tentang	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	m. Kuliah; n. Diskusi[TM: 1x(2x50''); o. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Penyelesaian sengketa bisnis elektronik	
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mahasiswa dapat memahami Perkembangan teori-teori hukum, pengaturan dan praktek perlindungan konsumen jasa pelayanan rumsakit	Ketepatan menjelaskan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	j. Kuliah; k. Diskusi[TM: 1x(2x50''); l. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')	e-Learning dan platform media lainnya.  -	2. Perkembangan teori hukum pengaturan perlindungan konsumen.	20 %
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa dapat memahami Perkembangan teori-teori hukum, pengaturan dan praktek perlindungan investor dalam transaksi reksadana di pasar modal	Ketepatan menjelaskan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	m. Kuliah; n. Diskusi[TM: 1x(2x50''); o. [PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')	e-Learning dan platform media lainnya.  -	1. Perkembangan Teori Hukum Praktek Perlindungan Hukum Investor.	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Penanaman Modal Asing	FA1763100	HTN	T=2 P= 1	VIII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius. b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu,pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. c. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. d. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. e. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. f. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mahasiswa dapat menguasai Perkembangan teori-teori hukum perusahaan dalam hubungan dengan tenaga kerja, memiliki pengetahuan mengenai praktek perusahaan dan pengalihan aset berdasarkan hak transfer dan repatriasi modal dalam rangka penanaman modal			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mampu memahami secara filosofis, teoretik, dan dogmatik, serta praktik hukum dalam pengaturan investasi dan penanaman modal, mengenal dan mengetahui hak dan kewajiban penanaman modal dan tata cara dan pengaturan baik pelaksanaan dan penyelesaian sengketa investasi.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu memahami arah tujuan pembelajaran mata kuliah. b. Mahasiswa mampu memahami pengertian Hakikat Hukum Investasi c. Mahasiswa menguasai pemahaman jenis-jenis penanaman moda, kondisi, dan dasar-dasar investasi. d. Mahasiswa memahami dasar dan makna undang-undang penanaman modal, hak dan kewajiban penanaman modal. e. Mahasiswa memiliki pengetahuan makna penanaman modal dan bentuk hukum, subyek hukum, dan badan hukum pendiriannya. f. Mahasiswa mengetahui pola investasi dengan UMKM dan Koperasi dan tata caranya. g. Mahasiswa memahami dan mengetahui ijin-ijin yang diperlukan dalam berinvestasi. h. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang lembaga BKPM dan cara penyelesaian sengketa dalam investasi.				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini merupakan kumpulan pembahasan topik/bidang kajian hukum Investasi atau penanaman modal yang didalamnya membahas mengenai hakikat hukum investasi, tata cara investasi dan pengaturan investasi.Hukum Penanaman Modal yang kita kenal dengan Hukum Investasi juga merupakan mata kuliah yang juga membahas pengaturan investasi, hak dan kewajiban penanaman modal, sinergitas penanaman modal bersama UMKM dan Koperasi dan aturan-aturan lain yang meliputi penyelesaian sengketa dalam penanaman modal di Indonesia.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak kuliah, dan Pengantar Mata Kuliah. 2. Pengertian dan hakikat hukum investasi 3. Jenis Penanaman Modan 4. Kondisi Investasi di Indonesia. 5. Dasar-Dasar Hukum Investasi. 6. Asas-Asas UU Penanaman Modal, 7. Hak dan Kewajiban Penanaman Modal 8. <b>Ujian Tengah Semester</b> 9. Makna Penanaman Modal, 10. Bentuk hukum Penanaman Modal, 11. Subyek hukum penanaman modal, badan hukum, dan pendiriannya. 12. Investasi yang dilakukan dengan UMKM dan Koperasi, 13. Tata Cara Melakukan Investasi di Indonesia. 14. Ijin yang diperlukan Dalam Investasi 15. BKPM dan Cara penyelesaian Persoalan Investasi 16. <b>Ujian Ahr Semester</b>				
<b>Pustaka</b>					




		Daftar Referensi: 1. Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. 2. Amiruddin, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta : PT. Kencana, 2007) 3. Dhaniswara K, " <i>Hukum Penanaman Modal</i> , ( Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada , 2007) 4. Erman Rajagukguk, Modul Hukum Investasi dan Pasar Modal 5. UU Nomor 25 Tahun 2007. 6. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase					
		Pendukung :					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Mata kuliah syarat</b>		Hukum Penanaman Modal Asing.					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami arah dan tujuan pembelajaran mata kuliah serta memahami relevansi mata kuliah.	Ketepatan memahami pentingnya mempelajari mata kuliah Hukum dan Politik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	g. Kuliah; h. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; i. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	20 %
2	Sub-CPMK-2 Mahasiswa dapat menjelaskan, mengembangkan secara teoretis hakikat hukum investasi, ruang lingkup hukum investasi, dan perkembangan penanaman modal di Indonesia	Ketepatan menjelaskan dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	m. Kuliah; n. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; o. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Makna Investasi, Jenis-jenis investasi, Kondisi Investasi di Indonesia saat ini.	15 %
3	Sub-CPMK-3 Mahasiswa dapat menjelaskan, dan memahami jenis penanaman modal di Indonesia	Ketepatan menjelaskan dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	p. Kuliah; q. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; r. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Jenis-jenis investasi, Kondisi Investasi di Indonesia saat ini.	
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat menjelaskan, mengenali jenis-jenis investasi dan penanaman modal di Indonesia	Ketepatan menjelaskan dan memahami.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	m. Kuliah; n. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; o. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Mengenal Jenis Investasi di Indonesia	15 %
5	Sub-CPMK-5 Mahasiswa dapat menjelaskan, secara teoretis apa yang menjadi dasar dasar Hukum investasi dan penanaman modal di Indonesia	Ketepatan menjelaskan dan memahami.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	p. Kuliah; q. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; r. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. UU Penanaman Modal umumnya, Azas dan tujuannya; • Perubahan mendasar UU Penanaman Modal yang baru	
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa dapat menjelaskan secara teoritis asas-asas hukum Penanaman Modal	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	m. Kuli ah; n. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; o. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	4. Dasar dan sumber hukum penanaman modal	10 %
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa dapat menjelaskan secara teoretis hak dan kewajiban penanaman modal di Indonesia.	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	p. Kuliah; q. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; r. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Hak-hak penanaman modal, Kewajiban penanaman modal, Tanggung jawab penanam modal	
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester</b>						
9	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu	Ketepatan menjelaskan, dan	A = 86-100 B = 71-85	m. Kuliah; n. Diskusi[TM:	e-Learning dan	3. Badan hukum atau non badan hukum dalam	10 %

	menjelaskan, makna dan tujuan Investasi/ penanaman modal	memahami	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	1x(2x50''); o. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	platform media lainnya.	penanaman modal,• Pendiriannya		
<b>10</b>	Sub-CPMK-10 Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis bentuk badan hukum investasi.	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	p. Kuliah; q. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; r. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Badan hukum atau non badan hukum dalam penanaman modal,• Pendiriannya		
<b>11</b>	Sub-CPMK-11 Mahasiswa mampu menjelaskan, memahami Subyek Hukum, Badan Hukum, dan Pendiannya	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	p. Kuliah; q. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; r. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Permohonan investasi• Tatacara isian investasi• Izin Prinsi	<b>10 %</b>	
<b>12</b>	Sub-CPMK-12 Mahasiswa mampu menjelaskan, investasi dalam pengelolaan bersama UMKM dan Koperasi	Ketepatan menjelaskan, dan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	s. Kuliah; t. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; u. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Bentuk Usaha bersama UMKM dan Koperasi dalam Investasi		
<b>13</b>	Sub-CPMK-13 Mahasiswa dapat menjelaskan tata cara melakukan investasi di Indonesia	Ketepatan menjelaskan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	p. Kuliah; q. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; r. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Peraturan dalam ketentuan Dalam Investasi di Indonesia.	<b>20 %</b>	
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mahasiswa dapat menjelaskan izin-izin yang diperlukan IUI, TDI, IUT, API, API U, APIT, IMTA dan SIUP	Ketepatan menjelaskan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	s. Kuliah; t. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; u. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Jenis ijin dan ketentuan dalam melakukan investasi.		
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa dapat menjelaskan Lembaga Pelayanan Investasi BKPM dan Penyelesaian Persoalan.	Ketepatan menjelaskan memahami	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	v. Kuliah; w. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; x. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Pengawasan dan Penyelesaian Persoalan (sengketa) dalam nvestasi.		
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>							

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
ILMU NEGARA	FA176218	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menjelaskan Pengantar ilmu Negara, Teori Negara dan Ilmu Negara</li> <li>2. Mampu menganalisis: Hubungan Ilmu Negara Dengan Ilmu Kenegaraan Lainnya</li> <li>3. Mampu mengidentifikasi: Sifat dan Hakikat serta Tujuan Negara, Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan</li> </ol>			
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
Sub-CPMK	mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar ilmu Negara;Teori Negara dan Ilmu Negara; Hubungan Ilmu Negara Dengan Ilmu Kenegaraan Lainnya; Sifat dan Hakikat serta Tujuan Negara; Asal Mula dan Berakhirnya Negara; Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan; Teori-Teori Kedaulatan; tipe -tipe Negara.				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang kedudukan dan status ilmu negara dalam lingkup ilmu kenegaraan serta memberikan dasar pengetahuan untuk mempelajari Hukum Tata Negara. Mata kuliah ini meliputi Defenisi, Kedudukan, manfaat dan Hubungan Ilmu Negara dengan ilmu hukum lain, Pengertian Negara, Teori Kekuasaan dan Ajaran Kedaulatan, Teori tentang Timbul dan Berakhirnya Negara, Perkembangan dan Tipe-tipe Negara, Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan, Teori-teori Konstitusi, Demokrasi, tipe -tipe Negara, Kerjasama Antar Negara				
<b>Bahan Kajian / Materi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah dan pemahaman awal materi tentang Pengantar Ilmu Negara</li> <li>2. Unsur-Unsur Negara</li> <li>3. Teori Negara</li> </ol>				

<b>Pembelajaran</b>	4. Teori Ilmu Negara 5. Hubungan Ilmu Negara Dengan Ilmu Kenegaraan Lainnya 6. Tujuan negara 7. Fungsi negara <b>8. Ujian Tengah Semester</b> 9. Teori Asal Mula Negara 10. Teori Berakhirnya Negara 11. bentuk negara dan bentuk pemerintahan dan Sistem Pemerintahan 12. teori kedaulatan 13. tipe -tipe Negara 14. Konstitusi 15. kerjasama antar Negara <b>16. Ujian Akhir Semester</b>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: Soehino. (2000). Cet. III. Ilmu Negara. Yogyakarta. Liberty.. <b>Pendukung :</b> I Gede Pantja Astawa. (2009). Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Refika Aditama: Bandung						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Mata kuliah syarat</b>	Ilmu Negara						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan pemahaman awal materi tentang Pengantar Ilmu Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam melaksanakan kontrak kuliah</li> <li>Ketepatan menjelaskan tentang Pengantar Ilmu Negara</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Istilah dan Pengertian Negara, Ilmu Negara	5 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu merumuskan dan menjelaskan Unsur-Unsur Negara	Ketepatan menjelaskan tentang Unsur-Unsur Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Unsur-Unsur Negara, Teori Hukum Politik dan Teori Hukum Internasional	5 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu merumuskan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan merumuskan dan menjelaskan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(	<b>eLearning dan platform media</b>	Teori-teori tentang negara	5 %

	dan menjelaskan Teori Negara	Teori negara.	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	2x50"); c.[PT+B M:(1+1) x(2x60") ]	<b>lainnya.</b>			
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu merumuskan dan menjelaskan Teori Ilmu Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan merumuskan dan menjelaskan Teori negara.</li> <li>• Ketepatan dan kesesuaian merumuskan dan menjelaskan teori ilmu Negara</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60") ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Teori-teori ilmu negara.	5 %	
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menjelaskan Hubungan Ilmu Negara Dengan Ilmu Kenegaraan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60") ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara,</li> <li>2. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik,</li> <li>3. Hubungan ilmu negara dengan ilmu perbandingan hukum tata negara.</li> </ol>	10 %	
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Tujuan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan Tujuan Negara</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sifat dan hakikat negara, tujuan negara	10 %	
7	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Fungsi Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan fungsi Negara</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Fungsi negara	10 %	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan asal mula</li> </ul>	A = 86-100	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2	<b>eLearning dan</b>	Teori asal mula negara, teori terjadinya dan pertumbuhan negara, teori	5 %	

	menjelaskan Asal Mula Negara	Negara	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	x50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	platform media lainnya .	lenyapnya negara	
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menjelaskan Teori Berakhirnya Negara	• Ketepatan menjelaskan berakhirnya Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	Teori lenyapnya negara	5 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menganalisis dan mengimplementasikan bentuk negara dan bentuk pemerintahan dan Sistem Pemerintahan	• Ketepatan menjelaskan bentuk negara dan bentuk pemerintahan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	Teori bentuk negara, teori bentuk pemerintahan	5 %
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menjelaskan teori - teori kedaulatan	• Ketepatan menjelaskan teori kedaulatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	Teori kedaulatan teori kedaulatan tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, teori hukum.	5 %
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menjelaskan tipe -tipe Negara	Ketepatan menjelaskan tipe -tipe negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	Negara pada abad pertengahan, negara kesekuleran klasik, negara kesekuleran modern	10%

14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu menjelaskan Konstitusi	Ketepatan menjelaskan Konsitusi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Istilah dan Pengertian Konstitusi, Jenis-Jenis Konstitusi dan Tujuan Konstitusi	10%
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu menjelas kan kerjasama antar negara	Ketepatan menjelaskan kerjasama antar Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Teori pengakuan terhadap negara, orga - nisasi lintas negara	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM

Kode Dokumen  
FA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM ALIH TEKNOLOGI	FA176263	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum 2. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif tentang Perkembangan kajian tentang Hukum Alih Teknologi Cybercrime Konvergensi Bidang Teknologi dan UU ITE Mengetahui dan Peraturan Perundang-undangan mengenai Alih Teknologi.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	a. Mengetahui dan memahami Perkembangan kajian tentang Hukum Alih Teknologi b. Mengetahui dan memahami konsep Cybercrime c. Mengetahui dan memahami Konvergensi Bidang Teknologi dan UU ITE Mengetahui dan d. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Alih Teknologi				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini memfokuskan kajiannya pada Perkembangan kajian tentang Hukum Alih Teknologi Cybercrime Konvergensi Bidang Teknologi dan UU ITE Mengetahui dan Peraturan Perundang-undangan mengenai Alih Teknologi.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum 2. Istilah dan Kerangka Hukum Alih Teknologi 3. Cybercrime 4. Konvergensi Bidang Teknologi dan UU ITE 5. UU ITE Dalam Sistem Hukum Nasional 6. Peraturan Perundang-undangan mengenai Alih Teknologi 7. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Alih Teknologi				



	<p><b>8. Ujian Tengah Semester</b></p> <p>9. Perkembangan aspek hukum alih teknologi di Indonesia</p> <p>10. Perlunya Pengaturan Alih Teknologi Secara Sui Generis</p> <p>11. 11.Faktor-faktor pendukung Alih Teknologi</p> <p>12. Faktor-faktor penghambat Alih Teknologi</p> <p>13. Peranan Paten dalam Alih Teknologi</p> <p>14. KonsepAlih Teknologi dalam penanaman modal</p> <p>15. Review Tugas dan Materi</p> <p><b>16. Ujian Akhir Semester</b></p>						
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung.</li> <li>2. Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta.</li> <li>3. Judhariksawan, 2005, Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta.</li> <li>4. Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar, Prenada Kencana, Jakarta.</li> <li>5. _____, 2005, Legal Analysis of Telecommunication: Comparative Study between Indonesia and Australia, Jurisdictionary, Makassar..</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KUHP</li> <li>- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik informasi transaksi-elektronik</li> </ul>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	<b>HUKUM ALIH TEKNOLOGI</b>						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya .</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah</li> <li>2. Tujuan Mata Kuliah</li> </ol>	5%
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu mengurai Istilah dan Kerangka Hukum Alih	Ketepatan uraian Istilah dan Kerangka Hukum Alih Teknologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ;	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian</li> <li>2. Istilah</li> <li>3. Kerangka Hukum</li> </ol>	5 %

	Teknologi		D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	.		
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan Konsep Cybercrime	Ketepatan uraian Konsep Cybercrime	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	1. Unauthorized access to computer system and service; 2. Illegal contents; 3. Data forgery; 4. Cyber espionage; 5. Against IPR; 6. Infringments privacy.	5 %
4	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu menguraikan Konvergensi Bidang Teknologi dan UU ITE	Kesesuaian uraian Konvergensi Bidang Teknologi dan UU ITE	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	1. Aktivitas dalam dunia siber 2. Berbagai bentuk teknologi informasi 3. Pemisahan teknologi informasi, baik antara telekomunikasi, penyiaran dan teknologi	5 %
5	Sub-CPMK-5 Mahasiswa mampu menguraikan UU ITE Dalam Sistem Hukum Nasional	Ketepatan uraian UU ITE Dalam Sistem Hukum Nasional	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	1. Kaidah yang terkandung 2. Prinsip yang berlaku 3. UU ITE sebagai Hukum Siber	10 %
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mengenai Alih Teknologi	Ketepatan menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mengenai Alih Teknologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alih teknologi di Indonesia baik itu yang terdapat di dalam: 1. Undang-Undang Paten, 2. Rahasia Dagang, 3. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 4. Penanaman Modal, dan 5. Pedoman Pengecualian UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	10 %

7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan Upaya Perlinungan Hukum Terhadap Alih Teknologi	Ketepatan uraian mengenai Upaya Perlinungan Hukum Terhadap Alih Teknologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya</b> .	Upaya Perlinungan Hukum Terhadap Alih Teknologi	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan Perkembangan aspek hukum alih teknologi di Indonesia	ketepatan uraian Perkembangan aspek hukum alih teknologi di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x( 2x60'')]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya</b> .	Perkembangan aspek hukum alih teknologi di Indonesia	5 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan . Perlunya Pengaturan Alih Teknologi Secara Sui Generis	Ketepatan uraian . Perlunya Pengaturan Alih Teknologi Secara Sui Generis	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x( 2x60'')]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya</b> .	Perlunya Pengaturan Alih Teknologi Secara Sui Generis	5 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan Faktor-faktor pendukung Alih Teknologi	ketepatan uraian Faktor-faktor pendukung Alih Teknologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x( 2x60'')]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya</b> .	Faktor-faktor pendukung Alih Teknologi	5%
12	Sub-CPMK-12 Mahasiswa mampu menguraikan Faktor-faktor penghambatan Alih Teknologi	Ketepatan uraian Faktor-faktor penghambatan Alih Teknologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D =	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x( 2x60'')]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya</b> .	Faktor-faktor penghambatan Alih Teknologi	5%

			41-55 E = 0 - 40				
13	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu menganalisis Peranan Paten dalam Alih Teknologi	Ketepatan analisis Peranan Paten dalam Alih Teknologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	Peranan Paten dalam Alih Teknologi.	10%
14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Alih Teknologi dalam penanaman modal	Ketepatan menjelaskan Konsep Alih Teknologi dalam penanaman modal	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	Konsep Alih Teknologi dalam penanaman modal	10%
15	Sub-CPMK-15 view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	view Tugas dan Materi	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

		<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>			<b>Kode Dokumen FA</b>	
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>						
<b>MATA KULIAH (MK)</b>		<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN</b>		FA176262	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
		<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
						<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>		<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
<b>CPL1 SIKAP</b>		1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;				
<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>		1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.				
<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>		1. Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum 2. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;				
		<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
<b>CPMK</b>		Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif tentang Perkembangan kajian tentang korban kejahatan Dampak-dampak terjadinya kejahatan masalah kebutuhan korban				
		<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub- CPMK</b>		a. Mengetahui dan memahami Perkembangan kajian tentang korban kejahatan b. Mengetahui dan memahami konsep saksi dan korban c. Mengetahui dan memahami ketentuan pidana bagi perlindungan saksi dan korban d. Mengetahui dan memahami Dampak-dampak terjadinya kejahatan e. Mengetahui dan memahami Dampak viktimisasi dan masalah kebutuhan korban				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>		Mata kuliah ini memfokuskan kajiannya pada latar belakang perkembangan kajian tentang korban kejahatan yang mendorong pembentukan dan pemberlakuan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban serta mampu melakukan analisis berbagai permasalahan penegakan hukum perlindungan saksi dan korban.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>		1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum 2. Perkembangan kajian tentang korban kejahatan 3. Konsep saksi dan korban 4. Ketentuan pidana bagi perlindungan saksi dan korban 5. Dampak-dampak terjadinya kejahatan 6. Dampak viktimisasi dan masalah kebutuhan korban				

	<p>7. Masalah viktimisasi struktural</p> <p><b>8. Ujian Tengah Semester</b></p> <p>9. Korban dan kejahatan yang merupakan dampak pembangunan ekonomi</p> <p>10. 10.Perkembangan perlindungan korban di negara lain</p> <p>11. 11.Faktor-faktor pendukung gerakan perlindungan korban</p> <p>12. 12.Perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum Indonesia</p> <p>13. 13.Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat</p> <p>14. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</p> <p>15. Review Tugas dan Materi</p> <p><b>16. Ujian Akhir Semester</b></p>						
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdul Rahman Umar, Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam, Jakarta: PT.Pustaka al-Husna, 1986.</li> <li>2. Anshorudin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.</li> <li>3. Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.</li> <li>4. Djazuli, Fiqih Jinayah, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.</li> <li>5. Israel Draffin &amp; Emilio Viano eds., 1975, Victimology, Toronto: Lexington Book.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KUHP</li> <li>- UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ul>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	<b>HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN</b>						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	3. Kontrak kuliah 4. Tujuan Mata Kuliah	5%
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu mengurai Perkembangan kajian tentang	Ketepatan uraian Perkembangan kajian tentang korban kejahatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ;	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	1. Perkembangan kajian tentang korban kejahatan	5 %

	korban kejahatan		D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	.		
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan Konsep saksi dan korban	Ketepatan uraian Konsep saksi dan korban	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya	7. Konsep korban 8. Primary victims-Secondary victims Tertiary 9. Pengertian saksi dan korban	5 %
4	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu menguraikan Ketentuan pidana bagi perlindungan saksi dan korban	Kesesuaian uraian Ketentuan pidana bagi perlindungan saksi dan korban	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya	4. Ketentuan pidana bagi perlindungan saksi dan korban	5 %
5	Sub-CPMK-5 Mahasiswa mampu menguraikan Dampak-dampak terjadinya kejahatan	Ketepatan uraian Dampak-dampak terjadinya kejahatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya	4. Konsep kejahatan (Concept Of crime) 5. Penggolongan (Klasifikasi Kejahatan) 6. Dampak-dampak terjadinya kejahatan 7. Akibat kejahatan terhadap pelaku 8. Akibat kejahatan terhadap korban 9. Akibat kejahatan terhadap masyarakat	10 %
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu Dampak viktimisasi dan masalah kebutuhan korban	Ketepatan analisis Dampak viktimisasi dan masalah kebutuhan korban	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya	1. Dampak viktimisasi dan masalah kebutuhan korban (penderitaan fisik, masalah mental, masyarakat) 2. Masalah kebutuhan korban kejahatan 3. Pertolongan pada korban kejahatan	10 %

						4. Tindakan pendampingan korban dan upaya lain	
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan Masalah viktimisasi structural	Ketepatan uraian Masalah viktimisasi structural	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')] ; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	1. Viktimisasi struktural 2. Viktimisasi atas perorangan vs viktimisasi struktural 3. Akar viktimisasi structural 4. Terjadinya viktimisasi struktural	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan Korban dan kejahatan yang merupakan dampak pembangunan ekonomi	ketepatan uraian Korban dan kejahatan yang merupakan dampak pembangunan ekonomi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	1. Pendekatan negatif dan pendekatan positif. 2. Korban kejahatan ekonomi. 3. Penipuan terhadap ekonom	5 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan Perkembangan perlindungan korban di negara lain	ketepatan uraian Perkembangan perlindungan korban di negara lain	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	1. Perkembangan perlindungan korban di Australia 2. Menemukan kembali perhatian terhadap korban kejahatan 3. Tipologi korban menurut pendapat Mendelsohn	5 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan Faktor-faktor pendukung gerakan perlindungan korban	ketepatan uraian Faktor-faktor pendukung gerakan perlindungan korban	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	1. Faktor-faktor pendukung gerakan korban 2. Dukungan terhadap korban di Australia 3. Keadilan restoratif	5%
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menguraikan	Ketepatan uraian Perlindungan saksi dan	A = 86-100 B =	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')];	eLearning dan platform	Perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum di Indonesia dalam Undang-undang	5%




	Perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum Indonesia	korban dalam sistem hukum Indonesia	71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>media lainnya</b> .	Nomor 13 tahun 2006 a. latar belakang pembetulan Undang-undang tersebut, b. perlindungan pada semua tahap proses peradilan, c. asas, tujuan perlindungan saksi dan korban, hak-hak saksi dan korban, korban pelanggaran HAM Berat	
<b>13</b>	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu menganalisis Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat	Ketepatan analisis Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban pelanggaran HAM berat	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM Berat.</li> <li>2. Penerima kompensasi, restitusi, rehabilitasi.</li> <li>3. Prinsip-prinsip pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi.</li> <li>4. Penanggung jawab pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi.</li> </ol>	10%
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu menjelaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	ketepatan menjelaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</li> <li>2. Aspek-aspek yang terdapat dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</li> </ol>	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	view Tugas dan Materi	10%

			E = 0 - 40				
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>KRIMINOLOGI</b>	FA176258	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>2. Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum</li> <li>2. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
	<b>CPMK</b>	<p>Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif tentang kejahatan dari aspek penyebab kejahatan berdasarkan pada teori-teori dalam kriminologi dan memiliki kemampuan untuk menerapkan teori-teori kriminologi dengan memberikan upaya penanggulangan kejahatan dalam suatu kasus faktual di dalam masyarakat</p>			
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
	<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kriminologi;</li> <li>b. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai definisi kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana;</li> <li>c. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai aliran-aliran kriminologi;</li> <li>d. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai teori-teori penyebab kejahatan dalam kriminologi;</li> <li>e. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai upaya-upaya penanggulangan kejahatan.</li> </ol>			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Mata kuliah ini membahas tentang sejarah perkembangan kriminologi, definisi kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana, aliran-aliran kriminologi, teori-teori penyebab kejahatan dalam kriminologi, teori-teori penyebab kejahatan dalam kriminologi dan upaya-upaya penanggulangan kejahatan.</p>				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum</li> <li>2. Sejarah perkembangan kriminologi</li> <li>3. Karakteristik kriminologi</li> <li>4. Penggolongan kriminolog</li> </ol>				

	5. Ruang lingkup kriminologi 6. Aliran-aliran dalam kriminolog 7. Teori-teori dalam kriminologi dari perspektif biologis <b>8. Ujian Tengah Semester</b> 9. Teori-teori dalam kriminologi dari perspektif psikologis 10. Teori-teori dalam kriminologi dari perspektif sosiologis 11. Teori-teori dalam kriminologi dari perspektif sosiologis 12. Teori penyebab kejahatan dari perspektif lain 13. Teori upaya-upaya penanggulangan kejahatan 14. Teori penyebab kejahatan dan upaya-upaya penanggulangan kejahatan dalam berbagai kasus 15. Review Tugas dan Materi <b>16. Ujian Akhir Semester</b>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: 1. Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Offset Yogyakarta. 2. Arif Gosita, 1996. Masalah Korban Kejahatan, Akademi Pressindo, Jakarta. 3. A.S. Alam, 1964, Pelacuran dan Pemasaran : Studi Sosiologi Tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia, Penerbit Alumni, Bandung. 5. Gerson W. Bawengan, 1992. Pengantar Psikologi Kriminal, PT Pradnya Paramita, Jakarta. 6. J.E. Sahetapy, 1992. Teori Kriminologi: Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung <b>Pendukung :</b> - KUHP						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Kriminologi						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50’)] ; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60’)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	5. Kontrak kuliah 6. Tujuan Mata Kuliah	5%
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu menguraikan sejarah perkembangan kriminologi	Ketepatan uraian sejarah perkembangan kriminologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50’)] ; c. [PT+B	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	2. Pengantar Kriminologi 3. Sejarah Perkembangan Kriminologi	5%


			55 E = 0 – 40	M:(1+1) x(2x60”) ]				
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan karakteristik kriminologi	Ketepatan uraian karakteristik kriminologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	eLearni ng dan platfor m media lainnya .	1. Definisi kriminologi 2. Definisi viktimologi 3. Korelasi kriminologi dan hukum pidana	5 %	
4	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu menguraikan penggolongan kriminologi	Kesesuaian uraian klasifikasi kriminologi dan membedakan kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	eLearni ng dan platfor m media lainnya .	5. Klasifikasi kriminologi 6. Kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi	5 %	
5	Sub-CPMK-5 Mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup kriminologi	Ketepatan uraian ruang lingkup kriminologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	eLearni ng dan platfor m media lainnya .	10. Konsep kejahatan (Concept Of crime) 11. Penggolongan (Klasifikasi Kejahatan)	10 %	
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu menganalisis aliran aliran dalam kriminologi	Ketepatan analisis aliran spiritualisme dan naturalisme dalam kriminologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	eLearni ng dan platfor m media lainnya .	5. Spritualisme 6. Naturalisme	10 %	
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan teori teori dalam kriminologi dari perspektif biologis	Ketepatan uraian dan membedakan antara teori born criminal, tipe fisik, disfungsi otak dan learning disabilities	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	eLearni ng dan platfor m media lainnya .	1. Born Criminal 2. Tipe Fisik 3. Disfungsi Otak dan Learning Disabilities 4. Faktor Genetik	10 %	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							

9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan teoriteori dalam kriminologi dari perspektif psikologis	tepatan uraian dan membedakan antara teoripsikoanalisis,kecacauan mental dan pembelajaran sosial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya .</b>	4. Psikoanalisis 5. Kekacauan mental (mental disorder) 6. Pembelajaran sosial (social learning disabilities)	5 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan teoriteori dalam kriminologi dari perspektif sosiologis	Ketepatan uraian dan membedakan antara teori anomie, dan penyimpangan budaya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya .</b>	4. Teori anomie 5. Teori penyimpangan budaya	5 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan teoriteori dalam kriminologi dari perspektif sosiologis	tepatan uraian dan membedakan antara teori anomie, dan penyimpangan budaya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya .</b>	Teori kontrol sosial Teori interaksionisme	5%
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menguraikan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain	Ketepatan uraian teori labeling,teori konflik,teori radikal sebagai penyebab kejahatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya .</b>	1. Teori labelling 2. Teori konflik 3. Teori radikal	5%
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menganalisis teori upaya-upaya penanggulangan kejahatan	Ketepatan analisis teori upaya penanggulanga n kejahatan yaitu pre-emptif, preventif, refresif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya .</b>	1. Pre-Emptif 2. Preventif 3. Refresif 4. Tujuan pemidanaan	10%

14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis teori penyebab kejahatan dan upaya-upaya penanggulangan kejahatan dalam berbagai kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Praktek Menyusun Laporan Penelitian Hukum</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	3. Prostitusi sebagai masalah sosial 4. Faktor penyebab prostitusi 5. Upaya penanggulangan prostitusi	10%
15	Sub-CPMK-15 view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	view Tugas dan Materi	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM</b>	FA176253	MKDU	<b>T=2 P= 1</b>	I	Juli 2021
		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>2. Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum</li> <li>2. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa memiliki pemahaman mengenai dasar-dasar metodologi tentang penelitian hukum dan</li> <li>2. Mahasiswa memiliki pemahaman mengenai Penulisan hukum mencakup gambaran umum penelitian, objek penelitian, karakteristik, jenis dan Tipe, Metode Pendekatan,</li> <li>3. Mahasiswa memiliki pemahaman mengenai Tahapan/Langkah Metode Penelitian Normatif, penulisan daftar pustaka, hingga penyusunan usulan dan laporan hasil penelitian;</li> </ol>			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai penelitian normatif;</li> <li>2. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai penelitian empiris;</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Penelitian pada Umumnya, Penelitian dan Hukum dan Objeknya, Penelitian Hukum Ditinjau dari Berbagai Segi, Tahapan-tahapan Penelitian Hukum, Tahap Persiapan (Menyiapkan Proposal), Penggunaan Teori, Tinjauan Pustaka dan Metode, Praktek Menyusun Proposal Penelitian Hukum, Review Tugas Proposal, Tahap Pelaksanaan (Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data), Tahap Pelaporan (Menyusun Draft Laporan), Teknik Penulisan, Praktek Menyusun Laporan Penelitian Hukum.</p>				



<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum</li> <li>2. Penelitian pada Umumnya</li> <li>3. Penelitian dan Hukum dan Objeknya</li> <li>4. Penelitian Hukum Ditinjau dari Berbagai Segi</li> <li>5. Tahapan-tahapan Penelitian Hukum</li> <li>6. Tahap Persiapan (Menyiapkan Proposal)</li> <li>7. Penggunaan Teori, Tinjauan Pustaka dan Metode</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Praktek Menyusun Proposal Penelitian Hukum</li> <li>10. Review Tugas Proposal</li> <li>11. Tahap Pelaksanaan (Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data)</li> <li>12. Tahap Pelaporan (Menyusun Draft Laporan)</li> <li>13. Teknik Penulisan</li> <li>14. Praktek Menyusun Laporan Penelitian Hukum</li> <li>15. Review Tugas dan Materi</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>					
<b>Pustaka</b>		<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.</li> <li>2. Amiruddin &amp; Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit PT Radjagrafindo Persada, Jakarta</li> <li>3. Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung.</li> <li>4. Candra Kusuma, 2013, Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum, Penerbit Epistema Institute, Jakarta</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Johnny Ibrahim, 2006, Teori &amp; Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang.</li> <li>- John W. Creswell, 2014, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.</li> <li>- Mukti Fajar &amp; Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &amp; Empiris, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta</li> <li>- Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta</li> </ul>					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	7. Kontrak kuliah 8. Tujuan Mata Kuliah	5%
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menjelaskan Penelitian pada Umumnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan Penelitian pada Umumnya</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	4. Pengertian Penelitian 5. Tujuan Penelitian 6. Macam-macam penelitian	5 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menjelaskan Penelitian dan Hukum dan Objeknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan Penelitian dan Hukum dan Objeknya</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	4. Esensi penelitian hukum 5. Tipologi Penelitian Hukum 6. Objek Penelitian hukum	5 %
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu menjelaskan Penelitian Hukum Ditinjau dari Berbagai Segi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan Penelitian Hukum Ditinjau dari Berbagai Segi</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	8. Penelitian Hukum Empiris 9. Penelitian hukum Normatif	5 %
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menjelaskan Tahapan-tahapan Penelitian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan Tahapan-tahapan Penelitian Hukum</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	12. Tahap Persiapan 13. Tahap Pelaksanaan 14. Tahap Pelaporan	10 %
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu membuat Tahap Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam membuat Tahap Persiapan (Menyiapkan Proposal)</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')];	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	7. Struktur Proposal Penelitian	10 %

	(Menyiapkan Proposal)			c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]			
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menjelaskan Penggunaan Teori, Tinjauan Pustaka dan Metode	Ketepatan dalam menjelaskan Penggunaan Teori, Tinjauan Pustaka dan Metode	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya.	5. Penggunaan Teori, 6. Tinjauan Pustaka dan 7. Metode	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu Praktek Menyusun Proposal Penelitian Hukum	• Ketepatan Praktek Menyusun Proposal Penelitian Hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	Praktek Menyusun Proposal Penelitian Hukum	5 %
10	Sub-CPMK-10: Review Tugas Proposal	• Ketepatan dalam membuat Proposal	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	Review Tugas Proposal	5 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu membuat Tahap Pelaksanaan (Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data)	Ketepatan menggunakan Tahap Pelaksanaan (Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data	5%
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu membuat Laporan Tahap Pelaporan	• Ketepatan membuat Laporan Penelitian	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D =	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	Laporan Penelitian	5%

			41-55 E = 0 - 40					
13	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu memahami teknik penulisan	• Ketepatan memahami teknik penulisan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	eLearn ing dan platfor m media lainnya .	Teknik Penulisan	10%	
14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu membuat Praktek Menyusun Laporan Penelitian Hukum	• Ketepatan Praktek Menyusun Laporan Penelitian Hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	eLearn ing dan platfor m media lainnya .	Praktek Menyusun Laporan Penelitian Hukum	10%	
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	eLearn ing dan platfor m media lainnya .	view Tugas dan Materi	10%	
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>							

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
<b>POLITIK HUKUM PIDANA</b>	FA176368	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum</li> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif tentang Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana Hukum Pidana Indonesia dari Masa ke Masa Hukum Pidana Indonesia dalam Diskursus Perkembangan Masyarakat.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui dan memahami Tinjauan Umum Politik Hukum Pidana</li> <li>Mengetahui dan memahami Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana</li> <li>Mengetahui dan memahami Hukum Pidana Indonesia dari Masa ke Masa</li> <li>Memahami Hukum Pidana Indonesia dalam Diskursus Perkembangan Masyarakat</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini memfokuskan kajiannya pada Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana Hukum Pidana Indonesia dari Masa ke Masa Hukum Pidana Indonesia dalam Diskursus Perkembangan Masyarakat.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum</li> <li>Tinjauan Umum Politik Hukum Pidana</li> <li>Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana</li> <li>Hukum Pidana Indonesia dari Masa ke Masa</li> <li>Hukum Pidana Indonesia dalam Diskursus Perkembangan Masyarakat</li> <li>Sistem Pidana di Indonesia</li> <li>Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>Politik Hukum Pidana sebagai Upaya Menuju Pembaharuan Hukum Pidana</li> <li>Sumber dalam Pembaharuan Hukum Pidana</li> <li>Pokok-pokok Pemikiran dan Aspek Baru dalam Pembaharuan Hukum Pidana</li> </ol>				

	12. Sistem Pemidanaan menurut Konsep Hukum Pidana Baru 13. Beberapa Persoalan yang Kontroversial dalam Konsep Hukum Pidana Baru 14. Hukum Pidana Nasional sebagai Cita Hukum Pancasila 15. Review Materidan Tugas Akhir <b>16. Ujian Akhir Semester</b>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi:						
	1. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana, 2011 2. Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung : Lubuk Agung, 2011 3. Imly Asshidiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Angkasa, 1995 4. Mokhammad Najikh, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi (Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara), Malang : IN-TRANS Publishing, 2008.						
	<b>Pendukung :</b>						
	- KUHP - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik informasi transaksi-elektronik						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	<b>POLITIK HUKUM PIDANA</b>						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	9. Kontrak kuliah 10. Tujuan Mata Kuliah	5%
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu mengurai Tinjauan Umum Politik Hukum Pidana	Ketepatan uraian Tinjauan Umum Politik Hukum Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	4. Pengertian 5. Istilah 6. Kerangka Hukum	5 %

3	b-CPMK-3: mahasiswa mampu menguraikan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	ketepatan uraian Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'') ]	eLearni ng dan platfor m media lainnya .	Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	5 %
4	Sub-CPMK-4 mahasiswa mampu menguraikan Hukum Pidana Indonesia dari Masa ke Masa	Kesesuain uraian Hukum Pidana Indonesia dari Masa ke Masa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearni ng dan platfor m media lainnya .	Hukum Pidana Indonesia dari Masa ke Masa	5 %
5	Sub-CPMK-5 mahasiswa mampu menguraikan Hukum Pidana Indonesia dalam Diskursus Perkembangan Masyarakat	Ketepatan uraian Hukum Pidana Indonesia dalam Diskursus Perkembangan Masyarakat	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearni ng dan platfor m media lainnya .	Hukum Pidana Indonesia dalam Diskursus Perkembangan Masyarakat	10 %
6	Sub-CPMK-6 mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Pidana di Indonesia	Ketepatan menjelaskan Sistem Pidana di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearni ng dan platfor m media lainnya .	Sistem Pidana di Indonesia	10 %
7	Sub-CPMK-7 mahasiswa mampu menguraikan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana	Ketepatan uraian mengenai Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearni ng dan platfor m media lainnya .	Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						

9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan Politik Hukum Pidana sebagai Upaya Menuju Pembaharuan Hukum Pidana	ketepatan uraian Politik Hukum Pidana sebagai Upaya Menuju Pembaharuan Hukum Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	Politik Hukum Pidana sebagai Upaya Menuju Pembaharuan Hukum Pidana	5 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan . Sumber dalam Pembaharuan Hukum Pidana	Ketepatan uraian . Sumber dalam Pembaharuan Hukum Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	Sumber dalam Pembaharuan Hukum Pidana	5 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan Pokok-pokok Pemikiran dan Aspek Baru dalam Pembaharuan Hukum Pidana	ketepatan uraian Pokok-pokok Pemikiran dan Aspek Baru dalam Pembaharuan Hukum Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya . -	Pokok-pokok Pemikiran dan Aspek Baru dalam Pembaharuan Hukum Pidana	5%
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menguraikan Sistem Pidana menurut Konsep Hukum Pidana Baru	Ketepatan uraian Sistem Pidana menurut Konsep Hukum Pidana Baru	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	Sistem Pidana menurut Konsep Hukum Pidana Baru	5%
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menganalisis Beberapa Persoalan yang Kontroversial dalam Konsep Hukum Pidana Baru	Ketepatan analisis Beberapa Persoalan yang Kontroversial dalam Konsep Hukum Pidana Baru	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	Beberapa Persoalan yang Kontroversial dalam Konsep Hukum Pidana Baru	10%



14	Sub-CPMK-14 siswa mampu menjelaskan Hukum Pidana Nasional sebagai Cita Hukum Pancasila	tepatan menjelaskan Hukum Pidana Nasional sebagai Cita Hukum Pancasila	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x( 2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	kum Pidana Nasional sebagai Cita Hukum Pancasila	10%
15	Sub-CPMK-15 view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x( 2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	view Tugas dan Materi	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM WAKAF	FA176374	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthen Rahayu,SH.,MH</b>		

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>	
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> </ol>
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.</li> </ol>
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum</li> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>	
CPMK	Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif tentang Pengertian, Ketentuan Umum Perwakafan dan Perbedaannya dengan Dengan Harta Sosial Lainnya,Perkembangan Wakaf di Dunia Islam,Dasar-dasar, Tujuan, Macam-Macam Wakaf, Fungsi, Syarat-Syarat dan Unsur-unsur Wakaf,Peraturan Wakaf di Indonesia dan HartaBenda Wakaf dan Prospek Ekonominya.	
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>		
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui dan memahami Pengertian, Ketentuan Umum Perwakafan dan Perbedaannya dengan Dengan Harta Sosial Lainnya</li> <li>Mengetahui dan memahami Perkembangan Wakaf di Dunia Islam</li> <li>Mengetahui dan memahami Dasar-dasar, Tujuan, Macam-Macam Wakaf, Fungsi, Syarat-Syarat dan Unsur-unsur Wakaf</li> <li>Memahami HartaBenda Wakaf dan Prospek Ekonominya</li> </ol>	
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah ini menawarkan konsep pemahaman tentang sejarah perkembangan wakaf dari aspek perundang-undangan, pengelolaan maupun pemanfaatannya, serta upaya upaya yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf agar wakaf lebih dirasakan manfaatnya, dalam konteks ini disesuaikan dengan perkembangan sesuai dengan peraturan di Indonesia, diantaranya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.	

<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum</li> <li>2. Pengertian, Ketentuan Umum Perwakafan dan Perbedaannya dengan Dengan Harta Sosial Lainnya</li> <li>3. Perkembangan Wakaf di Dunia Islam</li> <li>4. Dasar-dasar, Tujuan, Macam-Macam Wakaf, Fungsi, Syarat-Syarat dan Unsur-unsur Wakaf</li> <li>5. Peraturan Wakaf di Indonesia</li> <li>6. Harta Benda Wakaf dan Prospek Ekonominya</li> <li>7. Wakaf Uang</li> <li>8. Ujian Tengah Semester</li> <li>9. Peruntukan Wakaf dan Wakaf dengan Wasiat</li> <li>10. Tata Cara Perwakafan di Indonesia</li> <li>11. Perubahan Status HartaWakaf dan Penarikan Kembali Harta Wakaf</li> <li>12. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dan Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI)</li> <li>13. Permasalahan Praktek Wakaf di Masyarakat Indonesia</li> <li>14. Penyelesaian SengketaWakaf</li> <li>15. Review MateridanTugas</li> <li>16. Ujian Akhir Semester</li> </ol>					
<b>Pustaka</b>		<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdurrahman Kasdi, Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif; Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2017.</li> <li>2. Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2005;</li> <li>3. A.Faishal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sidoarjo, CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2013.</li> <li>4. Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2015.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006</li> </ul>					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		<b>HUKUM WAKAF</b>					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50'')] ;	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah</li> <li>2. Tujuan Mata Kuliah</li> </ol>	5%

		tujuan mata kuliah	D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	.		
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu mengurai Pengertian, Ketentuan Umum Perwakafan dan Perbedaannya dengan Dengan Harta Sosial Lainnya	Ketepatan uraian Pengertian, Ketentuan Umum Perwakafan dan Perbedaannya dengan Dengan Harta Sosial Lainnya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	7. Pengertian, 8. Ketentuan Umum Perwakafan dan 9. Perbedaannya dengan Dengan Harta Sosial Lainnya	5 %
3	b-CPMK-3: mahasiswa mampu menguraikan Perkembangan Wakaf di Dunia Islam	ketepatan uraian Perkembangan Wakaf di Dunia Islam	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Perkembangan Wakaf di Dunia Islam	5 %
4	Sub-CPMK-4 mahasiswa mampu menguraikan Dasar-dasar, Tujuan, Macam-Macam Wakaf, Fungsi, Syarat-Syarat dan Unsur-unsur Wakaf	Kesesuain uraian Dasar-dasar, Tujuan, Macam-Macam Wakaf, Fungsi, Syarat-Syarat dan Unsur-unsur Wakaf	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	1. Dasar-dasar, 2. Tujuan, 3. Macam-Macam Wakaf, 4. Fungsi, 5. Syarat-Syarat dan 6. Unsur-unsur Wakaf	5 %
5	Sub-CPMK-5 mahasiswa mampu menguraikan Peraturan Wakaf di Indonesia	Ketepatan uraian Peraturan Wakaf di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Peraturan Wakaf di Indonesia	10 %
6	Sub-CPMK-6 mahasiswa mampu menjelaskan Harta Benda Wakaf dan Prospek	Ketepatan menjelaskan Harta Benda Wakaf dan Prospek Ekonominya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50”)] ;	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Harta Benda Wakaf dan Prospek Ekonominya	10 %

	Ekonominya		D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	.		
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan Wakaf Uang	Ketepatan uraian mengenai Wakaf Uang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Wakaf Uang	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan Peruntukan Wakaf dan Wakaf dengan Wasiat	ketepatan uraian Peruntukan Wakaf dan Wakaf dengan Wasiat	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Peruntukan Wakaf dan Wakaf dengan Wasiat	5 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan . Tata Cara Perwakafan di Indonesia	Ketepatan uraian . Tata Cara Perwakafan di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Tata Cara Perwakafan di Indonesia	5 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan Perubahan Status Harta Wakaf dan Penarikan Kembali Harta Wakaf	ketepatan uraian Perubahan Status Harta Wakaf dan Penarikan Kembali Harta Wakaf	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Perubahan Status Harta Wakaf dan Penarikan Kembali Harta Wakaf	5%
12	Sub-CPMK-12 Mahasiswa mampu menguraikan Pengelolaan dan Pengembangan	Ketepatan uraian Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda	A = 86-100 B = 71-85 C =	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	1. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dan 2. Keberadaan Badan Wakaf	5%

	Harta Benda Wakaf, dan Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Wakaf, dan Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI)	56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	(2x60'')	.	Indonesia (BWI)	
13	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu menganalisis Permasalahan Praktek Wakaf di Masyarakat Indonesia	Ketepatan analisis Permasalahan Praktek Wakaf di Masyarakat Indonesia	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Permasalahan Praktek Wakaf di Masyarakat Indonesia	10%
14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu menjelaskan Penyelesaian Sengketa Wakaf	Ketepatan menjelaskan Penyelesaian Sengketa Wakaf	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Penyelesaian Sengketa Wakaf	10%
15	Sub-CPMK-15 Review Tugas dan Materi	Review Tugas dan Materi	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Review Tugas dan Materi	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM

Kode Dokumen  
FA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBO T (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
PERBANDANGAN HTN-HAN	FA176376	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum 2. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif tentang Pengertian, Objek kajian/studi, Ruang Lingkup HTN dan HAN. Asas-asas HTN dan HAN ,sumber-sumber HTN dan HAN,Konstitusi dan Amandemen,Negara dan Lembaga Negara, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah..			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	a. Mengetahui dan memahami Pengertian, Objek kajian/studi, Ruang Lingkup HTN dan HAN. b. Mengetahui dan memahami Konstitusi dan Amandemen c. Mengetahui dan memahami Negara dan Lembaga Negara d. Memahami Struktur Organisasi, Pemerintah Dan Pemerintah Daerah..				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah ini menawarkan konsep Perbandingan HTN-HAN yang akan menjelaskan mengenai Pengertian, Objek kajian/studi, Ruang Lingkup HTN dan HAN. Asas-asas HTN dan HAN ,sumber-sumber HTN dan HAN,Konstitusi dan Amandemen,Negara dan Lembaga Negara, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum 2. Pengertian, Objek kajian/studi, Ruang Lingkup HTN dan HAN. 3. Asas-asas HTN dan HAN 4. sumber-sumber HTN dan HAN 5. Konstitusi dan Amandemen 6. Negara dan Lembaga Negara 7. Demokrasi dan HAM				

	8. Ujian Tengah Semester 9. Struktur Organisasi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah. 10. Kedudukan, Tugas dan fungsi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 11. Bentuk-bentuk perbuatan hukum pemerintah 12. sarana dalam menjalankan fungsi pemerintahan 13. Mahkamah Konstitusi 14. Peradilan Administrasi Negara 15. Review Materi dan Tugas 16. Ujian Akhir Semester						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: 1. Sinamo, Nomensen, Perbandingan Hukum Tata Negara, Jala Permata Aksara 2. Asshiddiqie, Jimly, Prof.DR., Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Bhuna Ilmu Populer. 3. Mahfudz, MD, Pedebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi 4. Soehino, Prof., S.H., Hukum Tata Negara, Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia, Ed1 5. M. Hadjon, Philipus., dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogya 2002.						
	<b>Pendukung :</b>						
	- Undang-Undang Dasar 1945						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	<b>PERBANDANGAN HTN-HAN</b>						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60'')] ]	eLearning dan platform media lainnya .	11. Kontrak kuliah 12. Tujuan Mata Kuliah	5%
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu mengurai Pengertian, Objek kajian/studi, Ruang Lingkup HTN dan HAN.	Ketepatan uraian Pengertian, Objek kajian/studi, Ruang Lingkup HTN dan HAN.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M:(1+1)	eLearning dan platform media lainnya .	10. Pengertian, 11. Objek kajian/studi, 12. Ruang Lingkup HTN dan HAN.	5 %



	HAN.		E = 0 – 40	x(2x60”)]			
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan Asas-asas HTN dan HAN	Ketepatan uraian Asas-asas HTN dan HAN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50”)] ; c. [PT+BM: (1+1)x (2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	Asas-asas HTN dan HAN	5 %
4	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu menguraikan sumber-sumber HTN dan HAN	Kesesuaian uraian sumber-sumber HTN dan HAN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50”)] ; c. [PT+BM: (1+1)x (2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	Sumber-sumber HTN dan HAN	5 %
5	Sub-CPMK-5 Mahasiswa mampu menguraikan Konstitusi dan Amendemen	Ketepatan uraian Konstitusi dan Amendemen	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50”)] ; c. [PT+BM: (1+1)x (2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	Konstitusi dan Amendemen	10 %
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu menjelaskan Negara dan Lembaga Negara	Ketepatan menjelaskan Negara dan Lembaga Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50”)] ; c. [PT+BM: (1+1)x (2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	Negara dan Lembaga Negara	10 %
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Ketepatan uraian mengenai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50”)] ; c. [PT+BM: (1+1)x (2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya .	Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						

9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan Struktur Organisasi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.	ketepatan uraian Struktur Organisasi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2 x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Struktur Organisasi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.	5 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan Kedudukan, Tugas dan fungsi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Ketepatan uraian . Tata Cara Perwakafan di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2 x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Kedudukan, Tugas dan fungsi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	5 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan Bentuk-bentuk perbuatan hukum pemerintah	ketepatan uraian Bentuk-bentuk perbuatan hukum pemerintah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2 x60'')]	eLearning dan platform media lainnya . -	Bentuk-bentuk perbuatan hukum pemerintah	5%
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menguraikan sarana dalam menjalankan fungsi pemerintahan	Ketepatan uraian sarana dalam menjalankan fungsi pemerintahan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2 x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Sarana dalam menjalankan fungsi pemerintahan	5%
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menganalisis Mahkamah Konstitusi	Ketepatan analisis Mahkamah Konstitusi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2 x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Mahkamah Konstitusi	10%

			- 40				
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu menjelaskan Peradilan Administrasi Negara	tepatan menjelaskan Peradilan Administrasi Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Peradilan Administrasi Negara	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	view Tugas dan Materi	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM

Kode Dokumen  
FA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM EKSEKUSI KEPERDATAAN	FA176380	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>		

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>	
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum 2. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>	
	CPMK	Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif mengenai Istilah dan Pengertian Hukum Eksekusi Keperdataan, Kerangka Hukum Eksekusi Keperdataan, Asas-asas dalam eksekusi Keperdataan, Macam-macam eksekusi Keperdataan dan Upaya Hukum dalam eksekusi Keperdataan
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>	
Sub-CPMK	a. Mengetahui dan memahami Istilah dan Pengertian Hukum Eksekusi Keperdataan b. Mengetahui dan memahami Kerangka Hukum Eksekusi Keperdataan c. Mengetahui dan memahami Asas-asas dalam eksekusi Keperdataan dan d. Memahami Upaya Hukum dalam eksekusi Keperdataan	
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan eksekusi dalam hukum keperdataan yang akan mempelajari mengenai Istilah dan Pengertian Hukum Eksekusi Keperdataan, Kerangka Hukum Eksekusi Keperdataan, Asas-asas dalam eksekusi Keperdataan, Macam-macam eksekusi Keperdataan dan Upaya Hukum dalam eksekusi Keperdataan	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum 2. Istilah dan Pengertian Hukum Eksekusi Keperdataan 3. Kerangka Hukum Eksekusi Keperdataan 4. Asas-asas dalam eksekusi Keperdataan 5. Macam-macam eksekusi Keperdataan 6. Upaya Hukum dalam eksekusi Keperdataan 7. Peraturan Perundang-undangan mengenai eksekusi Keperdataan	

	8. Ujian Tengah Semester 9. Tata Cara Eksekusi Keperdataan 10. Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan 11. Fungsi dan tujuan penyitaan 12. Pelaksanaan putusan secara biasa 13. Pelaksanaan putusan secara paksa 14. Tahapan -tahapan dalam penyelesaian suatu perkara 15. Review Tugas dan Materi 16. Ujian Akhir Semester
--	--

<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi:
	1. Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. 2. Badriyah Harun, S.H., 2010, Tata Cara Menghadapi Gugatan, Pustaka Yustisia; Yogyakarta. 3. H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. 2008. Kearah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA dan PERMA. Jakarta; Kencana. 4. K. Wantjik Saleh. 2002. Hukum Acara Perdata RBg/HIR. Jakarta; Ghalia Indonesia. 5. M. Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta; Sinar Grafika
	<b>Pendukung :</b> - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetbook) - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<b>Dosen Pengampu</b>	
-----------------------	--

<b>Matakuliah syarat</b>	<b>HUKUM EKSEKUSI KEPERDATAAN</b>
--------------------------	-----------------------------------

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50'')] ; c. [PT+BM: (1+1) x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	1. Kontrak kuliah 2. Tujuan Mata Kuliah	5%
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu mengurai Istilah dan	Ketepatan uraian Istilah dan Pengertian Hukum	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x	<b>eLearning dan platform</b>	1. Istilah 2. Pengertian Hukum Eksekusi Keperdataan	5%

	Pengertian Hukum Eksekusi Keperdataan	Eksekusi Keperdataan	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	(2x50'') ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'') ]	<b>media lainnya</b> .		
3	Sub-CPMK-3: mahasiswa mampu menguraikan Kerangka Hukum Eksekusi Keperdataan	Ketepatan uraian Kerangka Hukum Eksekusi Keperdataan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'') ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Kerangka Hukum Eksekusi Keperdataan	5 %
4	Sub-CPMK-4 mahasiswa mampu menguraikan Asas-asas dalam eksekusi Keperdataan	Kesesuaian uraian Asas-asas dalam eksekusi Keperdataan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'') ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Asas-asas dalam eksekusi Keperdataan	5 %
5	Sub-CPMK-5 mahasiswa mampu menguraikan Macam-macam eksekusi Keperdataan	Ketepatan uraian Macam-macam eksekusi Keperdataan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'') ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Macam-macam eksekusi Keperdataan	10 %
6	Sub-CPMK-6 mahasiswa mampu menjelaskan Upaya Hukum dalam eksekusi Keperdataan	Ketepatan menjelaskan Upaya Hukum dalam eksekusi Keperdataan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'') ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Upaya Hukum dalam eksekusi Keperdataan	10 %
7	Sub-CPMK-7 mahasiswa mampu menguraikan Peraturan Perundang-undangan mengenai eksekusi Keperdataan	Ketepatan uraian mengenai Peraturan Perundang-undangan mengenai eksekusi Keperdataan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'') ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Peraturan Perundang-undangan mengenai eksekusi Keperdataan	10 %


8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan Tata Cara Eksekusi Keperdataan	tepatan uraian Tata Cara Eksekusi Keperdataan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Tata Cara Eksekusi Keperdataan	5 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan . Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan	tepatan uraian . Perlunya Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan	5 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan Fungsi dan tujuan penyitaan	tepatan uraian Fungsi dan tujuan penyitaan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Fungsi dan tujuan penyitaan	5%
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menguraikan Pelaksanaan putusan secara biasa	Ketepatan uraian Pelaksanaan putusan secara biasa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Pelaksanaan putusan secara biasa	5%
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menganalisis Pelaksanaan putusan secara paksa	Ketepatan analisis Pelaksanaan putusan secara paksa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Pelaksanaan putusan secara paksa	10%

			E = 0 - 40				
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 siswa mampu menjelaskan Tahapan-tahapan dalam penyelesaian suatu perkara	tepatan menjelaskan Tahapan - tahapan dalam penyelesaian suatu perkara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Tahapan -tahapan dalam penyelesaian suatu perkara	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Review Tugas dan Materi	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM EKSEKUSI KEPIDANAAN</b>	FA176381	MKDU	<b>T=2 P= 1</b>	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum</li> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	<p>Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif mengenai eksekusi putusan dan eksekusi pidana, pidana dan pembedaan, pidana mati, pidana kurungan dan kurungan pengganti denda, pidana bersyarat (<i>voorwaardelijke veroor-deling</i>), pelepasan bersyarat (<i>voorwaardelijke in vrij-heidstelling</i>) dan grasi (pengampunan)</p>			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui dan memahami Istilah dan Pengertian Hukum Eksekusi Kepidanaan</li> <li>Mengetahui dan memahami eksekusi putusan dan eksekusi pidana</li> <li>Mengetahui dan memahami pidana dan pembedaan</li> <li>Memahami ,pidana mati, pidana kurungan dan kurungan pengganti denda, pidana bersyarat (<i>voorwaardelijke veroor-deling</i>), pelepasan bersyarat (<i>voorwaardelijke in vrij-heidstelling</i>) dan grasi (pengampunan)</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Mata kuliah ini memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan eksekusi dalam hukum Pidana yang akan mempelajari mengenai eksekusi putusan dan eksekusi pidana, pidana dan pembedaan, pidana mati, pidana kurungan dan kurungan pengganti denda, pidana bersyarat (<i>voorwaardelijke veroor-deling</i>), pelepasan bersyarat (<i>voorwaardelijke in vrij-heidstelling</i>) dan grasi (pengampunan)</p>				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum</li> <li>Istilah dan Pengertian Hukum Eksekusi Kepidanaan</li> <li>Eksekusi putusan dan eksekusi pidana</li> </ol>				

	4. Pidana dan pemidanaan 5. Pidana Mati 6. Pidana Penjara 7. Pidana Tutupan 8. Ujian Tengah Semester 9. Pidana kurungan dan kurungan pengganti denda 10. Pidana Denda 11. Pidana Tambahan 12. Pidana bersyarat ( <i>voorwaardelike veroor-deling</i> ). 13. Pelepasan bersyarat ( <i>voorwaardelike in vrij-heidstelling</i> ). 14. Grasi (pengampunan) 15. Review Tugas dan Materi 16. Ujian Akhir Semester
--	--

<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi:
	1. Achmad S. Soemoedipradja, 1984, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, PT. Alumni. 2. Djoko Prakoso, 1988, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Yogyakarta, Liberty. 3. Martiman, 1999, Komentor atas KUHAP, Jakarta, PT Pradya Paramita. 4. Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, UNDIP
	<b>Pendukung :</b> - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<b>Dosen Pengampu</b>	
<b>Matakuliah syarat</b>	<b>HUKUM EKSEKUSI KEPIDANAAN</b>

Minggu Ke-		Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	1. Kontrak kuliah 2. Tujuan Mata Kuliah	5%
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu mengurai	Ketepatan uraian Istilah dan Pengertian	A = 86-100 B = 71-	a. Kuliah; b. Diskusi	<b>eLearning dan platform</b>	1. Istilah 2. Pengertian Hukum Eksekusi	5%


	Istilah dan Pengertian Hukum Eksekusi Kepidanaan	Hukum Eksekusi Kepidanaan	85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	<b>m media lainnya</b> .	Kepidanaan	
<b>3</b>	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan Eksekusi putusan dan eksekusi pidana	Ketepatan uraian Eksekusi putusan dan eksekusi pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Batasan dan Ruang Lingkup 2. Sumber Hukum	5 %
<b>4</b>	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu menguraikan Pidana dan Pemidanaan	Kesesuaian uraian Pidana dan Pemidanaan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pidana dan Tindakan 2. Pemidanaan	5 %
<b>5</b>	Sub-CPMK-5 Mahasiswa mampu menguraikan Pidana Mati	Ketepatan uraian Pidana Mati	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pro dan Kontra Pidana Mati 2. Pelaksanaan Pidana Mati	10 %
<b>6</b>	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu menjelaskan Pidana Penjara	Ketepatan menjelaskan Pidana Penjara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pengantar 2. Dari Sistem Pemasyarakatan sampai dengan Sistem Pemasyarakatan 3. Pelaksanaan Pidana Penjara	10 %
<b>7</b>	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan Pidana Tutupan	Ketepatan uraian mengenai Pidana Tutupan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pengantar 2. Pelaksanaan Pidana Tutupan	10 %

			40				
<b>8</b>	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
<b>9</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan Pidana kurungan dan kurungan pengganti denda	tepatan uraian Pidana kurungan dan kurungan pengganti denda	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pengantar 2. Pelaksanaan Pidana Kurungan	5 %
<b>10</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan Pidana denda	tepatan uraian Pidana Denda	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pengantar 2. Pelaksanaan Pidana Denda	5 %
<b>11</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan Pidana Tambahan	tepatan uraian Pidana Tambahan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> . -	1. Pengantar 2. Pencabutan Hak-Hak Tertentu 3. Perampasan Barang-Barang Tertentu 4. Pengumuman Putusan Hakim 5. Pidana Tambahan di luar KUHP	5%
<b>12</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menguraikan Pidana bersyarat ( <i>voorwaardelijke veroordeling</i> ).	tepatan uraian Pidana bersyarat ( <i>voorwaardelijke veroordeling</i> ).	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Pidana bersyarat ( <i>voorwaardelijke veroordeling</i> ).	5%
<b>13</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menganalisis Pelepasan bersyarat ( <i>voorwaardelijke in vrij-</i>	Ketepatan analisis Pelepasan bersyarat ( <i>voorwaardelijke in vrij-</i>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D =	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pengantar. 2. Sistem Remisi dalam Proses Pembinaan Narapidana 3. Sistem Cuti Menjelang Bebas	10%

	<i>heidstelling)</i>		41-55 E = 0 - 40				
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 siswa mampu menjelaskan Grasi (pengampunan)	tepatan menjelaskan Grasi (pengampunan)	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x( 2x60")]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya .</b>	1. Pengantar 2. Tata Cara Pelaksanaan Grasi	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x( 2x60")]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya .</b>	Review Tugas dan Materi	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM EKSEKUSI KETATANEGARAAN</b>	FA176382	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>2. Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum</li> <li>2. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
	CPMK	Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif mengenai Eksekusi Ideal Perkara Tata Negara Berdasarkan Asas Keadilan, Aspek-Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Konstitusi, Tahapan -tahapan dalam penyelesaian suatu perkara, Perbandingan Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara			
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
	Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui dan memahami Eksekusi Ideal Perkara Tata Negara Berdasarkan Asas Keadila</li> <li>b. Mengetahui dan memahami Aspek-Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li> <li>c. Mengetahui dan memahami Tahapan -tahapan dalam penyelesaian suatu perkara</li> <li>d. Mengetahui dan Memahami Perbandingan Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara</li> </ol>			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan eksekusi dalam hukum ketatanegaraan yang akan mempelajari Eksekusi Ideal Perkara Tata Negara Berdasarkan Asas Keadilan, Aspek-Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Konstitusi, Tahapan -tahapan dalam penyelesaian suatu perkara, Perbandingan Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum</li> <li>2. Istilah dan Pengertian Hukum Eksekusi Ketatanegaraan</li> <li>3. Kerangka Hukum Eksekusi Ketatanegaraan</li> </ol>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Asas-asas dalam eksekusi Ketatanegaraan</li> <li>5. Macam-macam eksekusi Ketatanegaraan</li> <li>6. Upaya Hukum dalam eksekusi Ketatanegaraan</li> <li>7. Peraturan Perundang-undangan mengenai eksekusi Ketatanegaraan</li> <li>8. Ujian Tengah Semester</li> <li>9. Tata Cara Eksekusi Ketatanegaraan</li> <li>10. Eksekusi Ideal Perkara Tata Negara Berdasarkan Asas Keadilan</li> <li>11. Aspek-Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.</li> <li>12. Penafsiran Konstitusi.</li> <li>13. Tahapan -tahapan dalam penyelesaian suatu perkara</li> <li>14. Perbandingan Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara</li> <li>15. Review Tugas dan Materi</li> <li>16. Ujian Akhir Semester</li> </ol>
--	---

<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).</li> <li>2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di berbagai negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).</li> <li>3. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di 10 Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)</li> </ol>
	<b>Pendukung :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo UndangUndang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi</li> </ul>

<b>Dosen Pengampu</b>	
-----------------------	--

<b>Matakuliah syarat</b>	<b>HUKUM EKSEKUSI KETATANEGARAAN</b>
--------------------------	--------------------------------------

Minggu Ke-		Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M: (1+1) x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah</li> <li>2. Tujuan Mata Kuliah</li> </ol>	5%
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu mengurai Istilah dan	Ketepatan uraian Istilah dan Pengertian Hukum	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x	<b>eLearning dan platform</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istilah</li> <li>2. Pengertian Hukum Eksekusi Ketatanegaraan</li> </ol>	5 %

	Pengertian Hukum Eksekusi Ketatanegaraan	Eksekusi Ketatanegaraan	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	(2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>media lainnya</b> .		
<b>3</b>	Sub-CPMK-3: mahasiswa mampu menguraikan Kerangka Hukum Eksekusi Ketatanegaraan	Ketepatan uraian Kerangka Hukum Eksekusi Ketatanegaraan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Kerangka Hukum Eksekusi Ketatanegaraan	5 %
<b>4</b>	Sub-CPMK-4 mahasiswa mampu menguraikan Asas-asas dalam eksekusi Ketatanegaraan	Kesesuain uraian Asas-asas dalam eksekusi Ketatanegaraan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Asas-asas dalam eksekusi Ketatanegaraan	5 %
<b>5</b>	Sub-CPMK-5 mahasiswa mampu menguraikan Macam-macam eksekusi Ketatanegaraan	Ketepatan uraian Macam-macam eksekusi Ketatanegaraan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Macam-macam eksekusi Ketatanegaraan	10 %
<b>6</b>	Sub-CPMK-6 mahasiswa mampu menjelaskan upaya Hukum dalam eksekusi Ketatanegaraan	Ketepatan menjelaskan upaya Hukum dalam eksekusi Ketatanegaraan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Upaya Hukum dalam eksekusi Ketatanegaraan	10 %
<b>7</b>	Sub-CPMK-7 mahasiswa mampu menguraikan Peraturan Perundang-undangan mengenai eksekusi Ketatanegaraan	Ketepatan uraian mengenai Peraturan Perundang-undangan mengenai eksekusi Ketatanegaraan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x(2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Peraturan Perundang-undangan mengenai eksekusi Ketatanegaraan	10 %



<b>8</b>	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
<b>9</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan Tata Cara Eksekusi Ketatanegaraan	tepatan uraian Tata Cara Eksekusi Ketatanegaraan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Tata Cara Eksekusi Ketatanegaraan	5 %
<b>10</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan Eksekusi Ideal Perkara Tata Negara Berdasarkan Asas Keadilan	tepatan uraian Eksekusi Ideal Perkara Tata Negara Berdasarkan Asas Keadilan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Eksekusi Ideal Perkara Tata Negara Berdasarkan Asas Keadilan	5 %
<b>11</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan Aspek-Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	tepatan uraian Aspek-Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> . -	Aspek-Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	5%
<b>12</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu menguraikan Penafsiran Konstitusi	Ketepatan uraian Penafsiran Konstitusi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Penafsiran Konstitusi	5%
<b>13</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan - tahapan dalam penyelesaian suatu perkara	Ketepatan analisis Tahapan - tahapan dalam penyelesaian suatu perkara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D =	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Tahapan - tahapan dalam penyelesaian suatu perkara	10%

			41-55 E = 0 - 40				
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 mahasiswa mampu menjelaskan Perbandingan Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara	tepatan menjelaskan Perbandingan Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Perbandingan Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Review Tugas dan Materi	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Acara TUN	FA176241	HTN	T=2 P= 1	V	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius. 2. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. 3. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu,pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 4. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 5. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. 6. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanis dan memiliki tanggung jawab sosial. (Sikap)			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu mengetahui dan memahami pentingnya mata kuliah yang akan diajarkan. b. Mahasiswa mampu menjelaskan istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan P.T.U.N. c. Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi (absolute dan relatif) P.T.U.N. d. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur PTUN dan Sumber hukum PTUN. e. Mahasiswa mampu menjelaskan Subyek dan obyek Sengketa PTUN f. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan Sifat-sifat khusus Hukum Acara PTUN. g. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan Asas-Asas Pokok PTUN h. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN i. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan Pemeriksaan PTUN j. Mahasiswa mampu menjelaskan Pembuktian, putusan dan upaya hukum PTUN.				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan, serta cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan HAN (materiil)				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Kuliah 2. Latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan P.T.U.N. 3. Kompetensi (absolute dan relatif) P.T.U.N. 4. Unsur-unsur PTUN dan Sumber hukum PTUN 5. Subyek dan obyek Sengketa PTUN 6. Sifat-sifat khusus Hukum Acara PTUN. 7. Karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara. <b>8. Ujian Tengah Semester</b> 9. Asas-Asas Pokok PTUN. 10. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU 11. Perbedaan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan lainnya. 12. Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN 13. Dasar Pengujian Keputusan dan pemeriksaan peradilanTata Usaha Negara 14. Pembuktian, putusan dan upaya hukum PTUN 15. Sifat Putusan Dalam Peradilan TUN. <b>16. Ujian Akhir Semester.</b>				

<b>Pustaka</b>		Daftar Referensi: 1. Amrah Muslimin, 1985, <i>Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi</i> , Alumni, Bandung. 2. Indroharto, 1993, <i>Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II)</i> , Sinar Harapan, Jakarta. 3. Kuntjoro Purbopranoto, 1985, <i>Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara</i> , Alumni, Bandung. 4. Marbun, SF, 1997, <i>Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia</i> , Liberty, Yogyakarta. 5. Martiman Prodjohamidjojo, 1996, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i> , Ghalia Indonesia, Jakarta. 6. Riawan Tjandra, 1995, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i> , Universitas Atmajaya, Yogyakarta. 7. Suparto Wijoyo, 1997, <i>Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administratif</i> , Airlangga University Press, Yagyakarta.					
		<b>Pendukung :</b>					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>							
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kontrak kuliah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan P.T.U.N.	Ketepatan mengetahui dan memahami pentingnya mata kuliah yang akan diajarkan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Perkenalan 2. Pengantar mata kuliah, dan kontrak belajar	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan dan memahami istilah serta pengertian Hukum Acara TUN	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang pengertian TUN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Pengertian dan Definisi Hukum Acara TUN	10 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi (absolute dan relatif) P.T.U.N.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang kompetensi PTUN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Kompetensi Peradilan TUN	10%
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan unsur-unsur PTUN dan Sumber hukum PTUN	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang unsur dan sumber hukum PTUN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Unsur dan Sumber Hukum PTUN	7 %
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Subyek dan obyek Sengketa PTUN	Ketepatan menjelaskan Subyek dan obyek sengketa TUN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	2. Kuliah; 3. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; 4. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Subyek dan Obyek Sengketa TUN	8%
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Sifat-sifat khusus Hukum Acara PTUN.	Ketepatan menjelaskan Sifat-sifat Hukum Acara TUN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Sifat-sifat Khusus Hukum Acara PTUN	5%
7	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan Jenis dan karakteristik lembaga PTUN	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	2. Kuliah; 3. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; 4. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Karakteristik lembaga PTUN.	5%
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester</b>						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Asas-Asas Pokok PTUN	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang asas-asas Pokok TUN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Asas-asas Pokok PTUN	5 %
10	Sub-CPMK-10: Mampu menjelaskan	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100 B = 71-85	2. Kuliah; 3. Diskusi[TM:	e-Learning dan	1. Mengenal Kedudukan PTUN dalam undang-	5%

	posisi dan kedudukan PTUN dalam undang-undang.		C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	1x(2x50"); 4. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	platform media lainnya.	undang.		
<b>11</b>	Sub-CPMK-11 Mampu menjelaskan perbedaan antara PTUN dengan lembaga peradilan lainnya.	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50"); c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Perbedaan PTUN dengan Pengadilan Lainnya.	<b>5%</b>	
<b>12</b>	Sub-CPMK-12 Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATURAN	Ketepatan menjelaskan fungsi hukum sebagai alat pembaharu.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	2. Kuliah; 3. Diskusi[TM: 1x(2x50"); 4. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Susunan, Kedudukan dan Wewenang Peraturan.	<b>5%</b>	
<b>13</b>	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar Pengujian Keputusan Dan pemeriksaan peradilan Tata Usaha Negara	Ketepatan menjelaskan dasar pengujian keputusan TUN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM: 1x(2x50"); c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Dasar Pengujian PTUN	<b>5%</b>	
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan Pembuktian, dan upaya hukum PTUN	Ketepatan menjelaskan tentang pembuktian dan putusan PTUN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50"); f. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Pembuktian dan Upaya Hukum PTUN	<b>5%</b>	
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mampu menjelaskan dan memahami putusan TUN	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	g. Kuliah; h. Diskusi[TM: 1x(2x50"); i. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Sifat Putusan Dalam Peradilan TUN	<b>10%</b>	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>							

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Acara Perdata Lanjut	FA176250	HTN	T=2 P= 1	V	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius. 2. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. 3. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu,pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 4. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 5. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. 6. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta memberikan pandangan hukum terhadap ketentuan tentang hukum Acara Perdata di Indonesia.			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu mengetahui dan memahami pentingnya mata kuliah yang akan diajarkan. b. Mampu menjelaskan tentang pengertian Hukum Acara Perdata. c. Mampu memahami Susunan Badan Peradilan di Indonesia. d. Mampu mengidentifikasi pengertian Gugatan dan cara mengajukan Gugatan. e. Mampu memahami Tahapan pemeriksaan dan dan jawaban gugatam f. Mampu mendefinisikan Pembuktian Dalam Perkara Perdata. g. Mampu menggambarkan Putusan dan Kekuatan Putusan Pengadilan. h. Mampu secara teori tentang tata cara melakukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini membahas tentang pengertian, sumber hukum acara perdata, jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia, kompetensi pengadilan, asas-asas hukum acara perdata, penuntutan hak, tata cara berperkara di pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan gambaran bagaimana cara menyusun gugatan, jawaban, replik, duplik, dan memori banding, kasi, dan peninjauan kembali.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Kuliah dan Pengenalan Mata Kuliah. 2. Pengertian dan Definisi Hukum Acara Perdata. 3. Susunan Badan Peradilan Umum di Indonesia. 4. Pengertian Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata. 5. Tata Cara Pengajuan dan Pencabutan Gugatan. 6. Tahapan Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan. 7. Tujuan Jawaban dan Intervensi Tergugat. 8. <b>Ujian Tengah Semester.</b> 9. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata. 10. Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. 11. Kekuatan Putusan Dalam Perkara Perdata. 12. Banding Dalam Perkara Perdata. 13. Urgensi Kasasi Dalam Perkara Perdata. 14. Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata. 15. Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perdata. 16. <b>Ujian Akhir Semester..</b>				
<b>Pustaka</b>					
	Daftar Referensi: 1. Abdulkadir Muhammad.2012. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2. Bambang Sugeng & Sujayadi. 2011. Hukum Acara perdata & dokumen litigasi perkara perdata. Jakarta : Kencana				

		3. H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. 2008. <i>Kearah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA dan PERMA</i> . Jakarta; Kencana. 4. K. Wantjik Saleh. 2002. <i>Hukum Acara Perdata RBg/HIR</i> . Jakarta; Ghalia Indonesia. 5. M. Yahya Harahap. 2007. <i>Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan</i> . Jakarta; Sinar Grafika. 6. M. Yahya Harahap. 2008. <i>Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan</i>					
		<b>Pendukung :</b>					
		1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgelijke Wetboek</i> ) 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		<b>Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mahasiswa saling mengenal, menjelaskan kontrak perkuliahan yang meliputi tujuan matakuliah, berbagai tugas dan sumbernya serta prinsip penilaiannya	Ketepatan Mengenal dosen dan mahasiswa lainnya, dan beradaptasi dengan kontrak perkuliahan dan sistem penilaiannya.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50''); f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Perkenalan 2. Pengantar mata kuliah, dan kontrak belajar	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan dan memahami istilah Hukum Acara Perdata dan Kekuasaan Kehakiman	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang pengertian Hukum Acara Perdata	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	g. Kuliah; h. Diskusi[TM: 1x(2x50''); i. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Pengertian Hukum Acara Perdata	10 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu memahami Susunan Badan Pengadilan Umum	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	j. Kuliah; k. Diskusi[TM: 1x(2x50''); l. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Susunan Badan Peradilan Umum.	10%
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Gugatan dalam Hukum Acara Perdata.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50''); f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	5. Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata.	7 %
5	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan dan memahami tentang Mengajukan dan Pencabutan Gugatan	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	6. Kuliah; 7. Diskusi[TM: 1x(2x50''); 8. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Pengajuan dan Pencabutan Gugata,	8%
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu memahami acara pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50''); f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	5. Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan.	5%
7	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mampu memahami pengertian Jawaban dan Intervensi Tergugat.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	6. Kuliah; 7. Diskusi[TM: 1x(2x50''); 8. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Jawaban dan Intervensi Tergugat.	5%
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester</b>						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Pembuktian	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50''); f. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	e-Learning dan platform media lainnya.	5. Pentingnya Pembuktian Dalam Perkara Hukum Acara Perdata.	5 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85	6. Kuliah; 7. Diskusi[TM:	e-Learning dan	2. Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Perdata.	5%

	memahami mengenai Putusan Pengadilan		C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	1x(2x50"); 8. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	platform media lainnya.			
<b>11</b>	Sub-CPMK-11 Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai Kekuatan Putusan Pengadilan	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	d. Kuliah; e. Diskusi[TM: 1x(2x50"); f. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	e-Learning dan platform media lainnya.	5. Kekuatan Putusan Pengadilan Dalam Acara Perdata.	<b>5%</b>	
<b>12</b>	Sub-CPMK-12 Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai Banding perkara perdata	Ketepatan menjelaskan fungsi hukum sebagai alat pembaharu.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	6. Kuliah; 7. Diskusi[TM: 1x(2x50"); 8. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Banding Dalam Perkara Perdata.	<b>5%</b>	
<b>13</b>	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan urgensi mengenai kasasi perkara perdata	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	j. Kuliah; k. Diskusi[TM: 1x(2x50"); l. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Urgensi Kasasi Dalam Perkara Perdata.	<b>5%</b>	
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Peninjauan Kembali.	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	m. Kuliah; n. Diskusi[TM: 1x(2x50"); o. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Mengetahui Peninjauan Kembali. 3. Perlawanan Terhadap Putusan.	<b>5%</b>	
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	p. Kuliah; q. Diskusi[TM: 1x(2x50"); r. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Mengetahui Perma Nomor 1 Tahun 2008.	<b>10%</b>	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>							

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Pembuktian Acara Perdata	FA1763111	HTN	T=2 P= 1	VIII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius.</li> <li>Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa.</li> <li>Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu,pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</li> <li>Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> <li>Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus.</li> <li>Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mampu menjelaskan tata cara penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme yang diatur Hukum Acara Perdata.			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengetahui dan memahami pentingnya mata kuliah yang akan diajarkan.</li> <li>Mampu menjelaskan tentang pengertian Pembuktian Hukum Acara Perdata.</li> <li>Mampu mengidentifikasi dan memahami Asas-asas Hukum Acara Perdata</li> <li>Mampu menjelaskan Jenis dan Susunan Badan Peradilan dan Kompetensinya.</li> <li>Mampu memahami Kompetensi Peradilan Perdata.</li> <li>Mampu mendefinisikan aspek Hukum Perdata</li> <li>Mampu menggambarkan dan Membuat dokumen Gugatan dan Jawaban</li> <li>Mampu secara teori tentang tahapan, proses, dan putusan peradilan perdata.</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini membahas tentang pengertian, sumber hukum acara perdata, jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia, kompetensi pengadilan, asas-asas hukum acara perdata, penuntutan hak, tata cara berperkara di pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan gambaran bagaimana cara menyusun gugatan, jawaban, replik, duplik, dan surat kuasa.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak Kuliah</li> <li>Pengertian dan Definisi Pembuktian Dalam Acara Hukum Perdata.</li> <li>Asas-asas Hukum Acara Perdata</li> <li>Jenis-jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia beserta kompetensinya</li> <li>Kompetensi Peradilan dan Pengadilan.</li> <li>Pengertian dan Jenis Penuntutan Hak.</li> <li>Tinjauan Umum dan Latihan Membuat Surat Kuasa.</li> <li><b>Ujian Tengah Semester.</b></li> <li>Pengertian, Bentuk, dan Unsur Gugatan dan Jawaban.</li> <li>Pengertian, Bentuk, dan Unsur Replik dan Duplik.</li> <li>Tahapan Dalam Beracara di Pengadilan dalam Acara Perdata.</li> <li>Pengertian, Jenis, dan Isi Putusan.</li> <li>Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa</li> <li>Pelaksanaan Putusan Secara Paksa.</li> <li>Tahapan-tahapan dalam penyelesaian suatu perkara</li> <li><b>Ujian Akhir Semester.</b></li> </ol>				
<b>Pustaka</b>					
	Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.</li> <li>Badriyah Harun, S.H., 2010, Tata Cara Menghadapi Gugatan, Pustaka Yustisia; Yogyakarta.</li> </ol>				

		3. H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. 2008. Kearah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA dan PERMA. Jakarta; Kencana. 4. K. Wantjik Saleh. 2002. Hukum Acara Perdata RBg/HIR. Jakarta; Ghalia Indonesia. 5. M. Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta; Sinar Grafika.					
		<b>Pendukung :</b>					
		1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgelijke Wetboek</i> ) 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		<b>Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami dan mengetahui tahapan materi yang akan diajarkan	Ketepatan mengetahui dan memahami pentingnya mata kuliah yang akan diajarkan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	1. Perkenalan 2. Pengantar mata kuliah, dan kontrak belajar	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan dan memahami pengertian Pembuktian Hukum Acara Perdata.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	2. Pengertian dan Definisi Pembuktian Hukum Acara Perdata.	10 %
3	Sub-CPMK-3 Mampu menjelaskan dan memahami asas-asas hukum perdata	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Azas Hukum Perdata.	10%
4	Sub-CPMK-4 Mampu menjelaskan dan memahami Jenis, dan Susunan Peradilan di Indonesia.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	9. Jenis-Jenis dan Susunan Peradilan di Indonesia dan Kompetensinya.	7 %
5	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan dan memahami Kompetensi Peradilan dan Pengadilan.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Kompetensi Peradilan dan Pengadilan.	8%
6	Sub-CPMK-6 Mampu menjelaskan Pengertian dan Jenis Penuntutan Hak	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	9. Memahami Pengertian dan Jenis Penuntutan Hak.	5%
7	Sub-CPMK-7 Mampu menjelaskan Dan memahami Tinjauan Umum dan Membuat Surat Kuasa	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Tinjauan Umum Surat Kuasa dan Cara Membuatnya.	5%
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester</b>						
9	Sub-CPMK-9 Mampu menjelaskan Pengertian, Bentuk dan Unsur Gugatan dan Jawaban.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	9. Pengertian, Bentuk, dan Jenis Gugatan dan Jawaban.	5 %
10	Sub-CPMK-10 Mampu menjelaskan dan memahami Pengertian, Bentuk, dan Jenis Replik dan Duplik.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Bentuk, dan Jenis Replik dan Duplik.	5%
11	Sub-CPMK-11 Mampu menjelaskan Dan memahami Tahapan Acara di Pengadilan dalam	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	9. Tahapan Beracara dalam Pengadilan	5%

	Perkara Perdata.						
<b>12</b>	Sub-CPMK-12 Mampu menjelaskan Dan memahami Jenis dan Isi Putusan	Ketepatan dalam Menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x( 2x50 <sup>''</sup> )]; [PT+BM:(1+1) x(2x60 <sup>''</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Pengertian, Jenis, dan Isi Putusan.	<b>5%</b>
<b>13</b>	Sub-CPMK-13 Mampu menjelaskan Urgensi Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x( 2x50 <sup>''</sup> )]; [PT+BM:(1+1) x(2x60 <sup>''</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa.	<b>5%</b>
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mampu menjelaskan Dan memahami Pelaksanaan Putusan Secara Paksa,	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x( 2x50 <sup>''</sup> )]; [PT+BM:(1+1) x(2x60 <sup>''</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	4. Pengertian Pelaksanaan Putusan Secara Paksa.	<b>5%</b>
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mampu menjelaskan Dan Memahami Tahapan-tahapan Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Perdata.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x( 2x50 <sup>''</sup> )]; [PT+BM:(1+1) x(2x60 <sup>''</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Tahapan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.	<b>10%</b>
<b>16</b>	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi	FA176246	HTN	T=2 P= 1	V	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius.</li> <li>Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa.</li> <li>Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.</li> </ol>	
<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu,pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</li> <li>Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> <li>Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus.</li> <li>Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.</li> </ol>	
<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Setiap Mahasiswa mampu membuat dokumen-dokumen hukum ( <i>legal documents</i> ) beracara di Mahkamah Konstitusi di antaranya, berupa: Surat Kuasa Khusus, Permohonan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.	
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>		
<b>CPMK</b>	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.	
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>		
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengetahui dan memahami pentingnya mata kuliah yang akan diajarkan.</li> <li>Mampu menjelaskan tentang pengertian Hukum Praktek di Peradilan Mahkamah Konstitusi.</li> <li>Mampu memahami tentang Alur Beracara di Peradilan Mahkamah Konstitusi.</li> <li>Mampu memahami Alur Penyelesaian Perkara Pengujian UU, PHPU, dan Memutus Pendapat DPR tentang Impeachmen Presiden.</li> <li>Mampu memahami Dan menjelaskan Proses perkara Pengujian UU.</li> <li>Mampu mendefinisikan Perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Pembubaran Parpol.</li> <li>Mampu memahami Dokumen Beracara di Mahkamah Konstitusi.</li> <li>Mampu secara teori dan praktikum tentang Permohonan, Putusan, dan Penyusunan Dokumen dalam Praktek Peradilan di Mahkamah Konstitusi.</li> </ol>	

<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Praktikum mata kuliah ini merupakan suatu rangkaian dari mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Praktek penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi ( <i>constitutional adjudication</i> ) memuat materi bagaimana cara menyelesaikan perkara di Mahkamah Konstitusi secara praktis di lapangan ( <i>in action</i> ) terutama penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui jalur peradilan (litigasi/ajudikasi).
-----------------------------	--

<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak Kuliah</li> <li>Pengertian dan Definisi Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi</li> <li>Alur Beracara dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi.</li> <li>Alur Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.</li> <li>Alur Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.</li> <li>Alur Penyelesaian Perkara Memutus Pendapat DPR Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya.</li> <li>Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.</li> <li>Pembubaran Partai Politik</li> <li>Dokumen Beracara Dalam Menyelesaikan Perkara di Mahkamah Konstitusi.</li> <li>Permohonan Perkara Ke Mahkamah Konstitusi.</li> <li>Pengertian Putusan Dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi.</li> <li>Penyusunan Dokumen Simulasi Praktek Mahasiswa.</li> <li>Prakrek Peradilan Semu di Mahkamah Konstitusi.</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester.</b></li> </ol>
---	---

<b>Pustaka</b>	
----------------	--

		Daftar Referensi: 1. Abdul Muktie Fadjar, 2006, <i>Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi</i> , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 2. Badriyah Khaleed, 2015, <i>Mekanisme Judicial Review</i> , Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 3. Fatmawati, 2005, <i>Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i> , Rajawali Pers, Jakarta. 4. Jimly Asshiddiqie, 2005, <i>Kemerdekaan berserikat pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi</i> , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.					
		<b>Pendukung :</b> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		<b>Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Materi Pembelajaran	BobotP enilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami dan mengetahui tahapan materi yang akan diajarkan	Ketepatan mengetahui dan memahami pentingnya mata kuliah yang akan diajarkan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Perkenalan 4. Pengantar mata kuliah, dan kontrak belajar	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan dan memahami istilah serta pengertian Peradilan Mahkamah Konstitusi	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang Acara di Peradilan Mahkamah Konstitusi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	3. Pengertian dan Definisi Praktek Beracara di MK.	10 %
3	Sub-CPMK-3 Mampu menjelaskan dan memahami Tahapan beracara di Peradilan MK	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	4. Alur Beracara di Mahkamah Konstitusi.	10%
4	Sub-CPMK-4 Mampu menjelaskan dan memahami kekhususan Gugatan Judicial Review di MK	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	10. Alur Pengajuan Gugatan Pengujian UU di MK.	7 %
5	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan dan memahami Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	4. Alur Penyelesaian Perkara PHPU di MK.	8%
6	Sub-CPMK-6 Mampu menjelaskan Kekhususan Penyelesaian Perkara Impeachmen di MK.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	10. Alur Penyelesaian dan Memutus Perkara Impeachmen oleh DPR.	5%
7	Sub-CPMK-7 Mampu menjelaskan Dan memahami Sifat Pengujian Undang-Undang oleh MK.	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	4. Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.	5%
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9	Sub-CPMK-9 Mampu menjelaskan Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	10. Jenis-jenis Sengketa Konstitusional Lembaga Negara.	5 %
10	Sub-CPMK-10 Mampu memahami dan menjelaskan sebab Pembubaran Partai Politik	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>o</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>o</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	4. Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.	5%

<b>11</b>	Sub-CPMK-11 Mampu memahami Dokumen-dokumen yang diajukan dalam beracara di MK.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>''</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>''</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	10. Dokumen Beracara dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi.	<b>5%</b>
<b>12</b>	Sub-CPMK-12 Mampu menjelaskan Dan memahami tata cara Permohonan Perkara di Mahkamah Konstitusi.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>''</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>''</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	4. Tata cara Pengajuan Gugatan di Mahkamah Konstitusi.	<b>5%</b>
<b>13</b>	Sub-CPMK-13 Mampu menjelaskan Pengertian dan Sifat Putusan Perkara di MK.	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>''</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>''</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	4. Memahami Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.	<b>5%</b>
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mampu menyusun Dokumen Simulasi Praktek di Mahkamah Konstitusi	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>''</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>''</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	5. Penyusunan Dokumen Praktek Mahasiswa.	<b>5%</b>
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mampu membuat dan melaksanakan Praktek Peradilan Semu	Ketepatan menjelaskan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; Diskusi[TM: 1x(2x50 <sup>''</sup> )]; [PT+BM:(1+1)x(2x60 <sup>''</sup> )]	e-Learning dan platform media lainnya.	4. Praktek Peradilan Semu..	<b>10%</b>
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL</b>	FA176247	MKDU	T=2 P= 1	V	Juli 2021
		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang hukum perjanjian internasional dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia</li> <li>b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi</li> </ol>			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub- CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menguraikan mengenai ruang lingkup mata kuliah hukum perjanjian internasional</li> <li>2. Mahasiswa mampu menganalisis klasifikasi perjanjian internasional</li> <li>3. Mahasiswa mampu menguraikan pembentukan Perjanjian Internasional dan tahapan pembentukannya</li> <li>4. Mahasiswa mampu menguraikan persyaratan (reservation) perjanjian internasional</li> <li>5. Mahasiswa mampu menguraikan keberlakuan Perjanjian Internasional menurut waktu, tempat dan kaitannya dengan pihak ketiga</li> <li>6. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan norma penafsiran perjanjian internasional</li> <li>7. Mahasiswa mampu menganalisis dasar keabsahan dan kebatalan perjanjian internasional</li> <li>8. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan perjanjian internasional dengan hukum nasional serta praktiknya di Indonesia</li> </ol>				



<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Perjanjian Internasional untuk (1) mengkritisi hubungan perjanjian internasional dengan hukum nasional; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum perjanjian internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum perjanjian internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum perjanjian internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Perjanjian Internasional dalam Menjawab norma-norma dalam perjanjian internasional yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah</li> <li>2. ruang lingkup hukum perjanjian internasional</li> <li>3. klasifikasi perjanjian internasional</li> <li>4. klasifikasi perjanjian internasional</li> <li>5. pembentukan Perjanjian Internasional dan tahapan pembentukannya</li> <li>6. pembentukan Perjanjian Internasional dan tahapan pembentukannya</li> <li>7. persyaratan (reservation) perjanjian internasional</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. keberlakuan Perjanjian Internasional menurut waktu, tempat dan kaitannya dengan pihak ketiga</li> <li>10. keberlakuan Perjanjian Internasional menurut waktu, tempat dan kaitannya dengan pihak ketiga</li> <li>11. norma penafsiran perjanjian internasional</li> <li>12. norma penafsiran perjanjian internasional</li> <li>13. keabsahan dan kebatalan perjanjian internasional</li> <li>14. keabsahan dan kebatalan perjanjian internasional</li> <li>15. hubungan perjanjian internasional dengan hukum nasional serta praktiknya di Indonesia</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agusman, Damos Dumoli (2010). Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.</li> <li>2. Ardhiwisastra, Yudha Bakti (2000). Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: Alumni.</li> <li>3. Ardhiwisastra, Yudha Bakti (2003). Hukum Internasional: Bunga Rampai. Bandung: Alumni.</li> <li>4. Ashri, Muhammad (2012). Hukum Perjanjian Internasional: Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya. Makassar: Arus Timur.</li> <li>5. Aust, Anthony (2007). Modern Treaty Law and Practice. 2nd edn. New York: Cambridge University Press.</li> <li>6. Binder, Christina (2008). "The Pacta Sunt Servanda Rule in the Vienna Convention on the Law of Treaties: A Pillar and its Safeguards".</li> <li>7. I. Buffard, J. Crawford, A. Pellet, S. Wittich (eds.), International Law between Universalism and Fragmentation: Festschrift in Honour of Gerhard Hafner. The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Kitab Undang-undang Hukum Perdata</p>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Perjanjian Internasional				
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>




				Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: mahasiswa mampu menguraikan mengenai kontrak kuliah	Kontrak kuliah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Kontra kuliah	10 %
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup mata kuliah hukum perjanjian internasional	Menafsirkan Identitas mata kuliah Sasaran belajar Ruang lingkup mata kuliah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Ruang lingkup mata kuliah	10 %
3-4	Sub-CPMK-3-4: Mahasiswa mampu menguraikan klasifikasi perjanjian internasional	Menjelaskan 1. Law making treaty dan treaty contract 2. Executive agreement 3. Self-executing treaties 4. Perjanjian internasional dan kontrak	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	1. Law making treaty dan treaty contract 2. Executive agreement 3. Self-executing treaties 4. Perjanjian internasional dan kontrak internasional.	10 %
5-6	Sub-CPMK-5-6: Mahasiswa mampu menguraikan pembentukan Perjanjian Internasional dan tahapannya	Menjelaskan 1. Kewenangan membuat perjanjian internasional 2. Full powers dan Credentials 3. Persyaratan Full powers dan Credentials serta pengecualiaannya 4. Akibat hukum keberadaan dan ketiadaan Full powers dan Credentials	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	1. Kewenangan membuat perjanjian internasional 2. Full powers dan Credentials 3. Persyaratan Full powers dan Credentials serta pengecualiaannya 4. Akibat hukum keberadaan dan ketiadaan Full powers dan Credentials 5. Tahap-tahap persiapan pembentukan perjanjian internasional: a. Penjajakan; b. Perundingan; c. Perumusan naskah;	10 %

		5. Tahap-tahap persiapan pembentukan perjanjian internasional: a. Penjajakan; b. Perundingan; c. Perumusan naskah; d. Penerimaan/ pamarafan naskah				d. Penerimaan/ pamarafan naskah.	
7	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mampu menguraikan persyaratan (reservation) perjanjian internasional	Menjelaskan 1. Pengertian/konsep reservasi dan deklarasi 2. Penerimaan dan penolakan reservasi 3. Akibat hukum penerimaan dan penolakan reservasi 4. Prosedur pengajuan, penarikan, dan penolakan reservasi; 5. Fungsi Depositary berkaitan dengan reservasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	1. Pengertian/konsep reservasi dan deklarasi 2. Penerimaan dan penolakan reservasi 3. Akibat hukum penerimaan dan penolakan reservasi 4. Prosedur pengajuan, penarikan, dan penolakan reservasi; 5. Fungsi Depositary berkaitan dengan reservasi	5 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9-10	Sub-CPMK-9-10: Mahasiswa mampu menganalisis keberlakuan Perjanjian Internasional menurut waktu, tempat dan kaitannya dengan pihak ketiga	Menjelaskan 1. Keberlakuan menurut waktu 2. Keberlakuan menurut tempat 3. Perjanjian Internasional dan Pihak Ketiga	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	1. Keberlakuan menurut waktu 2. Keberlakuan menurut tempat 3. Perjanjian Internasional dan Pihak Ketiga	15%
11-12	Sub-CPMK-11-12: Mahasiswa mampu menganalisis norma penafsiran perjanjian internasional	Menjelaskan 1. Pengertian dan ketentuan umum penafsiran 2. Aliran dan metode penafsiran 3. Kekuatan hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	1. Pengertian dan ketentuan umum penafsiran 2. Aliran dan metode penafsiran 3. Kekuatan hukum penafsiran	15 %

		penafsiran	- 40				
<b>13-14</b>	Sub-CPMK-13-14: Mahasiswa mampu menguraikan dasar keabsahan dan kebatalan perjanjian internasional	Menjelaskan tentang 1. Dasar-dasar pembatalan Perjanjian Internasional 2. Akibat hukum batalnya perjanjian	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Dasar-dasar pembatalan Perjanjian Internasional 2. Akibat hukum batalnya perjanjian	15 %
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu menganalisis hubungan perjanjian internasional dengan hukum nasional serta praktiknya di Indonesia	Menjelaskan tentang 1. Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional 2. Pembentukan Perjanjian Internasional di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional 2. Pembentukan Perjanjian Internasional di Indonesia	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM PROPERTI</b>	FA176392	MKDU	T=2 P= 1	VII	Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;</li> </ol>			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang hukum property dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia</li> <li>b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi</li> </ol>				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menguraikan pengantar hukum properti</li> <li>2. Mahasiswa mampu menguraikan property dan hak kebendaan serta memahami dasar hukum pertanahan dan bangunan di Indonesia</li> <li>3. Mahasiswa mampu memahami syarat dan ketentuan pengembangan dan pembangunan property serta memahami aspek hukum satuan rumah susun dan apartemen</li> <li>4. Mahasiswa mampu menguraikan aspek hukum perumahan dan pemukiman serta memahami aspek hukum property fasilitas umum dan kepentingan umum</li> <li>5. Mahasiswa mampu menguraikan hak jaminan atas bangunan dan tanah serta menguraikan aspek jasa konstruksi</li> <li>6. Mahasiswa mampu aspek hukum dan legal audit property serta memahami sengketa dalam proyek properti</li> <li>7. Mahasiswa mampu menganalisis tanah untuk kepentingan umum</li> <li>8. Mahasiswa mampu menganalisis aspek perpajakan pada bisnis properti</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum property, hukum satuan rumah susun dan apartemen				

<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontak Kuliah</li> <li>2. Hukum property</li> <li>3. Hak kebendaan, pertanahan dan bangunan di Indoensia</li> <li>4. Hak kebendaan, pertanahan dan bangunan di Indoensia</li> <li>5. Syarat dan ketentuan pembangunan serta aspek hukum satuan rumah susun dan apartemen</li> <li>6. Syarat dan ketentuan pembangunan serta aspek hukum satuan rumah susun dan apartemen</li> <li>7. Aspek hukum property dan fasilitas umum</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Hak jaminan atas bangunan dan aspek jasa konstruksi</li> <li>10. Hak jaminan atas bangunan dan aspek jasa konstruksi</li> <li>11. Hukum legal audit property dan proyek property</li> <li>12. Hukum legal audit property dan proyek property</li> <li>13. Aspek tanah untuk kepentingan umum</li> <li>14. Aspek tanah untuk kepentingan umum</li> <li>15. Perpajakan pada bisnis property</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>					
<b>Pustaka</b>		Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adrian Sutedi , Peralihan Hak atas Tanah dan pendaftarannya, ( Jakarta : Sinar Grafika , 2010 )</li> <li>2. Boedi Harsono , Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria , isi dan Pelaksanaannya, ( Jakarta : Djambatan , 2008 )</li> <li>3. Eddy M. Leks, Panduan Praktis Hukum Properti( Jakarta: Gramedia,2015)</li> <li>4. R.Serfianto, Iswi Hariyani &amp; Cita Yustisia.S , Kitab Hukum Bisnis Properti (Jakarta,2012)</li> <li>5. Urip Santosa, Hak atas Tanah , Hak Pengelolaan &amp; Hak Milik atas Satuan Rumah</li> </ol>					
		<b>Pendukung :</b>					
		Kitab Undang-undang Hukum Perdata					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Hukum Properti					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mahasiswa mampu menguraikan kontrak kuliah	Kesepakatan kontrak kuliah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M: (1+1) x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Kontrak kuliah	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menguraikan	Menafsirkan Hukum propertu	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x	<b>eLearning dan platform</b>	Pengertian, ruang lingkup, dan tujuan hukum property di Indonesia	10 %

	pengantar hukum properti		C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	(2x50'') ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'')]	<b>media lainnya</b> .		
<b>3-4</b>	Sub-CPMK-3-4: Mahasiswa mampu menguraikan property dan hak kebendaan serta memahami dasar hukum pertanahan dan bangunan di Indonesia	Menjelaskan Property dan hak kebendaan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori property</li> <li>- Karakteristik property</li> <li>- Hak kebendaan</li> <li>- Hukum tanah dan politik hukum pertanahan di Indonesia</li> <li>- Siste kepemilikan dan penguasaan tanah</li> <li>- System pendaftaran tanah</li> </ul>	15 %
<b>5-6</b>	b-CPMK5-63: Mahasiswa mampu memahami syarat dan ketentuan pengembangan dan pembangunan property serta memahami aspek hukum satuan rumah susun dan apartemen	menjelaskan syarat dan ketentuan pengembangan properti	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	<p>Syarat umum pembangunan,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan gedung</li> <li>- Perumahanam</li> <li>- Rumah susun</li> <li>- Perhotelan</li> <li>- Pusat kota</li> <li>- Perkantoran dan industri</li> </ul> <p>Dasar hukum rumah susun kepemilikan dan pengelolannya Problematikan dan perbandingan rumah susun dan apartemen</p>	15 %
<b>7</b>	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan aspek hukum perumahan dan pemukiman serta memahami aspek hukum property fasilitas umum dan kepentingan umum	Menjelaskan aspek hukum perumahan dan fasilitas umum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	<p>Pengantar perumahan dan pemukiman.-Kawasan / zona peruntukan tanah atas perumahan-Fungsi Sosiologi dan politik hukum perumahan Jalan , jalan raya dan jalan tol -Properti Negara - Tempat ibadah</p>	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-9-10: Mahasiswa mampu	Menjelaskan hak jaminan atas tanah	A = 86-100 B =	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM:1x(2x 50'')];	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	<p>Hak Tanggungan - Kekuatan Hukum Hak Tanggungan Regulasi terkait jasa</p>	10 %

	menguraikan hak jaminan atas bangunan dan tanah serta menguraikan aspek jasa konstruksi		71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>media lainnya</b> .	konstruksi -Jenis, bentuk dan bidang usaha jasa konstruksi -Kualifikasi dan klarifikasi jasa konstruksi	
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-11-12: Mahasiswa mampu aspek hukum dan legal audit property serta memahami sengketa dalam proyek properti	Menjelaskan aspek legal audit hukum properti	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Perizinan property - Kelayakan property - Amdal -Gangguan Lingkungan -IMB Bentuk persengketaan-Proses Penyelesaian Persengketa	10 %
<b>13</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menganalisis tanah untuk kepentingan umum	Menjelaskan tanah untuk kepentingan umum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Fungsi Sosial HTN - Gusuur dan Kedudukan Hukumnya. -Dasar hukum pembebasan tanah untuk kepentingan umum	10 %
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-14-15 Mahasiswa mampu menganalisis aspek perpajakan pada bisnis properti	Menjelaskan tentang perpajakan pada bisnis properti	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Residensial dan komersial properti-Aspek pajak bagi Wajib Pajak Developer Dan bukan Developer	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	FA176394	MKDU	<b>T=2 P= 1</b>	VII	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang penyelesaian sengketa hubungan industrial dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub- CPMK</b>	1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian hubungan industrial. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perusahaan sebagai kepentingan bersama pengusaha, pekerja, dan pemerintah dan menjelaskan perkembangan hubungan industrial 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori hubungan industrial dan menjelaskan teori serikat buruh dan menjelaskan sejarah hubungan industrial. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan organisasi pengusaha di Indonesia. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan organisasi pekerja di Indonesia. 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Hubungan Industrial 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.				



		8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja.					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari tentang hubungan industri dan penyelesaian sengketa di lingkup industrial						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah</li> <li>2. Pengertian hubungan industrial</li> <li>3. Perusahaan sebagai kepentingan bersama pengusaha, pekerja, dan pemerintah dan Perkembangan hubungan industrial</li> <li>4. Perusahaan sebagai kepentingan bersama pengusaha, pekerja, dan pemerintah dan Perkembangan hubungan industrial</li> <li>5. Teori hubungan industrial dan Teori serikat buruh Sejarah hubungan industrial</li> <li>6. Teori hubungan industrial dan Teori serikat buruh Sejarah hubungan industrial</li> <li>7. Organisasi pengusaha di Indonesia</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Organisasi pekerja di Indonesia</li> <li>10. Organisasi pekerja di Indonesia</li> <li>11. Hubungan Industrial Pancasila (HIP)</li> <li>12. Hubungan Industrial Pancasila (HIP)</li> <li>13. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial</li> <li>14. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial</li> <li>15. Hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumanto. 2014. Hubungan Industrial. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Center of Academic Publishing Service (CAPS)</li> <li>2. Umar Hasan. 2013. Manajemen Hubungan Industrial. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Tangerang: Penerbit Jelajah Nusa</li> <li>3. Cosmas Batubara. 2008. Hubungan Industrial. Jakarta: Penerbit PPM</li> </ol> <b>Pendukung :</b> Kitab Undang-undang Hukum Perdata						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Penyelesaian sengketa hubungan industrial						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mahasiswa mampu memahami kontrak kuliah	Kontrak kuliah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 –	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60'']	eLearning dan platform media lainnya.	Kontrak kuliah	10 %

			40	)]			
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian hubungan industrial.	Menafsirkan Hubungan indsutrial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'') ]]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Pengertian hubungan industrial	20 %
3-4	Sub-CPMK-3-4: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perusahaan sebagai kepentingan bersama pengusaha, pekerja, dan pemerintah dan menjelaskan perkembangan hubungan industrial	Menjelaskan Perusahaan sebagai kepentingan bersama dan menjelaskan perkembangan hubungan industrial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'') ]]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Perusahaan sebagai kepentingan bersama pengusaha, pekerja, dan pemerintah Perkembangan hubungan industrial	15 %
5-6	Sub-CPMK-5-6: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori hubungan industrial dan menjelaskan teori serikat buruh dan menjelaskan sejarah hubungan industrial	menjelaskan teori hubungan industrial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'') ]]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Teori hubungan Industrial Teori serikat buruh Sejarah hubungan Industrial	15 %
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan organisasi pengusaha di Indonesia.	Menjelaskan organisasi pengusaha di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 –	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'') ]]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Organisasi pengusaha di Indonesia	10 %

			40	]			
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-9-10: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan organisasi pekerja di Indonesia.	Menjelaskan organisasi pekerja di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Organisasi pekerja di Indonesia	10 %
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-11-12: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Hubungan Industrial.	Menjelaskan hubungan industrial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Hubungan industrial pancasila	10 %
<b>13-14</b>	Sub-CPMK-13-14: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Menjelaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Penyelesaian sengketa hubungan industrial	10 %
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan kerja dan keputusan hubungan kerja.	Menjelaskan hubungan kerja dan keputusan hubungan kerja	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Hubungan kerja dan keputusan hubungan kerja	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM

Kode Dokumen  
FA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA	FA176393	MKDU	T=2 P= 1	VIII	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang perbuatan melawan hukum perdata dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian hubungan industrial. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perusahaan sebagai kepentingan bersama pengusaha, pekerja, dan pemerintah dan menjelaskan perkembangan hubungan industrial 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori hubungan industrial dan menjelaskan teori serikat buruh dan menjelaskan sejarah hubungan industrial. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan organisasi pengusaha di Indonesia. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan organisasi pekerja di Indonesia. 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Hubungan Industrial 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja.				


<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari seluk-beluk istilah dan pengertian-pengertian Hukum keperdataan						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah</li> <li>2. Pengertian hukum Acara Perdata</li> <li>3. Pengertian hukum Acara Perdata</li> <li>4. Tindakan Sebelum dan Selama Sidang</li> <li>5. Tindakan Sebelum dan Selama Sidang</li> <li>6. Proses Acara Istimewa</li> <li>7. Proses Acara Istimewa</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Proses Jawab Menjawab</li> <li>10. Proses Jawab Menjawab</li> <li>11. Pembuktian</li> <li>12. Pembuktian</li> <li>13. Putusan</li> <li>14. Upaya hukum</li> <li>15. Pelaksanaan putusan</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdulkadir Muhamad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.</li> <li>2. Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>3. Chidir Ali, 1987, Responsi Hukum Acara Perdata, CV Armico, Bandung.</li> <li>4. Chidir Ali, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Armico, Bandung.</li> <li>5. Darwan Prints, 1996, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, CV. Armico, Bandung.</li> </ol> <b>Pendukung :</b> Kitab Undang-undang Hukum Perdata						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Perbuatan melawan hukum perdata						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mahasiswa mampu memahami kontrak kuliah	Kontrak kuliah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M: (1+1) x (2x60'')] ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Kontrak kuliah	10 %
2-3	Sub-CPMK-2-3: Mahasiswa	Menafsirkan Pengertian hukum Acara	A = 86-100 B = 71-	a. Kuliah; b. Diskusi	<b>eLearning dan platform</b>	a. Pengertian hukum Acara Perdata b. Sumber-sumber hukum	10 %

	mampu memahami dan menjelaskan Pengertian hukum Acara Perdata	Perdata	85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>m media lainnya</b> .	Acara Perdata c. Asas- Asas Hukum Acara Perdata d. Susunan Badan Kekuasaan Peradilan e. Pejabat di Lingkungan Peradilan	
<b>4-5</b>	Sub-CPMK-4-5: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Tindakan Sebelum dan Selama Sidang	Menjelaskan Tindakan Sebelum dan Selama Sidang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	a. Tuntutan Hak b. Isi Gugatan dan Dasar Hukumnya c. Gugatan Lisan dan Gugatan Tertulis d. Penggabungan/ Komulatif e. Upaya untuk Menjamin Hak f. Kompetensi Peradilan g. Gugatan Perwakilan	15 %
<b>6-7</b>	b-CPMK-6-7: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori Proses Acara Istimewa	menjelaskan Proses Acara Istimewa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	a. Pemanggilan Secara Patut b. Acara Istimewa c. Mediasi Litigasi d. Perubahan dan Pencabutan Gugatan	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-9-10: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Proses Jawab Menjawab	Menjelaskan Proses Jawab Menjawab	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	a. Jawaban Gugatan b. Replik Duplik c. Mengikut sertakan Pihak Ketiga Dalam Proses	15 %
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-11-12: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pembuktian	Menjelaskan Pembuktian	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	a. Pengertian b. Beban Pembuktian c. Alat-alat Bukti	10 %

			E = 0 - 40				
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan putusan	Menjelaskan putusan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya . -	a. Pengertian putusan b. Sistematika Putusan c. Asas-asas Putusan d. Jenis-jenis Putusan e. Kekuatan Putusan	10 %
14	Sub-CPMK-14: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan upaya hukum	Menjelaskan upaya hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya . -	a. Upaya Hukum Biasa b. Upaya Hukum Luar Biasa	10 %
15	Sub-CPMK-15: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pelaksanaan putusan	Menjelaskan pelaksanaan putusan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	a. Pengertian b. Dasar Hukum c. Asas-asas d. Jenis-jenis e. Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi f. Pelaksanaan Putusan	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>REFORMA AGRARIA</b>	FA176102	MKDU	<b>T=2 P= 1</b>	VIII	Juli 2021
		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang reforma agrarian dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia</li> <li>b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi</li> </ol>			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menguraikan mengenai Tap MPR No.IX Tahun 2001 dan produk hukum RA lainnya</li> <li>2. Mahasiwa mampu Organisasi ,obyek dan subyek (pendekatan normatif)</li> <li>3. Mahasiswa mampu menjelaskan ketimpangan</li> <li>4. Mahasiswa mampu menganalisis antar konflik dan antipologi konflik agraria</li> <li>5. Mahasiswa mampu menguraikan perjuangan dan agrarian(pengalaman perjuangan inonesia)</li> <li>6. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah pembentukan kebijakan RA</li> <li>7. Mahasiswa mampu menjelaskan petani dan kemiskinan dan akses</li> <li>8. Mahasiswa mampu menganalisis desa dan kebijakan RA</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar, azas-azas hukum agrarian				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tap MPR No.IX Tahun 2001 dan produk hukum RA lainnya</li> <li>2. Organisasi ,obyek dan subyek (pendekatan normatif)</li> <li>3. Ketimpangan</li> <li>4. Antar konflik dan antipologi konflik agraria</li> <li>5. Perjuangan agrarian(pengalaman perjuangan Indonesia)</li> </ol>				




	6. Sejarah pembentukan kebijakan RA 7. Pengalaman RA Indonesia dan beberapa negara <b>8. Ujian Tengah Semester</b> 9. Petani kemiskinan dan akses 10. Desa dan kebijakan RA 11. Proses dan perubahan agrarian indonesia 12. Transmigrasi dan MPEI kebijakan pembangunan perkebunan skala luas 13. Landgrabb 14. Daya rusak eksploitasi SDA 15. Hak-hak petani / masyarakat adat dan gagasan(alternative solusi) reformasi agraria <b>16. Ujian Akhir Semester</b>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi:						
	1. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, Airlangga UP, Surabaya, 2006. 2. R. Soetojo P & Marthalena Pohan, Hukum orang dan keluarga (Personen en Familie Recht), Airlangga UP, Surabaya, 2000. 3. Harry Marpaung, Masalah Perceraian, Tonis, Bandung, 1893. 4. J. Satrio, Hukum Harta perkawinan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. 5. Padma D. Liman, Pewarisan ahli waris ab-intestato menurut BW, Wineka Media, Malang, 201						
	<b>Pendukung :</b> Kitab Undang-undang Hukum Perdata						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Reforma Agraria						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: mahasiswa mampu menguraikan mengenai Tap MPR No.IX Tahun 2001 dan produk hukum RA lainnya	Tap MPR No.IX Tahun 2001 dan produk hukum RA lainnya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Tap MPR No.IX Tahun 2001 dan produk hukum RA lainnya	10 %
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu menguraikan mengenai Organisasi ,obyek dan subyek	Menafsirkan Organisasi ,obyek dan subyek (pendekatan normatif)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Organisasi ,obyek dan subyek (pendekatan normatif)	10 %

	(pendekatan normatif)		E = 0 – 40	x(2x60” )]			
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menjelaskan Ketimpangan	Menjelaskan Ketimpangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60” )]	eLearn ing dan platfor m media lainnya .	Ketimpangan	10 %
4	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu menganalisis Antar konflik dan antipologi konflik agraria	Menjelaskan Antar konflik dan antipologi konflik agraria	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60” )]	eLearn ing dan platfor m media lainnya .	Antar konflik dan antipologi konflik agraria	5 %
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menganalisis perjuangan agrarian(pengalaman perjuangan Indonesia)	Perjuangan agrarian(pengalaman perjuangan Indonesia)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60” )]	eLearn ing dan platfor m media lainnya .	perjuangan agrarian(pengalaman perjuangan Indonesia)	10 %
6	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu menguraikan Sejarah pembentukan kebijakan RA	Sejarah pembentukan kebijakan RA	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60” )]	eLearn ing dan platfor m media lainnya .	Sejarah pembentukan kebijakan RA	5 %
7	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mampu menguraikan Pengalaman RA Indonesia dan beberapa negara	Pengalaman RA Indonesia dan beberapa negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60” )]	eLearn ing dan platfor m media lainnya .	Pengalaman RA Indonesia dan beberapa negara	5 %
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa	Petani kemiskinan dan	A = 86-	a. Kuliah; b.Diskus i[	eLearn ing dan	Petani kemiskinan dan akses	10 %

	mampu menguraikan Petani kemiskinan dan akses	akses	100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>platform media lainnya</b> .		
<b>10</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan Desa dan kebijakan RA	Desa dan kebijakan RA	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Desa dan kebijakan RA	5 %
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-11-12: Mahasiswa mampu Proses dan perubahan agrarian Indonesia, Trans migrasi dan MPEI kebijakan pembangunan perkebunan skala luas	Proses dan perubahan agrarian indonesia ,Transmigrasi dan MPEI kebijakan pembangunan perkebunan skala luas	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Proses dan perubahan agrarian Indonesia,Transmigrasi dan MPEI kebijakan pembangunan perkebunan skala luas	10 %
<b>13-14</b>	Sub-CPMK-13-14: Mahasiswa mampu menganalisis Landgrabb ,Daya rusak eksploitasi SDA	Menjelaskan tentang Landgrabb ,Daya rusak eksploitasi SDA	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .  -	Landgrabb,Daya rusak eksploitasi SDA	10 %
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu menganalisis Hak-hak petani / masyarakat adat dan gagasan(alternative solusi) reformasi agraria	Menjelaskan tentang Hak-hak petani / masyarakat adat dan gagasan(alternative solusi) reformasi agraria	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Hak-hak petani / masyarakat adat dan gagasan(alternative solusi) reformasi agraria	10 %
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>PRAKTEK PERADILAN PERDATA</b>	FA176255	MKDU	<b>T=2 P= 1</b>	VI	Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;</li> </ol>			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
<b>CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang praktek peradilan perdata dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia</li> <li>b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi</li> </ol>				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian hubungan industrial.</li> <li>2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perusahaan sebagai kepentingan bersama pengusaha, pekerja, dan pemerintah dan menjelaskan perkembangan hubungan industrial</li> <li>3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori hubungan industrial dan menjelaskan teori serikat buruh dan menjelaskan sejarah hubungan industrial.</li> <li>4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan organisasi pengusaha di Indonesia.</li> <li>5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan organisasi pekerja di Indonesia.</li> <li>6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Hubungan Industrial</li> <li>7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.</li> <li>8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan kerja dan</li> </ol>				

		pemutusan hubungan kerja.					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari seluk-beluk istilah dan pengertian-pengertian Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata, sasa-asas Acara dan Praktek Peradilan Perdata,						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah</li> <li>2. Pengertian hukum Acara Perdata</li> <li>3. Pengertian hukum Acara Perdata</li> <li>4. Tindakan Sebelum dan Selama Sidang</li> <li>5. Tindakan Sebelum dan Selama Sidang</li> <li>6. Proses Acara Istimewa</li> <li>7. Proses Acara Istimewa</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Proses Jawab Menjawab</li> <li>10. Proses Jawab Menjawab</li> <li>11. Pembuktian</li> <li>12. Pembuktian</li> <li>13. Putusan</li> <li>14. Upaya hukum</li> <li>15. Pelaksanaan putusan</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdulkadir Muhamad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.</li> <li>2. Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>3. Chidir Ali, 1987, Responsi Hukum Acara Perdata, CV Armico, Bandung.</li> <li>4. Chidir Ali, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Armico, Bandung.</li> <li>5. Darwan Prints, 1996, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, CV. Armico, Bandung.</li> </ol>						
	<b>Pendukung :</b>						
	Kitab Undang-undang Hukum Perdata						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Praktek peradilan perdata						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mahasiswa mampu memahami kontrak kuliah	Kontrak kuliah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 –	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1 x(2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60”]	eLearning dan platform media lainnya.	Kontrak kuliah	10 %

			40	)]			
2-3	Sub-CPMK-2-3: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengertian hukum Acara Perdata	Menafsirkan Pengertian hukum Acara Perdata	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	a. Pengertian hukum Acara Perdata b. Sumber-sumber hukum Acara Perdata c. Asas- Asas Hukum Acara Perdata d. Susunan Badan Kekuasaan Peradilan e. Pejabat di Lingkungan Peradilan	10 %
4-5	Sub-CPMK-4-5: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Tindakan Sebelum dan Selama Sidang	Menjelaskan Tindakan Sebelum dan Selama Sidang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	a. Tuntutan Hak b. Isi Gugatan dan Dasar Hukumnya c. Gugatan Lisan dan Gugatan Tertulis d. Penggabungan/ Komulatif e. Upaya untuk Menjamin Hak f. Kompetensi Peradilan g. Gugatan Perwakilan	15 %
6-7	Sub-CPMK-6-7: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori Proses Acara Istimewa	menjelaskan Proses Acara Istimewa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	a. Pemanggilan Secara Patut b. Acara Istimewa c. Mediasi Litigasi d. Perubahan dan Pencabutan Gugatan	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9 - 10	Sub-CPMK-9-10: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Proses Jawab Menjawab	Menjelaskan Proses Jawab Menjawab	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	a. Jawaban Gugatan b. Replik Duplik c. Mengikuti sertakan Pihak Ketiga Dalam Proses	15 %
11 - 12	Sub-CPMK-11-12: Mahasiswa mampu memahami dan	Menjelaskan Pembuktian	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B	eLearning dan platform media	a. Pengertian b. Beban Pembuktian c. Alat-alat Bukti	10 %

	menjelaskan Pembuktian		C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	M:(1+1)x (2x60'')	lainnya .			
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan putusan	Menjelaskan putusan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya . -	a. Pengertian putusan b. Sistematika Putusan c. Asas-asas Putusan d. Jenis-jenis Putusan e. Kekuatan Putusan	10 %	
14	Sub-CPMK-14: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan upaya hukum	Menjelaskan upaya hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya . -	a. Upaya Hukum Biasa b. Upaya Hukum Luar Biasa	10 %	
15	Sub-CPMK-15: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pelaksanaan putusan	Menjelaskan pelaksanaan putusan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	a. Pengertian b. Dasar Hukum c. Asas-asas d. Jenis-jenis e. Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi f. Pelaksanaan Putusan	10%	
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>							

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM PERUSAHAAN DAN TRANSPORTASI</b>	FA176244	MKDU	<b>T=2 P= 1</b>	IV	Juli 2021
		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang perusahaan dan transportasi dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia</li> <li>b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi</li> </ol>			
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa dapat memahami mengenai pengertian hukum transportasi secara umum</li> <li>2. Mahasiswa dapat menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan transportasi darat.</li> <li>3. Mahasiswa dapat menganalisis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan transportasi laut</li> <li>4. Mahasiswa dapat menganalisis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan transportasi udara.</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mendiskusikan mengenai pengertian transportasi, asas-asas transportasi, ruang lingkup transportasi dan jenis-jenis transportasi.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah</li> <li>2. Pengertian Hukum Transportasi</li> <li>3. Sumber Hukum Transportasi</li> <li>4. Asas-Asas Hukum Transportasi</li> <li>5. Subyek dan obyek hukum transportasi</li> </ol>				

	6. Ruang Lingkup Hukum Transportasi 7. Pengertian transportasi darat. <b>8. Ujian Tengah Semester</b> 9. Unsur-unsur transportasi darat. 10. Asas-asas transportasi darat. 11. Hak dan kewajiban pada transportasi darat. 12. Tanggung jawab dalam transportasi 13. Pengertian transportasi laut. Unsur-unsu transportasi laut. Asas-asa transportasi laut. Hak dan kewajiban pada transportasi laut. Tanggung jawab dalam transportasi laut. Jenis-jenis transportasi laut. Jasa transportasi laut. 14. Pengertian transportasi udara. Unsur-unsur transportasi udara. Asas-asas transportasi udara. Hak dan kewajiban pada transportasi udara. 15. Tanggung jawab dalam transportasi udara. Jenis-jenis transportasi udara. Jasa transportasi udara. <b>16. Ujian Akhir Semester</b>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: 1. Hartono, Siti Soemarti. 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan. Yogyakarta: Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM 2. Ichsan, Achmad. 1984. Hukum Dagang. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita. Purwosutjipto, H.M.N. 1984. Pengertian Pokok Hukum Dagang dan Hukum Transportasi . Jakarta: Penerbit Djambatan. 3. Purwosutjipto, H.M.N. 1985. Pengertian Pokok Hukum Dagang. Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat. Jakarta: Penerbit Djambatan. 4. Wiradipja, Saefullah, E. 1989. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Transportasi Udara Internasional dan Nasional. Jakarta: Penerbit Liberty.						
	<b>Pendukung :</b>						
	Kitab Undang-undang Hukum Perdata						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Perusahaan dan Transportasi						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: mahasiswa mampu menguraikan mengenai kontrak kuliah	Kontrak kuliah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M:(1+1) x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Kontrak kuliah	10 %

2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu menguraikan Pengertian Hukum Transportasi	Menafsirkan Pengertian Hukum Transportasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Pengertian Hukum Transportasi	5 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan Sumber Hukum Transportasi	Menjelaskan Sumber Hukum Transportasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Sumber Hukum Transportasi	5%
4	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu menguraikan Asas-Asas Hukum Transportasi	Menjelaskan Asas-Asas Hukum Transportasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Asas-Asas Hukum Transportasi	5 %
5	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menguraikan Subyek dan obyek hukum transportasi	Menjelaskan Subyek dan obyek hukum transportasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Subyek dan obyek hukum transportasi	5 %
6	Sub-CPMK-6 : mahasiswa Ruang Lingkup Hukum Transportasi	Menjelaskan Ruang Lingkup Hukum Transportasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]		Ruang Lingkup Hukum Pengangkutan	5%
7	Sub-CPMK-7: Mahasiswa Pengertian transportasi darat.	Pengertian transportasi darat.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]		Pengertian transportasi darat.	5%

			D = 41-55 E = 0 – 40	M:(1+1)x(2x60") ]			
<b>8</b>	Ujian Tengah Semester						
<b>9</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu Unsur-unsur transportasi darat.	Menjelaskan Unsur-unsur transportasi darat.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Unsur-unsur transportasi darat.	10%
<b>10</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa Asas-asas transportasi darat.	Menjelaskan Asas-asas transportasi darat.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Asas-asas transportasi darat.	15 %
<b>11</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu Hak dan kewajiban pada transportasi darat.	Menjelaskan Hak dan kewajiban pada transportasi darat.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> . -	Hak dan kewajiban pada transportasi darat.	10%
<b>12</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu Tanggung jawab dalam transportasi	Menjelaskan tentang Tanggung jawab dalam transportasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Tanggung jawab dalam transportasi	10%
<b>13</b>	Sub-CPMK-13: Pengertian transportasi	Menjelaskan Pengertian transportasi	A = 86-100	a. Kuliah; b.Diskusi[		Pengertian transportasi laut. Unsur-unsu transportasi laut. Asas-	5%

	<p>laut. Unsur-unsu transportasi laut. Asas-asa transportasi laut. Hak dan kewajiban pada transportasi laut. Tanggung jawab dalam transportasi laut. Jenis-jenis transportasi laut. Jasa transportasi laut.</p>	<p>laut. Unsur-unsu transportasi laut. Asas-asa transportasi laut. Hak dan kewajiban pada transportasi laut. Tanggung jawab dalam transportasi laut. Jenis-jenis transportasi laut. Jasa transportasi laut.</p>	<p>B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	<p>TM: 1x(2x 50"); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60")]</p>	<p>asa transportasi laut. Hak dan kewajiban pada transportasi laut. Tanggung jawab dalam transportasi laut. Jenis-jenis transportasi laut. Jasa transportasi laut.</p>	
14	<p>Sub-CPMK-14: Pengertian transportasi udara. Unsur-unsur transportasi udara. Asas-asa transportasi udara. Hak dan kewajiban pada transportasi udara.</p>	<p>Pengertian transportasi udara. Unsur-unsur transportasi udara. Asas-asa transportasi udara. Hak dan kewajiban pada transportasi udara.</p>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50"); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60")]</p>	<p>Pengertian transportasi udara. Unsur-unsur transportasi udara. Asas-asa transportasi udara. Hak dan kewajiban pada transportasi udara.</p>	5%

15	Sub-CPMK-15:Tanggung jawab dalam transportasi udara. Jenis-jenis transportasi udara. Jasa transportasi udara.	Tanggung jawab dalam transportasi udara. Jenis-jenis transportasi udara. Jasa transportasi udara.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]		Tanggung jawab dalam transportasi udara. Jenis-jenis transportasi udara. Jasa transportasi udara.	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
<b>HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN HAK GUNA TANAH</b>	FA1763101	MKDU	T=2 P= 1	VIII	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthen Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang reforma agrarian dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia</li> <li>Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi</li> </ol>			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu menguraikan mengenai Tap MPR No.IX Tahun 2001 dan produk hukum RA lainnya</li> <li>Mahasiswa mampu Organisasi ,obyek dan subyek (pendekatan normatif)</li> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan ketimpangan</li> <li>Mahasiswa mampu menganalisis antar konflik dan antipologi konflik agraria</li> <li>Mahasiswa mampu menguraikan perjuangan dan agrarian(pengalaman perjuangan inonesia)</li> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah pembentukan kebijakan RA</li> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan petani dan kemiskinan dan akses</li> <li>Mahasiswa mampu menganalisis desa dan kebijakan RA</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini membahas mengenai pengertian, dasar hukum, tujuan dan fungsi pendaftaran tanah, sistem publikasi dalam pendaftarantah ; menjelaskan instansi yang menyelenggarakan pendaftaran tanah ; menjelaskan kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah ;menguraikan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan pendaftaran peralihan hak atas tanah; menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang timbul dalam praktik pendaftaran tanah; serta mengevaluasi				





1	Sub-CPMK-1: mahasiswa mampu menguraikan kontrak kuliah	Kontrak kuliah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+ BM: (1+1)x(2x60")]	eLearn ing dan platform media lainnya .	Kontrak kuliah	10 %	
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu menghubungkan beberapa aspek pengantar mengenai pendaftaran tanah.	menghubungkan beberapa aspek pengantar mengenai pendaftaran tanah.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+ BM: (1+1)x(2x60")]	eLearn ing dan platform media lainnya .	menghubungkan beberapa aspek pengantar mengenai pendaftaran tanah.	10 %	
3-4	Sub-CPMK-3-4: Mahasiswa mampu menganalisis pendaftaran tanah menurut UUPA.	menganalisis pendaftaran tanah menurut UUPA.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+ BM: (1+1)x(2x60")]	eLearn ing dan platform media lainnya .	Menganalisis pendaftaran tanah menurut UUPA.	10 %	
5	Sub-CPMK-5: mahasiswa mampu membedakan sistem pendaftaran tanah.	membedakan sistem pendaftaran tanah.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+ BM: (1+1)x(2x60")]	eLearn ing dan platform media lainnya .	membedakan sistem pendaftaran tanah.	10 %	
6-7	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu menetapkan ciri dan membedakan sistem publikasi dalam pendaftaran tanah.	ciri dan membedakan sistem publikasi dalam pendaftaran tanah.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+ BM: (1+1)x(2x60")]	eLearn ing dan platform media lainnya .	ciri dan membedakan sistem publikasi dalam pendaftaran tanah.	5 %	
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>							

9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu merumuskan proses pendaftaran tanah	merumuskan proses pendaftaran tanah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	merumuskan proses pendaftaran tanah	10 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu membedakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis dan sporadis	membedakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis dan sporadis	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	membedakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis dan sporadis	5 %
11 - 12	Sub-CPMK-11-12: Mahasiswa mampu menguraikan proses dan beberapa aspek mengenai sertifikat hak atas tanah	proses dan beberapa aspek mengenai sertifikat hak atas tanah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	proses dan beberapa aspek mengenai sertifikat hak atas tanah	10 %
13-14	Sub-CPMK-13-14: Mahasiswa mampu mengaitkan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dan menguraikan mengenai pemeliharaan data pendaftaran tanah	kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dan menguraikan mengenai pemeliharaan data pendaftaran tanah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .  -	kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dan menguraikan mengenai pemeliharaan data pendaftaran tanah	10 %
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu menganalisis tugas tugas PPAT serta hak dan kewajibannya.	tugas tugas PPAT serta hak dan kewajibannya.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	tugas tugas PPAT serta hak dan kewajibannya.	10 %

	kewajibannya.		D = 41-55 E = 0 - 40				
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM KEPAILITAN DAN JAMINAN</b>	FA176248	MKDU	T=2 P= 1	V	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang Hukum kepailitan dan jaminan Perdata dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub- CPMK</b>	1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Ruang Lingkup, Asas – Asas dan Teori Hukum Kepailitan. 2. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami peraturan perundang – undangan yang terkait dengan Hukum Kepailitan. 3. Mahasiswa mampu memahami Jenis-jenis surat berharga dan karakteristiknya serta mampu memahami mengenai kepailitan, landasan hukum, tujuan dan objek kepailitan. 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pemahaman teoritis mengenai kepailitan serta implementasinya pada perkembangan terkini di dunia bisnis. 5. Mahasiswa mampu menganalisis fenomena dan perkembangan terkini terkait aspek hukum kepailitan. 6. Mampu menyelesaikan permasalahan di bidang hukum kepailitan dan membuat legal opinion bidang hukum kepailitan.				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang kepailitan yang mencakup landasan hukum, pengertian dan kepailitan dalam kerangka				

	teoritis dan praktik juga dibahas mengenai perkembangan hukum dan problematika hukum dalam praktik terkait kepailitan. Mahasiswa juga akan mempelajari mengenai perbedaan antara kepailitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah</li> <li>2. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia;</li> <li>3. Dasar Hukum, Pengertian</li> <li>4. Tujuan Hukum Kepailitan;</li> <li>5. Asas-asas, syarat-syarat dan prosedur dalam permohonan pailit;</li> <li>6. Putusan Pernyataan Pailit dan Daya Eksekusinya, serta upaya hukum;</li> <li>7. Akibat Terhadap Pernyataan Pailit; Perdamaian; Harta Pailit, Kurator dan Hakim Pengawas;</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Pencocokan Utang, Kedudukan Hak Jaminan dalam kepailitan dan Actio Pauliana;</li> <li>10. Status Hukum Debitor Setelah Pemberesan Utang;</li> <li>11. Pengertian, dasar hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);</li> <li>12. Syarat-syarat dan prosedur permohonan PKPU;</li> <li>13. Akibat hukum terhadap PKPU;</li> <li>14. Perdamaian dalam PKPU;</li> <li>15. Berakhirnya PKPU.</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel Suryana, Hukum Kepailitan, Bandung, Pustaka Sutra, 2007</li> <li>2. Man S. Sastrawidjaya, Hukum Kepailitan dan PKPU, Bandung, Alumni, 2006</li> <li>3. Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor dalam Perkara Kepailitan), Bandung, PT. Keni, 2019</li> <li>4. Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Jakarta, Pt. Pustaka Utama Grafiti, 2002</li> <li>5. Kitab Undang Undang Hukum Perdata</li> <li>6. Kitab Undang Undang Hukum Dagang</li> <li>7. Undang Undan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan &amp; PKPU</li> </ol> <b>Pendukung :</b> Kitab Undang-undang Hukum Perdata						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Kepailitan dan jaminan						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mengetahui dan memahami RPS mata kuliah Hukum Kepailitan yang akan	- Mahasiswa mampu memahami RPS Hukum Kepailitan, - Mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M:(1+1)]	eLearning dan platform media lainnya .	Pengantar materi perkuliahan Hukum Kepailitan	15 %

	ditempuh dalam satu semester, serta siap untuk mengikutinya dengan baik, memahami materi- materi pengantar Hukum Kepailitan	mampu memahami materi Hukum Kepailitan	E = 0 – 40	x(2x60” )]			
2	Sub-CPMK-2: Mengetahui dan memahami RPS mata kuliah Hukum Kepailitan yang akan ditempuh dalam satu semester, serta siap untuk mengikutinya dengan baik, memahami materi- materi pengantar Hukum Kepailitan	- Mahasiswa mampu memahami RPS Hukum Kepailitan, - Mahasiswa mampu memahami materi Hukum Kepailitan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60” )]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Pengantar materi perkuliahan Hukum Kepailitan	10 %
3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu Mengetahui & memahami Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia, mulai dari pengaturan dalam FV, Perpu No. 1/1998, UU No. 4/1998 dan UU No. 37/2004	- mampu memahami sejarah perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia. - mampu memahami dan menjelaskan dasar hukum, pengertian dan tujuan hukum kepailitan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60” )]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	- Sejarah perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia - Dasar hukum, pengertian dan tujuan hukum kepailitan	10 %
4	Sub-CPMK-3 Mahasiswa mampu Mengetahui dan memahami memahami dasar hukum,	mampu memahami dan menjelaskan dasar hukum, pengertian dan tujuan hukum kepailitan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x( 2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Dasar hukum, pengertian dan tujuan hukum kepailitan	10 %

	pengertian dan tujuan Hukum Kepailitan		E = 0 – 40				
5	b-CPMK-5: Mahasiswa mampu Mengetahui dan memahami Asas-asas, syarat-syarat dan prosedur dalam permohonan pailit	- menjelaskan asas-asas, syarat-syarat dan prosedur dalam permohonan pailit	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Asas-asas, syarat-syarat dan prosedur dalam permohonan pailit	10 %
6	b-CPMK-6: Mahasiswa mampu Mengetahui dan memahami Putusan pernyataan Pailit dan Daya Eksekusinya, serta upaya hukum.	- putusan pernyataan pailit, memahami tentang daya eksekusi kepailitan serta memahami bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Putusan pernyataan pailit; daya eksekusi; upaya hukum	5%
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu Mengetahui dan memahami serta analisis Akibat Terhadap Pernyataan Pailit; Perdamaian dan mengetahui	- menganalisis akibat terhadap pernyataan pailit, perdamaian serta menganalisis kasus dalam praktik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Akibat terhadap pernyataan putusan pailit dan masalah perdamaian	5 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu Mengetahui dan memahami tentang keberadaan Harta pailit, Kurator dan Hakim Pengawas	menjelaskan mengenai harta pailit, tugas kurator dan hakim pengawas	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Harta pailit, Kurator dan Hakim Pengawas	5%
10	Sub-CPMK-10 Mahasiswa	-menjelaskan tentang status	A = 86-	a. Kuliah; b.Diskusi[	<b>eLearning dan</b>	Status Hukum Debitor Setelah	5 %

	mampu menguraikan Mengetahui dan memahami mengenai Status Hukum Debitor Setelah Pemberesan Utan	hukum Debitor setelah Pemberesan Utang	100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	TM:1x(2x 50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>platform media lainnya</b> .	Pemberesan Utang.	
<b>11</b>	Sub-CPMK-11 Mahasiswa mampu Mengetahui dan memahami tentang Pengertian, dasar hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	menjelaskan pengertian, dasar hukum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50"); c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Pengertian dan dasar hukum PKPU10	5%
<b>12</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu Mengetahui dan memahami tentang Syarat-syarat dan prosedur permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	-menjelaskan tentang syarat-syarat-syarat dan prosedur permohonan PKPU	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Syarat-syarat dan prosedur permohonan PKPU	5 %
<b>13</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu Mengetahui dan Memahami tentang akibat hukum terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	menjelaskan dan menganalisis tentang akibat hukum PKPU dan membandingkan dengan kepailitan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50"); c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Akibat hukum terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	5%



14	Sub-CPMK-14: Mahasiswa mampu Mengetahui dan memahami tentang perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU))	menjelaskan dan menganalisis tentang perdamaian dalam PKPU dan membandingkan dengan kepailitan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	5 %
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu Menguraikan Mengetahui dan memahami tentang berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta membandingkan dengan berakhirnya kepailitan.	menjelaskan tentang berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta membandingkan dengan berakhirnya kepailitan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	5%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM KELUARGA DAN HARTA PERKAWINAN</b>	FA176391	MKDU	<b>T=2 P= 1</b>	VII	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang Kapita Selekta Hukum Perdata dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub- CPMK</b>	1. Mahasiswa mampu menguraikan mengenai dasar hukum perkawinan 2. Mahasiswa mampu menganalisis azas-azas hukum perkawinan dan syarat materil dan formil perkawinan 3. Mahasiswa mampu membedakan pencegahan dengan pembatalan perkawinan dan menguraikan perjanjian kawin 4. Mahasiswa mampu menguraikan perjanjian kawin dan menganalisis akibat dari suatu perkawinan dan menganalisis penyebab putusnya perkawinan 5. Mahasiswa mampu menguraikan dasar hukum perkawinan dan sumbernya dan menguraikan sifat hukum dan membedakannya dengan harta-harta lain 6. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan harta-harta yang merupakan harta perkawinan 7. Mahasiswa mampu menganalisis tindakan yang dilakukan ketika terjadi perubahan nilai harta dan perkawinan 8. Mahasiswa mampu menganalisis hal yang dilakukan terhadap harta perkawinan ketika terjadi perceraian, kematian, perkawinan kedua,				

		perkawinan campuran					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>		Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar, azas-azas hukum perkawinan, perjanjian kawin, akibat perkawinan, bubar dan akibatnya perkawinan, dasar hukum, pengertian, dan sifat harta perkawinan, pembagian harta perkawinan.					
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah dan Dasar hukum perkawinan</li> <li>2. Azas-azas hukum perkawinan dan Syarat materiil dan formil perkawinan</li> <li>3. Azas-azas hukum perkawinan dan Syarat materiil dan formil perkawinan</li> <li>4. Pembatalan perkawinan</li> <li>5. Pembatalan perkawinan</li> <li>6. Perjanjian kawin</li> <li>7. Perjanjian kawin</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Akibat perkawinan dan Putusnya perkawinan</li> <li>10. Akibat perkawinan dan Putusnya perkawinan</li> <li>11. Sifat hukum perkawinan</li> <li>12. Sifat hukum perkawinan</li> <li>13. Klasifikasi harta-harta perkawinan</li> <li>14. Harta perkawinan saat terjadi perceraian, kematian, perkawinan kedua, perkawinan campuran</li> <li>15. Harta perkawinan saat terjadi perceraian, kematian, perkawinan kedua, perkawinan campuran</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>					
<b>Pustaka</b>		Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, Airlangga UP, Surabaya, 2006.</li> <li>2. R. Soetojo P &amp; Marthalena Pohan, Hukum orang dan keluarga (Personen en Familie Recht), Airlangga UP, Surabaya, 2000.</li> <li>3. Harry Marpaung, Masalah Perceraian, Tonis, Bandung, 1893.</li> <li>4. J. Satrio, Hukum Harta perkawinan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.</li> <li>5. Padma D. Liman, Pewarisan ahli waris ab-intestato menurut BW, Wineka Media, Malang, 201</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b> Kitab Undang-undang Hukum Perdata</p>					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Hukum keluarga dan harta perkawinan					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: mahasiswa mampu menguraikan mengenai kontrak kuliah	Menafsirkan Kontrak kuliah dan Dasar hukum perkawinan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')];	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Kontrak kuliah dan Dasar hukum perkawinan; Pengertian perkawinan	20 %

	dan dasar hukum perkawinan		D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	.		
2-3	Sub-CPMK-2-3: Mahasiswa mampu menganalisis azas-azas hukum perkawinan dan syarat materil dan formil perkawinan	Menjelaskan Azas-azs hukum perkawinan Menjelaskan syarat materil dan formil pekrawinan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Azas – azas hukum perkawinan;</li> <li>- Unsur – unsur/ pranata hukum perkawinan.</li> <li>- Syarat – syarat perkawinan:</li> <li>- Syarat materil</li> <li>- Syarat formil</li> </ul>	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-4-5: Mahasiswa mampu membedakan pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan	menjelaskan pencegahan dan pembatalan perkawinan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan perkawinan;</li> <li>Pembatalan perkawinan</li> </ul>	15 %
6 - 7	Sub-CPMK-6-7 Mahasiswa mampu menguraikan perjnjian kawin dan menganalisis akibat dari suatu perkawinan dan menganalisis penyebab putusnya perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan perjanjian kawin</li> <li>- Menjelaskan akibat dari perkawinan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian kawin Akibat perkawinan:</li> <li>- Terhadap suami istri</li> <li>- Terhadap keturunan</li> <li>- Terhadap harta benda</li> </ul>	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9 - 10	Sub-CPMK-9-10: Mahasiswa mampu menguraikan dasar hukum perkawinan dan sumbernya dan menguraikan sifat hukum dan membedakannya dengan harta-harta lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menafsirkan tentang dasar hukum perkawinan</li> <li>- Menjelaskan harta-harta perkawinan</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum dan pengertian harta perkawinan</li> <li>- Penggabungan dan bentuk-bentuk harta perkawinan</li> </ul>	10 %

11 - 12	Sub-CPMK-11-12: Mahasiswa mampu mengklasifikasi harta-harta yang merupakan harta perkawinan	Menafsikan tentang klasifikasi harta perkawinan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Pembagian harta perkawinan ketika terjadi perubahan nilai harta perkawinan	10 %
13	Sub-CPMK-13: Mahasiswa mampu menganalisis tindakan yang dilakukan ketika terjadi perubahan nilai harta dan perkawinan	Menjelaskan tentang Perubahan nilai harta dan perkawinan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Pembagian harta perkawinan ketika terjadi perubahan nilai harta perkawinan	10 %
14	Sub-CPMK-14-15 Mahasiswa mampu menganalisis hal yang dilakukan terhadap harta perkawinan ketika terjadi perceraian, kematian, perkawinan kedua, perkawinan campuran	Menjelaskan tentang harta perkawinan ketika ada perceraian, perkawinan kedua dan perkawinan campuran	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Pembagian harta perkawinan: - Dalam perceraian - Dalam kematian - Dalam perkawinan kedua - Dalam perkawinan campuran	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM

Kode Dokumen  
FA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
PERANCANGAN KONTRAK	FA176260	Perdata	T=2 P= 1		Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	<b>CPL1 SIKAP</b>	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religious b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu c. pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. d. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. e. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. f. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. g. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mampu menguasai dan mempraktekan perancangan kontrak secara teoritis dan praktis
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>		
CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan perancangan kontrak	
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>		
Sub-CPMK	a. Mampu membandingkan pengertian kontrak dengan pengertian konsep hukum terkait, yaitu persetujuan, perjanjian, perikatan, kontrak bernama dan kontrak tidak bernama. b. Mampu menganalisis asas-asas hukum kontrak, terutama asas kebebasan berkontrak/asas otonomi paripihak, asas perikatan kontrak/asas pacta sunt servanda, asas itikat baik, asas konsensualisme dan asas personalitas. c. Mampu menganalisis klausula eksonerasi/klausula eksemsi dan klausula memberatkan dalam kontrak konsumen (consumerscontracts) dan kontrak baku serta kaitannya dengan penagaturan terkait dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). d. Mampu membandingkan klausula operatif dalam isi kontrak nasional/kontrak domestik yang sederhana, seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, sewa guna usaha (leasing), dan jasa.	

		<p>e. Mampu menganalisis standar/tolok ukur dalam pembatalan kontrak, yang meliputi tidak terpenuhinya persyaratan subyektif atau obyektif, tidak beritikad baik, adanya penyalahgunaan keadaan (undue influence).</p> <p>f. Mampu membandingkan pengertian dan karakteristik antara kontrak internasional (international contracts) dan traktat/perjanjian internasional publik (treaties).</p> <p>g. Mampu menganalisis para pihak dalam suatu kontrak internasional.</p> <p>h. Mampu menganalisis hukum yang berlaku dalam kontrak internasional.</p> <p>i. Mampu menjelaskan asas hukum kontrak internasional yang umum.</p> <p>j. Mampu menganalisis asas hukum kontrak internasional berdasarkan hukum transnasional (new lex mercatoria), terutama yang diatur Unidroit PICC dan mampu membandingkan pokok pengaturan kontrak dalam PICC dan hukum kontrak nasional Indonesia.</p> <p>k. Terampil dalam merancang kontrak internasional, dengan penekanan pada klausula operatif tertentu dalam kontrak patungan internasional (international joint venture contracts)</p>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini membahas tentang pengertian, sumber hukum kontrak, asas-asas hukum kontrak, jenis-jenis, prinsip-prinsip, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merancang kontrak, struktur dan anatomi kontrak, serta berakhirnya kontrak dan berakhirnya perikatan	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah dan Hakikat perancangan kontrak</li> <li>2. Asas-asas hukum kontrak</li> <li>3. Asas kebebasan berkontrak para pihak dalam teori maupun praktek</li> <li>4. Kontrak konsumen dan kontrak baku</li> <li>5. Klausula-klausula kontrak</li> <li>6. Klausula opertaif</li> <li>7. Pembatalan kontrak</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Kontrak internasional dan traktak</li> <li>10. Para pihak kontrak internasional</li> <li>11. Hukum kontrak internasional</li> <li>12. Asas hukum kontrak internasional umum</li> <li>13. Asas hukum kontrak internasional berdasarkan hukum transnasional</li> <li>14. Langkah dan struktur kontrak internasional</li> <li>15. Perumusan klausula</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semster</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dahlan dan Sanusi Bintang. 2000. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Cet Ke-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.</li> <li>- Mariam Darus Badruzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis, Cet Ke-1, Bandung: Alumni.</li> <li>- _____, 2015, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yursiprudensi, Doktrin, Serta Penjelasannya, Cet. Ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.</li> <li>- Muhammad Syarifuddin. 2012. Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung: Mandar Maju.</li> <li>- Sanusi Bintang. 2017. Perancangan Kontrak Internasional, Cet Ke-1, Banda Aceh: Gamna Publishing.</li> <li>- Satrio J., 1992. Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Cet. Ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.</li> <li>- Subekti, R. 1995. Aneka Perjanjian. Cet. Ke-10. Bandung: Citra Aditya Bakti.</li> <li>- _____, 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Penerbit PT Intermasa.</li> <li>- Yohannes Sogar Simamora, 2009, Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Laksbang Pressindo</li> </ul>	
	<b>Pendukung :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> </ul>	



<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Perancangan Kontrak					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami kontrak kuliah dan mengembangkan membandingkan antara pengertian kontrak dan pengertian persetujuan, perjanjian, perikatan, kontrak bernama dan kontrak tidak bernama. [S1, KU1]	Kejelasan kontrak kuliah dan , pemahaman dan penghayatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak kuliah dan Pengertian Perikatan, Persetujuan, Perjanjian, dan Kontrak Klasifikasi Kontrak ke dalam Kontrak Bernama dan Kontrak Tidak Bernama	20 %
2-3	Sub-CPMK-2-3: Memahami secara teoretis asas-asas hukum kontraksial sengketa. asas kebebasan berkontrak/asas otonomi para pihak baik dalam teori maupun dalam praktik [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang strategi penyelesaian	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1) x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK 1. Asas Kebebasan Berkontrak/Asas Otonomi Para Pihak 2. Asas Perikatan Kontrak/Asas Pacta Sunt Servanda 3. Asas Itikad Baik 4. Asas Konsensualisme 5. Asas Personalitas ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 1. Teori 2. Praktik	15 %



						3. Asas Kebebasan Berkontrak yang Bertanggung Jawab	
4 - 5	<p>b-CPMK-4-5: Mampu memahami mengenai pengaturan kontrak konsumen dan kontrak baku serta realitasnya am praktik. menganalisis klausula eksonerasi/klausula eksemisi dan klausula memberatkan dalam kontrak konsumen dan kontrak baku [S9, PP4]</p>	Kejelasan dan pemahaman tentang arbitrase	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+BM: (1+1)x (2x60'')]</p>	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	<p>KONTRAK KONSUMEN DAN KONTRAK BAKU 1. Kontrak Konsumen 2. Kontrak Bakuse KLAUSULA EKSONERASI/KLAUSULA EKSEMSI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM KONTRAK KONSUMEN DAN KONTRAK BAKU 1. Pengertian dan Pengaturan Klausula Eksonerasi/Klausula Eksemisi 2. Pengertian dan Pengaturan Klausula Memberatkan</p>	15 %
6 - 7	<p>b-CPMK-6-7 Mampu memahami membandingkan klausula operatif dalam beberapa kontrak nasional/kontrak domestik yang sederhana. menganalisis standar/tolok ukur pembatalan kontrak [S9, KU1, PP4]</p>	Kejelasan dan pemahaman tentang badan arbitrase dan pembatalannya	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+BM: (1+1)x (2x60'')]</p>	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	<p>PERBANDINGAN KLAUSULA OPERATIF KONTRAK 1. Jual Beli 2. Sewa Menyewa 3. Sewa Guna Usaha (Leasing) 4. Jasa PEMBATALAN KONTRAK 1. Tidak Terpenuhi Persyaratan Subyektif dan Obyektif 2. Tidak Beritikad</p>	10 %

						Baik 3. Ada Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence)	
<b>8</b>	Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-9-10: Mampu memahami tentang karakteristik antara kontrak internasional dan Traktat. para pihak dalam kontrak internasional [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman mengenai jenis-jenis arbitrase modern di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1) x(2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK KONTRAK INTERNASIONAL 1. Pengertian a. Berdasarkan Unsur Asing (Nasionalitas dan teritorialitas) b. Berdasarkan Subyek/Para Pihak dalam Kontrak c. Berdasarkan Risiko 2. Perbedaan dengan Traktat 3. Karakteristik PARA PIHAK DALAM KONTRAK INTERNASIONAL 1. Swasta dan Swasta 2. Swasta dan Negara/Daerah 3. Negara/Daerah dan Negara/Daerah secara Terbatas	10 %
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-11-12: Memahami tentang hukum yang berlaku dalam kontrak internasional. menganalisis asas hukum kontrak internasional yang umum [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang keuntungan dan kelemahan penyelesaian sengketa modern dan online.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1) x(2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	HUKUM YANG BERLAKU DALAM KONTRAK INTERNASIONAL 1. Ketika Ada Pilihan Hukum (Choice of Law, Governing Law) 2. Ketika Tidak Ada	10 %


					Pilihan Hukum ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK INTERNASION AL (UMUM) 1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Ciontracts/Party Autonomy) dan Asas Turunannya a. Asas Pilihan Hukum b. Asas Pilihan Forum (Choice of Forum) c. Asas Pilihan Pengadilan (Choice of Court) d. Asas Pilihan Arbitrase (Choice of Arbitration) 2. Asas Perikatan Kontrak (The Principle of Pacta Sunt Servanda) 3. Asas yang Merangah pada Keseimbangan a. Asas Itikad Baik (The Principle of Good Faith and Fair Dealing) b. Asas Kewajaran dan Kepatutan (The Principle of Reasonableness and Fairness) c. Asas Sesuai Hati Nurani (The Principle of Unconsienability) d. Asas Proportionalitas (The Principle of Proportinality) . e.Asas Keseimbangan (The Principle of	
--	--	--	--	--	--	--

						Equilibrium)	
<b>13-14</b>	Sub-CPMK-13-14: mampu menjelaskan asas hukum kontrak internasional berdasarkan hukum transnasional (new lex mercatoria), terutama Unidroit PICC. menganalisis langkah dalam perancangan kontrak internasional dan struktur kontrak internasional [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan Putusan modern dan arbitrase online	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1) x(2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	AS HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL ( UNIDROIT PICC) Pengertian Hukum Transnasional (New lex Mercatoria) Sejarah Hukum Transnasional Unidroit PICC Asas Hukum Kontrak Internasional Unidroit PICC Perbandingan Asas Hukum Internasional Unidroit PICC dan Hukum Kontrak Internasional Indonesia ENGENALAN PERANCANGAN KONTRAK INTERNASIONAL Langkah dalam perancangan kontrak Internasional cara Umum Struktur Kontrak Internasional Secara Umum	10 %
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mampu terampil dalam merumuskan klausula pada bagian operatif Kontrak internasional tertentu, terutama kontrak patungan internasional (international joint venture contracts)	Kejelasan dan pemahaman tentang putusan arbitrase asing di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+BM:(1+1) x(2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	KLAUSULA OPERATIF KONTRAK INTERNASIONAL TERTENTU: KONTRAK USAHA PATUNGAN INTERNASIONAL 1. Contoh Klausula Baku Tertentu 2. Latihan Perancangan Klausula Kontrak Internasional	10%

						Tertentu	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>	
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>						
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>	
<b>Hukum Perbankan</b>		Perdata	<b>T=2 P= 1</b>	IV	Juli 2021	
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>		
				<b>Kanthi Rahayu, SH., MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etik dalam menjalankan tugas;</li> <li>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>				
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>				
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
	CPMK	Mampu mempelajari lembaga perbankan sebagai bagian dalam sistem keuangan dengan pendekatan utama pada aspek hukum				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>						
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>e. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Lembaga Keuangan</li> <li>f. Mahasiswa mampu memahami dan membedakan lembaga keuangan bank dan non bank</li> <li>g. Mahasiswa mampu memahami aspek – aspek yuridis perbankan dan LKNB</li> <li>h. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang berbagai perkembangan dan permasalahan hukum perbankan dan LKNB di Indonesia.</li> </ol>					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	kripsi Mata Kuliah Mata kuliahi ini mempelajari lembaga perbankan sebagai bagian dalam sistem keuangan dengan pendekatan utama pada aspek hukum berkaitan dengan sejarah perbankan Indonesia, jenis dan usaha bank, penanganan bank bermasalah, dan hubungan dengan berbagai bidang hukum lain. disamping pendekatan hukum, pendekatan ekonomi diberikan agar mahasiswa dapat memahami karakter berbagai hukum positif yang terkait dengan perbankan sebagai bagian dari bidang ekonomi moneter.					
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Keuangan</li> <li>2. Perbankan</li> <li>3. Bank Sebagai Industri Perbankan</li> <li>4. Perlindungan Hukum Nasabah</li> <li>5. Koperasi Simpan Pinjam</li> <li>6. Asuransi</li> </ol>					

	7. Pasar Modal, 8. PasarUang 9. ValutaAsing (Valas) 10. PegadaaiandanFiducia 11. SewaGuna Usaha (leasing), 12. PembayaranKonsumen (consumers finance) danAnjakPiutang (Factoring) 13. Modal Ventura (venture capital) 14. Usaha KartuKredit (credit card)Dana Pensiun						
<b>Pustaka</b>	<b>DaftarReferensi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abdul Kadir Muhammad danRildaMurniati, 2000, SegiHukumLembagaKeuangandanPembiayaan, Citra AdityaBakti, Bandung</li> <li>- Hartono, 2002, Bank danLembagaKeuangan Lain, Ekonisia, Yogyakarta Hudiyanto, 2001, SistemKoperasi : IdeologidanPengelolaan, UII Press, Yogyakarta</li> <li>- Johannes Ibrahim, 2004, Bank SebagaiLembagaIntermediasiDalamHukumPositif, CV Utomo, Bandung.</li> <li>- Kasmir, 2005, Bank danLembagaKeuanganLainnya, Raja GrafindoPersada, Jakarta Malayu</li> <li>- S.P. Hasibuan, 2005, Dasar – DasarPerbankan, BumiAksara, Jakarta</li> <li>- MuchdarsyahSinungan, 1990, Manajemen Dana Bank, RinekaCipta, Jakarta</li> <li>- Muhammad Djumhana, 2003, HukumPerbankan di Indonesia, Citra AdityaBakti, Bandung MunirFuady, 1999, HukumPerbankan Modern, Citra AdityaBakti, Bandung</li> <li>- RachmadiUsman, 2002, Aspek-AspekHukumPerbankan Islam di Indonesia, Citra AdityaBakti, Bandung</li> <li>- Suyatno Thomas, 1993, KelembagaanPerbankan, GramediaPustakaUtama, Jakarta</li> <li>- TotokBudisantosodanSigitTriandaru, 2006, Bank danLembagaKeuanganlain; EdisiKedua, SalembaEmpat, Jakarta,</li> <li>- Widjanarto, 1993, Hukum&amp;KetentuanPerbankan di Indonesia, PustakaUtamaGrafiti, Jakarta</li> <li>- A. Hasymi Ali, 2006, PengantarAsuransi, BumiAksara, Jakarta</li> </ul>						
	<b>Pendukung :</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPER)</li> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> <li>- UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung</li> <li>- UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman</li> </ul>						
	<b>DosenPengampu</b>						
<b>Matakuliah syarat</b>	HukumPerdata						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	BobotPenilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Pertemuanawal dilakukankontrakbelajaruntuk menyepakati point-point	kontrakbelajar untuk menyepakati point-point yang harusditaatiselamaperkuliah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x	<b>eLearn ing dan platform media lainnya.</b>	kontrakbelajaruntuk menyepakati point-point yang harusditaatiselamaperkuliah	10 %

	yang harus ditaati selama perkuliahan. [S9, KU1, KU2]	han	D = 41-55 E = 0 – 40	60”)]			
2-3	Sub-CPMK-2: Memahami mengenai Lembaga Keuangan [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman a. tentang Tinjauan Umum Lembaga Keuangan b. Peran Lembaga Keuangan c. Klasifikasi Lembaga Keuangan d. Bentuk Hukum Lembaga Keuangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Perkembangan Lembaga Keuangan	15 %
4-5	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai Perbankan [S9, PP4]	Kejelasan dan pemahaman a. tentang Pengertian Hukum Perbankan b. Sejarah dan Kondisi Perbankan di Indonesia c. Sumber Hukum Perbankan di Indonesia d. Jenis – Jenis Bank e. Bank Sentral	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian mengenai Perbankan	15 %
6-7	Sub-CPMK-4 Mampu memahami tentang Bank Sebagai Industri Perbankan [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman a. tentang Aspek Yuridis Pendirian Bank b. Produk dan Layanan Jasa Bank c. Kredit/ Pembiayaan d. Prinsip Perbankan di	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Substansi Bank Sebagai Industri Perbankan	10 %



		Indonesia 1) Prinsip Mengenai Nasabah 2) Prinsip Prudential Banking 3) Prinsip Risiko Bank dan Sanksi Administratif e. Penilaian Kesehatan Bank f. Pembinaan dan Pengawasan Bank g. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank					
<b>8</b>	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-5: mampu memahami; Perlindungan Hukum Nasabah [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman a. mengenai Pengertian dan Prinsip Perlindungan hukum nasabah b. Mekanisme Perlindungan hukum nasabah c. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearn</b> <b>ngdan</b> <b>platfor</b> <b>m</b> <b>media</b> <b>lainnya.</b>	Penjelasan tentang pemahaman; Perlindungan Hukum Nasabah	10 %
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6: Memahami tentang Koperasi Simpan Pinjam [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman a. tentang Pengertian, Dasar hukum dan Prinsip Koperasi b. Prosedur Pe	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 -	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearn</b> <b>ngdan</b> <b>platfor</b> <b>m</b> <b>media</b> <b>lainnya.</b>	Pengertian Koperasi Simpan Pinjam	10 %

		ndirianKop erasi c. Produkdan Layanan KSP d. Pembinaan danPenga wasan	40				
13	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan Asuransi. [S9, KU9, KK1]	a. Kejelasan dan pemahama n tentang Pengertian danJenis – JenisAsura nsi b. Keuntunga ndanPrinsi p – PrinsipAsu ransi c. Jenis – JenisRisik o	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearni ngdan platfor m media lainnya.</b>  -	DefinisiAsuransi	10 %
14	Sub-CPMK-7 Mampumenget ahuidanmemah amiUsaha KartuKredit (credit card)	a. Kejelasand anpemaha manPenger tian. b. SistemKerj aKartuKre dit c. Jenis – jenisKartu Kredit d. Keuntunga ndanKerug ianKartuKr edit	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya.</b>	Usaha KartuKredit	10%
15	Sub-CPMK-7 memahamitenta ng. Dana Pensiun	Kejelasan dan pemahaman a. tenta ngPengerti andanLatar Belakang b. Jenis – Jenis Dana Pensiun c. Siste mPembaya ranPensiun d. Azas – Azas Dana Pensiun	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearni ng dan platfor m media lainnya.</b>	Dana Pensiun	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha		Perdata	T=2 P= 1	IV	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu, SH., MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu mempelajari aspek positif dan negative monopoli, Pendekatan-pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha,			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	a. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Lembaga Keuangan b. Mahasiswa mampu memahami dan membedakan lembaga keuangan bank dan non bank c. Mahasiswa mampu memahami aspek – aspek yuridis perbankan dan LKNB d. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang berbagai perkembangan dan permasalahan hukum perbankan dan LKNB di Indonesia.				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas mengenai aspek positif dan negative monopoli, Pendekatan-pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha, Gambar singkat Hukum Persaingan Usaha di beberapa negara, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha serta perbandingan beberapa kasus persaingan usaha yang ada di beberapa negara.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. aspek positif dan aspek negative monopoli dalam persaingan usaha 2. pendekatan -pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha 3. hukum persaingan usaha di beberapa negara. 4. macam -macam persaingan usaha 5. kegiatan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha 6. penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha 7. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mampu membedakannya dengan organisasi persaingan usaha di beberapa negara				

	9. tata cara penanganannya perkaradiperbandingannya di beberapa negara 10. pengecualiadalam persaingan usahadiperbandingannya beberapa negara sertakaitan persaingan usahadiperlindungan konsumen dan HKI	di
--	---	----

<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung</li> <li>- Hartono, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisia, Yogyakarta Hudiyanto, 2001, Sistem Koperasi : Ideologi dan Pengelolaan, UII Press, Yogyakarta</li> <li>- Johannes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, CV Utomo, Bandung.</li> <li>- Kasmir, 2005, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta Malayu</li> <li>- S.P. Hasibuan, 2005, Dasar – Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta</li> <li>- Muchdarsyah Sinungan, 1990, Manajemen Dana Bank, Rineka Cipta, Jakarta</li> <li>- Muhammad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung</li> <li>- Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung</li> <li>- Rachmadi Usman, 2002, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung</li> <li>- Suyatno Thomas, 1993, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta</li> <li>- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan lain; Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta,</li> <li>- Widjanarto, 1993, Hukum &amp; Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta</li> <li>- A. Hasymi Ali, 2006, Pengantar Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta</li> </ul>
	<b>Pendukung :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPER)</li> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> <li>- UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung</li> <li>- UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman</li> </ul>

<b>Dosen Pengampu</b>	
-----------------------	--

<b>Matakuliah</b>	Hukum Perdata
-------------------	---------------

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Pertemuan awal Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menandatangani kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan sejarah/gambaran umum hukum	Kontrak Perkuliahan - Sejarah/gambaran umum Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	menandatangani kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan sejarah/gambaran umum hukum Anti Monopoli dan persaingan usaha..	10 %

	ukum Anti Monopoli dan persaingan usaha. [S9, KU1, KU2]						
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menjelaskan aspek positif dan aspek negatif dalam persaingan usaha. [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman Aspek positif dan negatif monopoli	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Aspek positif dan negatif monopoli	15 %
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan pendekatan - pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha [S9, PP4]	Pendekatan - pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	menguraikan pendekatan - pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha	15 %
4	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu membedakan hukum persaingan usaha di beberapa negara. [S9, KU1, KU2, PP4]	Gambar singkat Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha di beberapa negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum Anti Monopoli dan persaingan usaha di beberapa negara.	15 %
5	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menguraikan macam - macam persaingan usaha [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman Oligopoli, penetapan harga dan pembagian wilayah (disertai kasus - kasus)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Oligopoli, penetapan harga dan pembagian wilayah (disertai kasus - kasus)	15 %
6	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menguraikan macam - macam persaingan usaha [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman Pemboikotan, kartel dan trust (disertai kasus - kasus)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pemboikotan, kartel dan trust (disertai kasus - kasus)	15 %

7	b-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan macam - macam persaingan usaha [S9, PP4]	Kejelasan dan pemahaman Oligopsoni, integrasi vertikal dan perjanjian tertutup (disertai kasus - kasus)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearn ngdan platfor m media lainnya.	Oligopsoni, integrasi vertikal dan perjanjian tertutup (disertai kasus - kasus)	10 %
<b>8</b> Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menjabarkan kegiatan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha [S9, KU1, PP4]	e. Monopoli f. monopsoni (disertai kasus-kasus)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearn ngdan platfor m media lainnya.	Penjelasan tentang Monopoli monopsoni (disertai kasus-kasus)	10 %
10	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menjabarkan kegiatan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha [S9, KU1, PP4]	Penguasaan pasar dan persekongkolan (disertai kasus-kasus)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearn ngdan platfor m media lainnya.	Penjelasan tentang Penguasaan pasar dan persekongkolan (disertai kasus-kasus)	10 %
11	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menjabarkan penyalahgunaan posisi dominan dalam hukuipersaingan usaha [S9, KU1, PP4]	Penyalahgunaan posisi dominan (disertai kasus-kasus)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearn ngdan platfor m media lainnya.	Penjelasan tentang Penyalahgunaan posisi dominan (disertai kasus-kasus)	10 %
12	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu menjabarkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan [S9, KU1, PP4]	e. Penggabungan, f. peleburan g. pengambilalihan (disertai kasus-kasus)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearn ngdan platfor m media lainnya.	Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (disertai kasus-kasus)	10 %
13	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mampu menjabarkan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Organisasi KPPU dan Perbandingannya dengan Organisasi Persaingan Usaha	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM	eLearn ngdan platfor m media	Penjelasan tentang Organisasi KPPU dan Perbandingannya dengan Organisasi Persaingan Usaha di	10 %

	ainingan usaha dan kemampuan membedakannya diorganisasikan di perusahaan. [S9, KU9, KK1]	ersaingan Usaha di Beberapa Negara	70 D = 41-55 E = 0 – 40	:(1+1)x(2x60”)]	<b>lainnya.</b>  -	Beberapa Negara	
<b>14</b>	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan cara penanganan perbandingan di beberapa negara.	Tata Cara Penanganan Perbandingan di beberapa negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Penjelasan Tata Cara Penanganan Perbandingan di beberapa negara	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan pengecualian dalam persaingan usaha dan perbandingannya di beberapa negara serta kaitan persaingan usaha dan perlindungan konsumen HKI	e. Pengecualian dalam Persaingan Usaha dan Perbandingannya di Beberapa Negara f. kaitan Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen HKI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengecualian dalam Persaingan Usaha dan Perbandingannya di Beberapa Negara - Kaitan Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen HKI	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Judicial Review		Perdata	T=2 P= 1	IV	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu, SH., MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasilais dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara penyelesaian sengketa lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilu, dan kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment terhadap presiden dan/atau wakil presiden.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	1. Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan dan eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. 2. Mahasiswa mampu menganalisa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan dan proses beracara di Mahkamah Konstitusi dengan benar. 4. Mahasiswa mampu mempraktekan proses beracara di Mahkamah Konstitusi dengan benar..				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini merupakan 'contentious procesrecht' – proses dan tata cara peradilan konstitusi serta mampu merespon perkembangan peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Konstruksi mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi ini disusun sebagai upaya peningkatan kognisi kajian peradilan konstitusi sekaligus sebagai praktek latihan beracara dalam persidangan Mahkamah Konstitusi				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. 2. Gagasan Judicial Review dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi 3. Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 4. Aspek-Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 5. Penafsiran Konstitusi 6. Hukum Acara PUU (Pengujian Undang-Undang) terhadap UUD				

	7. Hukum Acara Penyelesaian sengketa lembaga Negara 8. Hukum Acara Pembubaran Partai Politik 9. Hukum Acara Penyelesaian sengketa hasil pemilu 10. Hukum Acara Perkara Impeachment 11. Sekilas Perbandingan Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara						
<b>Pustaka</b>							
	Daftar Referensi: - Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. - Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). - Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). - Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di berbagai negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). - Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di 10 Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). - Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi; Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif, (hasil Penelitian, 2010).						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Perdata						
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]</b>		<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>
		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>		
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
<b>1</b>	Sub-CPMK-1: Pertemuan awal Pembukaan matakuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu mendapatkan pemahaman tentang judicial review[S9, KU1, KU2]	Kontrak Perkuliahan - pemahaman tentang judicial review	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan pemahaman tentang judicial review	10 %
<b>2</b>	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100 B = 71-	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x	<b>eLearning dan platform</b>	Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan Mahkamah	15 %

	memahamiMahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. [S9, KU1, KU2, PP4]	a. Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. b. Susunan Hakim Konstitusi	85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	50”); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>m media lainnya.</b>	Konstitusi dan Susunan Hakim Konstitusi	
3	b-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan Gagasan Judicial Review dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi[S9, PP4]	Gagasan Judicial Review dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	menguraikan Gagasan Judicial Review dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi	15 %
4	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu memahamiKarakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.. [S9, KU1, KU2, PP4]	a. Istilah dan pengertian Hukum acara dalam persidangan Mahkamah Konstitusi b. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi c. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi d. Kekhususan (Distingsi) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	a. Istilah dan pengertian Hukum acara dalam persidangan Mahkamah Konstitusi b. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi c. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi d. Kekhususan (Distingsi) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	15 %
5	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menguraikan Aspek-Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.[S9, KU1, KU2,	a. Permohonan Perkara Konstitusi b. Penggabungan Perkara Konstitusi c. Beban pembuktian dan alat	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Aspek-Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.	15 %

	PP4]	<p>bukti</p> <p>d. Jenis dan sifat persidangan</p> <p>e. Putusan</p> <p>f. Tata cara dan Tertib persidangan Mahkamah Konstitusi</p>					
6	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menguraikan Penafsiran Konstitusi. [S9, KU1, KU2, PP4]	<p>a. Penafsiran sebagai metode penemuan hukum</p> <p>b. Macam-macam penafsiran hukum dan konstitusi</p> <p>c. Kebebasan Hakim dalam Penafsiran Konstitusi</p>	<p>A = 86-100</p> <p>B = 71-85</p> <p>C = 56-70</p> <p>D = 41-55</p> <p>E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah;</p> <p>b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)];</p> <p>c. [PT+BM: (1+1)x(2x6 0”)]</p>	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	<p>a. Penafsiran sebagai metode penemuan hukum</p> <p>b. Macam-macam penafsiran hukum dan konstitusi</p> <p>c. Kebebasan Hakim dalam Penafsiran Konstitusi</p>	15 %
7	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Acara PUU (Pengujian Undang-Undang) terhadap UUD[S9, PP4]	<p>a. Pengujian formil dan materiil</p> <p>b. Kedudukan hukum pemohon (Legal standing)</p> <p>c. Posisi pembentuk undang-undang dalam persidangan</p> <p>d. Keterangan tambahan (ad informandum judicem)</p> <p>e. Proses persidangan</p>	<p>A = 86-100</p> <p>B = 71-85</p> <p>C = 56-70</p> <p>D = 41-55</p> <p>E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah;</p> <p>b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)];</p> <p>c. [PT+BM: (1+1)x(2x6 0”)]</p>	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum Acara PUU (Pengujian Undang-Undang) terhadap UUD	10 %

		an dan pembuktian f. Putusan					
<b>8</b>	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
<b>9</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menjabarkan Hukum Acara Penyelesaian sengketa lembaga negara[S9, KU1, PP4]	g. Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia h. Prosedur dan tata cara hukum acara penyelesaian sengketa lembaga negara i. Pihak yang bersengketa j. Permohonan dan tata cara pengejukan perkara sengketa lembaga negara k. Putusan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum Acara Penyelesaian sengketa lembaga negara	10 %
<b>10</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menjabarkan Hukum Acara Pembubaran Partai Politik[S9, KU1, PP4]	a. Konsep pembubaran b. Kewenangan pembubaran partai politik di Indonesia c. Pemohonan dan permohonan d. Alasan-alasan pembubaran partai politik e. Proses persidangan dan pembuktian	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Penjelasan tentang Hukum Acara Pembubaran Partai Politik	10 %

		f. Putusan dan akibat hukum putusan					
11	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menjabarkan Hukum Acara Penyelesaian sengketa hasil pemilu[S9, KU1, PP4]	a. Perselisihan hasil pemilu b. Penyelesaian PHPU sebagai sengketa Konstitusionalitas Pemilu c. Macam-macam perselisihan hasil pemilu d. Hukum acara PHPU	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Penjelasan tentang Hukum Acara Penyelesaian sengketa hasil pemilu	10 %
12	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu menjabarkan Hukum Acara Perkara Impeachment[S9, KU1, PP4]	h. Impeachment sebelum dan pasca Amandemen UUD 1945 i. Para pihak j. Alasan permohonan k. Proses Persidangan dan putusan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum Acara Perkara Impeachment	10 %
13	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mampu menjabarkan Sekilas Perbandingan Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara[S9, KU9, KK1]	Perbandingan Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	Sekilas Perbandingan Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara	10 %
14	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis	a. Pengembangan secara teoretis dan praktis	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	mengembangkan secara teoretis dan praktis penerapan teori interpretasi konstitusional MKRI	10%

	dan praktis penerapan teori interpretasi konstitusional MKRI pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan menerapkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan	penerapan teori interpretasi konstitusional MKRI pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara b. penerapannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan	D = 41-55 E = 0 – 40	60”)]		pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan menerapkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan	
15	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis dan praktis teori dan hukum legislasi dan menerapkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan	Kejelasan, pemahaman dan ketepatan analisis	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	mengembangkan secara teoretis dan praktis teori dan hukum legislasi dan menerapkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Keuangan Negara		HTN	T=2 P= 1	IV	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu, SH., MH</b>	

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>	
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>	
	CPMK	Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai secara filosofis dan konsep normatif tentang hukum keuangan negara dan daerah serta mampu mengambil keputusan dalam menerapkan kasus hukum keuangan negara dan daerah dalam bernegara dan berbangsa.
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>	
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan Mahasiswamampu memahami pengertian, kedudukan, dan fungsi hukum keuangan Negara dan daerah.</li> <li>Mahasiswa mampu mengetahui sumber dan ruang lingkup keuangan negara dan daerah</li> <li>Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang badan penerimaan negara.</li> <li>Mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah.</li> </ol>	
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari konsep normatif tentang hukum keuangan negara dan daerah serta hubungannya dengan pengelolaannya yang berujung pada pengembalian kerugian keuangan negara.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>pengertian, kedudukan, dan fungsi hukum keuangan Negara dan daerah</li> <li>sumber dan ruang lingkup keuangan negara dan daerah</li> <li>kekayaan negara yang dipisahkan.</li> <li>badan penerimaan negara. pengelolaan keuangan negara dan daerah.</li> <li>pengawasan keuangan negara dan daerah, baik secara fungsional, internal, dan eksternal.</li> <li>pemeriksaan keuangan negara dan daerah</li> <li>pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah</li> <li>kerugian keuangan negara dan daerah</li> <li>pengembalian kerugian keuangan negara.</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>		



		<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abdul Halim dan Theresia Darmayanti, 2007; Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta</li> <li>- Ahmad Fikri Hadin, 2013; Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta;</li> <li>- Arifin, P. Soeria Atmadja, 2009; Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta;</li> <li>- Chabib Solehdan Heru Rochmansjah, 2010; Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Cetakan Edisi Kedua, Fokus media, Bandung;</li> <li>- Hernold Ferry Makawimbang, 2015 Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang, Thafa Media, Yogyakarta;</li> <li>- Muhammad Djafar Saidi &amp; Eka Merdekawati Djafar, 2017; Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik, Rajawali Pers, Edisi Ketiga, Cetakan Kelima, Jakarta;</li> <li>- Theodorus M. Tuanakotta, 2009; Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, Jakarta.</li> </ul>					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Hukum Tata Negara					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Pertemuan awal Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu mendapatkan pemahaman Keuangan Negara [S9, KU1, KU2]	Kontrak Perkuliahan - pemahaman tentang Keuangan Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan pemahaman tentang Keuangan Negara	10 %
2	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu memahami pengertian, kedudukan, dan fungsi hukum keuangan Negara dan daerah. [S9, KU1, KU2,	Kejelasan dan pemahaman c. Pengertian hukum keuangan negara dan daerah ; d. Kedudukan hukum keu	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	pengertian, kedudukan, dan fungsi hukum keuangan Negara dan daerah.	15 %

	PP4]	anganegara adandaerah ; e. Fungsi umkeuanga nnegara ndaerah;					
3	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu mengetahui sum- ber dan ruang lin- gkup keuangan negara dan daerah [S9, PP4]	a. Pengertian keuangan negara dan daerah; b. Ruang lin- gkup keua- ngan nega- ra dan daer- ah c. Sumber keuangan negara dan daerah;	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sumber dan ruang lin- gkup keuangan negara dan daerah	15 %
4	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi kekayaan negara yang dipisahkan. [S9, KU1, KU2, PP4]	e. Kekayaan negara yang dipisahkan; f. Dasar hukum terhadap kekayaan negara yang di- pisahakan.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	meng- identifikasi kekayaan negara yang dipisahkan.	15 %
5	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang badan penerimaan negara. [S9, KU1, KU2, PP4]	g. Dasar hukum keberada- an badan pe- nerimaan negara; h. Kedudukan badan pener- imaan nega- ra; i. Kewenang- an badan pe- nerimaan negara.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Mengidentifikasi tentang badan penerimaan negara	15 %
6-7	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. [S9, KU1, KU2, PP4]	d. Pengelola- an keuangan negara dan daerah; e. Pengelola- an keuangan negara dan daerah serta kewajiban- nya.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	pengelolaan keuangan negara dan daerah	15 %

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu mengidentifikasi penguasaan keuangan negara dan daerah, baik secara fungsional, internal, dan eksternal. [S9, KU1, PP4]	l. Lembaga pengawas keuangan negara dan daerah m. Jenis penguasaan; a. Fungsional; b. Internal, dan c. Eksternal. n. Konsekuensi hukum dari penguasaan keuangan negara dan daerah.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	pengawasan keuangan negara dan daerah, baik secara fungsional, internal, dan eksternal.	10 %
10	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu mengidentifikasi pemeriksaan keuangan negara dan daerah [S9, KU1, PP4]	g. Lembaga pemeriksaan keuangan negara dan daerah; h. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara dan daerah i. Wewenang pemeriksaan keuangan negara dan daerah j. Konsekuensi pemeriksaan keuangan negara dan daerah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	mengidentifikasi pemeriksaan keuangan negara dan daerah	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu memahami pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah [S9, KU1, PP4]	e. Pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah; f. Jenis pertanggungjawaban	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 –	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah	10 %

		uanganne garadand aerah.	40				
12 - 13	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mam p mengidentifikasi kasimengenaik erugiankeuang an negaradanda erah [S9, KU1, PP4]	l. Pengertian kerugianke uang-an negaradand aerah m. Timb ulnyakerug iankeuang an negaradand aerah;	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM :(1+1)x(2x 60")]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	Mengidentifikasi mengetahui kerugiankeuang an negaradanda erah	10 %
14	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mam p mengidentifikasi kasimengenaik erugiankeuang an negaradanda erah [S9, KU9, KK1]	a. Kewenang an menetapkan kerugianke uang negarad andaerah; b. Kerugianke uanganne garaunsurti tidak pidana Korupsi	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM :(1+1)x(2x 60")]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>  -	Mengidentifikasi mengetahui kerugiankeuang an negaradanda erah	10 %
15	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mam p meng- identifikasi tent ang pengembalia n kerugiankeua ngannegara.	a. Pengertia n pengemb aliankeru giankeua ngannega radandaer ah; b. Pengemb aliankeru giankeua ngannega radandaer ah di luarperad ilan. c. Pengemb aliankeru giankeua ngannega radandaer ah melalui proses peradilan	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM :(1+1)x(2x 60")]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	meng- identifikasi tent ang pengembalia n kerugiankeua ngannegara.	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTASHUKUM  
PRODIILMU HUKUM**

**KodeDoku  
men  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TglPenyusunan
Sistem Peradilan Pidana		Pidana	T=2 P= 1		Juli2021
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua PRODI		
			Kanthi Rahayu,SH.,MH		
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religious b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu c. Pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. d. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. e. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. f. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. g. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu membedakan nilai-nilai yang melandasi pada setiap model sistem peradilan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan tujuan dan manfaat sistem peradilan pidana, substansi hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana, mahasiswa pidana, Mahasiswa mampu berargumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP. 3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum pidana khusus. 4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. 5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. 6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab. 7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.				
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang ketentuannya diatur diluar KUHP, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pidana-pidana khusus tersebut memiliki beberapa kaidah hukum formil yang berbeda dari tindak pidana				

	umum.						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Dasar-dasar hukum pidana khusus: definisi dan ruang lingkup.</li> <li>3. Alat bukti yang khas digunakan dalam hukum pidana khusus.</li> <li>4. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: perkembangan peraturan di Indonesia.</li> <li>5. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: pembuktian terbalik yang terbatas.</li> <li>6. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus-kasus korupsi.</li> <li>7. Pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang: sistem pembuktian menurut UU 8/2010.</li> </ol> <p><b>8. Ujian Tengah Semester</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup.</li> <li>10. Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup (Lanjutan).</li> <li>11. Pembahasan mengenai tindak pidana ITE: alat bukti khas yang hanya diatur dalam UU 11/2008.</li> <li>12. Pembahasan mengenai tindak pidana narkoba: definisi dan ketentuan khusus.</li> <li>13. Pembahasan mengenai tindak pidana psikotropika: definisi dan ketentuan khusus.</li> <li>14. Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus.</li> <li>15. Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus (Lanjutan)</li> </ol> <p><b>16. Ujian Akhir Semester</b></p>						
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <p>Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, <i>Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen &amp; Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)</i>, Bandung, Widya Padjadjaran.</p> <p>H. Edi Setiadi, 2017, <i>Sistem Peadilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</i>, Prenadamedia Grup, Jakarta</p> <p>Kadri Husin, Budi Rizki Husin, 2016 <i>Sistem Peradilan Pidana di Indonesia</i>, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Marlina, 2009, <i>Peradilan Pidana Anak di Indonesia</i>, Refika Aditama, Bandung.</p> <p>Romli Atmasasmita, 2010, <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana</i> Prenadamedia, Jakarta</p> <p>R.Wiyono, 2016, <i>Sistem Peradilan Piddana Anak</i>, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan</p> <p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kejaksaan</p> <p>Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat</p> <p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan</p> <p>Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</p>						
	<p><b>Pendukung :</b></p> <p>Abdul Hakim. 1986. KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan.</p> <p>Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung.</p>						
<b>DosenPengampu</b>							
<b>Matakuliahsyarat</b>	Hukum Pidana, Hukum Pidana Lanjut						
MingguK e-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria& Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus dan posisi	a.Ketepatan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus;	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50""); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60"")]	eLearning dan platform media lainnya.		20 %

	hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. [S9, KU1, KU2]	b. Ketepatan menjelaskan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum.					
2	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. [S9, KU1, KU2, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Perkembangan peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia; tindak pidana korupsi; pembuktian terbalik yang terbatas.	15 %
3	Sub-CPMK-3: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	a. Sistem pembuktian menurut UU No.8 Tahun 2010 b. Alat bukti menurut UU No. 8 Tahun 2010	15 %
4	mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisi tindak pidana ekonomi; ruang lingkup tindak pidana ekonomi; badan hukum sebagai pelaku tindak pidana ekonomi; serta pidana yang dapat dikenakan.	10 %
5	Mahasiswa mampu menguraikan substansi hukum dalam Proses Peradilan Pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Sistem Inquisitoir dan Accusatoir Adversary System dan Non Adversary System Bail system (System Jaminan/System Uang tebusan) Plea Bargening	
6	Mahasiswa mampu Menguraikan substansi hukum dalam Proses Peradilan Pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Hukum Acara Pidana : mengatur Bagaimana proses peradilan dilakukan Hukum Pidana materil : hukum menentukan siapa dan perbuatan apa serta hukuman yg ditetapkan(diuji terbukti atau tidaknya) 2. Hukum Pelaksanaan Pidana sebagai akhir dr proses peradilan pidana	
7	Mahasiswa mampu menguraikan Kepolisian sebagai komponen sistem peradilan pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Dasar hukum Tugas dan kewenangan kepolisian dalam proses Peradilan Pidana	
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9	Sub-CPMK-5: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Konsep dasar informasi dan transaksi elektronik, dan kekhususan tindak pidananya.	10 %



	elektronik [S9, KU1, PP4]	elektronik					
10	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika dan psikotropika. [S9, KU1, PP4]	a.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika; b.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana psikotropika.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisi narkotika; kekhususan tindak pidana narkotika; definisi psikotropika; kekhususan	10 %
11	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme. [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Kedudukan hukum pidana; asas retroaktif; kekhususan tindak pidana terorisme.	20 %
12	Mahasiswa mampu menguraikan Advokat sebagai komponen sistem peradilan pidana	Kemampuan menganalisis aturan Keaktifan dalam diskusi kelompok Ketepatan hasil analisis kasus Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	Penyidikan Penuntutan Pemeriksaan persidangan di pengadilan Pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan	10 %
13	Mahasiswa mampu menguraikan tahap pemeriksaan perkara pidana	Ketepatan menguraikan materi Kemampuan menyatakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum</li> <li>• Tugas dan kewenangan advokat sebagai komponen sistem peradilan pidana</li> </ul>	10%
14	Mahasiswa mampu menguraikan sistem peradilan pidana	Kemampuan menganalisis aturan Keaktifan dalam diskusi kelompok Ketepatan hasil analisis kasus Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum</li> <li>• Komponen sistem peradilan pidana anak Tahap pemeriksaan anak</li> </ul>	10%
15	Mahasiswa mampu menguraikan sistem peradilan pidana anak	Ketepatan menguraikan materi Kemampuan menyatakan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum</li> <li>• Komponen sistem peradilan pidana anak Tahap pemeriksaan</li> </ul>	10%

		pendapat Kedisiplinan dan sopan santun				perkara pidana anak	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTASHUKUM  
PRODIILMU HUKUM**

**KodeDoku  
men  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TglPenyusunan
Hukum Acara Pidana Lanajut		Pidana	T=2 P= 1		Juli 2021
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius</li> <li>b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa.</li> <li>c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.</li> </ul>			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu</li> <li>c. Pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>d. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</li> <li>e. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> <li>f. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus.</li> <li>g. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.</li> </ul>			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu membedakan nilai-nilai yang melandasi pada setiap model sistem peradilan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan tujuan dan manfaat sistem peradilan pidana, substansi hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana, mahasiswa pidana, Mahasiswa mampu berargumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus.</li> <li>2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.</li> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum pidana khusus.</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang ketentuannya diatur diluar KUHP, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pidana-pidana khusus tersebut memiliki beberapa kaidah hukum formil yang berbeda dari tindak pidana umum.				

<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Dasar-dasar hukum pidana khusus: definisi dan ruang lingkup.</li> <li>3. Alat bukti yang khas digunakan dalam hukum pidana khusus.</li> <li>4. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: perkembangan peraturan di Indonesia.</li> <li>5. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: pembuktian terbalik yang terbatas.</li> <li>6. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus-kasus korupsi.</li> <li>7. Pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang: sistem pembuktian menurut UU 8/2010.</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup.</li> <li>10. Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup (Lanjutan).</li> <li>11. Pembahasan mengenai tindak pidana ITE: alat bukti khas yang hanya diatur dalam UU 11/2008.</li> <li>12. Pembahasan mengenai tindak pidana narkoba: definisi dan ketentuan khusus.</li> <li>13. Pembahasan mengenai tindak pidana psikotropika: definisi dan ketentuan khusus.</li> <li>14. Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus.</li> <li>15. Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus (Lanjutan)</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester.</b></li> </ol>					
<b>Pustaka</b>		<p>Daftar Referensi:</p> <p>Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, <i>Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen &amp; Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)</i>, Bandung, Widya Padjadjaran.</p> <p>H. Edi Setiadi, 2017, <i>Sistem Peadilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</i>, Prenadamedia Grup, Jakarta</p> <p>Kadri Husin, Budi Rizki Husin, 2016 <i>Sistem Peradilan Pidana di Indonesia</i>, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Marlina, 2009, <i>Peradilan Pidana Anak di Indonesia</i>, Refika Aditama, Bandung.</p> <p>Romli Atmasasmita, 2010, <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenadamedia</i>, Jakarta</p> <p>R.Wiyono, 2016, <i>Sistem Peradilan Piddana Anak</i>, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan</p> <p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kejaksaan</p> <p>Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat</p> <p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan</p> <p>Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</p> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Abdul Hakim. 1986. KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djembatan.</p> <p>Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung.</p>					
<b>DosenPengampu</b>							
<b>Matakuliahsyarat</b>		Hukum Pidana, Hukum Pidana Lanjut					
MingguK e-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilai an (%)
		Indikator	Kriteria& Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus dan posisi	a.Ketepatan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus;	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+ 1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.		20 %

	hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. [S9, KU1, KU2]	b. Ketepatan menjelaskan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum.					
2	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. [S9, KU1, KU2, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Perkembangan peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia; tindak pidana korupsi; pembuktian terbalik yang terbatas.	15 %
3	Sub-CPMK-3: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	a. Sistem pembuktian menurut UU No.8 Tahun 2010 b. Alat bukti menurut UU No. 8 Tahun 2010	15 %
4	mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisi tindak pidana ekonomi; ruang lingkup tindak pidana ekonomi; badan hukum sebagai pelaku tindak pidana ekonomi; serta pidana yang dapat dikenakan.	10 %
5	Mahasiswa mampu menguraikan substansi hukum dalam Proses Peradilan Pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Sistem Inquisitoir dan Accusatoir Adversary System dan Non Adversary System Bail system (System Jaminan/System Uang tebusan) Plea Bargening	
6	Mahasiswa mampu Menguraikan substansi hukum dalam Proses Peradilan Pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Hukum Acara Pidana : mengatur Bagaimana proses peradilan dilakukan Hukum Pidana materiil : hukum menentukan siapa dan perbuatan apa serta hukuman yg ditetapkan(diuji terbukti atau tidaknya) Hukum Pelaksanaan Pidana sebagai akhir dr proses peradilan pidana	
7	Mahasiswa mampu menguraikan Kepolisian sebagai komponen sistem peradilan pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Dasar hukum Tugas dan kewenangan kepolisian dalam proses Peradilan Pidana	
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9	Sub-CPMK-5: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Konsep dasar informasi dan transaksi elektronik, dan kekhususan tindak pidananya.	10 %

	elektronik [S9, KU1, PP4]	elektronik					
10	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika dan psikotropika. [S9, KU1, PP4]	a.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika; b.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana psikotropika.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisi narkotika; kekhususan tindak pidana tindak pidana psikotropika.narkotika; definisi psikotropika; kekhususan	10 %
11	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme. [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Kedudukan hukum pidana; asas retroaktif; kekhususan tindak pidana terorisme.	20 %
12	Mahasiswa mampu menguraikan Advokat sebagai komponen sistem peradilan pidana	Kemampuan menganalisis aturan Keaktifan dalam diskusi kelompok Ketepatan hasil analisis kasus Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	Penyidikan Penuntutan Pemeriksaan persidangan di pengadilanPelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan	10 %
13	Mahasiswa mampu menguraikan tahap pemeriksaan perkara pidana	Ketepatan menguraikan materi Kemampuan menyatakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum</li> <li>• Tugas dan kewenangan advokat sebagai komponen sistem peradilan pidana</li> </ul>	10%
14	Mahasiswa mampu menguraikan sistem peradilan pidana	Kemampuan menganalisis aturan Keaktifan dalam diskusi kelompok Ketepatan hasil analisis kasus Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum</li> <li>• Komponen sistem peradilan pidana anak Tahap pemeriksaan anak</li> </ul>	10%
15	Mahasiswa mampu menguraikan sistem peradilan pidana anak	Ketepatan menguraikan materi Kemampuan menyatakan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum</li> <li>• Komponen sistem peradilan pidana anak Tahap pemeriksaan</li> </ul>	10%

		pendapat Kedisiplinan dan sopan santun				perkara pidana anak	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTASHUKUM  
PRODIILMU HUKUM**

**KodeDoku  
men  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TglPenyusunan
Pendidikan Anti Korupsi		Pidana	T=2 P= 1		Juli 2021
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI
					<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu c. Pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. d. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. e. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. f. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. g. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu membedakan nilai-nilai yang melandasi pada setiap model sistem peradilan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan tujuan dan manfaat sistem peradilan pidana, substansi hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana, mahasiswa pidana, Mahasiswa mampu berargumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP. 3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum pidana khusus. 4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. 5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. 6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab. 7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.				
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang ketentuannya diatur diluar				



	<p>KUHP, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pidana-pidana khusus tersebut memiliki beberapa kaidah hukum formil yang berbeda dari tindak pidana umum.</p>						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Dasar-dasar hukum pidana khusus: definisi dan ruang lingkup.</li> <li>3. Alat bukti yang khas digunakan dalam hukum pidana khusus.</li> <li>4. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: perkembangan peraturan di Indonesia.</li> <li>5. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: pembuktian terbalik yang terbatas.</li> <li>6. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus-kasus korupsi.</li> <li>7. Pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang: sistem pembuktian menurut UU 8/2010.</li> </ol> <p><b>8. Ujian Tengah Semester</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup.</li> <li>10. Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup (Lanjutan).</li> <li>11. Pembahasan mengenai tindak pidana ITE: alat bukti khas yang hanya diatur dalam UU 11/2008.</li> <li>12. Pembahasan mengenai tindak pidana narkoba: definisi dan ketentuan khusus.</li> <li>13. Pembahasan mengenai tindak pidana psikotropika: definisi dan ketentuan khusus.</li> <li>14. Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus.</li> <li>15. Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus (Lanjutan)</li> </ol> <p><b>16. Ujian Akhir Semester.</b></p>						
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <p>Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, <i>Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen &amp; Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)</i>, Bandung, Widya Padjadjaran.</p> <p>H. Edi Setiadi, 2017, <i>Sistem Peadilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</i>, Prenadamedia Grup, Jakarta</p> <p>Kadri Husin, Budi Rizki Husin, 2016 <i>Sistem Peradilan Pidana di Indonesia</i>, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Marlina, 2009, <i>Peradilan Pidana Anak di Indonesia</i>, Refika Aditama, Bandung.</p> <p>Romli Atmasasmita, 2010, <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana</i> Prenadamedia, Jakarta</p> <p>R.Wiyono, 2016, <i>Sistem Peradilan Piddana Anak</i>, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan</p> <p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kejaksaan</p> <p>Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat</p> <p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan</p> <p>Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</p> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Abdul Hakim. 1986. KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan.</p> <p>Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung.</p>						
<b>DosenPengampu</b>							
<b>Matakuliahsyarat</b>	Hukum Pidana, Hukum Pidana Lanjut						
MingguK e-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria& Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan	a.Ketepatan menjelaskan tentang definisi	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")];	eLearning dan platform		20 %

	ruang lingkup hukum pidana khusus dan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. [S9, KU1, KU2]	dan ruang lingkup hukum pidana khusus; b. Ketepatan menjelaskan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum.	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	media lainnya.			
2	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. [S9, KU1, KU2, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Perkembangan peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia; tindak pidana korupsi; pembuktian terbalik yang terbatas.	15 %	
3	Sub-CPMK-3: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang. [S9, KU1, KU2, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	a. Sistem pembuktian menurut UU No.8 Tahun 2010 b. Alat bukti menurut UU No. 8 Tahun 2010	15 %	
4	mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisi tindak pidana ekonomi; ruang lingkup tindak pidana ekonomi; badan hukum sebagai pelaku tindak pidana ekonomi; serta pidana yang dapat dikenakan.	10 %	
5	Mahasiswa mampu menguraikan substansi hukum dalam Proses Peradilan Pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Sistem Inquisitoir dan Accusatoir Adversary System dan Non Adversary System Bail system (Sistem Jaminan/System Uang tebusan) Plea Bargening		
6	Mahasiswa mampu Menguraikan substansi hukum dalam Proses Peradilan Pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Hukum Acara Pidana : mengatur Bagaimana proses peradilan dilakukan Hukum Pidana materiil : hukum menentukan siapa dan perbuatan apa serta hukuman yg ditetapkan (diuji terbukti atau tidaknya) 2. Hukum Pelaksanaan Pidana sebagai akhir dr proses peradilan pidana		
7	Mahasiswa mampu menguraikan Kepolisian sebagai komponen sistem peradilan pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Dasar hukum Tugas dan kewenangan kepolisian dalam proses Peradilan Pidana		
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>							
9	Sub-CPMK-5: mampu menjelaskan kekhususan	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media	Konsep dasar informasi dan transaksi elektronik, dan kekhususan tindak pidananya.	10 %	

	tindak pidana informasi dan transaksi elektronik [S9, KU1, PP4]	pidana informasi dan transaksi elektronik	E = 0 – 40	1)x(2x60'')	lainnya.		
10	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika dan psikotropika. [S9, KU1, PP4]	a.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika; b.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana psikotropika.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisi narkotika; kekhususan tindak pidana narkotika; definisi psikotropika; kekhususan	10 %
11	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme. [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Kedudukan hukum pidana; asas retroaktif; kekhususan tindak pidana terorisme.	20 %
12	Mahasiswa mampu menguraikan Advokat sebagai komponen sistem peradilan pidana	Kemampuan menganalisis aturan Keaktifan dalam diskusi kelompok Ketepatan hasil analisis kasus Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	Penyidikan Penuntutan Pemeriksaan persidangan di pengadilan Pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan	10 %
13	Mahasiswa mampu menguraikan tahap pemeriksaan perkara pidana	Ketepatan menguraikan materi Kemampuan menyatakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum</li> <li>• Tugas dan kewenangan advokat sebagai komponen sistem peradilan pidana</li> </ul>	10%
14	Mahasiswa mampu menguraikan sistem peradilan pidana	Kemampuan menganalisis aturan Keaktifan dalam diskusi kelompok Ketepatan hasil analisis kasus Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum</li> <li>• Komponen sistem peradilan pidana anak Tahap pemeriksaan perkara pidana anak</li> </ul>	10%
15	Mahasiswa mampu menguraikan	Ketepatan menguraikan	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[TM	eLearning dan	• Dasar hukum	10%

	sistem peradilan pidana anak	materi Kemampuan menyatakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	:1x(2x50"); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>platform media lainnya</b>	•Komponen sistem peradilan pidana anak Tahap pemeriksaan perkara pidana anak	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTASHUKUM  
PRODIILMU HUKUM**

**KodeDoku  
men  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TglPenyusunan
Kejahatan Korporasi		Pidana	T=2 P= 1		Juli 2021
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu c. Pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. d. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. e. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. f. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. g. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu membedakan nilai-nilai yang melandasi pada setiap model sistem peradilan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan tujuan dan manfaat sistem peradilan pidana, substansi hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana, mahasiswa pidana, Mahasiswa mampu berargumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP. 3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum pidana khusus. 4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. 5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. 6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab. 7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.				
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang ketentuannya diatur diluar KUHP, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pidana-pidana khusus tersebut memiliki beberapa kaidah hukum formil yang berbeda dari tindak pidana				

	umum.						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Dasar-dasar hukum pidana khusus: definisi dan ruang lingkup.</li> <li>3. Alat bukti yang khas digunakan dalam hukum pidana khusus.</li> <li>4. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: perkembangan peraturan di Indonesia.</li> <li>5. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: pembuktian terbalik yang terbatas.</li> <li>6. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus-kasus korupsi.</li> <li>7. Pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang: sistem pembuktian menurut UU 8/2010.</li> </ol> <p><b>8. Ujian Tengah Semester</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup.</li> <li>10. Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup (Lanjutan).</li> <li>11. Pembahasan mengenai tindak pidana ITE: alat bukti khas yang hanya diatur dalam UU 11/2008.</li> <li>12. Pembahasan mengenai tindak pidana narkoba: definisi dan ketentuan khusus.</li> <li>13. Pembahasan mengenai tindak pidana psikotropika: definisi dan ketentuan khusus.</li> <li>14. Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus.</li> <li>15. Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus (Lanjutan)</li> </ol> <p><b>16. Ujian Akhir Semester.</b></p>						
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <p>Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, <i>Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen &amp; Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)</i>, Bandung, Widya Padjadjaran.</p> <p>H. Edi Setiadi, 2017, <i>Sistem Peadilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</i>, Prenadamedia Grup, Jakarta</p> <p>Kadri Husin, Budi Riszki Husin, 2016 <i>Sistem Peradilan Pidana di Indonesia</i>, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Marlina, 2009, <i>Peradilan Pidana Anak di Indonesia</i>, Refika Aditama, Bandung.</p> <p>Romli Atmasasmita, 2010, <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana</i> Prenadamedia, Jakarta</p> <p>R.Wiyono, 2016, <i>Sistem Peradilan Piddana Anak</i>, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan</p> <p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kejaksaan</p> <p>Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat</p> <p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan</p> <p>Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</p>						
	<p><b>Pendukung :</b></p> <p>Abdul Hakim. 1986. KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan.</p> <p>Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung.</p>						
<b>DosenPengampu</b>							
<b>Matakuliahsyarat</b>	Hukum Pidana, Hukum Pidana Lanjut						
MingguK e-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilai an (%)
		Indikator	Kriteria& Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan ruang lingkup hukum pidana	a.Ketepatan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50""); c.[PT+BM:(1+ 1)x(2x60"")]	eLearning dan platform media lainnya.		20 %

	husus dan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. [S9, KU1, KU2]	pidana khusus; b. Ketepatan menjelaskan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum.	E = 0 – 40					
2	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. [S9, KU1, KU2, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Perkembangan peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia; tindak pidana korupsi; pembuktian terbalik yang terbatas.	15 %	
3	Sub-CPMK-3: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	a. Sistem pembuktian menurut UU No.8 Tahun 2010 b. Alat bukti menurut UU No. 8 Tahun 2010	15 %	
4	mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisi tindak pidana ekonomi; ruang lingkup tindak pidana ekonomi; badan hukum sebagai pelaku tindak pidana ekonomi; serta pidana yang dapat dikenakan.	10 %	
5	Mahasiswa mampu menguraikan substansi hukum dalam Proses Peradilan Pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Sistem Inquisitoir dan Accusatoir Adversary System dan Non Adversary System Bail system (Sistem Jaminan/System Uang tebusan) Plea Bargening		
6	Mahasiswa mampu Menguraikan substansi hukum dalam Proses Peradilan Pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Hukum Acara Pidana : mengatur Bagaimana proses peradilan dilakukan Hukum Pidana materil : hukum menentukan siapa dan perbuatan siapa serta hukuman yg ditetapkan (diuji terbukti atau tidaknya) Hukum Pelaksanaan Pidana sebagai akhir dr proses peradilan pidana		
7	Mahasiswa mampu menguraikan Kepolisian sebagai komponen sistem peradilan pidana		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Dasar hukum Tugas dan kewenangan kepolisian dalam proses Peradilan Pidana		
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>							
9	Sub-CPMK-5: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Konsep dasar informasi dan transaksi elektronik, dan kekhususan tindak pidananya.	10 %	


	transaksi elektronik [S9, KU1, PP4]	transaksi elektronik					
10	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika dan psikotropika. [S9, KU1, PP4]	a.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika; b.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana psikotropika.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisi narkotika; kekhususan tindak pidana psikotropika.narkotika; definisi psikotropika; kekhususan	10 %
11	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme. [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	Kedudukan hukum pidana; asas retroaktif; kekhususan tindak pidana terorisme.	20 %
12	Mahasiswa mampu menguraikan Advokat sebagai komponen sistem peradilan pidana	Kemampuan menganalisis aturan Keaktifan dalam diskusi kelompok Ketepatan hasil analisis kasus Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	Penyidikan Penuntutan Pemeriksaan persidangan di pengadilanPelaksanaan putusan di lembaga pemyarakatan	10 %
13	Mahasiswa mampu menguraikan tahap pemeriksaan perkara pidana	Ketepatan menguraikan materi Kemampuan menyatakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum</li> <li>• Tugas dan kewenangan advokatsebagai komponensistem peradilan pidana</li> </ul>	10%
14	Mahasiswa mampu menguraikan sistem peradilan pidana	Kemampuan menganalisis aturan Keaktifan dalam diskusi kelompok Ketepatan hasil analisis kasus Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum</li> <li>• Komponen sistem peradilan pidana anakTahappemeriksaan perkarapidana anak</li> </ul>	10%
15	Mahasiswa mampu menguraikan sistem peradilan pidana	Ketepatan menguraikan materi Kemampuan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+	eLearning dan platform media	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dasar hukum</li> <li>•Komponen sistem peradilan pidana</li> </ul>	10%



	anak	menyatakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	E = 0 – 40	1)x(2x60")]	<b>lainnya</b>	anak Tahap pemeriksaan perkara pidana anak	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM PIDANA ISLAM</b>	FA176388	MKDU	<b>T=2 P= 1</b>	I	Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthen Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>2. Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum</li> <li>2. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
	<b>CPMK</b>	<p>Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif tentang Gambaran Umum tentang Tindak Pidana dan Sanksi/Pidana (Jarimah dan Uqubah), Tujuan, Syarat-syarat, Macam-macam, dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Hudud (Jarimah Minum-Minum Keras (Khamr), Tindak Pidana Zina, Tindak Pidana Qadza, Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Hirabah, Tindak Pidana Bughat (Subversive), Tindak Pidana Riddah (Konversi Agama), Tindak Pidana Qishah dan Diyat; Jarimah atas Pembunuhan, dan Melukai Badan), Tindak Pidana Pembunuhan Janin dan Tindak Pidana Ta'zir.</p>			
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
	<b>Sub- CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui dan memahami Gambaran Umum tentang Tindak Pidana dan Sanksi/Pidana (Jarimah dan Uqubah)</li> <li>b. Mengetahui dan memahami Tujuan, Syarat-syarat, Macam-macam, dan Unsur-unsur Tindak Pidana</li> <li>c. Mengetahui dan memahami Tindak Pidana Zina</li> <li>d. Mengetahui dan memahami Tindak Pidana Qadza</li> <li>e. Mengetahui dan memahami Tindak Pidana Pencurian</li> <li>f. Mengetahui dan memahami Tindak Pidana Hirabah</li> </ol>			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Mengetahui dan memahami Tindak Pidana Bughat (Subversive)</li> <li>h. Mengetahui dan memahami Tindak Pidana Riddah (Konversi Agama)</li> <li>i. Mengetahui dan memahami Tindak Pidana Qishah dan Diyat; Jarimah atas Pembunuhan, dan Melukai Badan)</li> <li>j. Mengetahui dan memahami Tindak Pidana Pembunuhan Janin</li> <li>k. Mengetahui dan memahami Tindak Pidana Ta'zir</li> </ul>					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah ini menawarkan konsep pemahaman tentang Gambaran Umum tentang Tindak Pidana dan Sanksi/Pidana (Jarimah dan Uqubah), Tujuan, Syarat-syarat, Macam-macam, dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Hudud (Jarimah Minum-Minum Keras (Khamr), Tindak Pidana Zina, Tindak Pidana Qadzaf, Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Hirabah, Tindak Pidana Bughat (Subversive), Tindak Pidana Riddah (Konversi Agama), Tindak Pidana Qishah dan Diyat; Jarimah atas Pembunuhan, dan Melukai Badan), Tindak Pidana Pembunuhan Janin dan Tindak Pidana Ta'zir.						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum</li> <li>2. Gambaran Umum tentang Tindak Pidana dan Sanksi/Pidana (Jarimah dan Uqubah)</li> <li>3. Tujuan, Syarat-syarat, Macam-macam, dan Unsur-unsur Tindak Pidana</li> <li>4. Tindak Pidana Hudud (Jarimah Minum-Minum Keras (Khamr))</li> <li>5. Tindak Pidana Zina</li> <li>6. Tindak Pidana Qadzaf</li> <li>7. Tindak Pidana Pencurian</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Tindak Pidana Hirabah</li> <li>10. Tindak Pidana Bughat (Subversive)</li> <li>11. Tindak Pidana Riddah (Konversi Agama)</li> <li>12. Tindak Pidana Qishah dan Diyat; Jarimah atas Pembunuhan, dan Melukai Badan)</li> <li>13. Tindak Pidana Pembunuhan Janin</li> <li>14. Tindak Pidana Ta'zir</li> <li>15. Review Materi dan Tugas Akhir</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Marsaid, M.A, Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, 2020, Palembang: CV Amanah.</li> <li>2. Opo Santoso, SH.MH. Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas, Bandung, As-Syaamil, 2000.</li> <li>3. Prof. Drs. A. Djazuli, Prof. Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Jakarta, Radjawali Press, 1996.</li> <li>4. A. Hanafi, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1991.</li> </ol>						
	<b>Pendukung :</b>						
	-						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	<b>HUKUM PIDANA ISLAM</b>						
Mingu u Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria &	Luring (offline)	Daring (online)		

(1)	(2)	(3)	Bentuk	(5)	)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	eLearning dan platform media lainnya .	13. Kontrak kuliah 14. Tujuan Mata Kuliah	5%
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu mengurai Gambaran Umum tentang Tindak Pidana dan Sanksi/Pidana (Jarimah dan Uqubah)	Ketepatan uraian Gambaran Umum tentang Tindak Pidana dan Sanksi/Pidana (Jarimah dan Uqubah)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	eLearning dan platform media lainnya .	13. Pengertian, 14. Gambaran Umum 15. Sanksi/Pidana (Jarimah dan Uqubah)	5 %
3	Sub-CPMK-3: mahasiswa mampu menguraikan Tujuan, Syarat-syarat, Macam-macam, dan Unsur-unsur Tindak Pidana	Ketepatan uraian Tujuan, Syarat-syarat, Macam-macam, dan Unsur-unsur Tindak Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	eLearning dan platform media lainnya .	1. Tujuan, 2. Syarat-syarat, 3. Macam-macam, dan 4. Unsur-unsur Tindak Pidana	5 %
4	Sub-CPMK-4: mahasiswa mampu menguraikan Tindak Pidana Hudud (Jarimah Minum-Minuman Keras (Khamr))	Ketepatan uraian Tindak Pidana Hudud (Jarimah Minum-Minuman Keras (Khamr))	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	eLearning dan platform media lainnya .	7. Dasar-dasar, 8. Tujuan, 9. Macam-Macam Wakaf, 1. Pengertian 2. Unsur-unsur 3. Hukuman	5 %
5	Sub-CPMK-5: mahasiswa mampu menguraikan Tindak Pidana Zina	Ketepatan uraian Tindak Pidana Zina	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] ]	eLearning dan platform media lainnya .	1. Pengertian 2. Unsur-unsur 3. Hukuman	10 %

			55 E = 0 – 40	M:(1+1) x(2x60”) ]			
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu menjelaskan Tindak Pidana Qadzaf	Ketepatan menjelaskan Tindak Pidana Qadzaf	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60”) ]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya</b> .	1. Pengertian 2. Unsur-unsur 3. Hukuman	10 %
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan Tindak Pidana Pencurian	Ketepatan uraian mengenai Tindak Pidana Pencurian	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50”)] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60”) ]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya</b> .	1. Pengertian 2. Unsur-unsur 3. Hukuman	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan Tindak Pidana Hirabah	Ketepatan uraian Tindak Pidana Hirabah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya</b> .	1. Pengertian 2. Unsur-unsur 3. Hukuman	5 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan . Tindak Pidana Bughat (Subversive)	Ketepatan uraian Tindak Pidana Bughat (Subversive)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya</b> .	1. Pengertian 2. Unsur-unsur 3. Hukuman	5 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan Tindak Pidana Riddah (Konversi Agama)	Ketepatan uraian Tindak Pidana Riddah (Konversi Agama)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D =	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya</b> .	1. Pengertian 2. Unsur-unsur 3. Hukuman	5 %

			41-55 E = 0 - 40		-		
12	Sub-CPMK-12 Mahasiswa mampu menguraikan Tindak Pidana Qishah dan Diyat; Jarimah atas Pembunuhan, dan Melukai Badan)	Ketepatan uraian Tindak Pidana Qishah dan Diyat; Jarimah atas Pembunuhan, dan Melukai Badan)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pengertian 2. Unsur-unsur 3. Hukuman	5%
13	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu menganalisis Tindak Pidana Pembunuhan Janin	Ketepatan analisis Tindak Pidana Pembunuhan Janin	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pengertian 2. Unsur-unsur 3. Hukuman	10%
14	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu menjelaskan Tindak Pidana Ta'zir	Ketepatan menjelaskan Tindak Pidana Ta'zir	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pengertian 2. Unsur-unsur 3. Hukuman	10%
15	Sub-CPMK-15 view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	view Tugas dan Materi	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM PENOLOGI	FA176390	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		

**Capaian Pembelajaran (CP)**

<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>	
<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> </ol>
<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.</li> </ol>
<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum</li> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>

**Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**

CPMK	<p>Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif tentang definisi Penologi, Ruang Lingkup Penologi, Eksistensi dan Tujuan Penologi, Sejarah dan Perkembangan Penologi, Hubungan Penologi dengan Ilmu Lainnya</p> <p>Pidana dan Pemidanaan, Teori Pemidanaan, Prinsip Dasar Tujuan Pemidanaan, Teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif, Sejarah Perkembangan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP dan Sejarah Perkembangan Sistem Pemidanaan Narapidana.</p>
------	---

**Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)**

Sub-CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui dan memahami Definiisi Penologi, Ruang Lingkup Penologi</li> <li>Mengetahui dan memahami Eksistensi dan Tujuan Penologi</li> <li>Mengetahui dan memahami Sejarah dan Perkembangan Penologi</li> <li>Mengetahui dan memahami Hubungan Penologi dengan Ilmu Lainnya</li> <li>Mengetahui dan memahami Pidana dan Pemidanaan</li> <li>Mengetahui dan memahami Teori Pemidanaan</li> <li>Mengetahui dan memahami Prinsip Dasar Tujuan Pemidanaan</li> <li>Mengetahui dan memahami Teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif</li> <li>Mengetahui dan memahami Sejarah Perkembangan Sanksi Pidana</li> </ol>
----------	---



		10. Mengetahui dan memahami Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP 11. Mengetahui dan memahami Sejarah Perkembangan Sistem Pidanaan Narapidana 12. Mengetahui dan memahami Lembaga Pembinaan Menurut UU 12/1995					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah ini menawarkan konsep pemahaman tentang definisi Penologi, Ruang Lingkup Penologi, Eksistensi dan Tujuan Penologi, Sejarah dan Perkembangan Penologi, Hubungan Penologi dengan Ilmu Lainnya, Pidana dan Pidanaan, Teori Pidanaan, Prinsip Dasar Tujuan Pidanaan, Teori Tujuan Pidanaan yang Integratif, Sejarah Perkembangan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP dan Sejarah Perkembangan Sistem Pidanaan Narapidana.						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum 2. Definiisi Penologi, Ruang Lingkup Penologi 3. Eksistensi dan Tujuan Penologi 4. Sejarah dan Perkembangan Penologi 5. Hubungan Penologi dengan Ilmu Lainnya 6. Pidana dan Pidanaan 7. Teori Pidanaan <b>8. Ujian Tengah Semester</b> 9. Prinsip Dasar Tujuan Pidanaan 10. Teori Tujuan Pidanaan yang Integratif 11. Sejarah Perkembangan Sanksi Pidana 12. Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP 13. Sejarah Perkembangan Sistem Pidanaan Narapidana 14. Lembaga Pembinaan Menurut UU 12/1995 15. Review Materi dan Tugas Akhir <b>16. Ujian Akhir Semester</b>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: 1. A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006 2. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2006. 3. Tolib Setiyadi, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010.. <b>Pendukung :</b> - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	<b>HUKUM PENOLOGI</b>						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1:	• Ketepatan	A = 86-	a.	eLearn	15. Kontrak kuliah	5%

	Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	menjalankan kontrak kuliah • Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah	100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'')]	ing dan platform media lainnya .	16. Tujuan Mata Kuliah	
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu mengurai Definisi Penologi,Ruang Lingkup Penologi	Ketepatan uraian Definisi Penologi,Ruang Lingkup Penologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	16. Definisi Penologi, 17. Ruang Lingkup Penologi	5 %
3	Sub-CPMK-3: mahasiswa mampu menguraikan Eksistensi dan Tujuan Penologi	Ketepatan uraian Eksistensi dan Tujuan Penologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	5. Eksistensi dan 6. Tujuan Penologi	5 %
4	Sub-CPMK-4: mahasiswa mampu menguraikan Sejarah dan Perkembangan Penologi	Ketepatan uraian Sejarah dan Perkembangan Penologi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	4. Sejarah dan 5. Perkembangan Penologi	5 %
5	Sub-CPMK-5: mahasiswa mampu menguraikan Hubungan Penologi dengan Ilmu Lainnya	Ketepatan uraian Hubungan Penologi dengan Ilmu Lainnya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	4. Hubungan Penologi dengan Krimionologi 5. Hubungan Penologi dengan Ilmu Kedokteran Forensik 6. Hubungan Penologi dengan Psikiatri Kehakiman	10 %
6	Sub-CPMK-6: mahasiswa	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100	a. Kuliah;	eLearning dan	4. Pengertian Pidana	10 %

	mampu menjelaskan Pidana dan Pidana dan Pidana	Pidana dan Pidana	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskus i[TM: 1x (2x50'') ] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'') ]	<b>platform media lainnya</b> .	5. Pengertian Pidana 6. Perkembangan Pidana	
7	Sub-CPMK-7 mahasiswa mampu menguraikan Teori Pidana	Ketepatan uraian mengenai Teori Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM: 1x (2x50'') ] ; c.[PT+B M:(1+1) x(2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	4. Tujuan Pidana 5. Aliran-Aliran Hukum Pidana dalam Menentukan 6. Tujuan Pidana	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan Prinsip Dasar Tujuan Pidana	ketepatan uraian Prinsip Dasar Tujuan Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM: 1x(2x 50'') ]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Prinsip Dasar Tujuan Pidana	5 %
10	Sub-CPMK-10: mahasiswa mampu menguraikan Teori Tujuan Pidana yang Integratif	Ketepatan uraian Teori Tujuan Pidana yang Integratif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM: 1x(2x 50'') ]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Teori Tujuan Pidana yang Integratif	5 %
11	Sub-CPMK-11: Mahasiswa mampu menguraikan Sejarah Perkembangan Sanksi Pidana	ketepatan uraian Sejarah Perkembangan Sanksi Pidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM: 1x(2x 50'') ]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'') ]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	4. Penjatuhan Sanksi Pidana sebelum Terbentuknya Negara 5. Penjatuhan Sanksi Pidana setelah Terbentuknya Negara.	5%
12	Sub-CPMK-12: Mahasiswa mampu	Ketepatan uraian Jenis-Jenis Pidana	A = 86-100	a. Kuliah; b.Diskus i[ TM: 1x(2x	<b>eLearning dan platform</b>	4. Pidana Pokok 5. Pidana Tambahan	5%

	menguraikan Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP	Menurut KUHP	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>m media lainnya</b> .		
<b>13</b>	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu menganalisis Sejarah Perkembangan Sistem Pidanaan Narapidana	Ketepatan analisis Sejarah Perkembangan Sistem Pidanaan Narapidana	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	4. Sistem Kependidikan 5. Sistem Pemasarakatan	10%
<b>14</b>	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu menjelaskan Lembaga Pembinaan Menurut UU 12/1995	ketepatan menjelaskan Lembaga Pembinaan Menurut UU 12/1995	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Lembaga Pembinaan Menurut UU 12/1995	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	view Tugas dan Materi	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM KELAUTAN	FA1763105	MKDU	T=2 P= 1	I	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>		

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>	
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> </ol>
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.</li> </ol>
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum</li> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika;</li> </ol>
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>	
	<b>CPMK</b>	<p>Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif tentang Pengertian Hukum Laut, Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut</p> <p>Instrumen Peraturan Perundang-Undangan tentang Hukum Laut, Konferensi tentang Hukum Laut, Zona-zona maritim, Negara Kepulauan, Perairan Pedalaman, Laut Teritorial</p> <p>Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, Laut Lepas dan Penyelesaian sengketa Hukum Laut</p>
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>	
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui dan memahami Pengertian Hukum Laut Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut</li> <li>Mengetahui dan memahami Instrumen Peraturan Perundang-Undangan tentang Hukum Laut</li> <li>Mengetahui dan memahami Konferensi tentang Hukum Laut</li> <li>Mengetahui dan memahami Zona-zona maritim</li> <li>Mengetahui dan memahami Negara Kepulauan</li> <li>Mengetahui dan memahami Perairan Pedalaman</li> <li>Mengetahui dan memahami Laut Teritorial</li> <li>Mengetahui dan memahami Zona Tambahan</li> </ol>	

		9. Mengetahui dan memahami Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 10. Mengetahui dan memahami Landas Kontinen 11. Mengetahui dan memahami Laut Lepas 12. Mengetahui dan memahami Penyelesaian sengketa Hukum Laut					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah ini menawarkan konsep pemahaman tentang Pengertian Hukum Laut, Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut, Instrumen Peraturan Perundang-Undangan tentang Hukum Laut, Konferensi tentang Hukum Laut, Zona-zona maritim, Negara Kepulauan, Perairan Pedalaman, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, Laut Lepas dan Penyelesaian sengketa Hukum Laut.						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum 2. Pengertian Hukum Laut Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut 3. Instrumen Peraturan Perundang-Undangan tentang Hukum Laut 4. Konferensi tentang Hukum Laut 5. Zona-zona maritim 6. Negara Kepulauan 7. Laut Teritorial <b>8. Ujian Tengah Semester</b> 9. Perairan Pedalaman 10. Zona Tambahan 11. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 12. Landas Kontinen 13. Laut Lepas 14. Penyelesaian sengketa Hukum Laut 15. Review Materi dan Tugas Akhir <b>16. Ujian Akhir Semester</b>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: 1. Didik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010. 2. I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Media, Bandung, 2014. 3. Mochtar Kusumaatmadja, Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III, Alumni, 2003. 4. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Binacipta, 1986 <b>Pendukung :</b> - Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, 2000. - Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	<b>HUKUM KELAUTAN</b>						
Ming gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjalankan kontrak kuliah</li> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah</li> </ul>	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M: (1+1) x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	17. Kontrak kuliah 18. Tujuan Mata Kuliah	5%
2	Sub-CPMK-2: mahasiswa mampu mengurai Pengertian Hukum Laut Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut	Ketepatan uraian Pengertian Hukum Laut Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M: (1+1) x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	18. Pengertian Hukum Laut 19. Sejarah dan 20. Perkembangan Hukum Laut	5 %
3	Sub-CPMK-3: mahasiswa mampu menguraikan Instrumen Peraturan Perundang-Undangan tentang Hukum Laut	Ketepatan uraian Instrumen Peraturan Perundang-Undangan tentang Hukum Laut	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M: (1+1) x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Dasar Hukum Laut Internasional 2. Kodifikasi Hukum Laut	5 %
4	Sub-CPMK-4: mahasiswa mampu menguraikan Konferensi tentang Hukum Laut	Ketepatan uraian Konferensi tentang Hukum Laut	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x (2x50'')] ; c. [PT+B M: (1+1) x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	6. Konferensi kodifikasi Den Haag (1930), di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. 7. Konferensi PBB tentang hukum laut I (1958) 8. Konferensi PBB tentang hukum laut II (1960) UNCLOS II 9. Konferensi PBB tentang hukum laut III (1982) UNCLOS III	5 %
5	Sub-CPMK-5: mahasiswa mampu menguraikan Zona-zona	Ketepatan uraian Zona-zona maritim	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	7. Perairan Pedalaman 8. Laut Teritorial 9. Zona Tambahan	10 %

	maritim		C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	(2x50'') ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>media lainnya</b> .	10. Perairan Kepulauan 11. Zona Ekonomi 12. Eksklusif 13. Landas Kontinen 14. Laut Lepas 15. Kawasan (Dasar laut internasional)	
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu menjelaskan Negara Kepulauan	Ketepatan menjelaskan Negara Kepulauan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	7. Pengertian Kepulauan dan Negara Kepulauan 8. Garis pangkal Kepulauan 9. Perairan Kepulauan	10 %
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menguraikan Laut Teritorial	Ketepatan uraian mengenai Laut Teritorial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskus i[TM:1x (2x50'')] ; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	7. Sejarah penentuan lebar laut teritorial. 8. Macam-macam Garis pangkal 9. Status hukum.laut teritorial 10. Hak Negara pantai dan hak Negara lain di laut teritorial 11. Penetapan Garis batas laut teritorial	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-9: Mahasiswa mampu menguraikan Perairan Pedalaman	ketepatan uraian Perairan Pedalaman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pengertian Perairan Pedalaman 2. Klasifikasi perairan pedalaman 3. Laut Pedalaman 4. Perairan Darat	5 %
10	Sub-CPMK-10: Mahasiswa mampu menguraikan Zona Tambahan	Ketepatan uraian Zona Tambahan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Pengertian Zona Tambahan 2. Status Hukum Zona 3. Tambahan Hak Negara Pantai di Zona Tambahan	5 %



			- 40				
11	b-CPMK- Mahasiswa mampu menguraikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	ketepatan uraian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya</b> .	6. Hak dan Kewajiban 7. Pengertian ZEE Negara pantai di wilayah ZEE 8. Hak dan Kewajiban Negara lain di wilayah ZEE	5%
12	Sub-CPMK-12 Mahasiswa mampu menguraikan Landas Kontinen	Ketepatan uraian Landas Kontinen	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya</b> .	6. Sejarah Landas Kontinen 7. Batas LandasKontinen Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 8. Perbedaan Batas Landas Kontinen• menurut Konvensi Hukum Laut Tahun 1958 dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 9. Penentuan batas Landas Kontinen 10. Hak dan Kewajiban Negara Pantai dan Negara Lain di wilayah Landas Kontinen	5%
13	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu menganalisis Laut Lepas	Ketepatan analisis Laut Lepas	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya</b> .	6. Pengertian Laut Lepas 7. Hak dan Kewajiban Negara Pantai dan Negara Lain di wilayah Laut Lepas	10%

<b>14</b>	Sub-CPMK-14 siswa mampu menjelaskan Penyelesaian sengketa Hukum Laut	tepatan menjelaskan Penyelesaian sengketa Hukum Laut	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	1. Penyelesaian berdasar Hukum Kebiasaan 2. Penyelesaian berdasar Konvensi Hukum Laut	10%
<b>15</b>	Sub-CPMK-15 view Tugas dan Materi	view Tugas dan Materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 - 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Review Tugas dan Materi	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Lingkungan	FA206237	Perdata	T=2 P= 1	IV	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu, SH., MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 2. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 3. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Setelah mempelajari matakuliah ini, mahasiswa mampu menguasai teori-teori hukum yang relevan dengan hukum lingkungan demi pengembangan hukum di bidang lingkungan.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	1. Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai pendekatan dalam pengelolaan lingkungan 2. Mahasiswa dapat mengelaborasi kajian terhadap perkembangan instrumen hukum dan non-hukum, 3. Mahasiswa dapat memahami hukum dalam pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam), dan kearifan lokal, 4. Mahasiswa dapat memahami kajian instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, serta ADR (Alternative Dispute Resolution) terkait perkembangan penegakan hukum lingkungan, 5. Mahasiswa mampu memahami dan membandingkan pelaksanaan gugatan lingkungan, kajian konstitusionalisasi hak atas lingkungan, 6. Mahasiswa mampu memahami dan membandingkan instrumen ekonomi (seperti Corporate Social Responsibility).				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini membahas materi hukum lingkungan (konsep, pendekatan, prinsip-prinsip, substansi, dan penegakan) dari perspektif teoritis berdasarkan berbagai teori hukum yang bersifat general maupun teori-teori hukum yang relevan dengan hukum lingkungan,				

<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Pengertian Hukum Lingkungan</li> <li>3. Pendekatan dalam pengelolaan lingkungan</li> <li>4. Perkembangan instrument hukum.</li> <li>5. Perkembangan instrument non-hukum.</li> <li>6. Pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam)</li> <li>7. Pengelolaan kearifan lokal,</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Instrumen hokum administrasi, hokum perdata, dan hokum pidana, serta ADR (Alternative Dispute Resolution) terkait perkembangan penegakan hukum lingkungan.</li> <li>10. Gugatan lingkungan</li> <li>11. Gugatan lingkungan (Lanjutan)</li> <li>12. Kajian konstitusionalisasi hak atas lingkungan.</li> <li>13. Kajian konstitusionalisasi hak atas lingkungan (Lanjutan)</li> <li>14. Instrumen ekonomi (seperti Corporate Social Responsibility).</li> <li>15. Instrumen ekonomi (seperti Corporate Social Responsibility) Lanjutan.</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>
<b>Pustaka</b>	<p>DaftarReferensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A'anEfendi, 2014, HukumLingkungan: InstrumenEkonomikdalamPengelolaanLingkungan di Indonesia danPerbandingannyadenganbeberapanegara, PT Citra AdityaBakti, Bandung,</li> <li>- AanEfendi, 2016, HukumPenyelesaianSengketaLingkungan, PT Citra AdityaBakti, Bandung</li> <li>- Amiruddin, dkk (ed), 2015, PerkembanganHukumLingkunganKinidanMasaDepan, Prosiding Seminar Nasional&amp;KongresPembinbaHukumLingkungan se-Indonesia, FakultasHukumUnpad Bandung</li> <li>- -----, 2018, PengantarHukumLingkungan, PenerbitPrenadamediaGrup, Jakarta</li> <li>- AndiHamzah, 2016, PenegakanHukumLingkungan, Penerbit PT Alumni, Bandung</li> <li>- Andri G. Wibisana, 2017, PenegakanHukumLingkunganMelaluiPertanggungjawabanPerdata, BadanPenerbitFakultasHukum UI, Jakarta</li> <li>- BambangRudito&amp;MeliaFamiola, 2013, CSR (Corporate Social Responsibility), PenerbitRekayasaSains, Bandung</li> <li>- Brucew Mitchell dkk, 2010, PengelolaanSumberDayaAlamdandanLingkungan, GadjahMada University Press, Yogyakarta</li> <li>- DaudSilalahi&amp;Kristianto, 2016, PerkembanganPengaturanAmdal di Indonesia, Penerbit CV Keni Media, Bandung</li> <li>- Deni Bram, 2016, HukumPerubahanIklim (Perspektif Global danNasional), PenerbitSetara Press, Malang.</li> <li>- -----, 2014, HukumLingkunganHidup, PenerbitGramata Publishing, Bekasi</li> <li>- -----, 2014, PolitikHukumPengelolaanLingkunganHidup, PenerbitSetara Press, Malang.</li> <li>- FajarSugianto, 2014, Economic Analysis of Law, PenerbitKencanaPrenadamediaGrup, Jakarta</li> <li>- Helmi, 2015, HukumPerizinanLingkunganHidup, SinarGrafika, Jakarta</li> <li>- HyronimusRhiti, 2006, HukumPenyelesaianSengketaLingkunganHidup, UniversitasAtma Jaya, Yogyakarta</li> <li>- Irwansyah, 2013, AspekHukum Audit Lingkungan, Penerbit YAPMA, Jakarta</li> <li>- JimlyAsshiddiqie, 2009, Green Constitution, RajawaliPers, Jakarta.</li> <li>- Joni, 2018, Model PenegakanHukumPembalakan Liar, PenerbitPustakaPelajar, Yogyakarta</li> <li>- KoesnadiHardjasoemantri, 2009, Hukum Tata Lingkungan, PenerbitGadjaMada University Press, Yogyakarta.</li> <li>- Laode M. Syarief&amp;Andri G. Wibisana, 2015, HukumLingkungan: Teori,</li> </ul>

		<p>LegislasidanStudiKasus, Penerbit: USAID, KemitraanPatnership, The Asia Foundation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LilinBudiati, 2012, Good Governance dalamPengelolaanLingkunganHidup, Ghalia Indonesia, Jakarta</li> <li>- TakdirRahmadi, 2015, HukumLingkungan Indonesia, Penerbit PT RadjaGrafindioPersada, Jakarta</li> </ul>					
		<b>Pendukung :</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPER)</li> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)</li> <li>- Undang-undang Lingkungan Hidup</li> </ul>					
<b>DosenPengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Hukum Perdata					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	BobotPenilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: mahasiswa mampu memahami tentang mata kuliah Hukum Lingkungan [S9, KU1, KU2]	Pembukaan perkuliahan (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan Penjelasan mengenai mata kuliah kuliah hukum Lingkungan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Deskripsi mata kuliah Hukum Lingkungan	10 %
2-3	Sub-CPMK-2: Memahami mengenai Dinamika Lingkungan Nasional dan Global [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang Pengertian tentang Lingkungan (Nasional, Global) Dinamika Lingkungan global (isu Permasalahan, Konvensi Internasional dan Kelembagaan)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kejelasan dan pemahaman tentang Pengertian tentang Lingkungan (Nasional, Global) Dinamika Lingkungan global (isu Permasalahan, Konvensi Internasional dan Kelembagaan)	15 %

		Dinamika Lingkungan Nasional (isu Permasalahan Kebijakan Umum) Dinamika Lingkungan Lokal (isu permasalahan kebijakan sektoral dan daerah) Perkembangan hukum Lingkungan Klasik					
4-5	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai Konsep dan Strategi Perlindungan SDA dan Lingkungan (S9, PP4)	Pengertian dan konsep dasar Hukum Lingkungan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0-40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	eLearning dan platform media lainnya.	Pengertian dan konsep dasar Hukum Lingkungan	15 %
6-7	Sub-CPMK-4 Mampu memahami Pembangunan berkelanjutan dan konsep dasar "Greening the law". [S9, KU1, PP4]	Pembangunan berkelanjutan dan konsep dasar "Greening the law"	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0-40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	eLearning dan platform media lainnya.	Pembangunan berkelanjutan dan konsep dasar "Greening the law"	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9-10	Sub-CPMK-5: Mampu memahami; Poluter pays principle dan pendekatan ekonomi lingkungan [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman Konsep dan perkembangan prinsip pencemaran Masyarakat Analisis Ekonomi atas SDA Instrumen Ekonomi Lingkungan Menurut UUPPLH	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0-40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60)]	eLearning dan platform media lainnya.	Penjelasan tentang Poluter pays principle dan pendekatan ekonomi lingkungan	10 %

		Pengantar konsep CSR					
11 - 12	Sub-CPMK-6: Memahami tentang Prinsip Kehati-hatian dan Instrumen Pengendalian Pencemaran S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman Konsep Resiko dan dampak terhadap lingkungan Apadana Bagaimanapenerapan Prinsipkehati-hatian Instrumen pengendalian pencemaran dan prinsip pencegahan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearn ing dan platform media lainnya.</b>	Prinsip Kehati-hatian dan Instrumen Pengendalian Pencemaran	10 %
13	Sub-CPMK-7: Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . [S9, KU9, KK1]	Kejelasan dan pemahaman Konsep dan Kerangka hukum KLHS dan Penataan Ruang Terkait RPPLH- KLHS- RPJM	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearn ing dan platform media lainnya.</b>  -	Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 %
14	Sub-CPMK-7 Mampumengetahui dan memahami Perbandingan hukum lingkungan di berbagai negara	Kejelasan dan pemahaman Perbandingan hukum lingkungan di berbagai negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearn ing dan platform media lainnya.</b>	Perbandingan hukum lingkungan di berbagai negara	10%

15	Sub-CPMK-7 memahamitent angperkembangan peraturan per UU Lingkungan hidup	Kejelasan pemahaman tentangperkembangan peraturan per UU Lingkungan hidup	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearn ng dan platfor m media lainnya.</b>	perkembangan peraturan per UU Lingkungan hidup	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
<b>Hukum Kewarganegaraan</b>		HTN	T=2 P= 1	IV	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu, SH., MH</b>	

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>	
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>		
<b>CPMK</b>	Menguasai aplikasi konsep kewarganegaraan, untuk menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara, warga negara yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya	
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>		
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), tujuan PKN, kompetensi yang diharapkan, serta dasar hukumnya.</li> <li>Mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila baik sebagai system filsafat maupun sebagai Ideologi Bangsa dan Negara.</li> <li>Mahasiswa yang nantinya sebagai warganegara yang intelektual dan profesional mampu memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan kehidupan berdemokrasi.</li> <li>Mahasiswa mampu menganalisa Wawasan Nusantara (Geopolitik Indonesia) dalam konsep Wawasan Persatuan dan Kesatuan segenap Kehidupan Nasional (Poleksosbudhankam) sebagai Wawasan Kewilayahan, sebagai ruang hidup dan Konsep Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan Prinsip Otonomi Daerah, serta Bhineka Tunggal Ika.</li> <li>Mahasiswa mampu menganalisis dan mengimplementasikan konsep Ketahanan Nasion sebagai geostrategis Indonesia dalam menghadapi kehidupan sosial dan konsep Trigatra serta Pancagatra dalam mengh</li> </ol>	

		adapidanmengatasiancamana, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang baik dari Dalam Negeri maupun dari Luar Negeri bagi Bangsa dan Negara Indonesia.					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Kewarganegaraan (Kwn) pada dasarnya membahas tentang ke-Indonesiaan yakni: menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia, dengan demikian akan dapat menjadi warga negara yang baik dan terdidik ( <i>Smart and good citizen</i> ) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis.						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Belajar</li> <li>2. Latar Belakang Kewarganegaraan.</li> <li>3. Tujuan Kewarganegaraan,</li> <li>4. System Filsafat.</li> <li>5. Pancasila sebagai system filsafat.</li> <li>6. Ciri-ciri khas Pancasila,</li> <li>7. Susunan sila-sila yang bersifat hierargis pyramida.</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Pancasila sebagai ideology Bangsa dan Negara</li> <li>10. Sistem of Ideas sbg pedoman Dasar Hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-Negara.</li> <li>11. Ideologi terbuka dan ideology tertutup, Beda Ideologi dan Filsafat.</li> <li>12. Proses berbangsa dan bernegara, munculnya kesadaran dan gerakan mencintai bangsa dan negara Indonesia.</li> <li>13. Menjelaskan tentang Warga Negara Indonesia</li> <li>14. Menjelaskan Pasal 26 UUD 1945, azas Ius Soli dan Ius Sanguinis, UU No 12 Thn 2006 tentang</li> <li>15. Kewarganegaraan Indonesia, Menjelaskan mengenai Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia.</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armaidly Armawi, Geostrategi Indonesia, Jakarta, Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi, 2006</li> <li>- Azyumardi Azra, paradigma Baru Pendidikan Nasional dan Rekonstruksi dan Demokratisasi, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002</li> <li>- Bahar, Dr. Saefrodin, "Konteks Kenegaraan, Hak Asasi Manusia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.</li> <li>- Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, UGM Press, Yogyakarta 2005.</li> <li>- Slamet Soemiarno, Geopolitik Indonesia, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006</li> </ul>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Tata Negara						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Pertemuan awal kontrak belajar untuk menyepakati point-point yang harus ditaati selama perkuliahan.	kontrak belajar untuk menyepakati point-point yang harus ditaati selama perkuliahan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	kontrak belajar untuk menyepakati point-point yang harus ditaati selama perkuliahan	10 %

	[S9, KU1, KU2]		E = 0 – 40				
2	Sub-CPMK-2: Setelah selesai mengikutikuliahi ini, mahasiswa diharapkan mampu: - Menjelaskan tentang latar Belakang PKN. - Menjelaskan Tujuan PKN. - Menjelaskan kompetensi yang diharapkan. - Menjelaskan Dasar Hukum dan Visi Masyarakat Indonesia [S9, KU1, KU2, PP4]	e. Latar Belakang PKN f. Tujuan PKN g. Kompetensi yang diharapkan h. Dasar Hukum. i. Visi Masyarakat Indonesia yang diharapkan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearn ing dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan tentang Latar Belakang PKN. - Menjelaskan Tujuan PKN. - Menjelaskan kompetensi yang diharapkan. - Menjelaskan Dasar Hukum dan Visi Masyarakat Indonesia	15 %
3	Sub-CPMK-3: Setelah selesai mengikutikuliahi ini, mahasiswa diharapkan mampu: - Menjelaskan tentang system Filsafat. - Menjelaskan mengenai Pancasila sebagai system Filsafat. - Menyebutkan dan menjelaskan Ciri-ciri khas mengenai Pancasila. - Menjelaskan susunan sila-sila yang bersifat hierargis pyramidal. [S9, PP4]	f. Tentang system Filsafat g. Pancasila sebagai system filsafat. h. Ciri-ciri khas Pancasila. i. Susunan sila-sila yang bersifat hierargis pyramidal.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearn ing dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan tentang system Filsafat. - Menjelaskan mengenai Pancasila sebagai system Filsafat. - Menyebutkan dan menjelaskan Ciri-ciri khas mengenai Pancasila. - Menjelaskan susunan sila-sila yang bersifat hierargis pyramidal	15 %
4	Sub-CPMK-4 mahasiswa diharapkan mampu: - Menjelaskan tentang definisikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara. - Menjelaskan sistem of Ideas sebagai pedoman Dasar Hukum dan berbangsa dan bernegara	a. Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan Negara. b. Sistem of Ideas sebagai pedoman Dasar Hukum dan berbangsa dan bernegara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearn ing dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan tentang definisikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara. - Menjelaskan sistem of Ideas sebagai pedoman Dasar Hukum dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara	10 %

	tem of Ideas sebagai pedoman dasar Hukum dan alam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. - Menjelaskan mengenai Ideologi terbuka dan Ideologi tertutup. - Membedakan Ideologi dengan Filsafat [S9, KU1, PP4]	alam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup. d. Beda Ideologi dan Filsafat.				ra. - Menjelaskan mengenai Ideologi terbuka dan Ideologi tertutup. - Membedakan Ideologi dengan Filsafat	
5	Sub-CPMK-4 Setelah selesai mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: - Menjelaskan Proses berbangsa dan bernegara, munculnya kesadaran dan gerakan mencintai bangsa dan negara Indonesia. - Mendefinisikan mengenai Karakteristik identitas nasionalisme, ciri khas nasionalisme Indonesia [S9, KU1, PP4]	a. Proses berbangsa dan bernegara, munculnya kesadaran dan gerakan mencintai bangsa dan negara Indonesia. b. Karakteristik identitas nasionalisme, ciri khas nasionalisme Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. c. Tentang bangsa, sejarah proses berbangsa, National Building and Character Building, Empat Pilar Kebangsaan:	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan Proses berbangsa dan bernegara, munculnya kesadaran dan gerakan mencintai bangsa dan negara Indonesia. - Mendefinisikan mengenai Karakteristik identitas nasionalisme, ciri khas nasionalisme Indonesia	10 %

		Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.					
6	Sub-CPMK-4 Setelah selesai mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: - Menjelaskan tentang Warga Negara Indonesia. - Menjelaskan Pasal 26 UUD 1945, azas Soli dan Ius Sanguinis, UU No 12 Thn 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. - Menjelaskan mengenai Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia. - Menjelaskan mengenai Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, Pasal 31 UUD 1945, mengenai Bela Negara, tentang Pendidikan dan Pengajaran, Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945. Menjelaskan mengenai UU No 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi. [S9, KU1, PP4]	a. Warga Negara Indonesia b. Pasal 26 UUD 1945, azas Soli dan Ius Sanguinis, UU No 12 Thn 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. c. Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia. d. Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, Pasal 31 UUD 1945, mengenai Bela Negara, tentang Pendidikan dan Pengajaran, Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945. e. UU No 12 Thn 2012 tentang P	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50”)]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearn</b> <b>ing dan platform media lainnya.</b>	Menjelaskan Pasal 26 UUD 1945, azas Soli dan Ius Sanguinis, UU No 12 Thn 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. - Menjelaskan mengenai Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia. - Menjelaskan mengenai Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, Pasal 31 UUD 1945, mengenai Bela Negara, tentang Pendidikan dan Pengajaran, Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945. Menjelaskan mengenai UU No 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi	10 %

		endidikan Tinggi.					
7	<p>Sub-CPMK-4 Setelah selesai mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan Dinamika Konstitusi di Republik Indonesia.</li> <li>- Menjelaskan tentang pengertian Politik dan Strategi.</li> <li>- Menjelaskan Proses pengambilan keputusan stratifikasi Kepts, TAP MPR, UU, PP, Keppres, Kep Men, Perda Tkt 1 dan 2.</li> <li>- Menjelaskan Pengertian Strategi, Strategi Nasional.</li> <li>- Menjelaskan Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia.</li> <li>- Menjelaskan Tentang NKRI pengertian Negara Kesatuan, Proses kepemimpinan Nasional 5 tahunan.</li> <li>- Menjelaskan tentang Lembaga Penyelenggara Negara/Lembaga Tinggi Negara.</li> </ul> <p>[S9, KU1, PP4]</p>	<p>a. Dinamika Konstitusi di Republik Indonesia.</p> <p>b. Tentang pengertian Politik dan Strategi.</p> <p>c. Proses pengambilan keputusan stratifikasi Kepts, TAP MPR, UU, PP, Keppres, Kep Men, Perda Tkt 1 dan 2.</p> <p>d. Pengertian Strategi, Strategi Nasional.</p> <p>e. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia.</p> <p>f. Tentang NKRI pengertian Negara Kesatuan, Proses kepemimpinan Nasional 5 tahunan.</p> <p>g. Tentang Lembaga Penyelenggara Negara/Le mbaga Tinggi Negara</p>	<p>A = 86-100</p> <p>B = 71-85</p> <p>C = 56-70</p> <p>D = 41-55</p> <p>E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah;</p> <p>b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')];</p> <p>c. [PT+BM: (1+1)x(2x6 0'')]</p>	<b>eLearni ngdan platfor m media lainnya.</b>	<p>1. Dinamika Konstitusi di Republik Indonesia.</p> <p>2. Tentang pengertian Politik dan Strategi.</p> <p>3. Proses pengambilan keputusan stratifikasi Kepts, TAP MPR, UU, PP, Keppres, Kep Men, Perda Tkt 1 dan 2.</p> <p>4. Pengertian Strategi, Strategi Nasional.</p> <p>5. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia.</p> <p>6. Tentang NKRI pengertian Negara Kesatuan, Proses kepemimpinan Nasional 5 tahunan.</p> <p>7. Tentang Lembaga Penyelenggara Negara/Lembaga Tinggi Negara</p>	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9 - 10	<p>Sub-CPMK-5: kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan mengenai Hak Azasi Manusia (HAM).</li> </ul>	<p>Kejelasan dan pemahaman</p> <p>a. Hak Azasi Manusia (HAM)</p> <p>b. Sejarah</p>	<p>A = 86-100</p> <p>B = 71-85</p> <p>C = 56-70</p> <p>D = 41-55</p>	<p>a. Kuliah;</p> <p>b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')];</p> <p>c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]</p>	<b>eLearni ngdan platfor m media lainnya.</b>	<p>Penjelasantentang</p> <p>1. Hak Azasi Manusia (HAM)</p> <p>2. Sejarah perkembangan HAM di dunia s/d konvensi PBB 1948, pandangan bangsa Indonesia</p>	10 %

	<p>- Menjelaskan Sejarah perkembangan HAM di dunia s/d konvensi PBB 1948, pandangan bangsa Indonesia tentang HAM. Pasal 28 UUD 1945 yang telah diamandemen.</p> <p>- Menjelaskan "Rule of Law".</p> <p>- Menjelaskan Tentang pelanggaran HAM/HAM Berat, UU No 39 Thn 1999, tentang Hak-hak Dasar Manusia, berdirinya Komnas HAM di Indonesia.</p> <p>[S9, KU1, PP4]</p>	<p>perkembangan HAM di dunia s/d konvensi PBB 1948, pandangan bangsa Indonesia tentang HAM. Pasal 28 UUD 1945 yang telah diamandemen.</p> <p>c. Rule of Law.</p> <p>d. Tentang pelanggaran HAM/HAM Berat, UU No 39 Thn 1999, tentang Hak-hak Dasar Manusia, berdirinya Komnas HAM di Indonesia</p>	E = 0 – 40			<p>tentang HAM. Pasal 28 UUD 1945 yang telah diamandemen.</p> <p>3. Rule of Law.</p> <p>4. Tentang pelanggaran HAM/HAM Berat, UU No 39 Thn 1999, tentang Hak-hak Dasar Manusia, berdirinya Komnas HAM di Indonesia</p>	
11 - 12	<p>Sub-CPMK-6: Setelah selesai mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:</p> <p>- Menjelaskan mengenai Konsep dan Prinsip Demokrasi.</p> <p>- Menjelaskan Arti kata Demokrasi dan pengertian umum Demokrasi.</p> <p>- Menjelaskan dan menyebutkan Ciri dan macam-macam Demokrasi.</p> <p>- Menjelaskan mengenai Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi.</p> <p>- Menjelaskan</p>	<p>Kejelasan dan pemahaman</p> <p>a. Konsep dan Prinsip Demokrasi</p> <p>c. Arti kata Demokrasi dan pengertian umum Demokrasi</p> <p>d. Ciri dan macam-macam Demokrasi</p> <p>e. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi</p> <p>f. Demokrasi</p>	<p>A = 86-100</p> <p>B = 71-85</p> <p>C = 56-70</p> <p>D = 41-55</p> <p>E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah;</p> <p>b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")];</p> <p>c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]</p>	<p><b>eLearn</b></p> <p><b>ngdan</b></p> <p><b>platfor</b></p> <p><b>m</b></p> <p><b>media</b></p> <p><b>lainnya.</b></p>	<p>1 Konsep dan Prinsip Demokrasi.</p> <p>2. Arti kata Demokrasi dan pengertian umum Demokrasi.</p> <p>3. Ciri dan macam-macam Demokrasi.</p> <p>4. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi.</p> <p>5. Demokrasi di Indonesia dan istilah kerakyatan.</p> <p>6. Proses pengambilan Keputusan.</p>	10 %

	Demokrasi di Indonesia dan istilah kerakyatan. - Menjelaskan Proses Pengambilan keputusan. - Menjelaskan mengenai Demokrasi Pancasila.  [S9, KU1, PP4]	di Indonesia dan istilah kerakyatan g. Proses pengambilan Keputusan h. Demokrasi Pancasila					
13	Sub-CPMK-7: Setelah selesai mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: - - Menjelaskan Implementasi Wasantara dalam kehidupan sebagai Geopolitik Indonesia. - - Menjelaskan mengenai Politik, Ekonomi, Sosbud dan Hankam. - - Menjelaskan tentang Tantangan Wasantara dan Globalisasi. . [S9, KU9, KK1]	d. Implementasi Wasantara dalam kehidupan sebagai Geopolitik Indonesia. e. Politik, Ekonomi, Sosbud dan Hankam. f. Tantangan Wasantara, dan g. Globalisasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	1 Implementasi Wasantara dalam kehidupan sebagai Geopolitik Indonesia. 2. Politik, Ekonomi, Sosbud dan Hankam. 3. Tantangan Wasantara, dan 4. Globalisasi	10 %
14	Sub-CPMK-7 Mampu mengetahui dan memahami Usaha Kartu Kredit (credit card)	e. Kejelasan dan pemahaman Pengertian. f. Sistem Kerja Kartu Kredit g. Jenis – jenis Kartu Kredit h. Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Usaha Kartu Kredit	10%
15	Sub-CPMK-7 memahami tentang Dana Pensiun	Kejelasan dan pemahaman g. tentang Pengertian dan Latar	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x 50")]; c. [PT+BM	<b>eLearning dan platform media</b>	Dana Pensiun	10%



		Belakang h. Jenis – Jenis Dana Pensiun i. Sistem Pem bayaran Pe nsiun j. Azas – Azas Dana Pensiun	70 D = 41- 55 E = 0 – 40	:(1+1)x(2x 60”)]	<b>lainnya.</b>		
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,